



**RPJMD
TEBO**

2025
2029

2025



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
9. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Ncgara Rcpublik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Bupati adalah Bupati Tebo;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tebo untuk periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati;

9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau rencana pembangunan tahunan daerah;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
16. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati; dan

- b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan.
- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMN serta memperhatikan:
 - a. RPJPD Kabupaten Tebo;
 - b. RTRW Kabupaten Tebo; dan
 - c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD meliputi:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB V	PENUTUP
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan

- c. hasil RPJMD.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 19 Agustus 2025



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 19 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG /PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI
JAMBI: (3-26 TAHUN 2025)



Pemerintah
Kabupaten Tebo

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NO 3 TAHUN 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo

Tahun 2025-2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	8
1.3.1. Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Tebo 2025-2045	10
1.3.2. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029	10
1.3.3. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) 2025-2029	11
1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan RTRW	12
1.3.5. Keterkaitan RPJMD dengan KLHS	12
1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja dan APBD	12
1.4. Maksud dan Tujuan	13
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	16
2. 1. Aspek Geografi dan Demografi	17
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	17
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	23
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	26
2.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	29
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	36
2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	42

2.1.7.	Demografi	49
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	63
2.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi.....	63
2.2.2.	Kesehatan untuk Semua.....	76
2.2.3.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	80
2.2.4.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	86
2.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....	87
2.2.6.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....	90
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah.....	95
2.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	95
2.3.2.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	97
2.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau	101
2.3.4.	Transformasi Digital	102
2.3.5.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	104
2.3.6.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.....	106
2.3.7.	Stabilitas Ekonomi Makro	109
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	111
2.4.1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	112
2.4.2.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	114
2.4.3.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	117
2.4.4.	Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah.....	119
2.5.	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024.....	132
2.5.1.	Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir (2020-2024)	132
2.6.	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029	173
2.6.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah	176
2.6.2.	Proyeksi Belanja Daerah	185
2.6.3.	Proyeksi Pembiayaan Daerah	189
2.6.4.	Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	195
2.7.	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	200

2.7.1.	Permasalahan Lintas sektor	200
2.7.2.	Permasalahan urusan pemerintahan.....	204
2.7.3.	Isu Strategis	211
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		249
3.1.	Visi dan Misi.....	250
3.1.1.	Visi	250
3.1.2.	Misi.....	253
3.2.	Tujuan dan Sasaran.....	255
3.3.	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas	259
3.3.1.	Strategi Sebagai Tahapan Pembangunan Daerah	259
3.3.2.	Arah Kebijakan Sebagai Penjabaran Misi.....	260
3.3.3.	Arah Kebijakan Kewilayahan Daerah	268
3.3.4.	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	273
3.3.5.	Dukungan Program RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 Terhadap Kegiatan Prioritas Utama dan Proyek Strategis Nasional RPJMN Tahun 2025-2029	292
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		300
4.1	Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030	301
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	362
4.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	362
4.2.2.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)	363
BAB V PENUTUP.....		389

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas dan Persentase Wilayah Administrasi Kabupaten Tebo	19
Tabel 2. 2 Luas Tanam dan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2019-2024	24
Tabel 2. 3 Daya Dukung Air Menurut Kecamatan	28
Tabel 2. 4 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan.....	30
Tabel 2. 5 DAS yang Melewati Wilayah Kabupaten Tebo	31
Tabel 2. 6 Debit Rata-rata Bulanan Sub DAS Wilayah Kabupaten Tebo	32
Tabel 2. 7 Luas Danau/Waduk/Situ/Embung Kabupaten Tebo	33
Tabel 2. 8 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen) Tahun 2020-2024	34
Tabel 2. 9 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024.....	35
Tabel 2. 10 Pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024.....	41
Tabel 2. 11 Jumlah Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja.....	41
Tabel 2. 12. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024.....	42
Tabel 2. 13 Indikasi Luasan Kebakaran di Provinsi Jambi tahun 2018-2024	47
Tabel 2. 14 PDRB ADHK Kabupaten Tebo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024.....	65
Tabel 2. 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024.....	76
Tabel 2. 19 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tebo Tahun 2019 s/d 2024	79
Tabel 2. 20 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan.....	98
Tabel 2. 21 Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024.....	99
Tabel 2. 22 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024	100
Tabel 2. 23 Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB) (Juta Rupiah).....	104
Tabel 2. 24 Net Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) (Juta Rupiah)	105
Tabel 2. 25 Kondisi Infrastruktur Dasar.....	107
Tabel 2. 26 Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.....	111
Tabel 2. 27 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024.....	122
Tabel 2. 28 Realisasi APBD Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024	133
Tabel 2. 29 Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024.....	134
Tabel 2. 30 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tebo, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)	137
Tabel 2. 31 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar).....	138
Tabel 2. 32 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)..	139
Tabel 2. 33 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tebo, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)	141
Tabel 2. 34 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Tebo, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)	143

Tabel 2. 35 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)	144
Tabel 2. 36 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)	146
Tabel 2. 37 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Umum Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)	147
Tabel 2. 38 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tebo, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)	148
Tabel 2. 39 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Insentif Daerah Kabupaten Tebo, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)	149
Tabel 2. 40 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tebo, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)	149
Tabel 2. 41 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)	153
Tabel 2. 42 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)	154
Tabel 2. 43 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)	155
Tabel 2. 44 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)	156
Tabel 2. 45 Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp Miliar)	157
Tabel 2. 46 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)	158
Tabel 2. 47 Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)	159
Tabel 2. 48 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)	160
Tabel 2. 49 Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)	161
Tabel 2. 50 Neraca Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024	163
Tabel 2. 51 Proyeksi Kerangka Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026-2030	174
Tabel 2. 52 Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2026-2030	178
Tabel 2. 53 Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2026-2030	186
Tabel 2. 54 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2026-2030	191
Tabel 2. 55 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2026-2030	197
Tabel 2. 56 Pemetaan permasalahan pembangunan lintas sektor	200
Tabel 2. 57 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	204
Tabel 2. 58 Isu Strategis Internasional	213
Tabel 2. 59 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat	219
Tabel 2. 60 Proporsi Capaian Indikator TPB Kabupaten Tebo	232

Tabel 2. 61 Perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	235
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029.....	256
Tabel 3.2 Strategi Setiap Misi RPJMD Kabupaten Tebo.....	260
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kabupaten Tebo	261
Tabel 3. 4 Rencana Sistem Pusat Pelayanan di Kabupaten Tebo.....	269
Tabel 3. 5 Arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Tebo.....	270
Tabel 3.6 Perumusan program prioritas RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	274
Tabel 3. 7 Rincian program unggulan Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	288
Tabel 3. 8 Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	292
Tabel 3. 9 Penyelarasan Proyek Strategis Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	297
Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030.....	302
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tebo	362
Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tebo.....	364

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tebo	18
Gambar 2. 2 Peta Posisi Wilayah Kabupaten Tebo terhadap Wilayah Sekitar	20
Gambar 2. 3 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	21
Gambar 2. 4 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tebo	23
Gambar 2. 5 Peta Kesesuaian Ruang Budidaya Perkebunan Sawit	25
Gambar 2. 6 Peta Daya Dukung Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Tebo	27
Gambar 2. 7 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tebo	29
Gambar 2. 8 Prevalensi Ketidacukupan Pangan (Persen)	36
Gambar 2. 9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	37
Gambar 2. 10 Jasa Pemeliharaan kualitas udara Kabupaten Tebo <i>Sumber: KLHS Revisi RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033</i>	39
Gambar 2. 11 Persentase RTH dalam kondisi baik	40
Gambar 2. 12 Peta DDDTLH Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Tebo	43
Gambar 2. 13 Peta DDDTLH Jasa Pengaturan Pencegahan Bencana dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Tebo.....	44
Gambar 2. 14 Peta DDDTLH Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Tebo	44
Gambar 2. 15 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Alam Kabupaten Tebo	46
Gambar 2. 16 Proporsi Wilayah Terhadap Kerawanan Bencana Alam di Kabupaten Tebo	46
Gambar 2. 17 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024	49
Gambar 2. 18 Bentuk Piramida Penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2024	51
Gambar 2. 19 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025-2029	57
Gambar 2. 20 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut	63
Gambar 2. 21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)	64
Gambar 2. 22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia Tahun 2020-2024	68
Gambar 2. 23 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024	69
Gambar 2. 24 PDRB per Kapita Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan PDB Indonesia Tahun 2022-2024	70
Gambar 2. 25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia	72
Gambar 2. 26 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	73
Gambar 2. 27 Indeks Gini Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,	74

Gambar 2. 28 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia Tahun 2020-2024	75
Gambar 2. 29 Usia Harapan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	77
Gambar 2. 30 Indeks Pendidikan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	80
Gambar 2. 31 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024	81
Gambar 2. 32 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024	82
Gambar 2. 33 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).....	84
Gambar 2. 34 Indeks Masyarakat digital di Kabupaten Tebo	85
Gambar 2. 35 Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja	87
Gambar 2. 36 Indeks kerukunan umat beragama	88
Gambar 2. 37. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jambi.....	89
Gambar 2. 38 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2022 dan 2023	91
Gambar 2. 39 Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Tebo Tahun 2020-2023	92
Gambar 2. 40 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tebo Tahun 2021-2023	93
Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi Tahun 2020-2023	95
Gambar 2. 42 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	96
Gambar 2. 43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	100
Gambar 2. 44 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jambi.....	103
Gambar 2.45 Kondisi jalan kewenangan Kabupaten Tebo	107
Gambar 2. 46 Persentase desa mandiri di Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024	109
Gambar 2. 62 Rasio pajak terhadap PDRB	110
Gambar 2. 47 Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tebo.....	113
Gambar 2. 48 <i>Indeks SPBE Kabupaten Tebo</i>	114
Gambar 2. 49 Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Tebo.....	115
Gambar 2. 50 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Tebo	116
Gambar 2. 51 Perbandingan Skor Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi Jambi, dan Kabupaten Tebo.....	118
Gambar 2. 52 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah.....	136
Gambar 2. 53 Kontribusi Masing-masing Komponen PAD Tahun 2020-2024 (Persen)	138
Gambar 2. 54 Kontribusi Masing-masing Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024 (Persen).....	145
Gambar 2. 55 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024 (Persen).....	151
Gambar 2. 56 Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2020 – 2024	152
Gambar 2. 57 Rasio Likuiditas Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024	167
Gambar 2. 58 Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024	169
Gambar 2. 59 Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024	171
Gambar 2. 60 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kabupaten Tebo 2026-2030 (Rp. Miliar)	180

Gambar 2. 61 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Tebo 2026-2030 (Rp. Miliar).....	182
Gambar 2. 62 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tebo 2026-2030 (Rp. Miliar).....	193
Gambar 2. 63 Megatren Global 2045	212
Gambar 2. 64 Peluang dan tantangan pembangunan nasional	218
Gambar 2. 65 Isu dan Potensi Regional Sumatera	222
Gambar 2. 66 Isu strategis Provinsi Jambi dalam RPJMD Tahun 2025-2029	223
Gambar 3.1 Penyandingan Visi RPJMD Kabupaten Tebo terhadap Visi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi.....	253
Gambar 3.2 Tema Pembangunan Setiap Tahun di Dalam RPJMD	259



Pemerintah
Kabupaten Tebo



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan



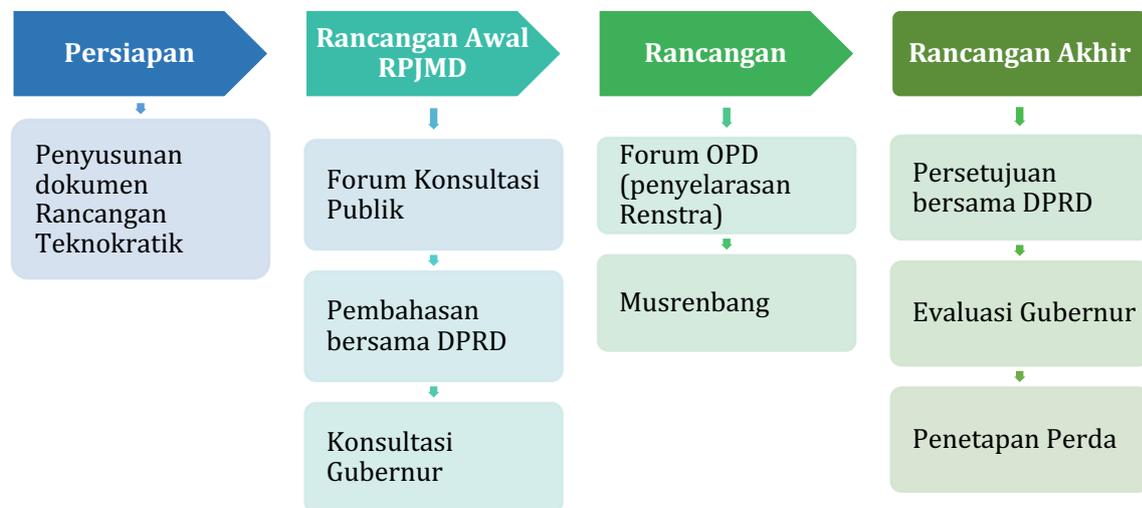
1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah. RPJMD merupakan jembatan antara perencanaan jangka panjang dengan perencanaan tahunan dan penganggaran. Perencanaan jangka panjang yang telah disusun oleh Kabupaten Tebo harus diinstrumentasikan lebih operasional dan terhubung dengan agenda pembangunan setiap tahun. Operasionalisasi dan membangun keterhubungan ini yang diperankan oleh perencanaan jangka menengah.

RPJMD juga menjadi instrumen keterpaduan antara berbagai pendekatan perencanaan. RPJMD memadukan antara pendekatan politik dan teknokratik. Sebelum pendekatan politik berjalan dan akan mengarahkan perencanaan jangka menengah, maka harus dikerangkai oleh pendekatan teknokratik. Dalam hal ini, perencanaan teknokratik tersusun lebih dahulu dan menjadi acuan bagi calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi dan program. Rumusan visi, misi dan program dari kepala daerah dengan adanya dasar teknokratik diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan pembangunan dan mampu meningkatkan kinerja pembangunan.

Pada tahun 2025, Kabupaten Tebo bersama seluruh daerah lain di Indonesia mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dilantiknya Agus Rubiyanto, S.E., M.M. dan Nazar Efendi, S.E., M.Si., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tebo periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025, maka Kabupaten Tebo diharuskan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD. Penyusunan RPJMD ini juga harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

bahwa pemerintah daerah diantaranya harus menyusun dokumen perencanaan jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

RPJMD disusun dengan sinkronisasi berbagai pendekatan perencanaan. Pendekatan teknokratik dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah dijalankan melalui penggunaan berbagai kajian, data, dan informasi pembangunan. Pendekatan partisipatif dijalankan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Pendekatan politik dilaksanakan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD hingga ditetapkan menjadi perda. Adapun pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dilaksanakan melalui penyelarasan RPJMN, RPJMD Provinsi Jambi, RPJPD Kabupaten Tebo terhadap RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029. Selain menggunakan berbagai pendekatan tersebut, penyusunan RPJMD memiliki berbagai tahapan, yaitu penyusunan Rancangan Teknokratik, Rancangan Awal (Ranwal), Rancangan, dan Rancangan Akhir (Rankhir).

Analisis mendalam terhadap kinerja pembangunan dan keuangan setidaknya dalam lima tahun terakhir, serta perumusan visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai dalam periode tersebut memiliki urgensi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis kinerja tersebut, dilakukan pemetaan permasalahan dan isu-isu strategis yang relevan saat ini. Pemetaan ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam mewujudkan visi dan misi lima tahun mendatang. Selain itu, hasil pemetaan akan menjadi acuan

penting dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang selaras dengan janji politik kepala daerah terpilih.

Secara umum, refleksi terhadap pembangunan Kabupaten Tebo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian yang cukup baik di satu sisi, namun di sisi lain masih terdapat berbagai tantangan dan kerentanan dalam mewujudkan transformasi pembangunan serta mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, meskipun mengalami sedikit kenaikan dari 6,34 persen pada tahun 2022 menjadi 6,46 persen pada tahun 2023 dan kemudian turun kembali menjadi 6,12 di tahun 2024. Tingkat pengangguran terbuka juga relatif rendah, meskipun mengalami peningkatan dari 1,38 persen pada tahun 2022 menjadi 1,71 persen pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 1,93 persen di tahun 2024. Sementara itu, ketimpangan pendapatan masyarakat menunjukkan sedikit kenaikan, yakni dari rasio Gini 0,240 pada tahun 2023 menjadi 0,257 pada tahun 2024.

Di tengah capaian kinerja yang positif, Kabupaten Tebo masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kinerja kesejahteraan yang baik saat ini masih sangat bergantung pada sektor perkebunan sawit, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan tuntutan standar keberlanjutan global. Sektor pertanian, yang di dalamnya termasuk perkebunan sawit, tetap menjadi penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tebo, dengan kontribusi sebesar 52,76 persen pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 56,73 persen pada tahun 2024.

Meskipun kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan perbaikan, tantangan masih ada. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tebo yang masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Namun demikian, tren IPM menunjukkan peningkatan, dari 71,14 pada tahun 2022 menjadi 71,99 pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 72,67 pada tahun 2024.

Pembangunan berkelanjutan juga menghadapi tantangan, tidak hanya karena dominasi sektor sawit yang harus memenuhi standar keberlanjutan yang semakin ketat, tetapi juga karena menurunnya kualitas lingkungan hidup. Hal ini tercermin dari penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dari 74,63 pada tahun 2022 menjadi 63,53 pada tahun 2023, meskipun kemudian membaik menjadi 67,82 pada tahun 2024.

Tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Tebo perlu direspons dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk lima tahun ke depan. Periode pembangunan 2025–2029 merupakan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo 2025–2045, yang mengusung tema “*Memperkuat Fondasi Daya Saing Daerah*”. Tahap awal ini sangat krusial dan strategis karena akan menjadi fondasi bagi efektivitas pembangunan dalam 20 tahun ke depan, dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang: “*Kabupaten Tebo Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan.*”

1.2. Dasar Hukum

RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 disusun dengan landasan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

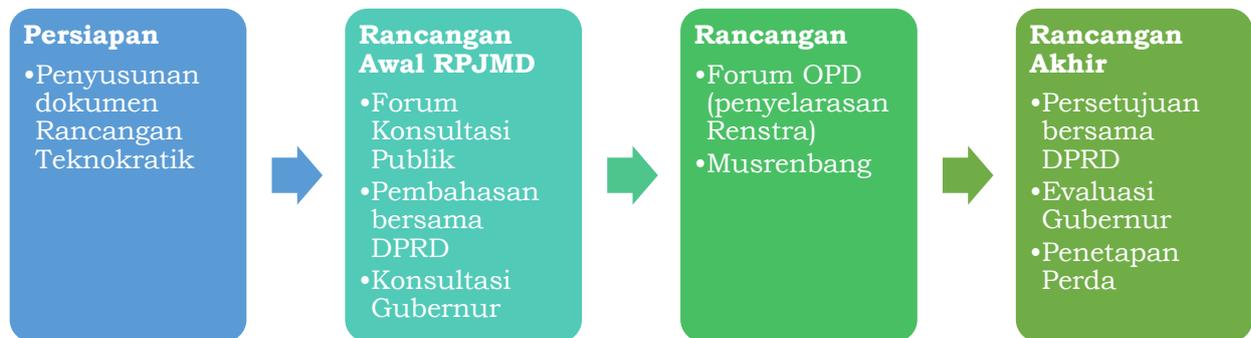
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);
 35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5);
 36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 5).

1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

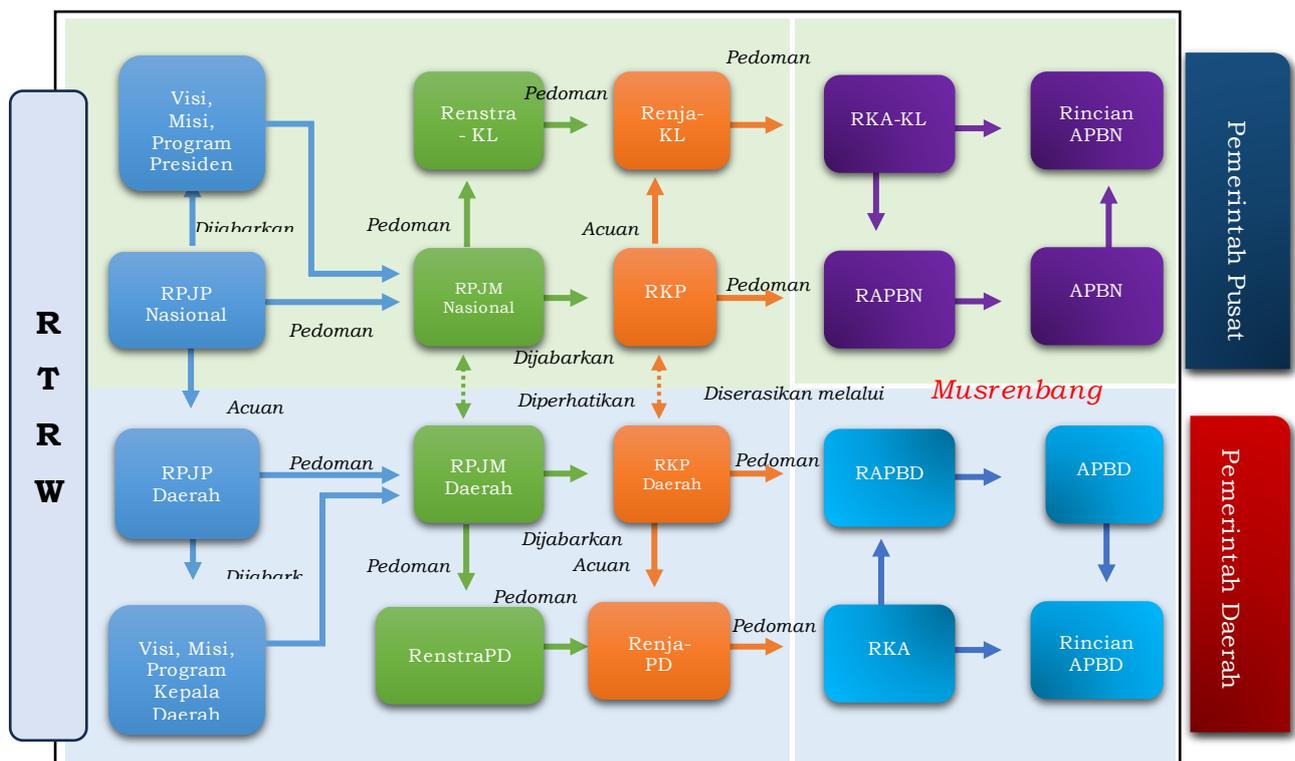
Penyusunan RPJMD merupakan rangkaian proses penyusunan RPJMD, yaitu mulai tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir hingga penetapan Perda RPJMD. Dalam proses penyusunan RPJMD utuh, seluruh pendekatan perencanaan digunakan dan dipadukan di dalam dokumen. Selain memadukan pendekatan teknokratik dan politik, tahapan penyusunan RPJMD juga memadukan pendekatan partisipasi, bawah-atas dan atas-bawah. Pendekatan partisipasi digunakan, antara lain melalui Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang.

Adapun penyelarasan pendekatan bawah-atas dan atas-bawah dilakukan melalui konsultasi dengan Gubernur. Tahap ini terutama untuk menyelaraskan antara perencanaan nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo. Proses penyusunan RPJMD secara utuh sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan RPJMD

Selain pendekatan yang berorientasi proses, pendekatan perencanaan yang berorientasi substansi juga digunakan. Pendekatan ini berupa tematik-holistik, integratif dan spasial. Melalui pendekatan ini, dokumen RPJMD harus memiliki keterkaitan kuat dengan rencana tata ruang wilayah. Berbagai agenda pembangunan di RTRW dapat diintegrasikan ke dalam RPJMD. Gambaran hubungan RPJMD dengan seluruh dokumen perencanaan makro dan tata ruang sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan hubungan antar dokumen, maka penjelasan hubungan antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan sebagai berikut:

1.3.1.Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Tebo 2025-2045

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Tebo. Tahap pertama memiliki tema pembangunan berupa “memperkuat fondasi daya saing daerah”. Tema pembangunan 3 periode berikutnya mencirikan tahapan yang semakin meningkat hingga mencapai visi 2045, yaitu “Kabupaten Tebo Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan. Visi tersebut selaras dan menopang pencapaian Visi Nasional, yaitu “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”, serta Visi Provinsi Jambi, yaitu “Jambi yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Visi jangka panjang Kabupaten Tebo dicapai melalui 4 misi, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan unggul sebagai fondasi pembangunan; mewujudkan sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan berbasis inklusifitas dan ekonomi hijau; mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berketahanan, dan berwawasan lingkungan; dan mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

RPJMD merupakan instrumen penting untuk mulai mengoperasionalisasi agenda-agenda pembangunan jangka panjang. Arah pembangunan, arah kebijakan transformatif, dan upaya super-prioritas (*game changer*) di RPJPD akan diintegrasikan ke dalam strategi, arah kebijakan dan mendasari pemilihan program pembangunan jangka menengah. Demikian pula Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD juga diintegrasikan ke dalam RPJMD sesuai level indikator, sehingga diharapkan kinerja jangka panjang tercapai melalui cascading kinerja yang tepat di dalam rencana jangka menengah.

1.3.2.Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Penyusunan RPJMD harus memperhatikan RPJMN. RPJMD dan RPJMN memiliki periode yang sama yaitu tahun 2025-2029, sehingga hal ini menjadi modal penting untuk membangun sinergi antara perencanaan pusat dan daerah. RPJMN tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJPN yang memiliki tema

periode berupa “perkuatan fondasi transformasi”. RPJMD dengan demikian juga memiliki agenda besar berupa perkuatan fondasi transformasi daerah. Makna perkuatan dalam hal ini merupakan rekognisi atas capaian periode-periode sebelumnya, yang kemudian berbagai capaian yang baik semakin diperkuat dan persoalan mendasar perlu dituntaskan.

Provinsi Jambi di dalam RPJMN memiliki tema pembangunan berupa “Penyangga Bioindustri dan Ketahanan Energi Sumatera”. Tema tersebut mendukung pembangunan tema wilayah Sumatera dalam jangka panjang, yaitu “Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Lebih lanjut lagi, Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029 menjadi pedoman bagi daerah termasuk pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025–2029 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025- 2029, mencakup penyelarasan kinerja dan perodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan wakil Presiden RI Periode 2025-2029.

1.3.3.Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) 2025-2029

Selain memberikan dukungan terhadap sasaran pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo juga diharapkan secara simultan memberikan dukungan terhadap pencapaian pembangunan Provinsi Jambi, yang mana Kabupaten Tebo menjadi bagian wilayah dari Provinsi Jambi. Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 terhadap RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, diharapkan dapat mewujudkan visi Provinsi Jambi yakni “Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT.”

1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan RTRW

RPJMD mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga rumusan kinerja dan agenda pembangunan jangka menengah harus selaras dengan peruntukan tata ruang. RTRW Provinsi Jambi bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang maju dan mandiri, dengan pemanfaatan ruang yang harmonis dan merata, berbasis pada pengelolaan sumber daya alam serta infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan. Sementara itu, RTRW Kabupaten Tebo bertujuan mewujudkan kabupaten yang berbasis pertanian dan agroindustri dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kedua tujuan RTRW, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, sama-sama menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah untuk menciptakan nilai tambah, dengan kerangka prinsip pembangunan berkelanjutan. Secara lebih operasional, kebijakan, strategi, dan program dalam RTRW menjadi acuan dalam merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program dalam dokumen RPJMD.

1.3.5. Keterkaitan RPJMD dengan KLHS

KLHS akan mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan yang kemudian akan menjadi salah satu landasan bagi perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Selain itu, seluruh rekomendasi pembangunan berkelanjutan dari KLHS akan menjadi landasan dan diintegrasikan ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD. Dengan demikian, Integrasi dokumen KLHS di dalam RPJMD dalam rangka untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) telah menjadi landasan di dalam perencanaan pembangunan.

1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja dan APBD

RPJMD sebagai operasionalisasi dari perencanaan jangka panjang, juga harus membangun keterhubungan yang sinergis dengan perencanaan lebih operasional di dalam Renstra maupun perencanaan dan penganggaran tahunan. Keterhubungan ini diharapkan membangun perencanaan yang sinergis mulai dari jangka panjang, menengah hingga tahunan dan penganggarnya.

RPJMD merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra. RPJMD juga harus dijabarkan ke dalam RKPD. Berbagai

rumusan kinerja baik dalam bentuk IKU, IKK dan kinerja program di dalam RPJMD harus dipedomani dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan perencanaan tahunan. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan APBD. Dengan demikian diharapkan tercapai pendekatan perencanaan dan penganggaran berupa *money follow program, program follow result*.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2025-2029 yaitu sebagai dokumen yang menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam implementasi pembangunan selama lima tahun ke depan. Lebih lanjut lagi, tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Tersedianya dokumen yang memuat gambaran kinerja pembangunan dan kondisi keuangan daerah yang aktual.
2. Tersedianya dokumen yang memuat pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.
3. Sebagai dasar perumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Tebo selama lima tahun kedepan.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota sekitar, serta perencanaan sektoral;
6. Menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tebo periode 2025-2029;
7. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
8. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tebo; dan
9. Menjadi pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab	Muatan
Bab 1 Pendahuluan	Gambaran umum RPJMD yang memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab 2 Gambaran Umum Daerah	<p>Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aspek geografi dan demografi; b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat; c. Aspek Daya Saing Daerah; d. Aspek Pelayanan Umum. <p>Subbab Gambaran Keuangan Daerah, memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029</p> <p>Subbab Permasalahan dan Isu Strategis memuat permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis daerah.</p>
Bab 3 Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab	Muatan
<p>Bab 4 Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p>Subbab Program Perangkat Daerah memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. <p>Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).
<p>Bab 5 Penutup</p>	<p>Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.</p>

Sumber: *Inmendagri nomor 02 Tahun 2025*



Pemerintah
Kabupaten Tebo



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi**
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah**
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum**
- 2.5. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024**
- 2.6. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029**
- 2.7. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**



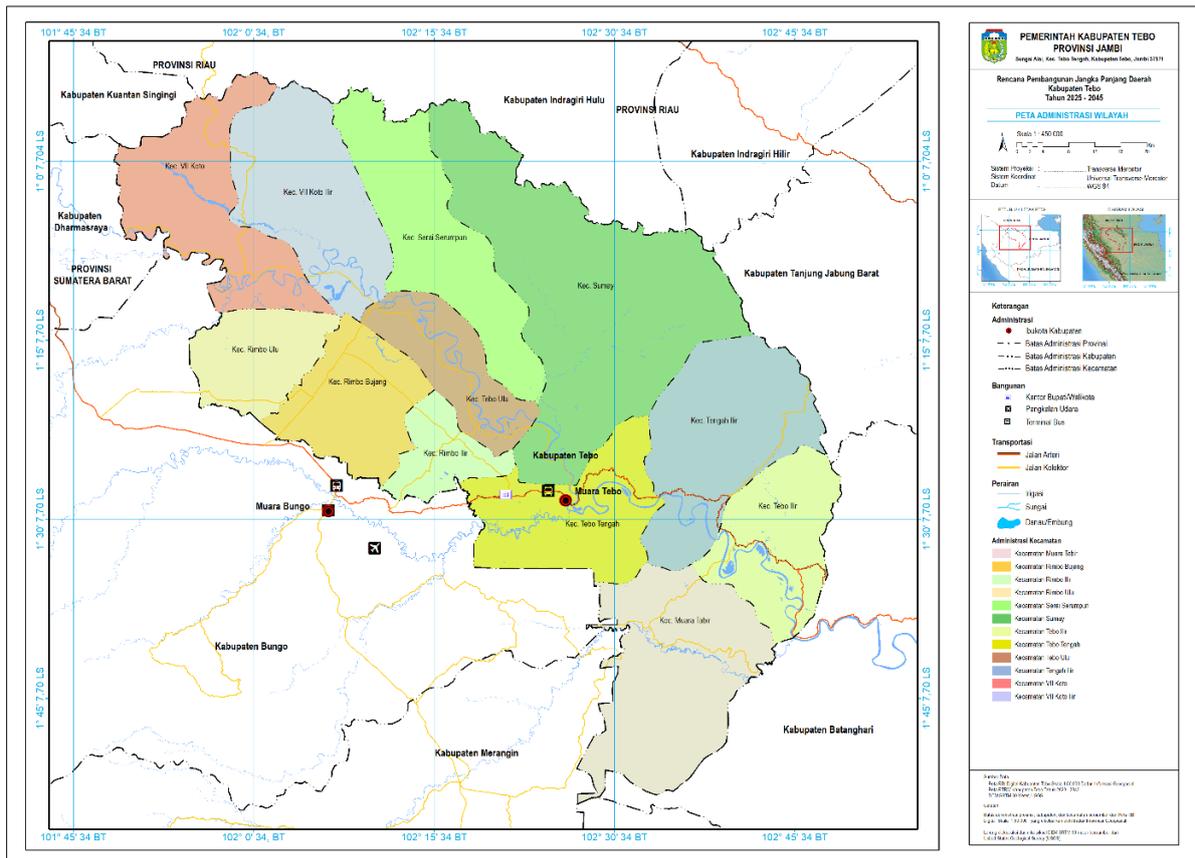
2. 1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi suatu wilayah menjabarkan bagaimana tatanan variabel geografis seperti letak wilayah, topografi, penggunaan lahan, hidrologi, hingga iklim mempengaruhi keberlanjutan pembangunan daerah. Dimensi keruangan menjadi landasan dalam mengidentifikasi potensi serta tantangan yang ada, baik dari aspek interaksi antarwilayah, aksesibilitas, dan pengelolaan sumber daya alam. Lebih jauh, aspek geografi saling berkaitan dengan demografi, yaitu bagaimana sebaran dan pola mobilitas penduduk dapat mempengaruhi struktur dan komposisi kependudukan suatu wilayah. Analisis terhadap kedua aspek ini menjadi fondasi penting bagi perencanaan yang mengedepankan pemerataan dan keberlanjutan pembangunan.

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Posisi Wilayah

Posisi sebuah wilayah menentukan bagaimana interaksi dan interdependensi keruangan yang terjalin untuk mendukung pergerakan perekonomian, sosial, dan proses ekologis. Posisi Kabupaten Tebo secara absolut terletak antara 0°52'32" LS – 1°54'50" LS dan 101°48'57" BT - 102°49'17" BT. Visualisasi posisi Kabupaten Tebo dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar 2. 1 Peta Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tebo

Sumber: RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045

Sebagai wilayah yang berada pada perbatasan terluar Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo berasosiasi dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau di sisi bagian barat. Secara rinci perbatasan wilayah Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut

- Bagian Utara : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
- Bagian Selatan : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin
- Bagian Barat : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
- Bagian Timur: Kabupaten Batanghari

Kabupaten Tebo meliputi wilayah seluas 610.373,69 hektar atau mencakup 12,88 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi. Wilayah administrasi terdiri atas

12 kecamatan dengan ibukota kabupaten berlokasi di Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah.

Tabel 2. 1 Luas dan Persentase Wilayah Administrasi Kabupaten Tebo

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas (Ha)	Proporsi (%)	Jumlah Desa/Kelurahan	
					Desa	Kelurahan
1	Tebo Ilir	Sungai Bengkal	39.875	6,53	10	1
2	Muara Tabir	Pintas Tuo	68.018	11,14	8	-
3	Tebo Tengah	Muara Tebo	45.935	7,53	10	2
4	Sumay	Teluk Singkawang	121.506	19,91	12	-
5	Tengah Ilir	Mangupeh	61.120	10,01	6	-
6	Rimbo Bujang	Wirotho Agung	37.070	6,07	13	3
7	Rimbo Ulu	Suka Damai	27.484	4,50	12	-
8	Rimbo Ilir	Karang Dadi	17.222	2,82	10	-
9	Tebo Ulu	Pulau Temiang	28.870	4,73	16	1
10	VII Koto	Sungai Abang	52.981	8,68	10	-
11	Serai Serumpun	Sekutur Jaya	55.243	9,05	8	-
12	VII Koto Ilir	Balai Rajo	55.049	9,02	6	-
Kabupaten Tebo		Muara Tebo	610.373,69	100	122	7

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043

Wilayah kecamatan dengan proporsi terluas adalah Kecamatan Sumay dengan persentase 19,91 persen atau meliputi 121.506 hektar. Wilayah terluas lainnya adalah Kecamatan Muara Tabir, meliputi 11,14 persen dari luas total Kabupaten Tebo. Sementara itu, kecamatan dengan cakupan wilayah terendah adalah kurang dari 5 persen diantaranya yaitu Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Rimbo Ulu, dan Rimbo Ilir. Beberapa kecamatan memiliki jumlah desa dan kelurahan yang cukup banyak, diantaranya yaitu Kecamatan Tebo Ulu dengan 16 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan

Sumay dan Rimbo Ulu sejumlah 12 desa; kemudian Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Rimbo Ilir, dan Kecamatan VII Koto memiliki 10 desa.

B. Peran Strategis Daerah

Posisi wilayah Kabupaten Tebo secara tidak langsung memberikan pengaruh pembangunan wilayah secara regional di Provinsi Jambi dan Sumatera Bagian Tengah. Jaringan ekonomi, sosial, infrastruktur, dan potensi lingkungan hidup dapat menunjukkan kontribusi dan relevansi secara langsung maupun tidak langsung. Identifikasi peran strategis Kabupaten Tebo mempertimbangkan pada interaksi dan interdependensi yang terjalin dengan wilayah di sekitarnya.



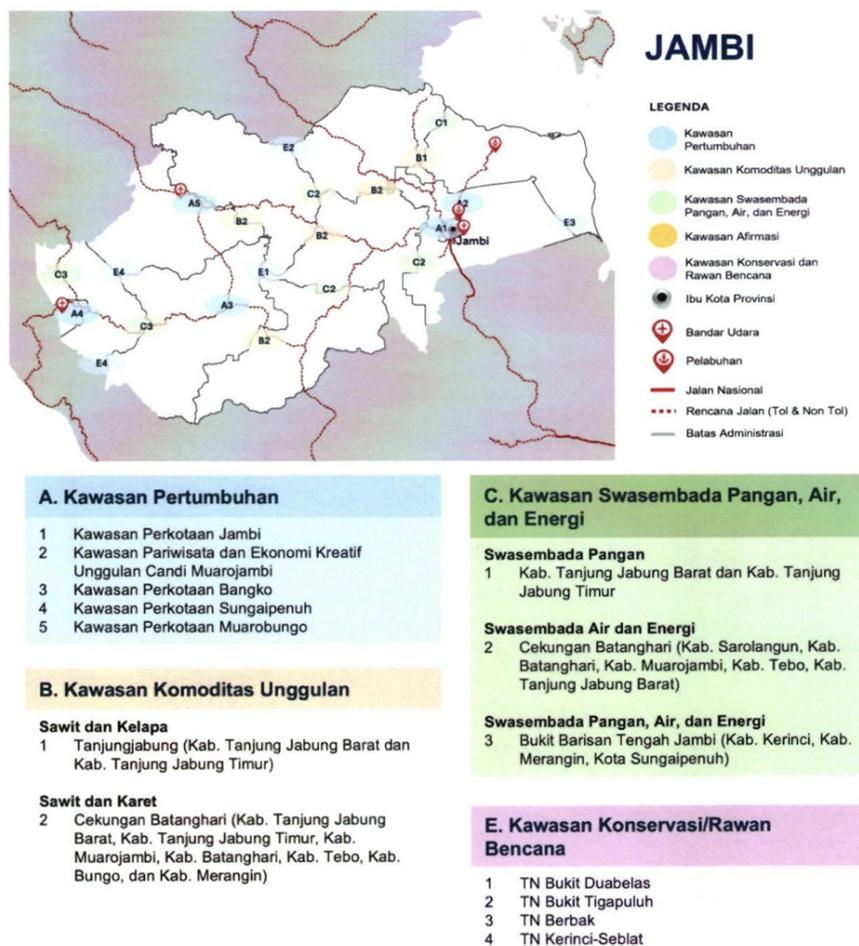
Gambar 2. 2 Peta Posisi Wilayah Kabupaten Tebo terhadap Wilayah Sekitar

Sumber: Olah Data, 2025

Wilayah Kabupaten Tebo berada pada posisi menyilang berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, peran Kabupaten Tebo sebagai daerah yang menjadi bagian dari pembuka akses terhadap kawasan Sumatera Bagian Tengah dan wilayah Provinsi Jambi. Wilayah ini dilintasi jaringan Jalan Lintas Sumatera bagian Tengah yang menghubungkan antar provinsi di regional Sumatera. Untuk menghubungkan pusat ibukota Provinsi Jambi dengan jalur lintas

Sumatera, terdapat jaringan jalan arteri primer berstatus jalan nasional yang melintasi Kabupaten Tebo. Jaringan jalan tersebut membangun konektivitas wilayah yang semakin baik untuk mendukung pergerakan perekonomian wilayah, secara umum di regional Sumatera. Selain itu, dapat mendukung pembangunan sosial dan pemerataan kesejahteraan dengan akses terhadap fasilitas layanan publik yang semakin membaik.

Lebih lanjut, jaringan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Tebo berkategori jalan kolektor primer, menghubungkan antar ibukota kabupaten. Jaringan jalan tersebut menjadi akses darat utama yang menghubungkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari terhadap Bandar Udara Muaro Bungo. Dalam skala yang lebih kecil, penataan keruangan melalui pengembangan terminal penumpang dan terminal barang di Kabupaten Tebo mendukung arus pergerakan barang dari skala regional ke dalam skala kawasan.



Gambar 2. 3 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Arah pembangunan kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 menegaskan Kabupaten Tebo akan dikembangkan sebagai Kawasan Komoditas Unggulan sawit dan karet; Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi; serta Kawasan Konservasi/Rawan Bencana di Provinsi Jambi. Penataan keruangan melalui pengembangan pola ruang, kawasan yang difungsikan sebagai lahan perkebunan meliputi area 305.902 hektar untuk mengembangkan komoditas sawit, karet, kakao, kelapa dalam, dan pinang. Luas tanam eksisting kelapa sawit mencapai 69.233 hektar dengan produksi mencapai 119.264 ton pada tahun 2024. Potensi perkebunan sawit yang besar di Kabupaten Tebo berpeluang besar untuk dikembangkan sebagai hilirisasi komoditas unggulan. Kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kabupaten Tebo akan dikembangkan pabrik pengolahan tandan buah segar (TBS) di Kecamatan Serai Serumpun, Muara Tabir, dan Tengah Ilir. Hal tersebut mendukung terhadap arah pembangunan kewilayahan Provinsi Jambi, dan secara luas mendukung sasaran pembangunan nasional di Pulau Sumatera untuk hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan.

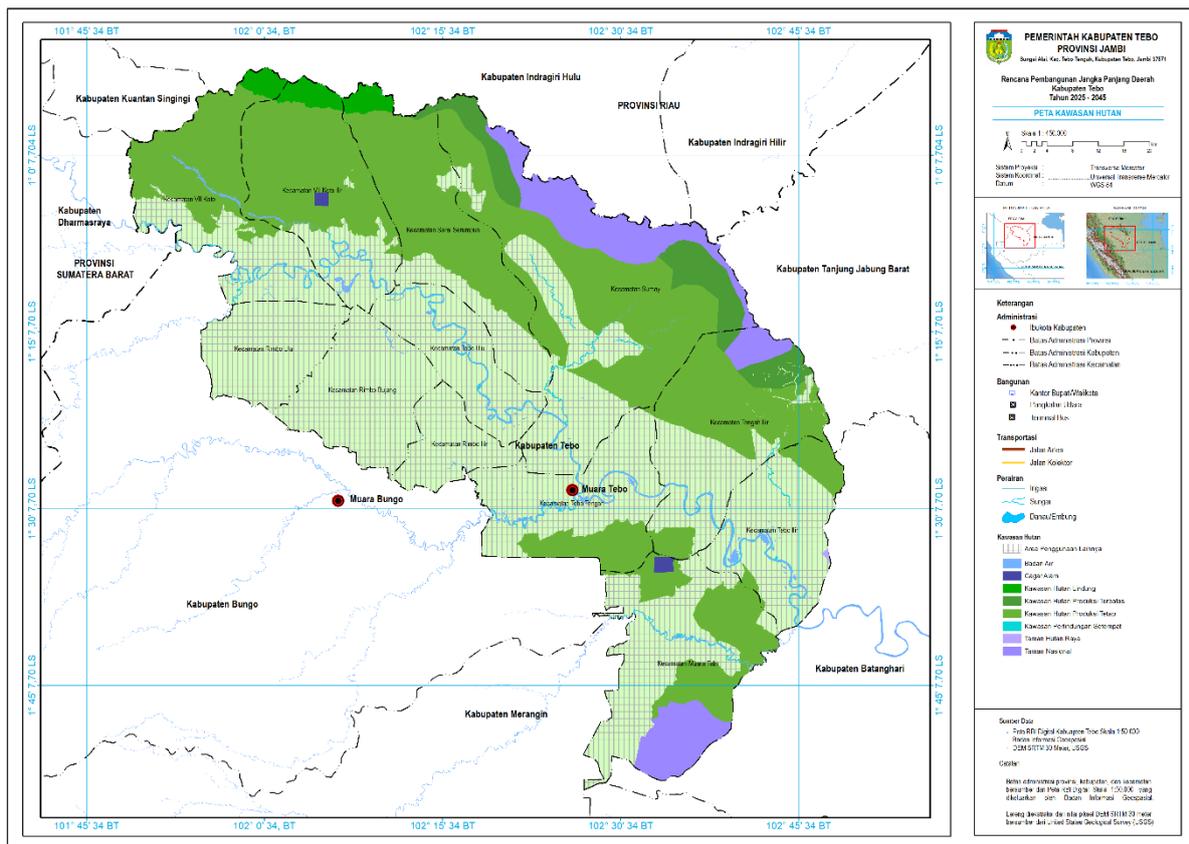
Tatanan hidrologi regional WS Batang Hari merupakan sumber air utama untuk melayani kebutuhan Masyarakat di Kabupaten Tebo dan daerah lain di sekitarnya. Kabupaten Tebo berada pada bagian hulu-tengah DAS, dengan aliran sungai besar Batang Hari dan Batang Tebo. Dalam rencana tata ruang, sumber daya air tersebut dikembangkan untuk sumber energi pembangkit Listrik mikro-hidro, jaringan irigasi, dan jaringan air baku. Dalam rangka pelestariannya, konservasi terhadap sumber daya air melalui perlindungan Kawasan DAS, rehabilitasi lahan kritis pada *catchment area* dan peningkatan kualitas jaringan prasarana sumber daya air. Hal ini sejalan dengan arah pengembangan Kawasan Kabupaten Tebo yang dikembangkan sebagai kawasan swasembada air dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Pengembangan Kawasan konservasi di Kabupaten Tebo termasuk didalamnya pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan Taman Nasional Bukit Dua Belas. Keberadaan TN tersebut berperan vital dalam pengawetan sumberdaya genetik keanekaragaman hayati dan *carbon uptake* sebagai regulator pengurangan emisi GRK. Dalam hal ini, Kabupaten Tebo memiliki peran strategis sebagai wilayah yang menerapkan pembangunan rendah karbon dari sektor lahan (*forest and other land use*) di Provinsi Jambi.

Kabupaten Tebo menjadi wilayah strategis di Provinsi Jambi dengan peran sebagai pusat komoditas unggulan dan hilirisasi industri, daerah swasembada air dan energi, serta kawasan konservasi berbasis pembangunan rendah karbon. Integrasi sektor perkebunan, industri, sumber daya air, dan lingkungan menjadikan Kabupaten Tebo sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi dan regional Sumatera.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merujuk pada jenis sumber daya alam yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sektor potensial yang dapat diidentifikasi di Kabupaten Tebo meliputi sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, dan sumber daya air. Identifikasi dilakukan dengan melihat tatanan keruangan wilayah Kabupaten Tebo dan produksi yang dihasilkan.



Gambar 2. 4 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tebo

Sumber: RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045

Eksistensi hutan tropis di Kabupaten Tebo merupakan kawasan penting dalam menjaga daya dukung lingkungan hidup dan siklus karbon. Terdapat sekitar 50.790 hektar kawasan lindung yang difungsikan sebagai ekosistem penting di Kabupaten Tebo. Secara umum, kawasan lindung berupa tutupan vegetasi hutan yang berada pada topografi perbukitan berperan vital sebagai kawasan konservasi sumber daya air dan kawasan imbuhan air. Penataan ruang wilayah membagi kawasan lindung untuk perlindungan tumbuhan dan satwa endemik dan mengawetkan keanekaragaman hayati seluas 36.784 hektar di TN Bukit Tiga Puluh dan TN Bukit Dua Belas yang dikelola dengan sistem zonasi. Tutupan tegakan hutan yang masih terjaga diperkirakan memiliki kapasitas serapan karbon mencapai 20 – 30 ton setara CO₂e per hektar setiap tahunnya. Potensi ini sangat besar untuk pengembangan dana kredit karbon mengingat sekitar 80 persen biomassa hutan dunia tersimpan hutan tropis. Nilai ekonomi karbon hutan tropis tercatat mencapai US\$ 2 miliar pada tahun 2022 dan diperkirakan terus meningkat mencapai US\$ 10 miliar pada tahun 2030. Jika diasumsikan setiap hektarnya mampu menyerap 20 ton CO₂e, diperkirakan dana kredit karbon yang dapat diperoleh mencapai 3,4 miliar rupiah. Dana kredit karbon merupakan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan luas untuk rehabilitasi dan konservasi ekosistem esensial di Kabupaten Tebo.

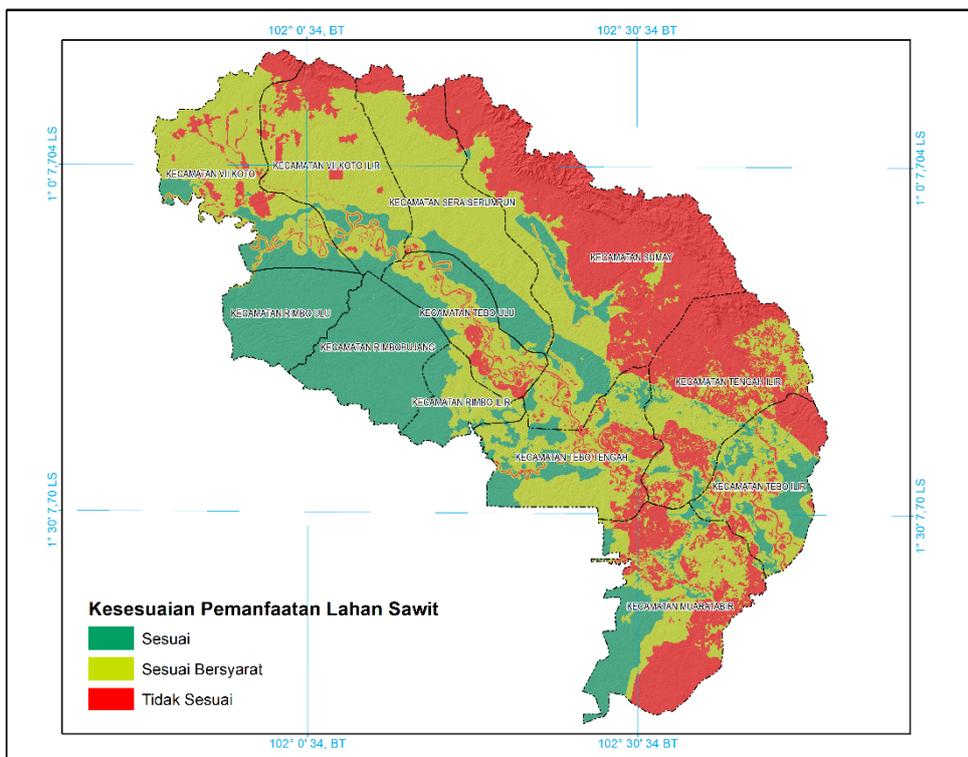
Tabel 2. 2 Luas Tanam dan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2019-2024

Tahun	Kelapa Sawit		Karet		Kelapa		Kopi		Kakao	
	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)
2019	56.760	119.264	105.421	50.099	1.069	449	274	47	340	71
2020	61.130	118.992	114.294	50.485	1.137	7.730	251	40	341	65
2021	60.985	118.677	114.263	50.300	1.087	1.087	284	42	378	52
2022	49.655	126.054	114.308	50.308	1.096	1.105	286	40	378	65
2023	60.982	129.170	105.421	50.099	1.041	449	260	47	333	71
2024	69.233	119.264	113.691	50.099	1.059	415	274	47	315	73

Sumber: Kabupaten Tebo Dalam Angka, 2025

Potensi sektor perkebunan diidentifikasi melalui luas tanam dan produksi dari lima komoditas utama, yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao. Di antara

komoditas tersebut, kelapa sawit dan karet menunjukkan dominasi yang signifikan dalam hal luas tanam, mencerminkan peran keduanya sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat. Luas tanam karet sempat meningkat dari 105.421 hektar pada 2019 menjadi 114.294 hektar pada 2020, namun kembali menurun menjadi 113.691 hektar pada 2024. Produksi karet relatif stabil di kisaran 50.099–50.485 ton selama enam tahun terakhir. Sebaliknya, luas tanam kelapa sawit menunjukkan tren peningkatan, dari 56.760 hektar pada 2019 menjadi 69.233 hektar pada 2024, meskipun sempat menurun di tahun 2022 (49.655 Ha). Uniknya, pada tahun 2023 terjadi penurunan luas tanam sawit sebesar 4.370 hektar dibandingkan tahun sebelumnya, namun produksinya justru meningkat sebesar 3.116 ton dari 126.054 ton pada 2022 menjadi 129.170 ton. Hal ini dapat mengindikasikan peningkatan efisiensi atau produktivitas. Tercatat terdapat 9 pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Tebo yang mengolah tandan buah segar menjadi CPO. Dengan dukungan luas lahan yang terus berkembang, stabilitas produksi, dan infrastruktur pengolahan yang tersedia, sektor perkebunan di Kabupaten Tebo memiliki potensi besar untuk memperkuat rantai pasok kelapa sawit di Provinsi Jambi.



Gambar 2. 5 Peta Kesesuaian Ruang Budidaya Perkebunan Sawit

Sumber: RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045

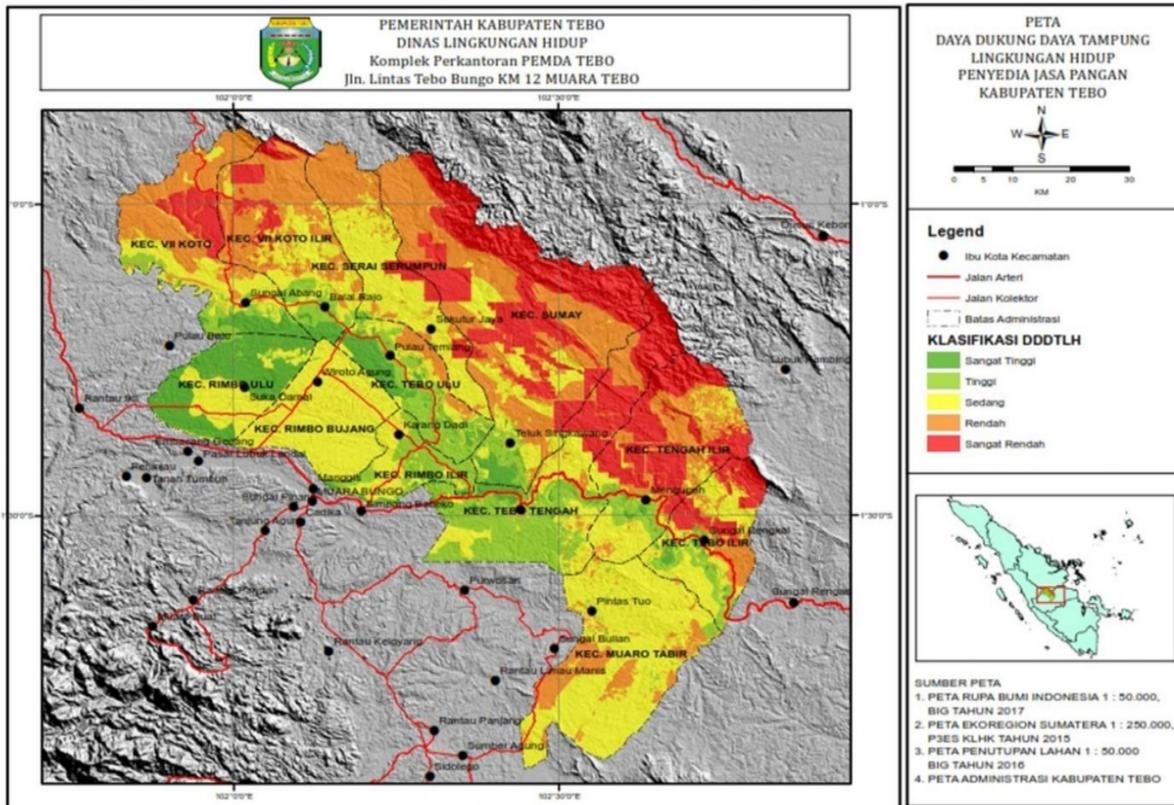
Budidaya lahan untuk perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan tatanan fungsi ruang untuk menghindari kekeliruan dalam pemanfaatan ruang. Analisis terhadap kesesuaian lahan perkebunan sawit menunjukkan terdapat 26,74 persen lahan di Kabupaten Tebo yang sesuai untuk perluasan budidaya sawit. Area tersebut dalam RTRW difungsikan sebagai kawasan perkebunan dan mampu mengoptimalkan produksi. Kemudian terdapat area seluas 41,11 persen yang tergolong sebagai kategori sesuai bersyarat. Area tersebut merupakan kawasan hutan produksi namun secara fisik mendukung untuk budidaya sawit. Sedangkan area yang tidak sesuai untuk perkebunan sawit mencakup area 32,14 persen yang merupakan kawasan lindung. Dengan memperhatikan kesesuaian ruang, diharapkan dapat mewujudkan industri sawit berkelanjutan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Komponen Lingkungan hidup merupakan entitas yang menghasilkan seperangkat fungsi lingkungan untuk proses pembangunan. Fungsi lingkungan hidup direpresentasikan sebagai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH,) termasuk daya dukung penyedia pangan, pengaturan hidrologis, hingga daya tampung pengaturan limbah. Jika tidak dikelola dengan baik, pemanfaatan sumber daya secara kontinyu dapat menimbulkan dampak negatif bagi keberlanjutan DDDTLH. Penilaian kondisi DDDTLH Kabupaten Tebo disajikan dalam kategori penyedia pangan dan penyedia air, secara lebih rinci dibahas berikut ini.

A. DDDTLH Penyedia Pangan

Pangan merupakan sumber serat hayati yang diperoleh dari budidaya pertanian dan perkebunan, maupun protein hewani dari budidaya perikanan dan peternakan. Kebutuhan pangan suatu daerah diproyeksikan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Disamping itu, potensi wilayah dalam menyediakan sumber pangan tergantung pada karakteristik wilayah dalam mendukung fungsi penyedia pangan. Analisis terhadap DDDTLH Penyedia Pangan di Kabupaten Tebo membantu untuk memetakan distribusi dan luasan yang potensial dalam menyediakan sumber pangan.



Gambar 2. 6 Peta Daya Dukung Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Tebo

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045

Kondisi DDDTLH Penyedia Pangan dikategorikan menjadi lima kelas yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Kategori Tinggi meliputi area yang cukup rendah yaitu 18,11 persen, sedangkan kategori Sedang meliputi area lebih luas yaitu 36,99 persen. Area dengan kategori Tinggi dan Sedang relatif mendukung untuk pengembangan kultivasi pertanian dan perkebunan. Sebaran keruangan area berkategori Sedang dan Tinggi berada pada topografi datar hingga landai dan berasosiasi terhadap aliran sungai Batanghari dan sungai Batang Tebo. Sumber air melimpah pada jenis tanah alluvial merupakan wilayah yang dapat mendukung produktivitas lahan secara optimal. Selanjutnya, kategori Rendah meliputi area cukup luas yaitu 44,89 persen. Wilayah dengan kategori demikian relatif kurang mendukung pengembangan kultivasi pertanian. Dari aspek topografi, wilayah tersebut merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng relatif diatas 15%. Lebih lanjut, status lahan merupakan kawasan hutan produksi yang tidak dapat dikembangkan sebagai budidaya pertanian secara luas.

B. DDDTLH Penyedia Air Bersih

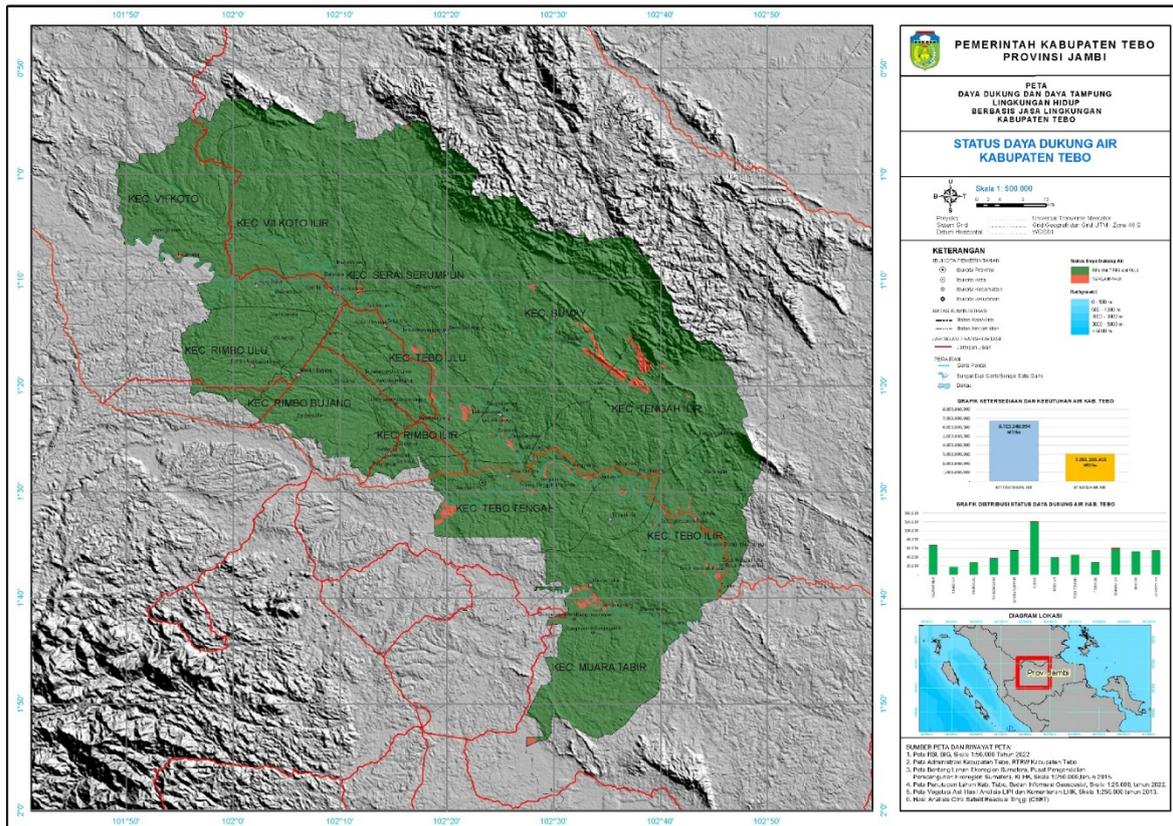
Ketersediaan air bersih berperan vital dalam pemenuhan kebutuhan dasar baik dari aspek kesehatan, sanitasi, serta mendukung produktivitas sektor pertanian, industri, dan energi. Pemenuhan air bersih suatu daerah bergantung pada karakteristik wilayah dalam menyediakan sumber air baku. Penilaian status DDDTLH Penyedia Air Bersih berupaya untuk menilai antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk pembangunan daerah. Lebih jauh menyediakan data dasar untuk mengetahui distribusi luas dan lokasi wilayah yang perlu dioptimalkan untuk melestarikan sumber daya air.

Tabel 2. 3 Daya Dukung Air Menurut Kecamatan

KECAMATAN	KETERSEDIAAN AIR	KEBUTUHAN AIR			SELISIH KETERSEDIAAN AIR	INDIKASI STATUS AIR KECAMATAN
		KEBUTUHAN AIR DOMESTIK	KEBUTUHAN AIR LAHAN	TOTAL KEBUTUHAN AIR		
MUARATABIR	697.118.433	814.190	302.082.507	302.896.697	394.221.736	BELUM TERLAMPAUI
RIMBO ILIR	255.816.943	1.028.462	126.066.117	127.094.579	128.722.364	BELUM TERLAMPAUI
RIMBO ULU	410.855.237	1.686.701	185.649.545	187.336.245	223.518.992	BELUM TERLAMPAUI
RIMBOBUJANG	528.285.220	2.853.187	259.724.196	262.577.383	265.707.837	BELUM TERLAMPAUI
SERAISERUMPUN	543.851.196	481.594	352.875.164	353.356.758	190.494.438	BELUM TERLAMPAUI
SUMAY	1.213.475.563	1.133.611	327.690.938	328.824.549	884.651.014	BELUM TERLAMPAUI
TEBO ILIR	424.070.252	1.307.491	206.693.586	208.001.077	216.069.175	BELUM TERLAMPAUI
TEBO TENGAH	530.190.576	1.848.917	302.227.033	304.075.950	226.114.626	BELUM TERLAMPAUI
TEBO ULU	392.673.794	1.492.085	178.260.382	179.752.467	212.921.327	BELUM TERLAMPAUI
TENGAH ILIR	578.154.913	1.251.374	302.371.884	303.623.258	274.531.655	BELUM TERLAMPAUI
VII KOTO	565.129.924	882.922	231.931.482	232.814.403	332.315.520	BELUM TERLAMPAUI
VII KOTO ILIR	583.618.943	898.733	259.903.314	260.802.047	322.816.896	BELUM TERLAMPAUI
KABUPATEN TEBO	6.723.240.994	15.679.267	3.035.476.147	3.051.155.415	3.672.085.579	BELUM TERLAMPAUI

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

Kapasitas penyediaan air di Kabupaten Tebo diproyeksikan mencapai 6,7 miliar m³/tahun. Tingginya kapasitas ini didukung oleh DAS besar di Kabupaten Tebo seperti DAS Batanghari dan DAS Batang Tebo. Selain itu, kawasan yang masih terjaga berupa tutupan vegetasi hutan pada topografi perbukitan mengoptimalkan fungsi imbuhan air dan tatanan hidrologis wilayah Kabupaten Tebo. Kebutuhan air untuk keperluan domestik, industri, dan pengelolaan lahan diperkirakan mencapai 3 miliar m³/tahun. Dengan demikian, daya dukung akumulatif di Kabupaten Tebo berstatus surplus. Artinya ketersediaan air masih lebih besar dari tingkat kebutuhannya. Status daya dukung air menurut kecamatan juga menunjukkan kondisi surplus atau belum terlampaui. Penilaian daya dukung diperinci dengan metode grid untuk melihat bagaimana kondisi daya dukung air dalam luasan terkecil.



Gambar 2. 7 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tebo

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

Menurut distribusinya, terdapat beberapa area yang menunjukkan kondisi terlampaui atau defisit daya dukung air. Area tersebut masih tergolong kecil, namun menjadi indikasi terhadap tingginya kebutuhan air hingga melampaui ketersediannya. Status terlampaui tertinggi ditunjukkan oleh Kecamatan Tengah Ilir dengan luasan 1.936 hektar, Kecamatan Sumay seluas 1.393 hektar dan Kecamatan Tebo Tengah seluas 1.100 hektar.

2.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tebo. Ketahanan energi mencakup ketersediaan dan pemanfaatan energi secara efisien, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Ketahanan air berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan guna mendukung kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Sementara itu, kemandirian pangan diwujudkan melalui peningkatan produksi

pertanian, penguatan sistem distribusi, serta dukungan terhadap petani lokal. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan harus dikelola secara terpadu agar mampu mendukung ketahanan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo. Berikut adalah data tentang ketahanan energi, air dan pangan di Kabupaten Tebo.

A. Indeks Ketahanan Energi

Ketahanan energi merupakan suatu kondisi kebutuhan energi tercukupi secara aman, terjangkau, dan merata. Ketahanan energi dapat tercipta jika suatu daerah dapat menyeimbangkan ketersediaan, penerimaan masyarakat, keterjangkauan, dan jaminan akses dari sumber energi. Energi listrik menjadi salah satu sektor energi yang harus dijamin pemerataan dan aksesnya, karena perannya yang vital terhadap kebutuhan rumah tangga dan industri.

Tabel 2. 4 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2020 s/d 2024

Kecamatan	Jumlah Pelanggan Listrik				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tebo Ilir	1.561	1.761	2.330	2.659	3.126
Muara Tabir	1.117	1.199	1.309	1.367	1.702
Tebo Tengah	3.322	3.583	3.898	4.078	5.383
Sumay	404	433	461	478	585
Tengah Ilir	N/A	N/A	N/A	N/A	578
Rimbo Bujang	3.711	4.343	4.794	5.115	6.621
Rimbo Ulu	289	333	336	391	948
Rimbo Ilir	445	535	673	702	957
Tebo Ulu	1.140	1.348	1.603	1.790	2.279
VII Koto	1.058	1.408	1.521	1.490	1.625
Serai Serumpun	N/A	N/A	N/A	N/A	97
VII Koto Ilir	344	379	399	517	957
Kabupaten Tebo	13.391	15.322	17.324	18.587	25.092

Sumber: Kabupaten Tebo Dalam Angka, 2025

Jumlah pelanggan listrik mencerminkan besarnya konsumsi Listrik Per Kapita, yang menunjukkan rata-rata penggunaan listrik oleh setiap individu dalam suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Artinya, jumlah pelanggan yang semakin meningkat memiliki kondisi yang linier dengan konsumsi listrik yang juga semakin tinggi, dan lebih lanjut lagi seringkali merepresentasikan tingkat perkembangan ekonomi dan akses listrik yang telah merata pada suatu daerah. Adapun jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Tebo mengalami peningkatan sebesar 11.701 pelanggan dari tahun 2020 hingga 2024. Kecamatan dengan jumlah pelanggan listrik terbanyak adalah Kecamatan Rimbo Bujang, Tebo Tengah, dan Tebo Ulu. Peningkatan ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam lima tahun ke depan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pelayanan jaringan listrik secara optimal. Selain itu, pemanfaatan energi listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan juga perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. Indeks Ketahanan Air

Ketahanan air merupakan suatu kondisi ketersediaan dan keterjangkauan air yang mencukupi bagi kebutuhan domestik, pengelolaan lahan, dan kegiatan industri. Ketersediaan air bergantung pada sistem hidrologis suatu wilayah, berdasarkan jasa lingkungan penyediaan air di Kabupaten Tebo berada dalam kondisi surplus. Artinya penyediaan air masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Suplai air baku oleh sumber permukaan dapat diidentifikasi lebih jauh melalui sistem daerah aliran sungai (DAS) sebagai batas imbuhan, akumulasi, dan distribusi air menurut tata hidrologis. Wilayah Kabupaten Tebo termasuk dalam empat DAS yaitu DAS Batanghari hulu, DAS Batanghari hilir, DAS Batang Tebo, dan DAS Batang Tabir.

Tabel 2. 5 DAS yang Melewati Wilayah Kabupaten Tebo

DAS	Luas (Ha)	Cakupan Kabupaten
Batanghari Hulu	1.277.947	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Tebo • Kabupaten Bungo • Kabupaten Kerinci • Kabupaten Solok • Kabupaten Soloh Selatan • Kabupaten Sawahlunto • Kabupaten Sijunjung

DAS	Luas (Ha)	Cakupan Kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Dharmasraya
Batang Tebo	538.725	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Tebo Kabupaten Bungo Kabupaten Kerinci
Batang Tabir	381.329	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Tebo Kabupaten Merangin Kabupaten Batanghari Kabupaten Kerinci Kabupaten Sarolangun
Batanghari Hilir	979.559	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Tebo Kota Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Batanghari

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo Dalam Angka 2023

DAS Batanghari Hilir merupakan wilayah DAS dengan cakupan sangat luas, didukung dengan debit air rata-rata mencapai 2.140,7 m³/detik. Debit DAS Batanghari berfluktuasi setiap bulannya, dipengaruhi oleh intensitas curah hujan juga pengelolaan lahan. Debit puncak mencapai 4,712 m³/detik dan umumnya terjadi pada bulan-bulan basah dari bulan november hingga april. Curah hujan di DAS Batanghari tergolong tinggi dengan rata-rata tahunan 2.500 mm/tahun. Curah hujan akan menurun pada bulan-bulan kering seperti bulan juni hingga oktober, menyebabkan debit DAS menurun drastis, memicu kekeringan dan kesulitan akses air bersih pada beberapa daerah di Kabupaten Tebo.

Tabel 2. 6 Debit Rata-rata Bulanan Sub DAS Wilayah Kabupaten Tebo

Bulan	Debit Rata-rata Bulanan (m ³ /detik)			
	Batanghari Hulu	Batang Tebo	Batang Tabir	Batanghari Hilir
Januari	453	218.14	77.88	4,712
Februari	298.1	178.14	63.92	4,027
Maret	388.89	166.75	87.01	3,389
April	451.8	123.13	92.59	3,670

Bulan	Debit Rata-rata Bulanan (m ³ /detik)			
	Batanghari Hulu	Batang Tebo	Batang Tabir	Batanghari Hilir
Mei	357.45	109.63	78.82	3,495
Juni	242.82	70.11	52.75	1,620
Juli	195.55	56.72	35.71	1,071
Agustus	159.91	51.21	35.54	713
September	186.33	57.12	53.03	741
Oktober	230.33	65.83	56.89	1,026
November	398.4	160.44	87.73	2,291
Desember	426.3	193.88	80.79	3,076

Sumber: Sunu Tino, 2000

Debit air rata-rata pada DAS Batanghari hulu, Batang Tebo, dan Batang Tabir jauh lebih rendah dibandingkan DAS Batanghari hilir. Namun demikian, debit puncak DAS Batang Tebo dapat mencapai 1.664,57 m³/detik. Pola fluktuasi umumnya linier untuk semua DAS, karena pengaruh intensitas curah hujan yang cukup signifikan terpengaruh fenomena dinamika iklim seperti ENSO dan Indian Ocean Dipole.

Tabel 2. 7 Luas Danau/Waduk/Situ/Embung Kabupaten Tebo

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	Danau Sigombak	45	1.230.499,56
2	Danau Tanduk	5	N/A
3	Waduk Cermin Alam	5	N/A
Total		55	1.230.499,56

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, 2019

Potensi sumber air baku lainnya tersimpan sebagai akumulasi limpasan permukaan danau dan waduk. Danau Sigombak adalah danau terluas di Kabupaten Tebo dengan cakupan 45 hektar mampu menampung volume air hingga 1 juta meter³ setiap tahunnya. Sementara Danau Tanduk mencakup area lebih kecil yaitu seluas 5 hektar. Disamping danau alami, Kabupaten Tebo memiliki waduk yang berlokasi di Kecamatan VII Koto Ilir yaitu Waduk Cermin Alam dengan luas genangan air seluas 5 hektar.

Input air didasarkan pada curah hujan tahunan, Kabupaten Tebo memiliki kapasitas penyediaan air sangat besar. Curah hujan tahunan mencapai 3.000 – 3.500 mm/tahun, artinya dominasi iklim basah meliputi wilayah Kabupaten Tebo. Sebagai wilayah dengan karakteristik bentangalam fluvial, imbuan air sub-permukaan Kabupaten Tebo berpotensi menyediakan air permukaan dalam jumlah yang besar. Manajemen pengelolaan hidrologi permukaan penting untuk menstabilkan suplai air sebagai bentuk preventif dalam menghadapi anomali iklim ekstrem seperti El-Nino dan IOD negatif.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak adalah indikator untuk melihat jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak. Indikator ini harus diperhatikan sebagai representasi dari indeks ketahanan air. Berikut adalah data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Tebo.

Tabel 2. 8 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen) Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	58,82	61,63	65,34	68,6	69,33

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tebo, 2025

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Tebo meningkat sebesar 10,51 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, peningkatan akses saluran dan beberapa faktor determinan lainnya.

C. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan mencerminkan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, diwakilkan dari ketersediaan yang cukup baik dari jumlah dan mutu serta terjangkau dengan akses merata. Ketersediaan yang cukup terkadang tidak diimbangi dengan mutu dan gizi pangan ataupun dukungan kemudahan akses terhadap sumber pangan yang masih kurang. Tersedianya informasi yang menyajikan ukuran ketahanan pangan daerah secara akurat dan komprehensif diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan status gizi di suatu daerah. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menyajikan data tingkat ketahanan

pangan pada level Kabupaten dengan melibatkan indikator ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Berikut ini merupakan IKP Kabupaten Tebo pada tahun 2020 sampai tahun 2024 yang diperoleh dari Badan Pangan Nasional.

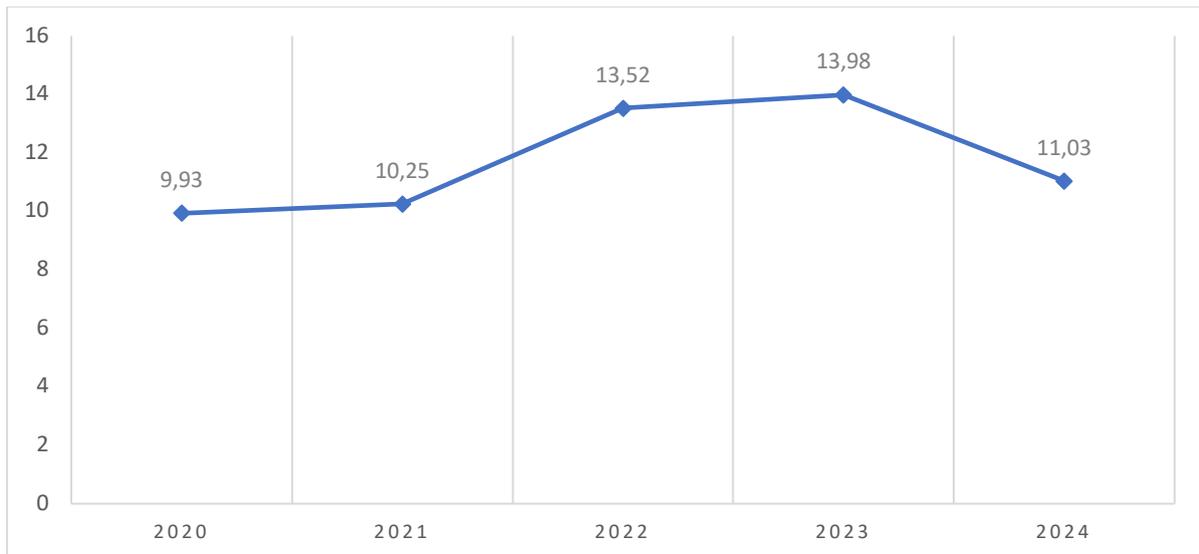
Tabel 2. 9 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan	51,39	66,9	55,01	50,48	57,43
Keterjangkauan	86,04	85,46	88,07	86,61	81,60
Pemanfaatan	67,74	67,55	68,99	74,41	73,67
IKP	68,33	72,37	70,52	70,89	71,36

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Tren ketahanan pangan Kabupaten Tebo menunjukkan tren yang meningkat sebesar 3,03 poin dari tahun 2020 hingga 2024. Capaian IKP tertinggi terjadi pada tahun 2021, kemudian menurun 1,85 poin pada tahun 2022. Indeks ketahanan pangan kembali membaik pada tahun 2023 dan 2024. Ketersediaan pangan menjadi persoalan utama yang menyebabkan indeks ketahanan pangan Kabupaten Tebo mengalami fluktuasi. Ketersediaan pangan dapat dijaga dengan memperhatikan beberapa faktor seperti stok cadangan pangan, kondisi infrastruktur lumbung pangan serta berbagai faktor pendukung lainnya.

Prevalensi ketidakcukupan pangan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase populasi dalam suatu wilayah atau negara yang tidak mampu memperoleh cukup kalori untuk memenuhi kebutuhan energi minimum harian secara konsisten. Berikut adalah data prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Tebo tahun 2020-2024.



Gambar 2. 8 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (Persen)

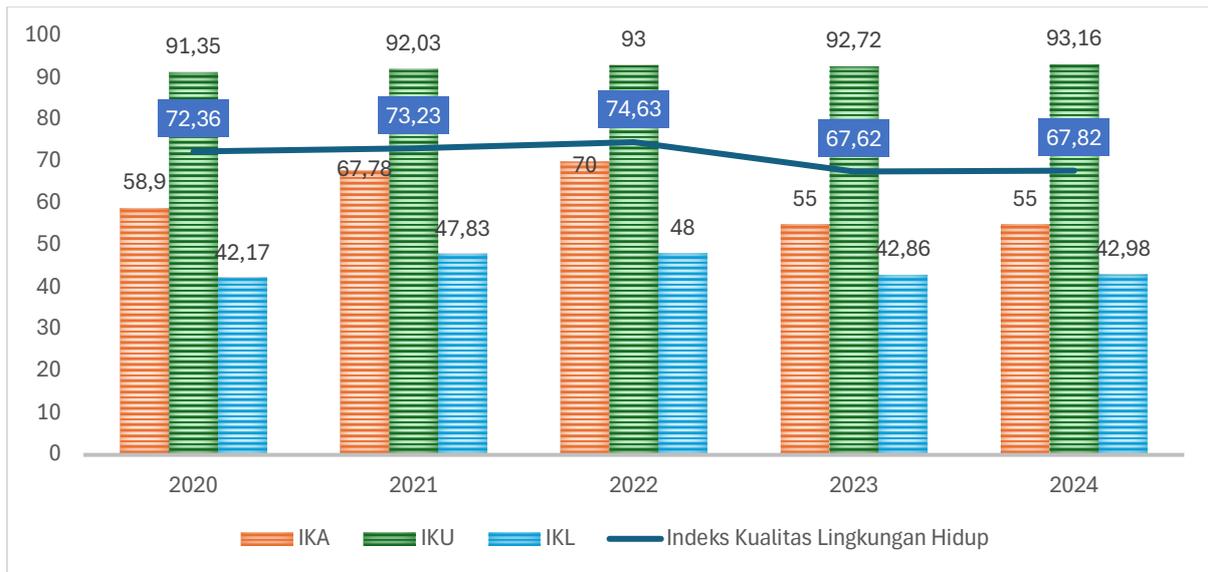
Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Tebo menunjukkan peningkatan sebesar 1,1 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan prevalensi ketidakcukupan pangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor indikatif seperti kemiskinan, pendapatan masyarakat, produksi dan distribusi pangan dan berbagai faktor determinan lainnya. Diperlukan intervensi kebijakan yang baik dengan melibatkan kolaborasi multiaktor untuk menurunkan prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Tebo.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas mampu menyediakan fungsi esensial secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup diukur melalui indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). IKLH dimaknai sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi dan mengendalikan kondisi lingkungan hidup. Parameter penilaian IKLH terdiri atas kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Berikut ini merupakan capaian IKLH dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Tebo.



Gambar 2. 9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, 2025

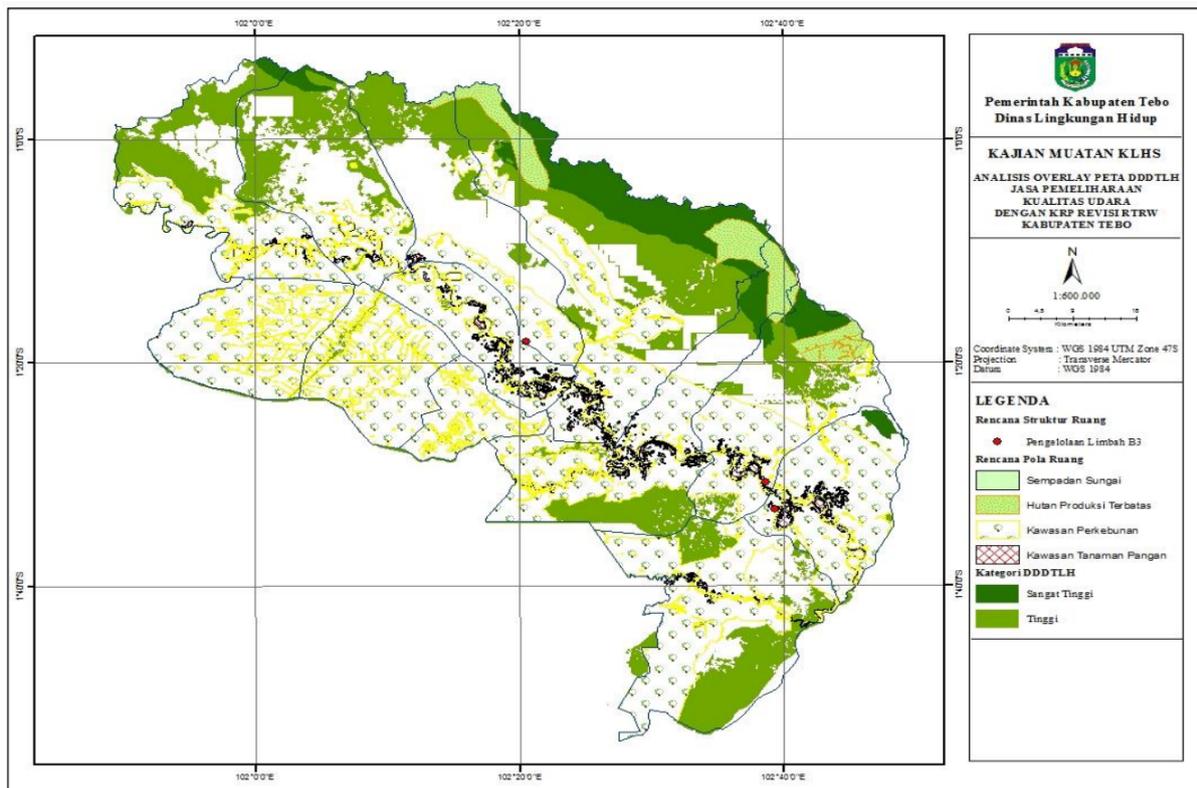
Capaian nilai IKLH mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan IKLH yang cukup signifikan dengan capaian 67,62. Penurunan tersebut berimplikasi terhadap pergeseran kualitas lingkungan menjadi predikat Sedang. Pada tahun 2024 IKLH kembali mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,20 menjadi 67,82.

Indikator pembentuk IKLH di Kabupaten Tebo umumnya memiliki tren fluktuatif, dengan capaian tertinggi ditunjukkan oleh indeks kualitas udara (IKU). Capaian IKU menunjukkan nilai >90 setiap tahunnya, menandakan kondisi udara Kabupaten Tebo berkualitas sangat baik. Minimnya sumber polusi udara dengan karakteristik wilayah dominan dengan tutupan lahan hijau merupakan pengaruh utama berkualitasnya udara di Kabupaten Tebo. Tegakan hutan yang cukup luas turut berperan besar dalam perbaikan udara melalui proses fotosintesis.

Sementara itu, capaian indeks kualitas air (IKA) pada tahun 2022 berkategori Baik kemudian mengalami penurunan sebesar 15 poin dan berpredikat sedang di tahun 2023 dan 2024. Sebelumnya capaian IKA mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022, dimana terjadi penambahan 8,88 poin dan 2,22 poin. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber air dihadapkan pada beberapa tantangan diantaranya kegiatan sanitasi masyarakat yang langsung membuang limbah ke sungai, pembuangan sampah ke badan sungai, sedimentasi yang cukup besar, dan pertambangan emas ilegal (PETI) sepanjang aliran sungai Batanghari dan

Batang Tebo. Sedimentasi pada aliran sungai salah satunya disebabkan oleh penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan limpasan air tidak terbendung dan membawa sedimentasi pada sistem aliran air. Pencemaran yang perlu mendapat perhatian serius adalah aktivitas PETI, penggunaan merkuri yang tidak bertanggungjawab memperbesar peluang masyarakat terekspos dengan zat kimia tersebut. Berbagai upaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber air bertanggung jawab perlu untuk diperkuat untuk mengoptimalkan capaian IKA, baik dari aspek perbaikan perilaku masyarakat dan penegakan hukum terkait aktivitas yang berpotensi berdampak negatif terhadap kualitas air. Reforestasi lahan kritis turut menjadi perhatian penting, karena tegakan vegetasi secara alamiah sebagai filtrasi air dan memaksimalkan imbuhan air.

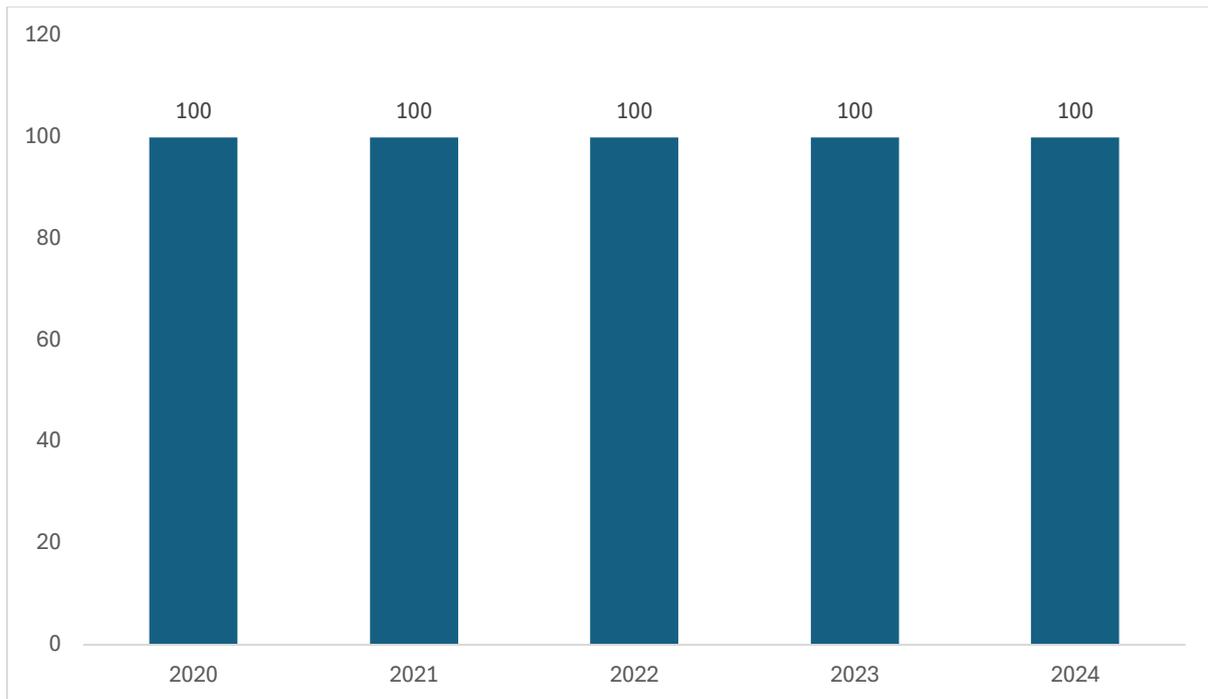
Capaian indeks kualitas lahan (IKTL) pada tahun 2024 memperoleh predikat sedang. Capaian tersebut mengalami penurunan poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan di Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh alih komoditas pada beberapa jenis pemanfaatan lahan, pergeseran pemanfaatan perkebunan karet menjadi perkebunan sawit lebih sering terjadi. Alih komoditas terjadi sebagai konsekuensi dari nilai ekonomi sawit yang terus melonjak dan relatif stabil dibandingkan dengan hasil perkebunan karet. Selain itu, perambahan hutan secara ilegal dan lahan kritis menjadi indikasi selanjutnya yang mendorong buruknya kualitas tutupan lahan di Kabupaten Tebo. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan regulasi perlindungan hutan dan upaya rehabilitasi lahan kritis perlu untuk dioptimalkan agar dapat lebih meningkatkan capaian dari IKTL.



Gambar 2. 10 Jasa Pemeliharaan kualitas udara Kabupaten Tebo

Sumber: KLHS Revisi RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area yang ditumbuhi vegetasi hijau sebagai ruang yang dioptimalkan untuk mengatur siklus udara, tata hidrologis alami, stabilitas iklim, dan meningkatkan estetika dan kualitas lingkungan hidup di suatu kawasan. RTH berperan sangat signifikan terhadap pengaturan limpasan aliran dan penyaringan udara perkotaan, untuk itu keberadaannya sangat vital bagi kawasan perkotaan. Pengelolaan RTH di Kabupaten Tebo merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo. Catatan data menunjukkan pengelolaan kawasan RTH telah berjalan secara optimal dengan capaian 100 persen pada tahun awal 2020 sampai data termutakhir tahun 2024.



Gambar 2. 11 Persentase RTH dalam kondisi baik Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, 2025

Jenis RTH terbagi atas RTH publik dan RTH privat, pengelolaan RTH privat menjadi wewenang masyarakat yang menguasai dan memiliki lahan RTH tersebut. RTH privat cenderung mudah mengalami pergantian fungsi, sebagai contoh lahan pekarangan yang diubah menjadi perumahan. Dengan demikian penyediaan RTH yang disesuaikan dengan kebutuhan Kawasan perkotaan, umumnya dapat dimaksimalkan melalui RTH publik. Peran vital RTH dalam Kawasan perkotaan, membutuhkan pengelolaan yang tidak hanya mengedepankan estetika namun juga fungsi alamiahnya. Sinergitas antar pemangku kebijakan dan Masyarakat serta organisasi non pemerintahan menjadi penting untuk dimaksimalkan untuk mempertahankan keberlanjutan RTH pada kawasan perkotaan. Diharapkan kedepannya, pengelolaan RTH di Kabupaten Tebo dapat berjalan sinergis dan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Selain itu, dari sisi pengelolaan sampah, timbulan sampah di Kabupaten Tebo diperkirakan mencapai volume 625.016 m³/hari, dengan volume tertinggi dihasilkan oleh Kecamatan Rimbo Bujang yaitu mencapai 20,36 persen volume sampah total. Selain sebagai daerah jumlah penduduk tertinggi, Kecamatan Rimbo Bujang merupakan pusat aktivitas perekonomian di Kabupaten Tebo. Sampah yang dihasilkan lebih beragam dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Tabel 2. 10 Pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Buah	32	32	32	30	22	22	26	26
Tempat Pembuangan Sampah Sementara 3R	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Buah	3	4	4	4	4	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, 2025

Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo masih cukup terbatas. Hal ini mempengaruhi capaian pengelolaan sampah secara optimal di Kabupaten Tebo. Jumlah sampah yang tidak terkelola jauh lebih besar dan dikhawatirkan akan mencemari sumber penghidupan di Kabupaten Tebo seperti sumber air. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga diindikasikan menjadi penyebab lain terhadap masih belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo.

Tabel 2. 11 Jumlah Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja (IPLT)	Buah	0	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, 2025

Upaya pengelolaan limbah di Kabupaten Tebo juga masih belum optimal, terutama terkait pengelolaan lumpur tinja (*black water*). Catatan data di awal tahun 2017 sampai dengan data termutakhir di tahun 2024 menunjukkan instalasi pengelolaan lumpur tinja hanya berjumlah 1 unit yaitu IPLT pusat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengoperasian unit IPLT juga turut menjadi kendala. Jarak antar daerah yang akan dilayani angkutan penyedot limbah tinja yang sangat jauh dan belum diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung mobilisasi menjadi faktor penghambat lainnya dalam mengelola limbah tinja tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, didukung dengan

teknisi terampil perlu untuk diupayakan, supaya dapat mengoptimalkan pengelolaan sanitasi yang lebih baik dan bertanggungjawab di Kabupaten Tebo.

2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kerawanan bencana alam diukur melalui indeks risiko bencana (IRB) yang dimuat dalam dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tingkat risiko bencana di Kabupaten Tebo disajikan sebagai berikut.

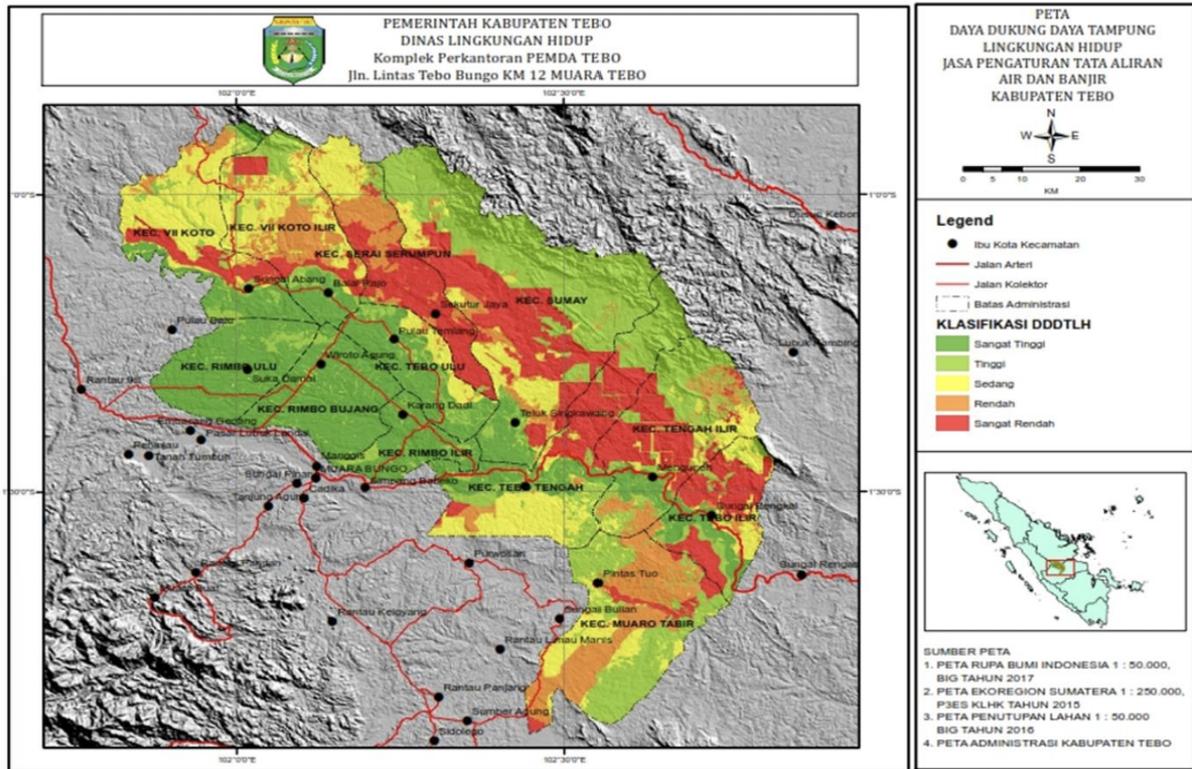
Tabel 2. 12. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRB	131,2	131,2	131,2	131,2	131,2	131,2	131,2	131,2
Kategori	Sedang							

Sumber: Data diolah, Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia

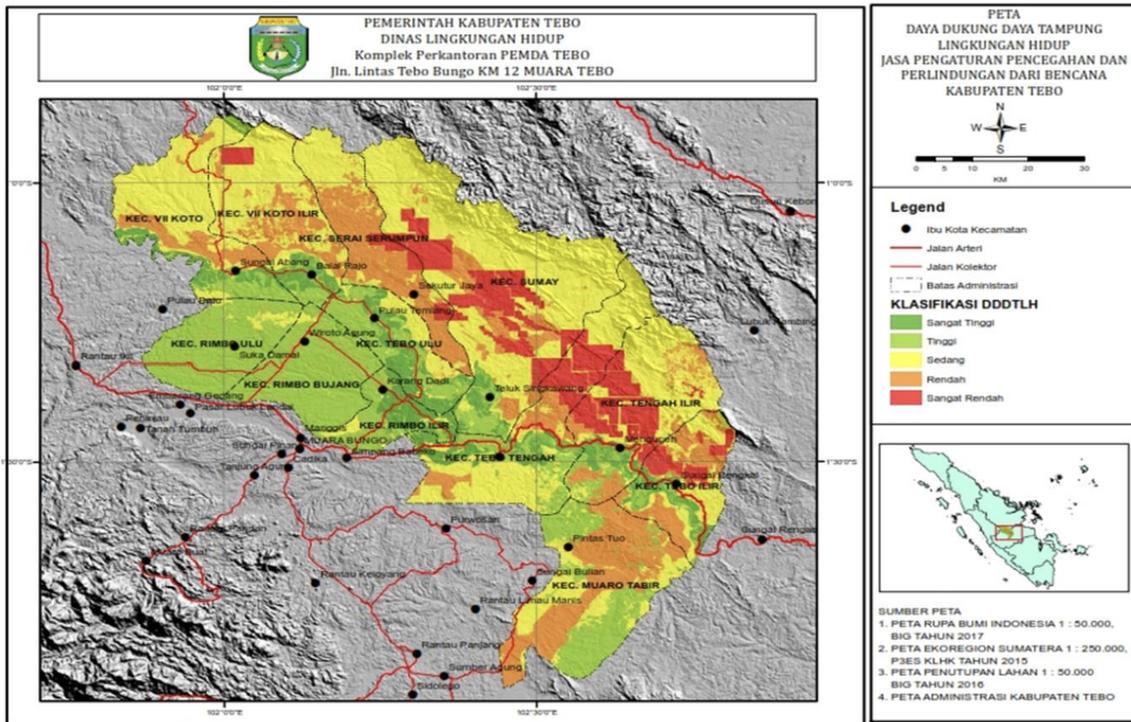
Tingkat IRB di Kabupaten Tebo tergolong kategori sedang setiap tahunnya dengan nilai konsisten 131,2 poin. Kategori tersebut menandakan kapasitas Kabupaten Tebo dalam menangani kejadian bencana telah berjalan baik dan optimal. Disamping itu, tingkat risiko bencana banjir, gempa bumi, Karhutla, kekeringan, dan cuaca ekstrim di Kabupaten Tebo masih berpredikat tinggi. Tingginya IRB pada beberapa jenis bencana di Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh tingkat bahaya yang melekat, konsekuensi dari kondisi wilayahnya.

Kondisi lingkungan Kabupaten Tebo dalam merespon secara alami kejadian bencana direpresentasikan dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) jasa pengaturan tata aliran air dan banjir serta jasa pengaturan pencegahan bencana dan perlindungan dari bencana. Jasa pengaturan perlindungan bencana dengan kelas sangat tinggi dan tinggi mencakup area 65,40 persen wilayah Kabupaten Tebo, mengindikasikan kemampuan komponen lingkungan yang sangat baik dalam mencegah terjadinya kejadian bencana. Jasa yang diberikan diantaranya seperti pengaturan tata aliran air dan menjaga stabilitas lereng. Jasa pengaturan tata aliran air dan banjir dengan kategori sangat tinggi dan tinggi meliputi area lebih luas yaitu 62,18 persen, menandakan kapasitas lingkungan hidup yang optimum dalam mengatur limpasan permukaan untuk mencegah bencana banjir.



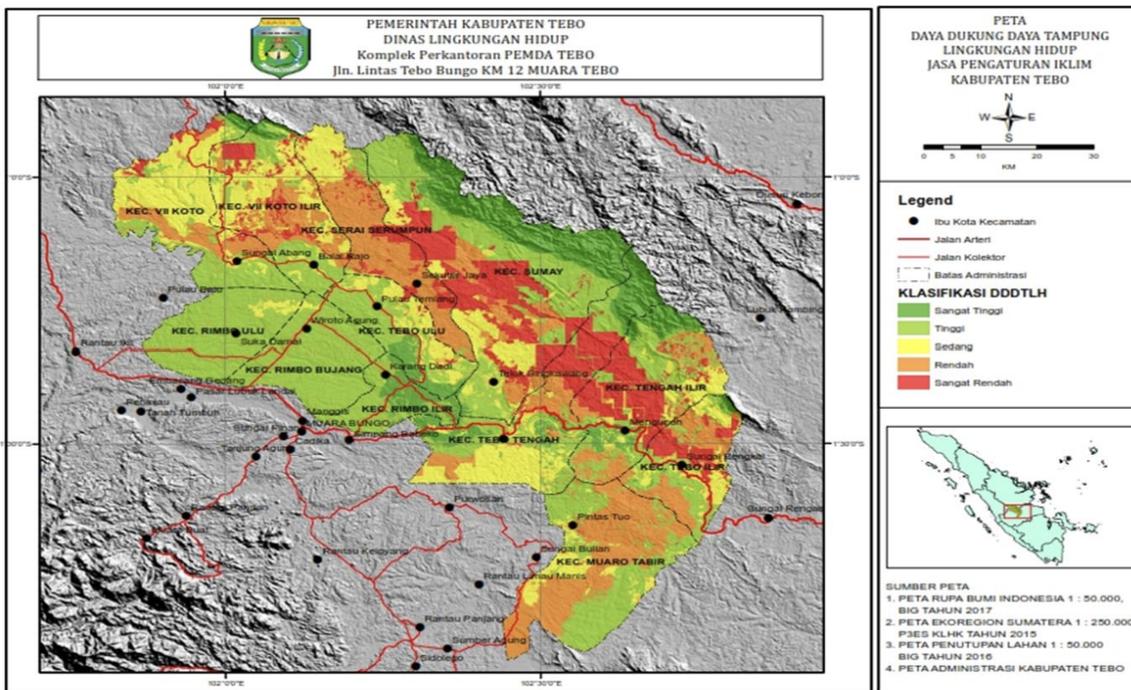
Gambar 2. 12 Peta DDDTLH Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Tebo

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045



Gambar 2. 13 Peta DDDTLH Jasa Pengaturan Pencegahan Bencana dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Tebo

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045



Gambar 2. 14 Peta DDDTLH Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Tebo

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045

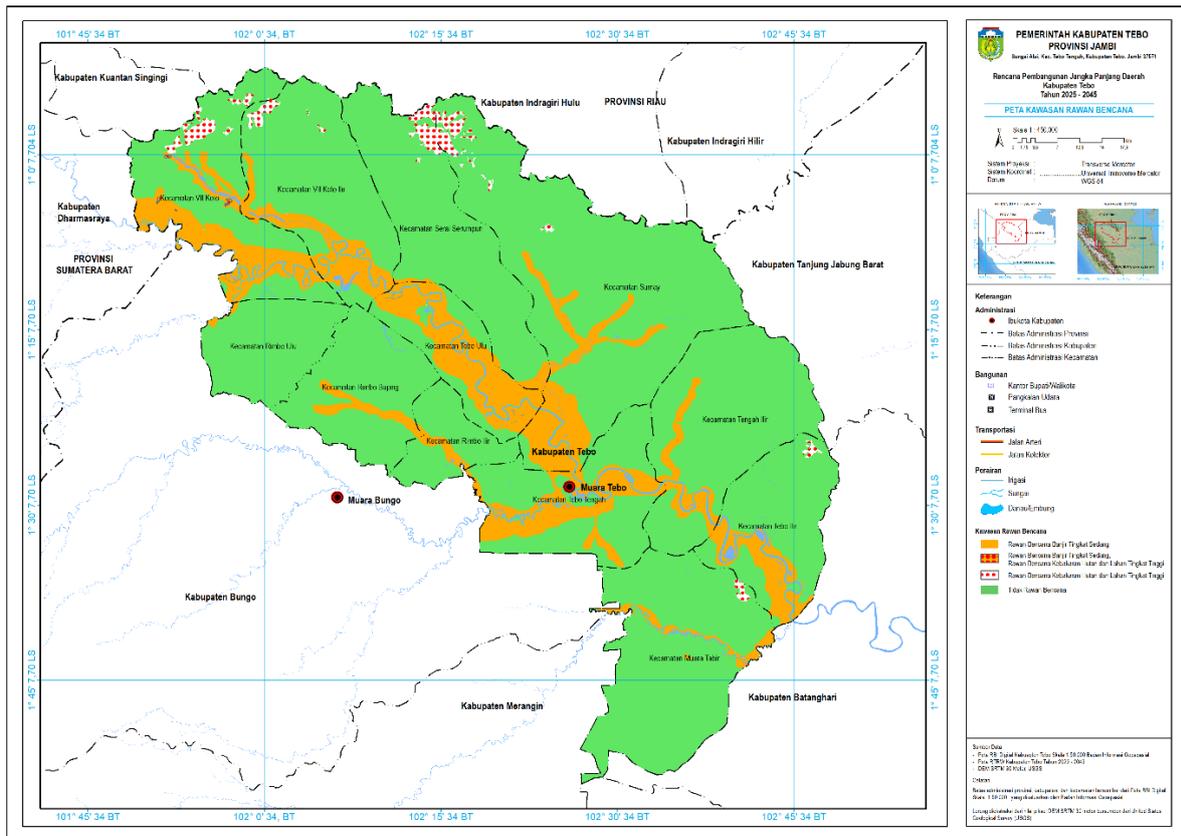
Ancaman bencana alam di Kabupaten Tebo akan semakin meningkat seiring meningkatnya krisis iklim global. Fenomena pendidihan global atau meningkatnya suhu permukaan bumi hampir menyentuh ambang batas kritikal akan berdampak pada bergesernya siklus udara global yang berpotensi meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologis di Indonesia termasuk Kabupaten Tebo. Kapasitas lingkungan hidup memberikan jasa pengaturan dalam memperlancar siklus iklim lokal seperti penyerap GRK, simpanan cadangan karbon, tata aliran air, dan mereduksi radiasi. Kapasitas DDDLH menunjukkan bahwa jasa pengaturan iklim kategori sangat tinggi dan tinggi meliputi 48,12 persen dari luas wilayah, kemudian kapasitas sedang meliputi 33,50 persen wilayah. Dengan demikian, komponen lingkungan hidup di Kabupaten Tebo mampu menjaga dan melindungi dampak krisis iklim secara optimal. Lebih lanjut lagi, apabila ditinjau dari total pencapaian penurunan intensitas emisi GRK, Kabupaten Tebo berada pada angka 53.745,484 Ton CO₂ eq hingga tahun 2024. Kondisi tersebut perlu untuk semakin dioptimalkan, dengan harapan Kabupaten Tebo dapat semakin adaptif terhadap dinamika perubahan iklim yang terjadi. Seperti yang diketahui, bahwasannya penurunan intensitas emisi GRK sendiri merupakan pengurangan rasio emisi per unit PDRB dalam periode tertentu. Artinya, suatu daerah berhasil memiliki besaran nilai ekonomi yang setara atau lebih besar lagi dengan secara bersamaan juga melakukan pengurangan jumlah emisi GRK dalam setiap aktivitas ekonominya.

Lebih lanjut lagi, kapasitas daerah Kabupaten Tebo perlu untuk terus diperkuat, mengingat tingginya tingkat kerawanan dan risiko kejadian bencana alamnya. Penguatan kapasitas dapat diarahkan dengan penguatan kebijakan kebencanaan, membangun masyarakat sadar dan tanggap bencana, pemberlakuan sanksi tegas, membangun infrastruktur adaptif terhadap bencana seperti kolam retensi, dan mitigasi struktural seperti normalisasi sungai, rehabilitasi kawasan serapan air, dan pengembalian fungsi DAS. Kondisi tersebut yang selanjutnya menjadikan Kabupaten Tebo memiliki ketahanan daerah yang semakin tinggi terhadap ancaman risiko bencana.

A. Risiko Bencana Alam

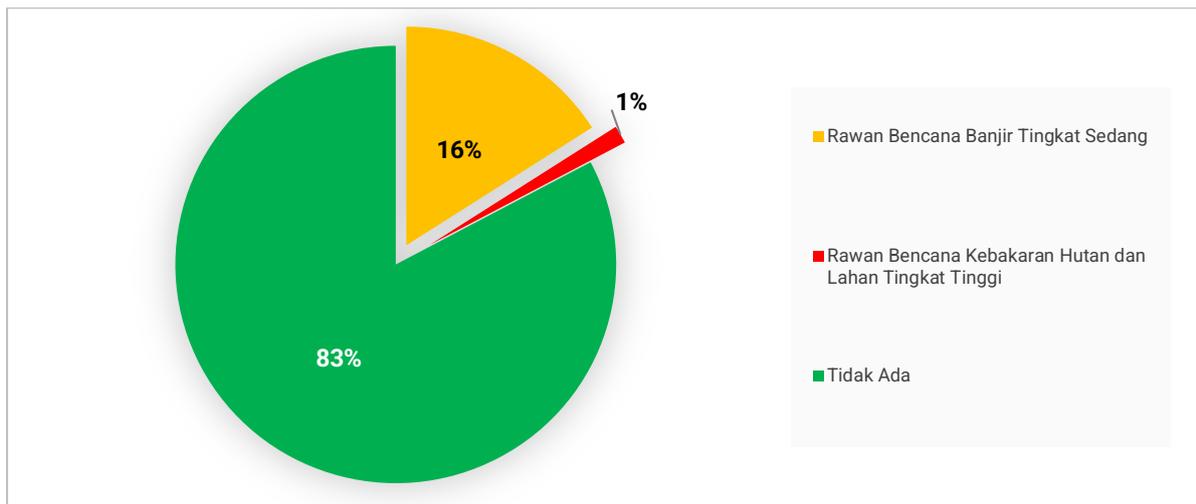
Peristiwa bencana alam disebabkan oleh proses geologis, geomorfologis, klimatologis, serta dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah seperti topografi, jenis tanah,

dan penggunaan lahan. Penilaian tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Tebo disajikan pada visual peta di bawah ini.



Gambar 2. 15 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Alam Kabupaten Tebo

Sumber: RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2043



Gambar 2. 16 Proporsi Wilayah Terhadap Kerawanan Bencana Alam di Kabupaten Tebo

Sumber: RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2043

Tingkat kerawanan bencana yang dipetakan menunjukkan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan bencana yang diwaspadai oleh Kabupaten Tebo karena frekuensi kejadiannya cukup tinggi dibandingkan bahaya bencana lainnya. Distribusi spasial kerawanan bencana banjir berasosiasi dengan jalur aliran sungai utama, seperti Sungai Batanghari dan Sungai Batang Tebo. Disamping itu, wilayah rawan banjir berada pada topografi dataran rendah pada kemiringan lereng kurang dari 8 derajat. Selain faktor geomorfologis, faktor klimatologis berupa curah hujan rata-rata 3000 mm/tahun juga berpengaruh kuat terhadap frekuensi kejadian banjir di Kabupaten Tebo. Histori kejadian banjir di Kabupaten Tebo menunjukkan sejumlah 80 desa mengalami kejadian banjir di tahun 2021 dan 46 desa di tahun 2020. Luapan aliran sungai umumnya disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi di Kabupaten Tebo, sebagaimana kejadian banjir tahun 2023 yang melanda 9 kecamatan di Kabupaten Tebo saat musim hujan. Kejadian banjir berketinggian 50-centimeter sampai 4 meter mengakibatkan 11.631 KK terdampak.

Kejadian karhutla di Kabupaten Tebo tergolong rawan dengan potensi kerawanan tinggi berada wilayah perbukitan dengan tutupan utama hutan. Kejadian karhutla pada tahun 2023 menghanguskan 1.0951 hektar lahan dan terdeteksi 550 titik api (*hot spot*), namun luasan Karhutla menurun drastis menjadi 189, 19 hektar pada tahun 2024. Karhutla yang melanda Kabupaten Tebo disebabkan oleh budaya membuka lahan dengan cara membakar. Titik api umumnya mudah muncul pada saat musim kering atau kemarau, Kabupaten Tebo mudah mengalami kekeringan karena terdampak kondisi iklim lokal maupun pengaruh *El-Nino* dan fenomena *Indian Ocean Dipole Positive*.

Tabel 2. 13 Indikasi Luasan Kebakaran di Provinsi Jambi tahun 2018-2024

Kabupaten Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Batang Hari	86	5745	50	113	54	3282	397,25	9.727,25
Bungo	0	277	4	0	43	27,08	123,9	474,98
Kota Jambi	0	0	0	0	0	0	0	-
Kerinci	0	0	134	0	1	51,31	2,46	188,77
Merangin	29	340	278	1	68	149,13	249,25	1.114,38

Kabupaten Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Muaro Jambi	868	20.891	17	22	114	15,68	1.907,32	23.835,00
Sarolangun	116	5.583	169	264	399	1.324,78	1.224,68	9.080,46
Sungai Penuh	0	0	0	0	0	91,15	8,67	99,82
Tanjung Jabung Barat	250	3.237	134	20	4	446,03	245,05	4.336,08
Tanjung Jabung Timur	95	14.129	114	16	5	60,09	1.288,91	15.708,00
Tebo	134	6.390	102	104	231	1.091,51	189,19	8.052,51
Total	1.578	56.592	1.002	540	919	6.539,69	5.636,68	72.807,37

Sumber: sipongi.menlhk.go.id (Diakses pada 31 Juli 2025)

B. Risiko Bencana Sosial

Bencana sosial ditimbulkan oleh interaksi masyarakat yang mengarah pada kekerasan seperti konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Konflik sosial di Kabupaten Tebo yang sering terjadi adalah permasalahan konflik lahan antar masyarakat atau antara masyarakat dengan perusahaan. Salah satu konflik lahan yang telah berlangsung lama yaitu konflik lahan antara Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti yang berlangsung sejak 2007. Penyebabnya adalah lahan pertanian seluas 1.500 hektar di Desa Lubuk Mandarsah masuk ke dalam konsesi perusahaan. Selain itu, di tahun 2022 terdapat dua konflik di Kabupaten Tebo yaitu antara masyarakat di enam desa pada Kecamatan VII Koto dan terdapat 3 desa pada VII Koto Ilir mengalami konflik lahan dengan PT Tebo Multi Agro (TMA) dan PT Tebo Utama Cipta (THC). Dalam menanganinya, Pemerintah Kabupaten Tebo menghadirkan upaya mediasi untuk penyelesaian konflik tersebut, diantaranya dengan menyepakati *corporate social responsibility* (CSR) akan dikelola melalui Forum CSR kabupaten.

Potensi konflik sosial di Kabupaten Tebo salah satunya disebabkan oleh masyarakat belum mengetahui batas konsesi lahan perusahaan. Upaya untuk mencegah konflik, salah satunya aktif mensosialisasikan kepada masyarakat terkait batas dan luas kawasan konsesi perusahaan. Disamping itu, pemerintah juga harus

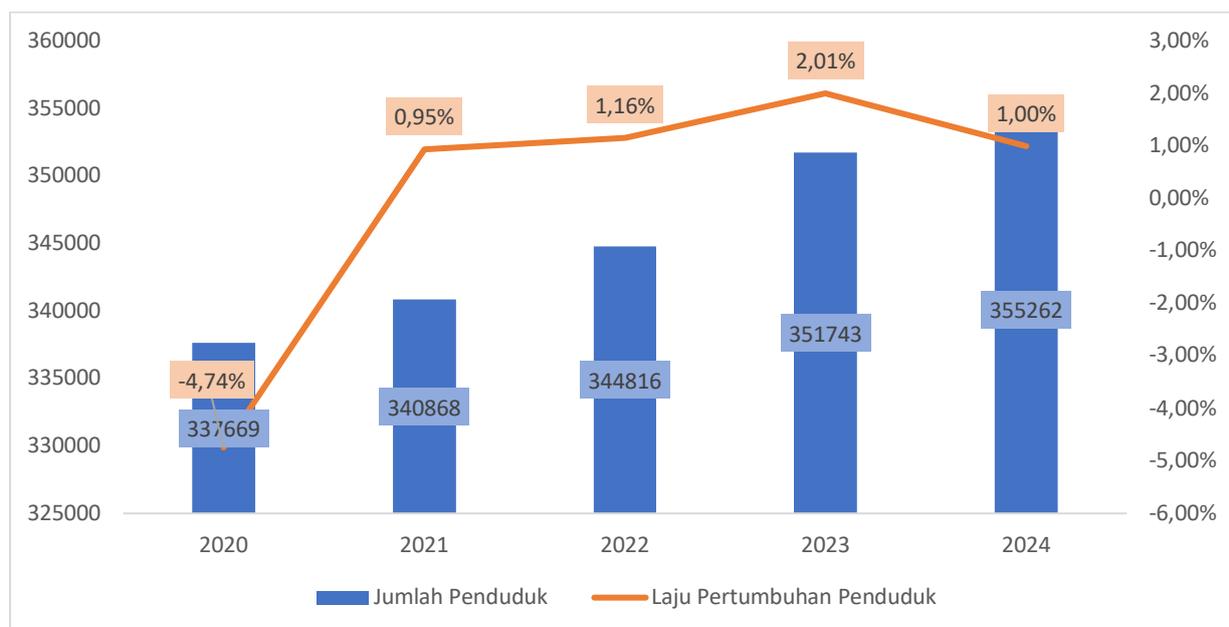
mengakomodir masukan dan saran masyarakat dalam menetapkan lahan konsesi baru demi menghindari potensi konflik kedepan.

2.1.7. Demografi

Demografi di Kabupaten Tebo bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk masuk maupun keluar daerah. Data kependudukan mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduk. Informasi demografi yang tersedia akan menjadi dasar dalam perencanaan proyeksi kependudukan untuk lima tahun ke depan di Kabupaten Tebo.

2.1.7.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Perubahan jumlah penduduk di Kabupaten Tebo bersifat dinamis karena dipengaruhi kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari Kabupaten Tebo. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo mencatat bahwa terdapat penduduk sebanyak 355.262 jiwa yang pada tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari 182.040 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, dan 173.222 penduduk berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan terutama semenjak tahun 2020 yang juga ditandai dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Berikut merupakan data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tebo pada tahun 2020-2024.



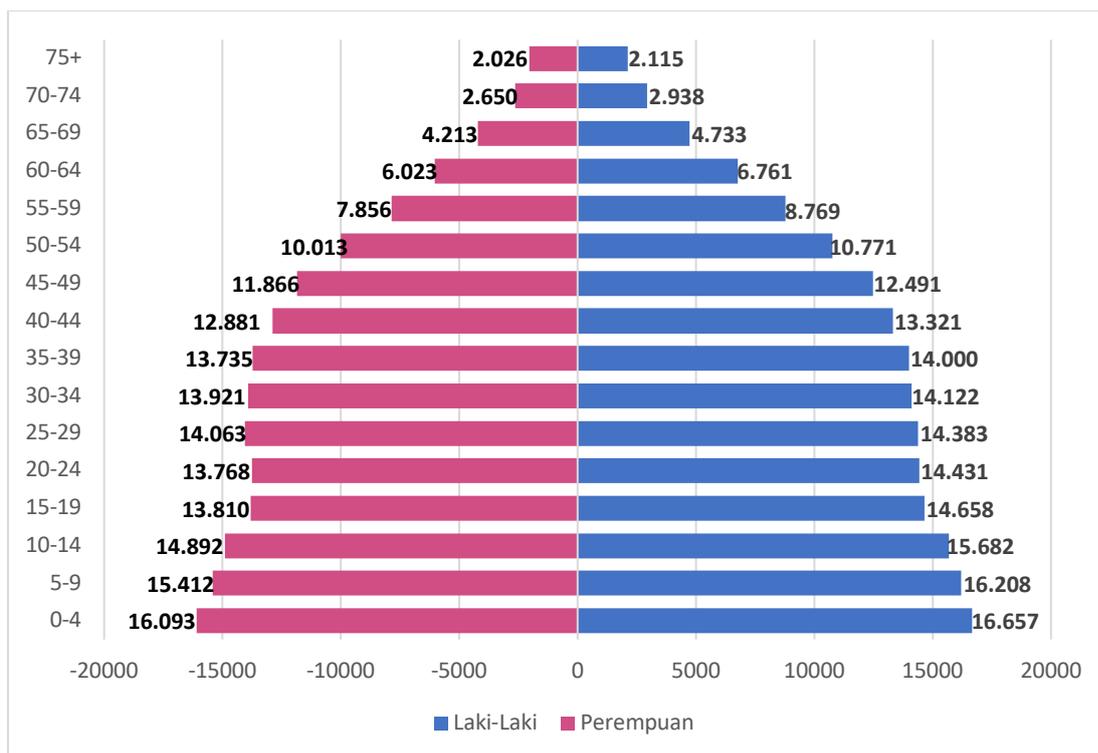
Gambar 2. 17 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo dalam Angka, 2021-2025

Data kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya fluktuasi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tebo pada tahun 2020 hingga 2024. Penurunan laju pertumbuhan penduduk tampak pada tahun 2020 yakni akibat pembaharuan data kependudukan melalui sensus penduduk per sepuluh tahun. Hal tersebut dikarenakan data yang digunakan pada tahun 2019 merupakan data hasil proyeksi dengan data dasar sensus penduduk 2010. Penurunan data jumlah penduduk di Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara riil lebih kecil dibandingkan yang diprediksikan pada tahun 2010. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berkontribusi akan penurunan jumlah penduduk di Kabupaten Tebo akibat peningkatan angka mortalitas di masyarakat. Meskipun begitu, data pada tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan kembali terkait jumlah penduduk di Kabupaten Tebo. Fluktuasi laju pertumbuhan tidak selalu berimplikasi terhadap jumlah penduduk secara langsung. Dengan kata lain, jumlah penduduk pada tahun 2024 dapat terus meningkat meskipun laju pertumbuhannya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.

2.1.7.2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk memiliki pengertian sebagai pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Pengelompokan dapat berdasar pada kondisi geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Komposisi penduduk di suatu wilayah dapat dilihat melalui kelompok usia dan jenis kelamin dan mengindikasikan beberapa hal, seperti jumlah tenaga kerja produktif dan non produktif, bonus demografi, dan angka ketergantungan. Hal-hal tersebut harus diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah. Komposisi penduduk di Kabupaten Tebo berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2024 dapat dilihat gambar di bawah ini.



Gambar 2. 18 Bentuk Piramida Penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2024

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo dalam Angka, 2025

Komposisi penduduk di Kabupaten Tebo yang memiliki bentuk piramida dengan kategori stasioner menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tebo relatif stabil pada tahun 2024. Piramida juga menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Tebo didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni yang berkisar usia 15-64 tahun. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari kelompok usia produktif sebesar di Kabupaten Tebo sebesar 68,02 persen dan non produktif sebanyak 31,92 persen. Kelompok usia produktif tersusun atas 51,19 persen penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 48,80 persen lainnya adalah perempuan. Penduduk usia non produktif di Kabupaten Tebo didominasi oleh kelompok usia 0-14 tahun yang mencapai 26,72 persen, sedangkan kelompok usia non produktif lansia hanya 5,25 persen. Piramida penduduk yang demikian menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo sedang dalam fase bonus demografi atau kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang kelompok non-produktif. Bonus demografi mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kabupaten Tebo, namun bonus demografi juga perlu dikelola dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kabupaten Tebo kedepannya.

2.1.7.3. Rasio Penduduk

Rasio penduduk di Kabupaten Tebo dapat dilihat melalui perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Perbandingan jumlah penduduk dapat dilihat melalui data *sex ratio* yang menampilkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. *Sex Ratio* dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kabupaten Tebo berdasarkan *Sex Ratio* dengan data awal tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 14 Rasio penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2020	173.708	163.961	337.669	105,94
2021	175.208	165.660	340.868	105,76
2022	177.090	167.726	344.816	105,58
2023	179.918	170.843	350.761	105,31
2024	182.040	173.222	355.262	105,09

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo dalam Angka, 2021-2025

Angka *sex ratio* di Kabupaten Tebo secara kontinyu mengalami penurunan pada rentang tahun 2020 hingga 2024. Penurunan angka *sex ratio* tertinggi terjadi pada tahun 2023, yakni selisih 0,27 poin dibandingkan data *sex ratio* pada tahun sebelumnya. Semakin rendah angka *sex ratio* di suatu wilayah, maka semakin sedikit pula jumlah laki-laki pada wilayah tersebut. Penurunan angka *sex ratio* yang semakin mendekati angka 100 mengindikasikan adanya keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tebo. *Sex ratio* yang menunjukkan angka 105,09 berarti mengindikasikan bahwa per 100 perempuan, terdapat 105 hingga 106 laki-laki. Penurunan angka *sex ratio* yang cukup tinggi memiliki tiga makna, yakni terdapat banyaknya kelahiran bayi perempuan yang ada di Kabupaten Tebo, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, dan adanya penurunan jumlah laki-laki di wilayah tersebut. Penurunan jumlah penduduk laki-laki bisa diakibatkan oleh peningkatan angka mortalitas maupun peningkatan migrasi keluar wilayah.

2.1.7.4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk menghitung jumlah individu pada suatu populasi dibagi dengan satuan luas atau ruang yang ditempati pada periode tertentu. Hasil dari perhitungan indikator tersebut adalah gambaran bentuk penyebaran dan merata tidaknya penduduk di suatu wilayah. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Tebo pada rentang tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 15 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Tebo Ilir	708,7	28314	39,95	28525	40,25	28796	40,63	23361	32,963	29717	41,932
2	Muara Tabir	509,3	17128	33,63	17237	33,84	17381	34,13	17,606	0,035	17768	34,887
3	Tebo Tengah	983,56	40161	40,83	40609	41,29	41145	41,83	42039	42,742	42682	43,395
4	Sumay	1268	21398	16,88	21773	17,17	22200	17,51	22659	17,870	23095	18,214
5	Tengah Ilir	221,44	25968	117,27	26658	120,38	27422	123,83	28347	128,012	29186	131,801
6	Rimbo Bujang	406,92	63320	155,61	63492	156,03	63793	156,77	64363	158,171	64750	159,122
7	Rimbo Ulu	295,74	37586	127,09	37759	127,68	38009	128,52	38453	130,023	38745	131,010
8	Rimbo Ilir	214,34	23408	109,21	23528	109,77	23697	110,56	24029	112,107	24238	113,082
9	Tebo Ulu	410,3	33011	80,46	33087	80,64	33230	80,99	33524	81,706	33695	82,123
10	VII Koto	658,79	19958	30,29	20093	30,50	20270	30,77	20619	31,298	20843	31,638
11	Serai Serumpun	315,7	9551	30,25	9738	30,85	9948	31,51	10218	32,366	10449	33,098
12	VII Koto Ilir	468,21	17866	38,16	18369	39,23	18925	40,42	19513	41,676	20094	42,917
Kabupaten Tebo		6461	337669	52,26	340868	52,76	344816	53,37	350761	54,289	355262	54,986

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo dalam Angka, 2021-2025

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tebo mengalami tren fluktuasi pada tahun 2020 hingga 2024. Penurunan kepadatan penduduk pada level kabupaten terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak dari adanya penyesuaian data kependudukan berdasarkan sensus penduduk 2020 dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan angka mortalitas. Meskipun begitu, ada beberapa kecamatan yang tetap mengalami peningkatan kepadatan penduduk, seperti di Kecamatan Tebo Ilir, Sumay, dan VII Koto Ilir. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Rimbo Bujang dengan angka 155,61 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 159,12 pada tahun 2024. Tingkat kepadatan terendah terdapat pada Kecamatan Sumay yang hanya ditempati oleh 16 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2020 dan hanya meningkat menjadi 18 hingga 19 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan sebagian wilayah Kecamatan Sumay termasuk dalam kawasan ekosistem esensial, yakni kawasan dengan ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, sehingga tidak bisa dijadikan permukiman secara luas.

2.1.7.5. Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk pada kelompok atau komunitas yang tumbuh tak terpisahkan dan memiliki hubungan organik dengan lingkungannya. Masyarakat adat cenderung memiliki ikatan yang kuat antar anggota kelompoknya dan bersifat sukarela. Umumnya setiap anggota masyarakat adat memiliki hukum adat yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang terjadi pada lingkungan adat terkait. Masyarakat adat di Kabupaten Tebo dinaungi oleh Lembaga Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung yang diresmikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2021. Setidaknya terdapat dua kelompok masyarakat adat yang diberikan Surat Keputusan (SK) pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Tebo, yakni Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, dan Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir. Kedua kelompok tersebut berada di naungan masyarakat hukum adat yang sama, yakni Suku Anak Dalam atau bisa disebut pula Orang Rimba. Keberadaan masyarakat adat salah satunya berperan untuk

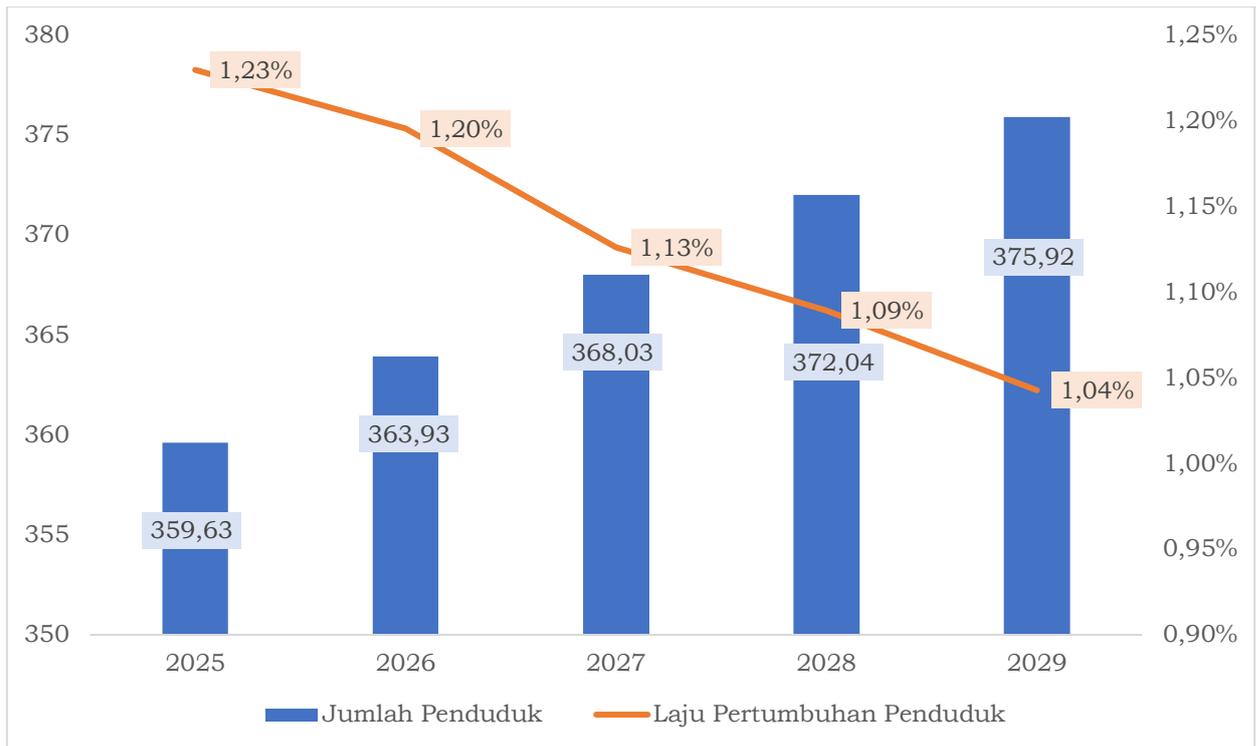
turut serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya daerah maupun nasional

2.1.7.6. Proyeksi demografi

Proyeksi demografi berfokus untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan pengelompokannya, seperti data penduduk berdasarkan jumlah, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Tebo. Data tersebut dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui kondisi penduduk lanjut usia, penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, dan bonus demografi. Berikut merupakan hasil proyeksi kependudukan di Kabupaten Tebo selama rentang tahun 2025 hingga 2029.

a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Salah satu aspek yang penting untuk dianalisis adalah jumlah, laju pertumbuhan penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk. Masing-masing dari indikator tersebut memberikan gambaran kondisi kependudukan yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lain. Berikut merupakan hasil proyeksi demografi Kabupaten Tebo pada tahun 2025 hingga 2029.



Gambar 2. 19 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk namun mengalami penurunan dari segi laju pertumbuhan penduduk pada periode 2025 hingga 2029. Jumlah penduduk di Kabupaten Tebo diproyeksikan bertambah sebanyak 16,29 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dengan rata-rata 1,14 persen pada tahun 2025-2029. Hasil proyeksi yang demikian tetap mempertimbangkan *Total Fertility Rate* (TFR) yang berada pada angka 2,45. TFR mengindikasikan bahwa pada tahun 2025 hingga 2029, populasi di Kabupaten Tebo akan cenderung bertumbuh. Hal itu dikarenakan TFR menunjukkan jumlah anak secara rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada masa reproduksinya. Angka TFR 2,45 merujuk rata-rata seorang perempuan di Kabupaten Tebo melahirkan dua orang anak yang diharapkan mampu meneruskan keturunan sehingga menjaga laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tebo.

Aspek demografi yang juga menjadi pokok pertimbangan kebijakan adalah tingkat kepadatan penduduk. Kabupaten Tebo memiliki peluang sekaligus

tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan harus didasarkan pada kondisi kependudukan dalam hal ini tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Berikut merupakan hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Tebo pada tahun 2025-2029.

Tabel 2. 16 Proyeksi Tingkat Kepadatan per Kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun 2020 (Ribu jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Tebo Ilir	708,7	28,42	30,424	31,04	31,64	32,23	32,80
2	Muara Tabir	509,3	17,06	17,553	17,65	17,73	17,81	17,88
3	Tebo Tengah	983,56	40,04	43,055	43,46	43,84	44,21	44,56
4	Sumay	1268	21,30	24,373	25,17	25,96	26,73	27,49
5	Tengah Ilir	221,44	25,99	26,963	27,14	27,29	27,44	27,58
6	Rimbo Bujang	406,92	63,74	68,475	69,14	69,79	70,43	71,03
7	Rimbo Ulu	295,74	37,07	39,104	39,40	39,69	39,97	40,23
8	Rimbo Ilir	214,34	23,90	26,384	26,58	26,76	26,94	27,10
9	Tebo Ulu	410,3	33,12	33,318	33,49	33,66	33,82	33,96
10	VII Koto	658,79	20,08	20,377	20,54	20,70	20,86	21,01
11	Serai Serumpun	315,7	9,54	10,336	10,41	10,49	10,56	10,62
12	VII Koto Ilir	468,21	16,37	19,282	19,88	20,47	21,06	21,63
KABUPATEN TEBO		6.461	336,64	359,64	363,90	368,02	372,02	375,88

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Tebo terpusat di wilayah perkotaan. Pola kepadatan penduduk dari hasil proyeksi di atas sejalan dengan pola kepadatan penduduk eksisting saat ini. Dari 12 kecamatan, terdapat 3 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi secara berurutan, yaitu Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Tebo Tengah, dan Kecamatan Rimbo Ulu. Tingginya kepadatan penduduk di tiga kecamatan tersebut disebabkan oleh alasan yang berbeda, yakni Kecamatan Rimbo Bujang sebagai pusat perekonomian, Kecamatan Tebo Tengah sebagai pusat

pemerintahan, dan Kecamatan Rimbo Ulu yang memiliki luas wilayah terkecil ketiga di Kabupaten Tebo. Sementara Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah merupakan kecamatan-kecamatan yang wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan, seperti Kecamatan Serai Serumpun.

Dalam konteks perkotaan, penambahan penduduk akan selalu meningkat karena perkotaan selalu memiliki daya tarik bagi masyarakat terutama seperti Kabupaten Tebo. Kota menyediakan berbagai fasilitas layanan dasar yang memadai dan berkualitas sehingga membuat sebuah kota selalu diminati masyarakat untuk ditempati. Di satu sisi, daya tarik kota menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah karena adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun di sisi lain menimbulkan tantangan bahkan permasalahan khas perkotaan, seperti wilayah kumuh, kriminalitas, perilaku agresif dan sejenis. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan sehingga permasalahan khas perkotaan dapat diminimalisir di Kabupaten Tebo.

b. Penduduk Usia Produktif

Proyeksi penduduk berdasarkan umur krusial untuk dilakukan karena dapat memberikan banyak informasi, seperti bonus demografi, tingkat ketergantungan penduduk, dan sebagainya. Bonus demografi secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi pertambahan penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun atau dikategorikan pula sebagai penduduk yang berada pada usia kerja. Persentase penduduk usia produktif yang tinggi menuntut pemerintah untuk menyediakan kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi dari penduduk usia produktif. Potensi yang dimiliki oleh penduduk kelompok usia produktif mampu mendatangkan kesejahteraan bagi wilayah terkait, namun apabila tidak dikelola dengan baik juga dapat menjadi potensi permasalahan yang tidak kalah luar biasa. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk usia produktif pada rentang tahun 2025 hingga 2029 di Kabupaten Tebo.

Tabel 2. 17 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Komposisi Umur di Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

Komposisi umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-14	95,42	95,72	95,89	95,91	95,87
15-64	244,26	246,89	249,41	251,92	254,34
65+	19,95	21,32	22,73	24,21	25,71
Angka ketergantungan	47,23%	47,41%	47,56%	47,68%	47,80%

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi penduduk usia produktif yang berada pada usia 15-64 tahun menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk usia kerja diproyeksikan bertambah sebanyak 10,08 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,03 persen. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk usia non produktif pada rentang usia 10-14 tahun pada tahun 2020-2025. Kelompok penduduk usia tersebut memasuki usia produktif dan ikut menyumbang proporsi dan jumlah penduduk usia produktif sebelumnya.

Implikasi dari semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif yakni semakin banyak pula penduduk usia kerja yang ada di Kabupaten Tebo. Banyaknya penduduk usia produktif yang diproyeksikan mencapai 67,66 persen pada tahun 2029 dari total keseluruhan jumlah penduduk dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut dapat diperoleh apabila jumlah penduduk usia produktif yang tersedia juga memiliki kualitas yang baik dan mampu mengoptimalkan kesempatan yang ada. Apabila kuantitas tidak sejalan dengan kualitas, maka dapat berpotensi menghadirkan permasalahan kependudukan dan turunannya di masa yang akan datang di Kabupaten Tebo.

c. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan didefinisikan sebagai suatu indikator yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia kerja dengan penduduk usia tidak bekerja di suatu wilayah. Angka ketergantungan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas,

kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Angka ketergantungan Kabupaten Tebo menunjukkan tren peningkatan setiap periode. Pada tahun 2025 ketergantungan, yaitu sebesar 47,23 persen dan meningkat menjadi 47,80 persen pada tahun 2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 47 hingga 48 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif pada tahun 2025 hingga 2029. Dari segi jumlah, tanggungan penduduk usia produktif pada tahun 2029 tidak bertambah atau maksimal bertambah satu penduduk non produktif per 100 penduduk usia produktif apabila dibandingkan dengan tahun 2025. Namun kondisi tersebut juga perlahan memberikan pengaruh terhadap produktivitas penduduk usia produktif di Kabupaten Tebo. Implikasi dari beban tanggungan yang terus bertambah adalah adanya potensi perlambatan kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif.

Meningkatnya angka ketergantungan di Kabupaten Tebo disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif, yakni selisih 0,19 persen. Hasil proyeksi terhadap penduduk umur 0-14 tahun mengalami penambahan mulai tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 95,42 ribu jiwa, mengalami peningkatan menjadi 95,87 ribu jiwa pada tahun 2029. Hal itu dipengaruhi dengan laju pertumbuhannya yang cenderung lambat dan terus mengalami penurunan hingga mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 0,20 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang diproyeksikan menurun yang berpengaruh terhadap penduduk umur 0-14 tahun. Selain itu, laju pertumbuhan dari kelompok usia non produktif 65 tahun ke atas juga menunjukkan tren penurunan di setiap periode dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,60 persen. Secara absolut penduduk usia 65 tahun ke atas

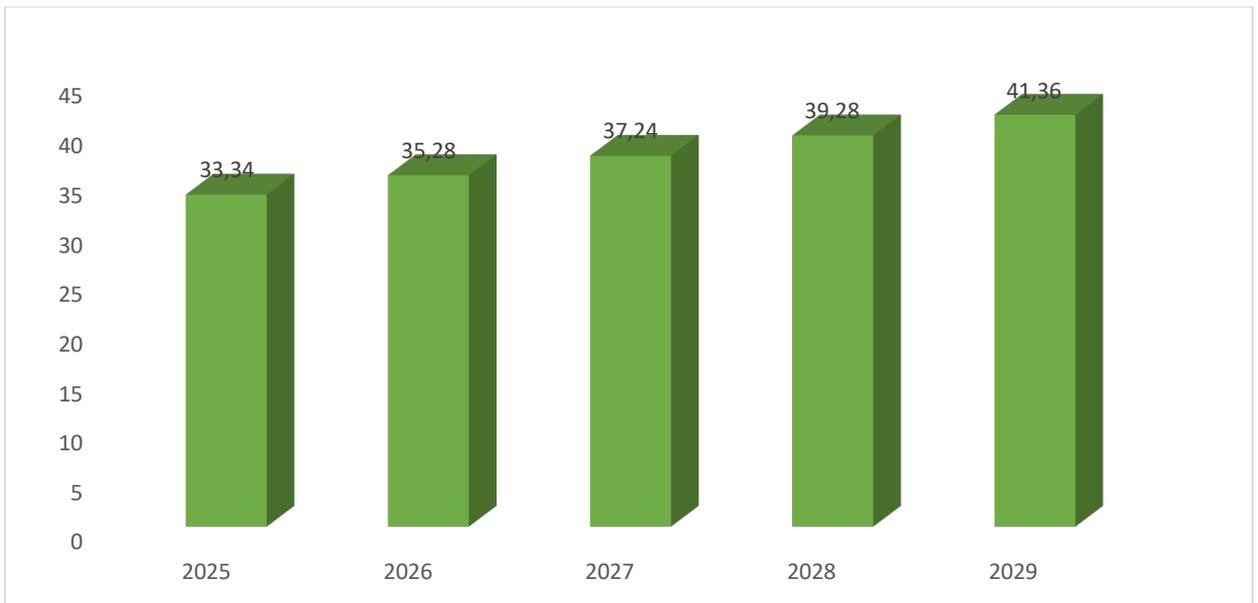
diproyeksikan mengalami peningkatan selama periode 2025 hingga 2029, yakni sebanyak 5,76 ribu jiwa. Pertambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Kabupaten Tebo ke depannya semakin baik. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan kelompok usia tersebut.

d. Bonus Demografi

Rasio ketergantungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo tidak memiliki atau belum mendapatkan peluang bonus demografi, termasuk ketika tahun 2025 hingga tahun 2029. Hal itu tampak dari rasio ketergantungan yang lebih tinggi dari 45 persen. Kabupaten Tebo tidak memiliki atau belum mendapatkan bonus demografi karena proporsi penduduk usia produktif semakin berkurang dibandingkan keseluruhan jumlah penduduk, sementara penduduk usia non produktif semakin meningkat. Perubahan proporsi antara penduduk usia produktif dan non produktif dapat dilihat melalui bentuk piramida yang semakin menyempit di bagian tengah. Kondisi ini membuat beban tanggungan terhadap penduduk tidak produktif semakin tinggi yang kemudian memengaruhi perekonomian daerah karena dapat menurunkan produktivitas.

e. Penduduk Usia Lanjut

Perubahan komposisi penduduk Kabupaten Tebo di atas berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya penurunan fertilitas dan peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Pada tahun 2020, jumlah lansia sebanyak 24,50 ribu jiwa dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2025 hingga 2029. Berikut merupakan data hasil proyeksi penduduk usia lanjut di Kabupaten Tebo pada tahun 2025-2029.



Gambar 2. 20 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut di Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Penduduk usia lanjut di Kabupaten Tebo diproyeksikan mengalami penambahan sebesar 8,02 ribu jiwa pada tahun 2025 hingga 2029. Hasil proyeksi yang menunjukkan peningkatan tersebut disertai dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 5,62 persen. Meskipun tampak mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhan penduduk usia lanjut diproyeksikan menurun sebesar 0,68 persen pada tahun 2025-2029. Bertambahnya penduduk lansia tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Tebo karena di satu sisi Pemerintah Kota harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kondisi lansia. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih mandiri.

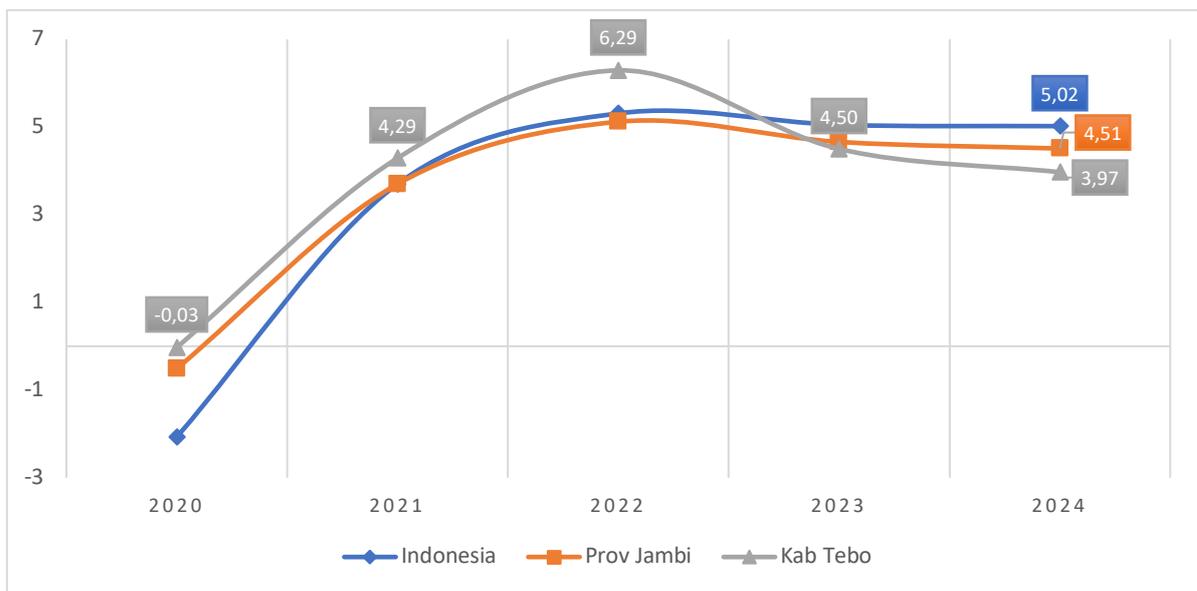
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah sangat bergantung pada kondisi perekonomian di daerah tersebut. Perekonomian daerah yang terus tumbuh positif mengindikasikan aktivitas ekonomi di daerah tersebut berjalan

dengan baik. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas penduduk dalam menghasilkan nilai tambah dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun ke- t terhadap tahun sebelumnya ($t-1$). Laju pertumbuhan yang semakin tinggi mengindikasikan penambahan nilai yang dihasilkan oleh masyarakat dalam perekonomian di daerah tersebut mengalami kenaikan yang lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya.



Gambar 2. 21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BPS, 2025

Pada periode 2020-2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif dengan rata-rata sebesar 3,80 persen per tahun. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Indonesia masing-masing sebesar 3,50 persen dan 3,40 persen per tahun pada periode yang sama. Namun demikian, perekonomian Kabupaten Tebo sedikit mengalami perlambatan pada tahun 2024 yakni 0,54 persen poin lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan 1,05 persen poin lebih rendah dibandingkan nasional.

Perekonomian Kabupaten Tebo yang tumbuh positif mendorong PDRB ADHK Kabupaten Tebo mencapai nilai 12,23 triliun rupiah pada tahun 2024. Perekonomian Kabupaten Tebo digerakkan oleh seluruh lapangan usaha dengan

kontributor terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diikuti sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2024, kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang hingga 56,73 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo. Tingginya kontribusi tersebut didorong oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menguat hingga 6,70 persen. Pada periode 2020-2024 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan mencapai 3,95 persen per tahun.

Tabel 2. 14 PDRB ADHK Kabupaten Tebo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.315,23	5.505,20	5.646,90	5.901,50	6.296,71	3,95
B	Pertambangan dan Penggalian	861,27	936,30	1.325,30	1.324,40	1.062,96	4,58
C	Industri Pengolahan	638,09	662,10	675,70	715,40	777,43	3,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,62	7,00	7,50	8,40	9,41	8,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,44	4,80	4,80	5,10	5,61	5,19
F	Konstruksi	709,59	746,90	747,00	785,30	832,10	1,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	833,59	881,90	928,40	1.014,50	1.111,80	5,47
H	Transportasi dan Pergudangan	145,77	157,60	171,00	183,50	199,87	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37,39	39,40	42,40	46,00	49,10	4,33
J	Informasi dan Komunikasi	426,41	443,90	478,20	513,80	538,07	6,56
K	Jasa Keuangan	132,46	137,50	138,10	139,40	141,63	1,89

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
L	Real Estate	191,78	193,90	204,00	210,30	214,44	2,40
M,N	Jasa Perusahaan	5,50	5,70	6,20	7,10	7,79	6,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	320,92	325,40	327,30	335,60	361,41	1,91
P	Jasa Pendidikan	236,69	242,80	245,70	254,20	279,43	4,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	105,30	115,10	114,50	119,90	128,56	5,58
R,S,T, U	Jasa Lainnya	187,18	188,50	197,70	202,80	218,14	2,48
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		10.158,23	10.594,00	11.260,60	11.767,30	12.234,47	3,80

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

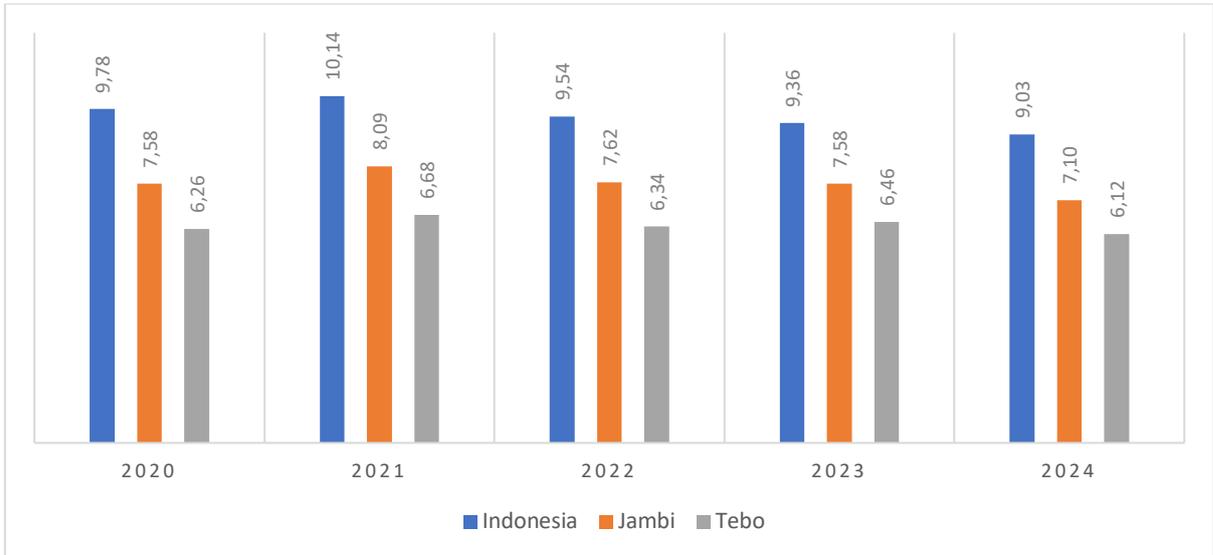
Kinerja positif sektor pertanian juga menjaga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo tidak terkontraksi begitu dalam pada saat pandemi Covid-19, di saat lapangan usaha lainnya terkontraksi cukup dalam. Tingginya nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian didorong oleh produksi komoditas unggulan Kabupaten Tebo yaitu kelapa sawit dan karet. Produksi kelapa sawit dan karet di Kabupaten Tebo tercatat mencapai 119.264 ton dan 50.099 ton pada tahun 2024.

Lapangan usaha lain yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo adalah sektor pertambangan dan penggalian. Komoditas batu bara menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Kinerja sektor pertambangan dan penggalian mulai menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 8,71 persen lalu semakin naik mencapai 41,55 persen pada tahun 2022, mendorong PDRB sektor pertambangan dan penggalian mencapai 1,33 triliun rupiah. Namun demikian, pada tahun 2023 kinerja pertambangan terkontraksi sebesar 0,07 persen dan semakin dalam ke angka 19,74 persen pada 2024 sehingga menurunkan PDRB daerah sebesar 261,44 miliar rupiah pada 2024.

Turunnya kinerja sektor pertambangan pada tahun 2024 berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo. Namun demikian, kinerja lapangan usaha lain yang terus meningkat dan pesat tetap mampu mendorong perekonomian Kabupaten Tebo tumbuh positif meskipun cukup melambat dibanding tahun 2022. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo didorong oleh kinerja sektor pertanian yang tumbuh 6,70 persen, diikuti oleh sektor perdagangan dengan pertumbuhan sebesar 9,59 persen, dan sektor industri pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 8,67 persen. Kinerja ketiga sektor tersebut menjaga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo tetap positif di tengah penurunan kinerja sektor pertambangan yang cukup dalam.

2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

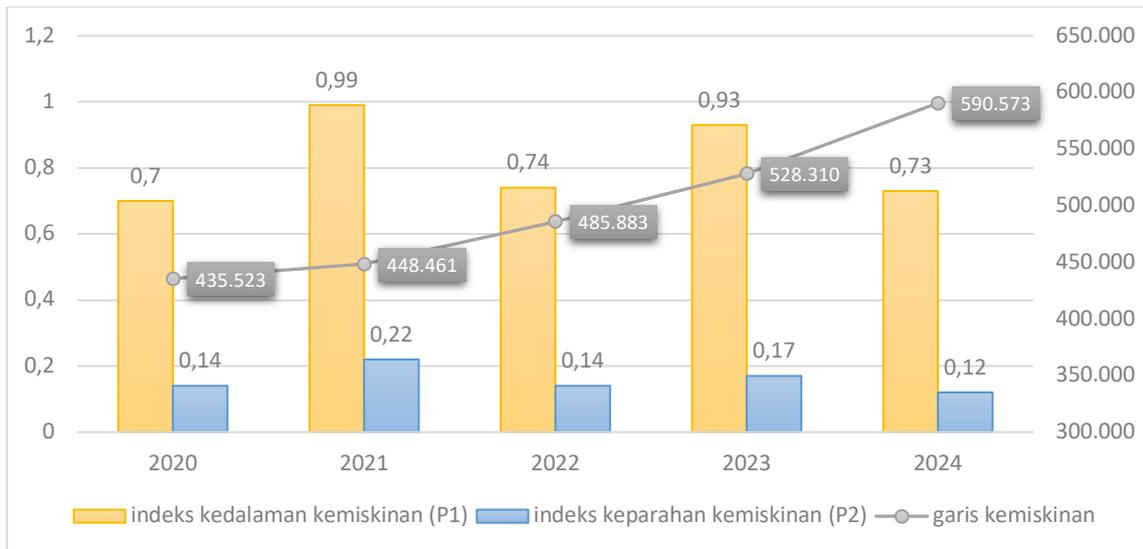
Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk. Persentase penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total penduduk. Pendekatan perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan *basic need approach* atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi mengindikasikan semakin besar pula proporsi penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar. Berikut adalah kondisi kemiskinan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia.



Gambar 2. 22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan nasional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tebo sebesar 6,37 persen per tahun, sedangkan Provinsi Jambi sebesar 7,59 persen per tahun dan Indonesia sebesar 9,57 persen per tahun. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, maupun Indonesia menunjukkan tren yang semakin menurun. Namun, penurunan kemiskinan di Tebo masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi yang turun 1,48 persen per tahun dan nasional yang turun 1,91 persen per tahun selama periode 2020-2024. Kemiskinan di Kabupaten Tebo turun 0,44 persen per tahun dengan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu hingga 5,26 persen.



Gambar 2. 23 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

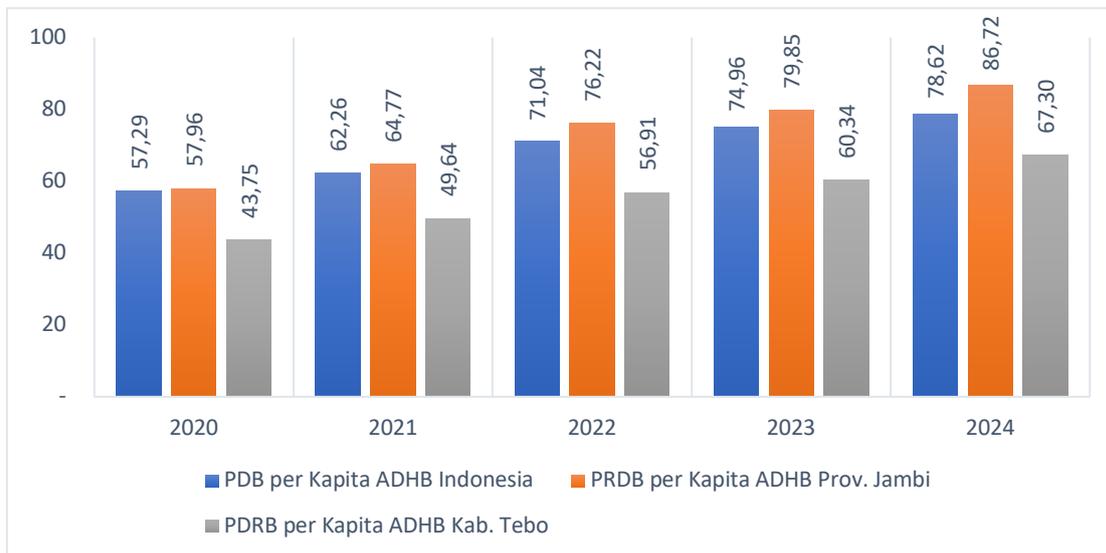
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tebo tidak hanya dilihat dari persentase penduduk miskin. Indikator lain seperti indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk melihat kondisi kemiskinan yang lebih utuh. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan kesenjangan pengeluaran antar masyarakat miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tebo menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dengan tren yang cenderung naik begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat miskin di Kabupaten Tebo dalam memenuhi kebutuhan dasarnya semakin sulit dan kesenjangan di antara penduduk miskin juga semakin besar. Garis kemiskinan yang terus mengalami kenaikan sampai 7,96 persen per tahun menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya keluar dari jurang kemiskinan. Peningkatan pendapatan dan stabilitas harga perlu untuk terus diupayakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tebo.

2.2.1.3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menggambarkan besaran PDRB per satu orang penduduk. Indikator ini sering kali digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan karena dapat mencerminkan pendapatan setiap penduduk secara kasar. Perhitung PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB terhadap total penduduk di daerah. PDRB per kapita yang semakin tinggi mengindikasikan produktivitas ekonomi yang tinggi sehingga imbal jasa yang diterima oleh penduduk atas faktor produksi yang dimiliki semakin tinggi. Berikut adalah gambaran PDRB per kapita Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan PDB Indonesia.



Gambar 2. 24 PDRB per Kapita Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan PDB Indonesia Tahun 2020-2024

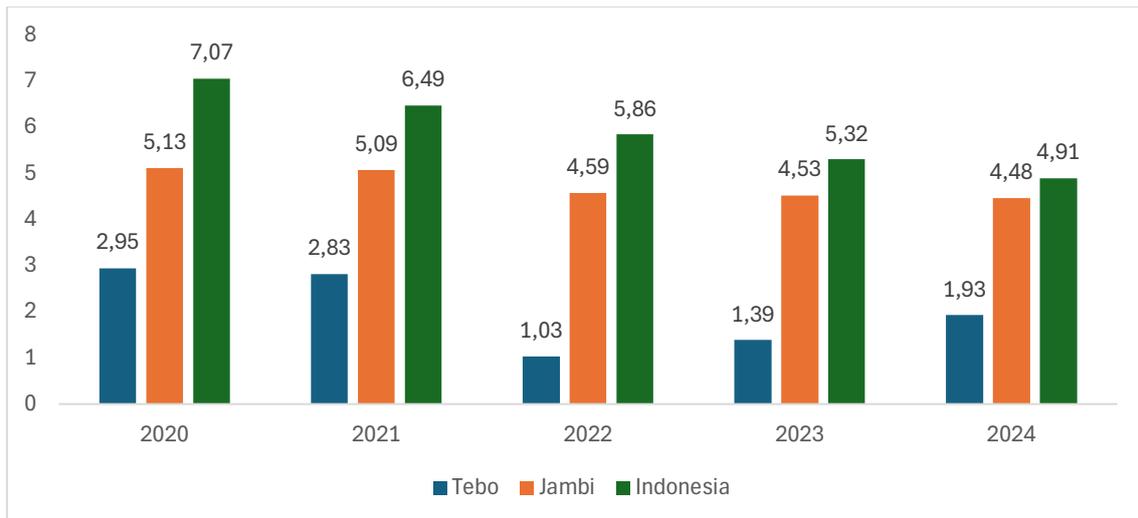
Sumber: BPS, 2024

PDRB nominal per kapita Kabupaten Tebo secara umum lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan Indonesia. PDRB per kapita Kabupaten Tebo rata-rata mencapai 55,58 juta rupiah, sedangkan PDRB per kapita Provinsi Jambi sebesar 73,10 juta rupiah, dan PDB per kapita Indonesia sebesar 68,84 juta rupiah pada periode 2020-2024. Rendahnya PDRB per kapita Kabupaten Tebo disebabkan oleh rendahnya nilai tambah yang dihasilkan di daerah yang didominasi oleh sektor pertanian. Daerah yang struktur perekonomiannya masih didominasi oleh sektor primer cenderung memiliki nilai tambah yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya nilai PDRB per kapita.

PDRB per kapita Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh total PDRB daerah dan jumlah penduduk. Kenaikan PDRB per kapita Kabupaten Tebo mengikuti kondisi perekonomian daerah. PDRB riil per kapita Kabupaten Tebo mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan sempat berkontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, seiring dengan perekonomian yang kembali tumbuh positif, PDRB per kapita turut mengalami kenaikan hingga mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,85 persen. Tingginya PDRB per kapita pada tahun 2022 didorong oleh peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Tebo yang tumbuh hingga 6,29 persen. Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Tebo sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021-2023 sehingga pertumbuhan PDRB riil per kapita turut mengalami penurunan yaitu 2,66 persen mendorong nilai PDRB riil per kapita ke angka 34,44 juta rupiah.

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendapatan yang dihasilkan melalui pekerjaan. Urusan ketenagakerjaan menjadi urusan yang wajib untuk diperhatikan guna memastikan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat seberapa banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, orang yang tidak memiliki pekerjaan maupun usaha dan tidak mencari pekerjaan, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

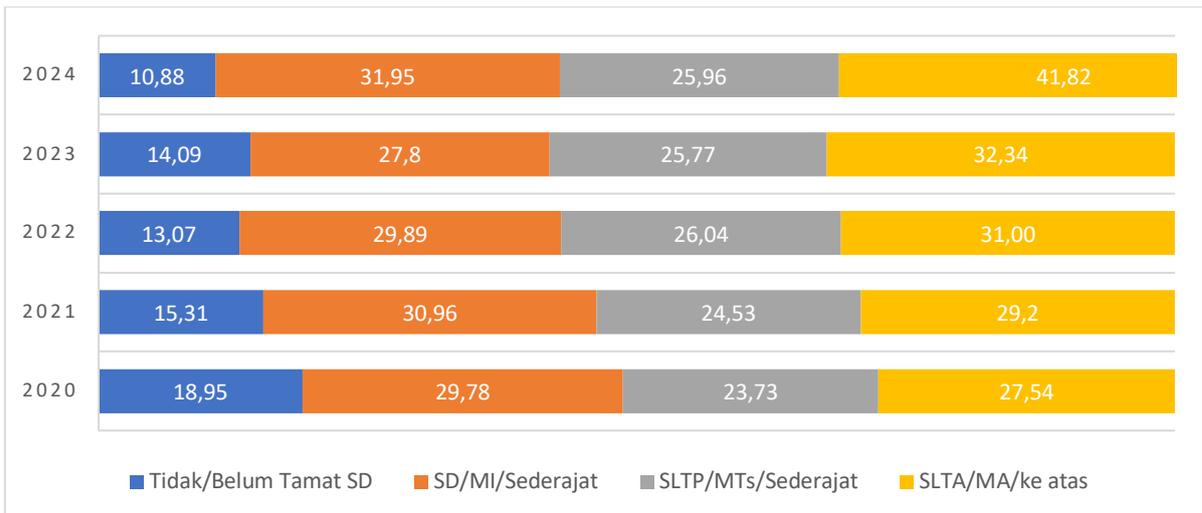


Gambar 2. 25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia

Sumber: BPS, 2025

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tebo dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan Indonesia dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah pada periode 2020-2024. Namun demikian, pada tahun 2024, tingkat pengangguran di Kabupaten Tebo justru menunjukkan kenaikan sebesar 38,85 persen di saat tingkat pengangguran di Provinsi Jambi dan nasional menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 1,10 persen dan 7,70 persen.

Jumlah pengangguran di Kabupaten Tebo mengalami kenaikan pada tahun 2023 sejumlah 533 orang dan berlanjut hingga tahun 2024 dengan kenaikan sejumlah 1.414 orang. Kenaikan jumlah pengangguran pada saat itu diduga dikarenakan kondisi pekerja yang sedang dalam posisi sementara tidak bekerja, yang umumnya terjadi pada pekerja di sektor pertanian yang sedang menunggu masa panen atau masa untuk menggarap sawah/kebun. Sektor pertanian sendiri memang memiliki peranan yang sangat besar terhadap perekonomian Kabupaten Tebo, yang dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB sektor pertanian yang mencapai 56,73 persen dan tingginya serapan tenaga kerja di sektor tersebut yang mencapai 61,84 persen pada tahun 2024.



Gambar 2. 26 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

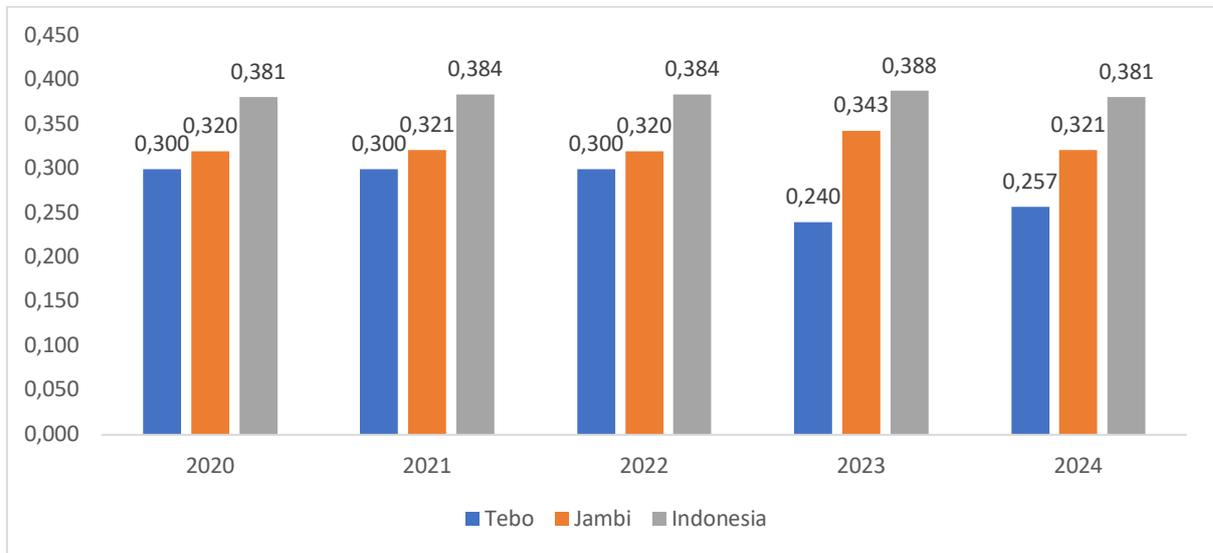
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Pengangguran juga dapat disebabkan oleh *mismatch* tenaga kerja yaitu ketidaksesuaian antara kualifikasi, keterampilan, keahlian, pendidikan tenaga kerja dengan tawaran yang ada di pasar kerja. Perekonomian Kabupaten Tebo hingga tahun 2024 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cenderung tidak membutuhkan banyak tenaga kerja terdidik. Namun demikian, 41,82 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas merupakan lulusan SMA ke atas yang mengindikasikan Kabupaten Tebo memiliki SDM dengan pendidikan tinggi. Umumnya, tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih selektif dalam memilih pekerjaan sehingga lebih memilih untuk menganggur sembari menunggu pekerjaan yang sesuai. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kualifikasi angkatan kerja yang tersedia dengan lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Tebo.

2.2.1.5. Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pemerataan dan ketimpangan pendapatan. Nilai indeks gini berkisar pada angka 0-1 di mana semakin mendekati 1 mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi sedangkan jika mendekati 0 mengindikasikan pemerataan pendapatan yang semakin sempurna. Indeks gini digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat untuk melengkapi analisis kesejahteraan yang belum bisa ditangkap melalui indikator

kesejahteraan ekonomi lainnya. Berikut ini adalah indeks gini Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia.



Gambar 2. 27 Indeks Gini Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia Tahun 2019-2023

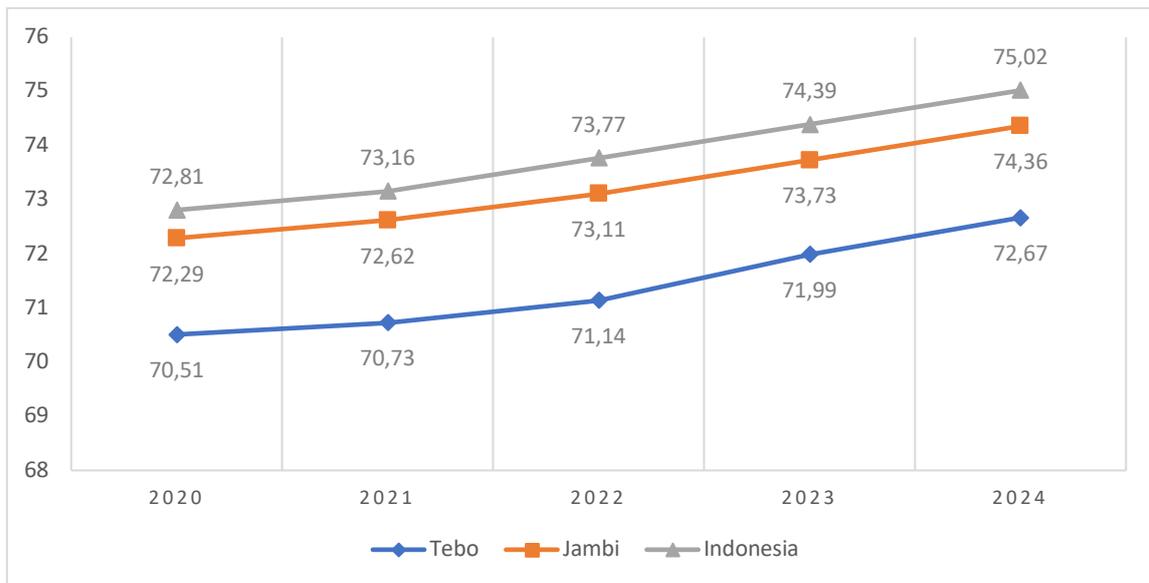
Sumber: BPS, 2024

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tebo cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan nasional. Indeks gini Kabupaten Tebo berkisar pada 0,280 per tahun sedangkan Provinsi Jambi dan nasional berkisar pada 0,325 dan 0,384 per tahun selama periode 2019-2023. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tebo sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020-2022 sebesar 15,38 persen atau naik 0,040 poin dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2023, distribusi pendapatan mulai mendekati merata dengan penurunan indeks gini sebesar 20 persen atau turun 0,060 poin. Rendahnya indeks gini di Kabupaten Tebo diperkirakan disebabkan oleh banyaknya penduduk yang bekerja di satu sektor yang sama yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Setidaknya terdapat 60,92 persen penduduk bekerja yang bekerja di sektor pertanian selama periode 2020-2024.

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas sumber daya manusia di daerah dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator yang mengukur capaian rata-rata dalam dimensi utama pembangunan masyarakat. Perhitungan IPM mencakup 3 dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, lama pendidikan, dan standar hidup layak. Indikator yang digunakan untuk mewakili

setiap dimensi yaitu umur harapan hidup (UHH) untuk mewakili umur panjang dan hidup sehat, rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) untuk mewakili pendidikan, dan pengeluaran per kapita disesuaikan untuk mewakili standar hidup layak. Perhitungan IPM sejak tahun 2023 telah disempurnakan dengan menggunakan UHH berdasarkan hasil Sensus Penduduk *Long Form* (SPLF) 2020 dari yang sebelumnya menggunakan UHH hasil Sensus Penduduk 2010. Berikut adalah capaian IPM Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia tahun 2020-2024.



Gambar 2. 28 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

IPM Kabupaten Tebo menunjukkan tren yang meningkat dengan kenaikan sebesar 0,54 poin per tahun pada periode 2020-2024. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tebo sehingga pembangunan manusia di Kabupaten Tebo tergolong tinggi. Namun demikian, kenaikan tersebut belum mampu mengejar IPM di tingkat Provinsi Jambi dan nasional. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Tebo lebih rendah 1,69 poin dibandingkan Provinsi Jambi, dan lebih rendah 2,35 poin dibandingkan dengan nasional.

IPM Kabupaten Tebo yang lebih rendah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persebaran tempat tinggal masyarakat yang mengikuti industri sawit di daerah hutan tanaman industri. Kebutuhan akan fasilitas publik dasar yaitu

bangunan sekolah layak dan fasilitas layanan kesehatan tidak dapat dipenuhi karena faktor peruntukan ruang di hutan yang tidak sesuai. Selain itu, faktor perekonomian juga mempengaruhi capaian IPM di Kabupaten Tebo mengingat sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dimana nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian masih tergolong rendah sehingga pendapatan yang diterima oleh para pekerja juga cenderung rendah. Meskipun capaian IPM Kabupaten Tebo masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jambi dan nasional, nilai IPM daerah terus menunjukkan kenaikan yang mengindikasikan adanya peningkatan pembangunan manusia.

Tabel 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (UHH)	73,02	73,05	73,25	73,45	73,62
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,58	7,59	7,70	7,94	8,04
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,6	12,64	12,65	12,92	12,93
Pengeluaran per kapita (Ribu Rp)	10.389	10.546	10.725	10.894	11.415
Indeks Pembangunan Manusia	70,51	70,73	71,14	71,99	72,67

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Kenaikan IPM di Kabupaten Tebo didorong oleh kenaikan seluruh komponen pembentuk IPM. Umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Tebo saat ini telah mencapai 73,62 tahun, sedangkan rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan setara kelas VIII. Anak usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Tebo berpeluang menempuh pendidikan hingga tamat SMA kelas XII bahkan memungkinkan untuk menempuh pendidikan hingga Diploma I. Dari segi perekonomian, pengeluaran per kapita penduduk semakin menunjukkan kenaikan yang dapat mengindikasikan naiknya kesejahteraan ekonomi penduduk.

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

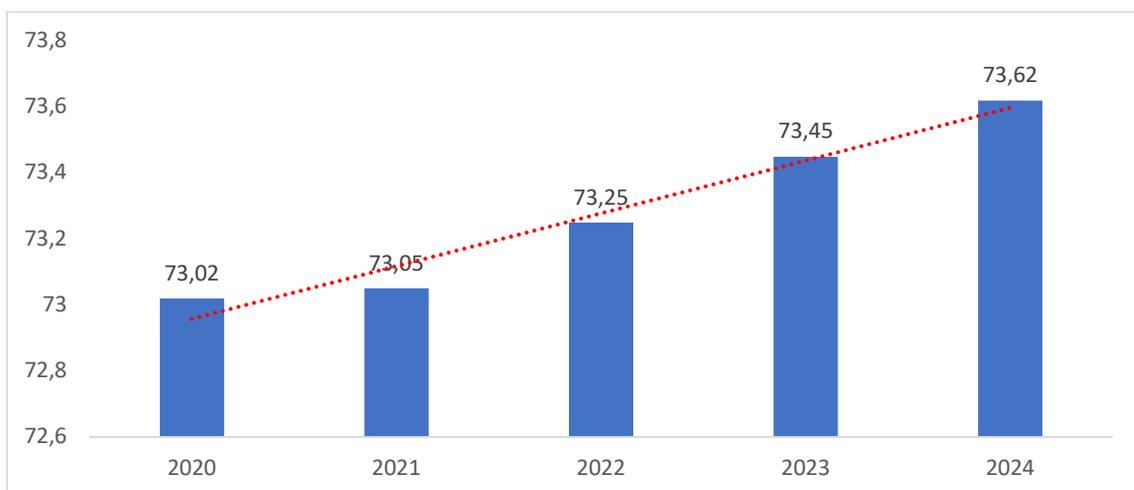
Kesehatan untuk semua Menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Kondisi kesehatan

masyarakat dapat dilihat dari beberapa data seperti Usia Harapan Hidup (UHH), prevalensi *stunting*, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), fasilitas kesehatan, dan SDM kesehatan dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Indikator terkait indeks keluarga sehat, diantaranya dapat diproksikan dengan usia harapan hidup. Meskipun belum secara komprehensif merepresentasikan komponen – komponen yang terdapat dalam indeks keluarga sehat tersebut. Adapun indeks keluarga sehat sendiri mencerminkan gambaran holistik seberapa baik keluarga memenuhi kebutuhan fundamental, yakni mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga lingkungan dan akses pelayanan. Setiap indikator saling terintegrasi untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman, sehat, dan produktif.

Adapun usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator pada level dampak yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat secara umum yang berada di wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Secara umum UHH juga erat kaitannya dengan beberapa aspek lain seperti pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, aksesibilitas pelayanan dasar, pendidikan, dan sebagainya. Sifat UHH yang multidisipliner membuat kolaborasi dan kerja sama lintas sektor menjadi perlu untuk meningkatkannya. Berikut perkembangan UHH di Kabupaten Tebo selama periode 2020 hingga 2024.



Gambar 2. 29 Usia Harapan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

UHH di Kabupaten Tebo mengalami tren meningkat selama periode 2020 hingga 2024 yang menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pembangunan kesehatan di Kabupaten Tebo. Capaian saat ini menunjukkan bahwa rata-rata harapan hidup masyarakat di Kabupaten Tebo adalah 73 tahun. Walaupun capaian UHH di Kabupaten Tebo mengalami tren yang meningkat, namun capaian UHH di Kabupaten Tebo masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa upaya pembangunan dalam bidang kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan sebagai upaya mendorong kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masih perlu untuk diperkuat dengan cara pemenuhan layanan spesialis di daerah didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai.

2.2.2.2. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah indikator penting untuk menilai gangguan pertumbuhan kronis pada anak balita akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, khususnya selama 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas jangka panjang, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penurunan angka stunting memerlukan pendekatan multisektor yang terintegrasi, mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan pola asuh dan konsumsi gizi keluarga, serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Sinergi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif masyarakat, sangat diperlukan untuk mempercepat penurunan stunting secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

Adapun capaian prevalensi stunting untuk Kabupaten Tebo hingga tahun 2024 mencapai 24,2% (SSGI, 2024) atau meningkat 1,5% dari tahun 2023 dengan angka prevalensi stunting 22,7% (SKI, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam penurunan angka stunting masih perlu perhatian serius dari semua pihak. Dengan upaya konvergensi lintas sektor dan komitmen bersama, diharapkan Kabupaten Tebo dapat terus menurunkan angka stunting dan mencapai target nasional.

2.2.2.3. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Tebo sudah relatif memadai dalam segi jumlah. Namun demikian, jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan tersebut masih menjadi kendala dan harus segera diselesaikan. Fasilitas kesehatan yang masih terkonsentrasi di beberapa kawasan, menjadi kendala bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat perkotaan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Selain upaya pemerataan fasilitas kesehatan, penambahan, dan pembangunan yang memperhatikan dinamika kependudukan menjadi sangat penting dilakukan sebagai upaya pembangunan kesehatan di masa yang akan datang. Catatan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tebo disajikan dengan data awal di tahun 2019 dan data termutakhir di tahun 2024 pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 16 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tebo Tahun 2019 s/d 2024

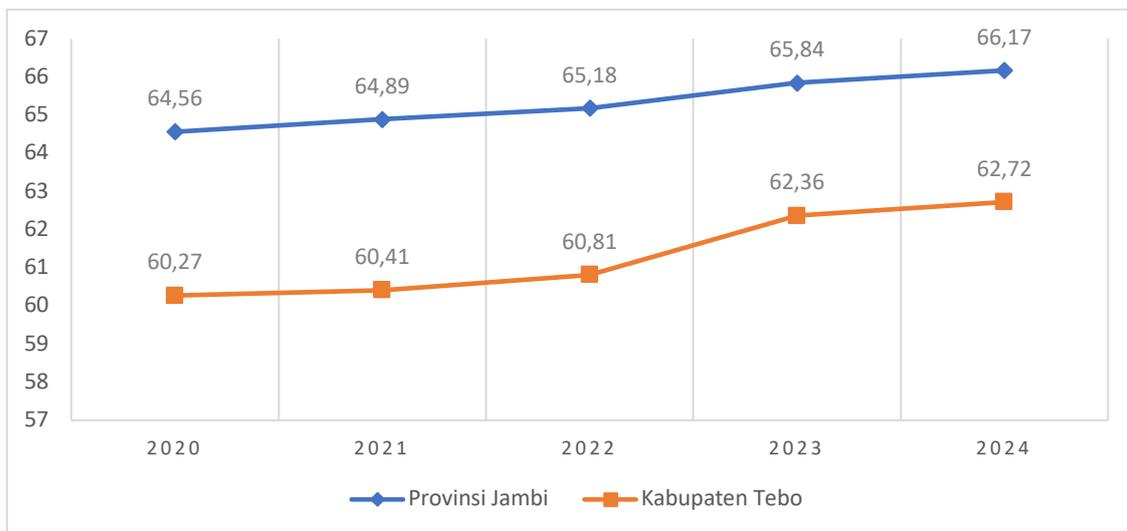
Tahun	Fasilitas Kesehatan				
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Lainnya
2019	55	135	207	27	16
2020	90	261	500	31	18
2021	97	466	619	68	44
2022	58	261	500	31	18
2023	58	313	515	35	18
2024	58	279	526	38	26

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tebo masih perlu untuk ditingkatkan, terutama terkait dengan kebutuhan tenaga dokter spesialis untuk ditempatkan di Rumah Sakit yang berada di beberapa wilayah Kabupaten Tebo. Upaya tersebut menjadi penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan umum dan spesialis di Kabupaten Tebo. Selain itu, pemerataan tenaga kesehatan juga menjadi isu penting yang perlu diselesaikan agar dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan menjadi lebih baik dan menyeluruh.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Indeks Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan capaian dalam bidang pendidikan, seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang menggambarkan tingkat akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Peningkatan nilai indeks pendidikan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kemajuan dalam penyediaan layanan pendidikan serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dengan demikian, indeks ini menjadi acuan strategis bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan program dan kebijakan untuk memperkuat sektor pendidikan secara berkelanjutan. Berikut merupakan capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Tebo selama periode 2020 hingga 2024.



Gambar 2. 30 Indeks Pendidikan Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

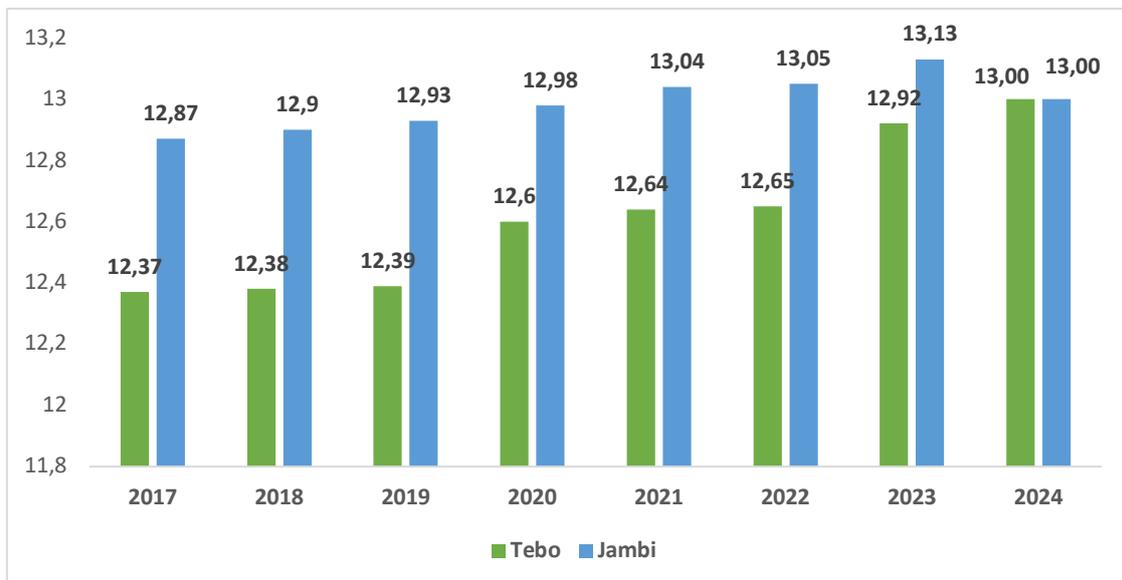
Indeks Pendidikan di Kabupaten Tebo mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks pendidikan Kabupaten Tebo mengalami peningkatan sebesar 4,06 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tebo mengalami peningkatan. Indeks Pendidikan Kabupaten Tebo secara konsisten berada di bawah rata-rata indeks pendidikan Provinsi Jambi. Oleh karena itu, upaya peningkatan layanan pendidikan perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Tebo, terutama dalam rangka

peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di masa yang akan datang.

2.2.3.1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Urusan pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. Urusan pendidikan menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana merupakan indikator makro untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan, dan lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan.

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di suatu daerah. Capaian Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah di suatu daerah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tebo Tahun 2017 hingga 2024



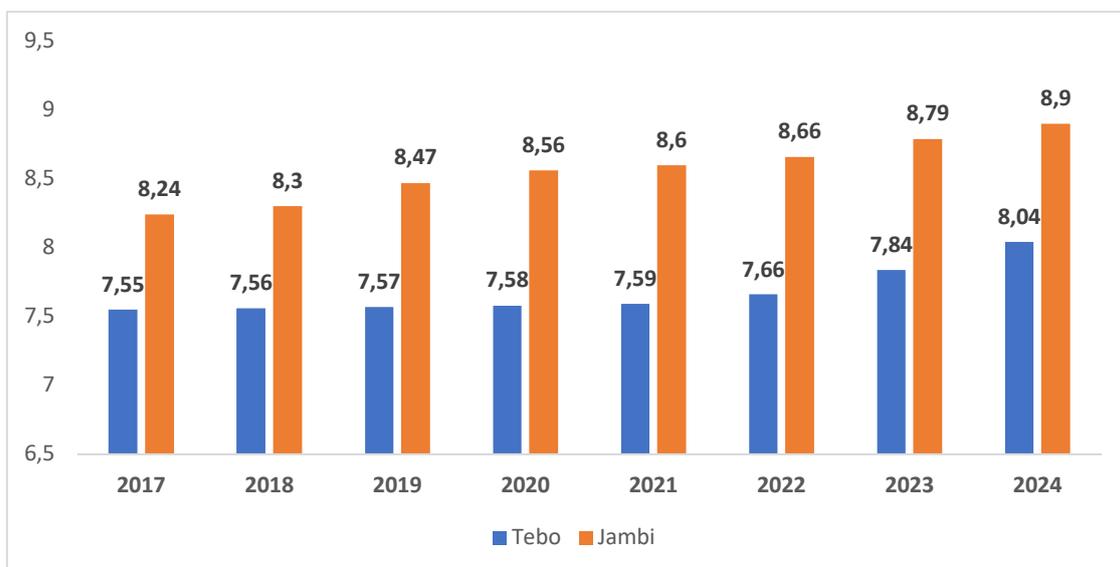
Gambar 2. 31 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tebo mengalami tren yang meningkat selama periode 2017 hingga 2024. Capaian HLS Kabupaten Tebo mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin. Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Tebo berada pada angka 13,00 tahun atau setara dengan jenjang Diploma 1. Walaupun mengalami tren yang positif, capaian HLS Kabupaten Tebo masih sama dengan rata-rata HLS Provinsi Jambi, yang mana pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga berada pada angka 13,00 atau setara dengan Diploma I. Upaya untuk meningkatkan capaian HLS perlu untuk terus dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat, terutama dalam mendukung program nasional Indonesia emas 2045.

2.2.3.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator lain yang menjadi tolok ukur pembangunan pada sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal. Berikut merupakan capaian RLS Kabupaten Tebo periode 2017 hingga 2024.



Gambar 2. 32 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tebo mengalami tren yang meningkat selama periode 2017 hingga 2024. Capaian RLS Kabupaten Tebo mengalami peningkatan sebesar 0,49 poin. Pada tahun 2024, RLS Kabupaten Tebo berada pada angka 8,04. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia sekolah di Kabupaten Tebo dapat merasakan pendidikan formal selama 8,04 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Upaya peningkatan partisipasi sekolah di Kabupaten Tebo perlu menjadi perhatian, mengingat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Tebo masih berada di bawah rata-rata RLS Provinsi Jambi. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Tebo.

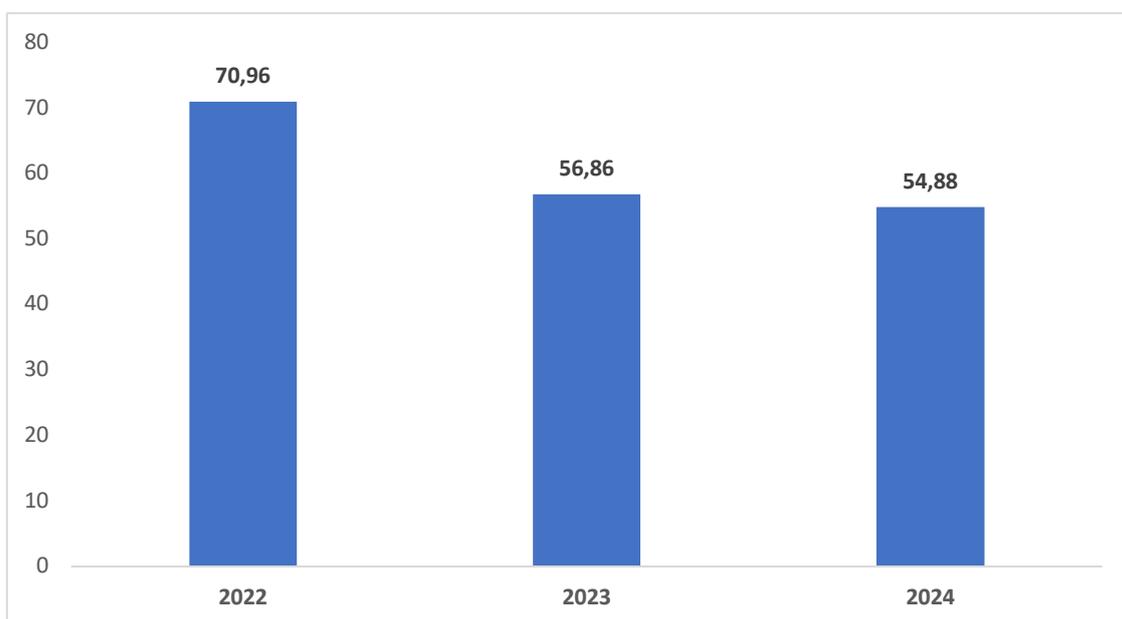
2.2.3.3. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi merujuk pada kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dari teks secara kritis. Adapun numerasi, merupakan kemampuan berpikir matematis, menggunakan dan menafsirkan angka, simbol, grafik, dan tabel. Masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas literasi/numerasi, yaitu kemampuan membaca yang diikuti dengan pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya akses terhadap bahan bacaan berkualitas, terutama di daerah terpencil. Jumlah perpustakaan dan taman bacaan yang masih kurang optimal menjadi kendala dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat di Kabupaten Tebo. Beberapa upaya untuk dapat meningkatkan capaian literasi/numerasi di Kabupaten Tebo yakni, melalui digitalisasi pendidikan, akses yang lebih luas terhadap bahan bacaan, serta peningkatan peran komunitas dalam gerakan literasi juga dapat menjadi alternatif lain, untuk memastikan bahwa semua masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dan informasi. Dengan demikian, capaian angka literasi/numerasi di Kabupaten Tebo diharapkan dapat semakin meningkat dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan.

2.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dihitung oleh perpustakaan nasional guna mengetahui tingkat

pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. IPLM diperoleh dari Unsur-Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan Aspek Masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Berikut adalah capaian IPLM Kabupaten Tebo tahun 2022 hingga 2024.



Gambar 2. 33 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tebo Tahun 2022-2024

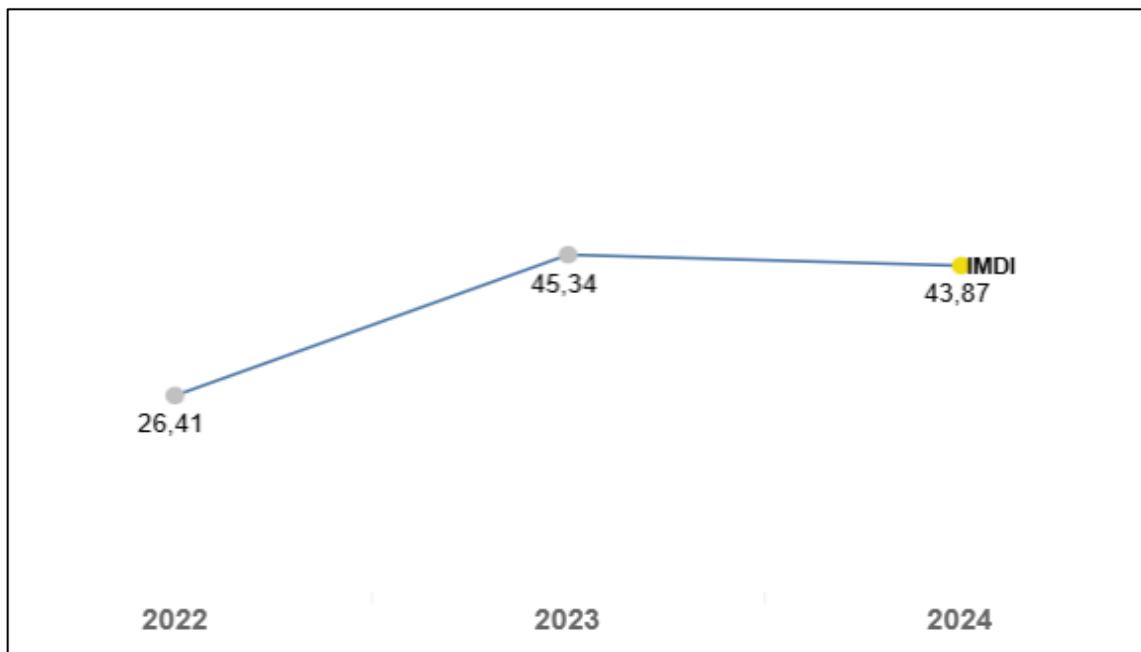
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

IPLM Kabupaten Tebo mengalami tren yang menurun selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2024 IPLM Kabupaten Tebo berada pada angka 54,88. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 16,08 poin. Kondisi ini menyebabkan capaian IPLM Kabupaten Tebo berada pada kategori sedang. Beberapa indikasi yang menyebabkan penurunan IPLM Kabupaten Tebo antara lain adalah kurangnya akses terhadap sumber bacaan, rendahnya minat baca dan tulis, serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak terkait. Upaya dan perhatian lebih dari pemerintah untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Hal ini menjadi salah satu modal penting yang

harus dipenuhi guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Tebo. Beberapa langkah strategis perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tebo dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, diantaranya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan yang berkualitas disertai dengan koleksi buku dan tenaga pustakawan yang berkompeten.

2.2.3.5. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Transformasi digital mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang digital. Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka indeks literasi digital digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat kemampuan individu atau masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Indeks ini mencerminkan sejauh mana seseorang dapat menggunakan perangkat digital, mengelola informasi secara online, berkomunikasi dengan aman, serta memahami etika dan risiko dalam dunia digital.



Gambar 2. 34 Indeks Masyarakat digital di Kabupaten Tebo Tahun 2022-2024

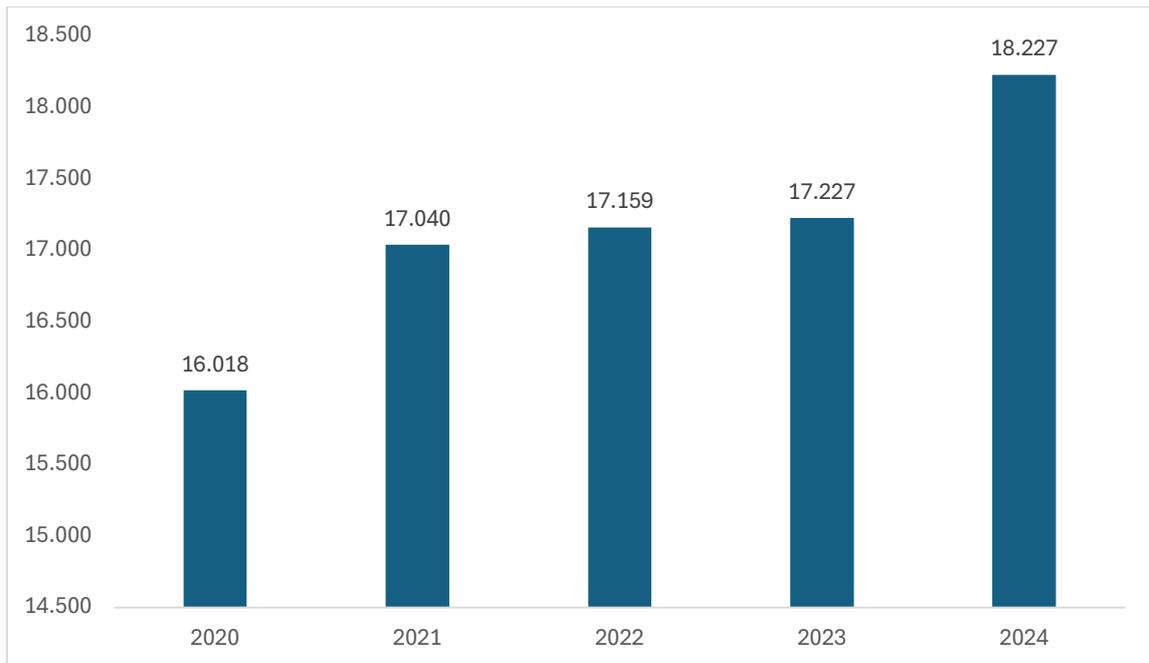
Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

Proksi yang dapat digunakan dari indeks literasi digital ini diantaranya Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), yang mana Kabupaten Tebo memiliki capaian sebesar 43,87 hingga tahun 2024 dengan kategori cukup. Capaian tersebut juga sekaligus mengalami penurunan sebesar 1,47 poin, dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, semakin pesatnya transformasi digital, peningkatan literasi digital di Kabupaten Tebo masih perlu untuk ditingkatkan. Penguasaan digital menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi konsumen teknologi tetapi juga mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dalam berbagai aspek kehidupan.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Lebih lanjut lagi, perlindungan sosial yang adaptif berupaya untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian, mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa data seperti cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial Kabupaten Tebo memiliki tren yang semakin meningkat. Kondisi tersebut menggambarkan implementasi yang semakin optimal terhadap perlindungan sosial tenaga kerja di Kabupaten Tebo. Capaian tersebut tentu masih perlu untuk dioptimalkan lagi, mengingat kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan tenaga kerja yang aman dan sejahtera.



Gambar 2. 35 Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2025

Dengan cakupan yang komprehensif, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya mendukung pembangunan nasional, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

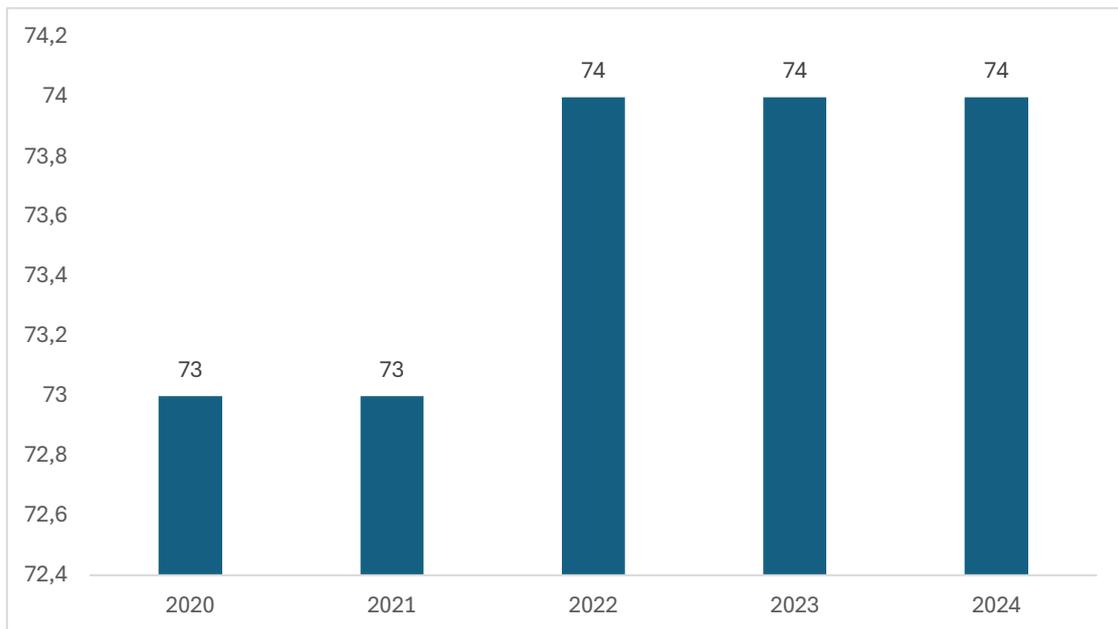
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Peneguhan kerukunan umat beragama dan kehidupan keberagamaan berperspektif Moderasi Beragama, salah satunya dilakukan melalui pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Dinamika hubungan antara umat beragama masih didominasi aksi penolakan pembangunan rumah ibadah oleh kelompok masyarakat. Dari beberapa hasil kajian yang dilakukan terkait alasan

penolakan pendirian rumah ibadah oleh warga masyarakat, disimpulkan bahwa latar belakang penolakan ijin pendirian rumah ibadah tidak disebabkan faktor tunggal, tapi sangat kompleks dan berbeda-beda, antara satu dengan lainnya. Secara umum, setidaknya terdapat tiga aspek penolakan warga atas pendirian rumah ibadah yaitu: aspek teologis, aspek administratif, dan aspek kesenjangan budaya dan ekonomi. Atas dasar itu, penanganan konflik perlu dilakukan secara struktural dan kultural. Secara struktural yaitu melalui pengorganisasian pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian konflik. Sementara secara kultural yaitu upaya fasilitasi dari pihak-pihak terkait melalui musyawarah dalam penyelesaian konflik.



Gambar 2. 36 Indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

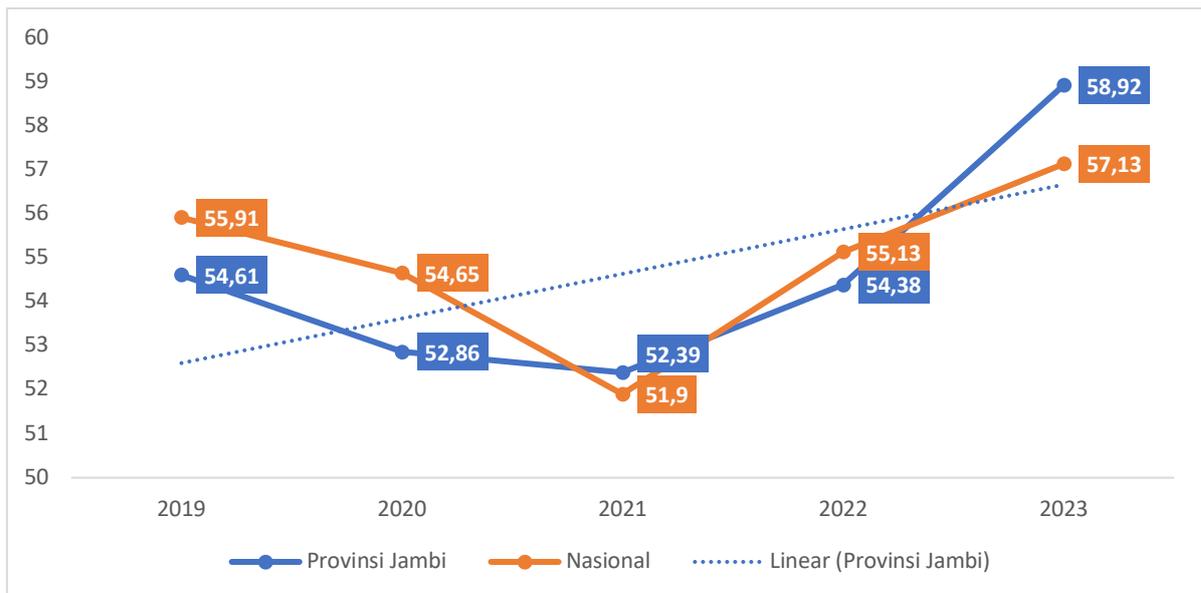
Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Tebo, 2025

Indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Tebo mengalami kenaikan, dari tahun 2020 hingga 2024. Artinya, konflik dengan latar belakang keagamaan dapat semakin diminimalisir di Kabupaten Tebo. Namun demikian, konflik dengan latar belakang keagamaan tetap perlu untuk terus dikawal dan menjadi perhatian daerah. Kondisi tersebut disebabkan karena konflik dengan latar belakang keagamaan di Kabupaten Tebo tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, seperti persoalan pendirian rumah ibadah, namun dapat juga disebabkan faktor lainnya, seperti, penyiaran agama, properti keagamaan, ritual dan perayaan hari

keagamaan, bantuan keagamaan, perpindahan agama, perkawinan beda agama, ujaran kebencian, penodaan agama, misinformasi dan disinformasi, sosial-politik-ekonomi yang melibatkan identitas atau sentimen keagamaan.

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Peran kebudayaan dalam pembangunan untuk mengintervensi kualitas sumber daya manusia melalui nilai budaya dan mentalitas. Pembangunan yang memperhatikan warisan budaya berfokus dalam menjadikan kebudayaan sebagai investasi kedepan. Serangkaian dimensi dan indikator yang memotret capaian kinerja pembangunan kebudayaan diwakilkan dalam indeks pembangunan kebudayaan (IPK).



Gambar 2. 37. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jambi

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024

Pengukuran capaian IPK Kabupaten Tebo menaksir dari capaian IPK Provinsi Jambi dengan data awal di tahun 2019 dan data termutakhir di tahun 2023. Realisasi IPK tertinggi terjadi pada tahun 2023. Realisasi IPK Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif serta berada di atas realisasi nasional pada tahun 2023. Penghitungan IPK melibatkan dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi

ekspresi budaya, dimensi literasi, dan dimensi kesetaraan gender. Untuk itu, diperlukan upaya dalam mengakselerasi capaian ketujuh dimensi IPK tersebut di Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Tebo.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

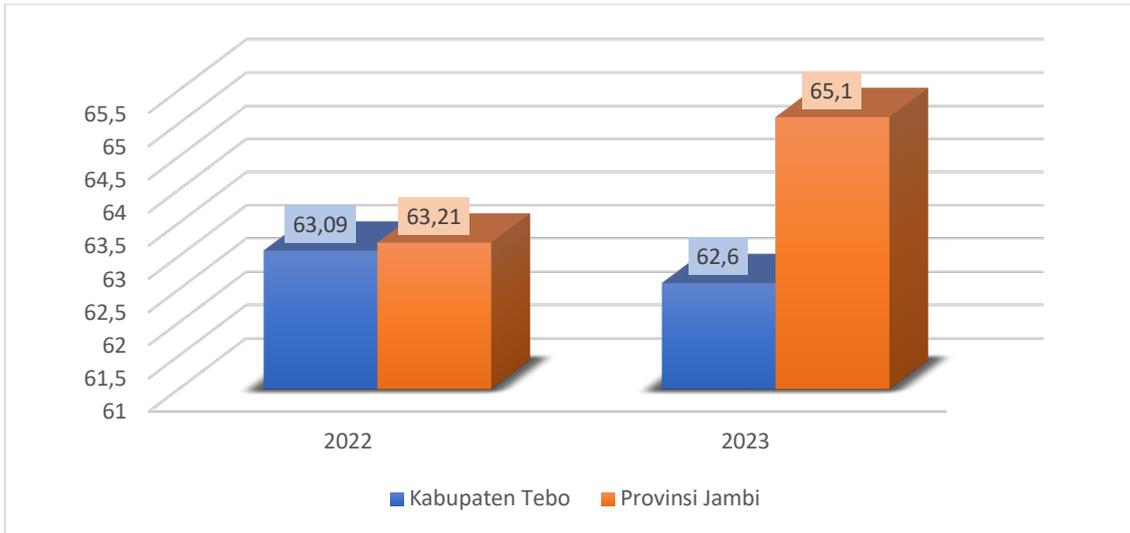
Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Keluarga yang berkualitas berperan sebagai lingkungan pertama dalam membentuk individu yang tangguh, berpendidikan, dan memiliki kesejahteraan yang baik. Sementara itu, kesetaraan gender memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial. Pada sisi lain masyarakat inklusif mencerminkan lingkungan sosial yang terbuka dan menerima keberagaman sekaligus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Penguatan pada ketiga aspek ini akan membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing yang akan menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor.

Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, serta Indeks Pembangunan Pemuda, yang disesuaikan dengan konteks masing-masing daerah.

2.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program perlindungan anak dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung tumbuh kembang optimal, serta menjamin hak-hak anak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Perlindungan anak menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun sumber

daya manusia yang berkualitas di masa depan. Dengan adanya sistem perlindungan yang kuat, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan berdaya, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Berikut merupakan capaian Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Tebo pada tahun 2022 hingga 2023.



Gambar 2. 38 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2022 dan 2023

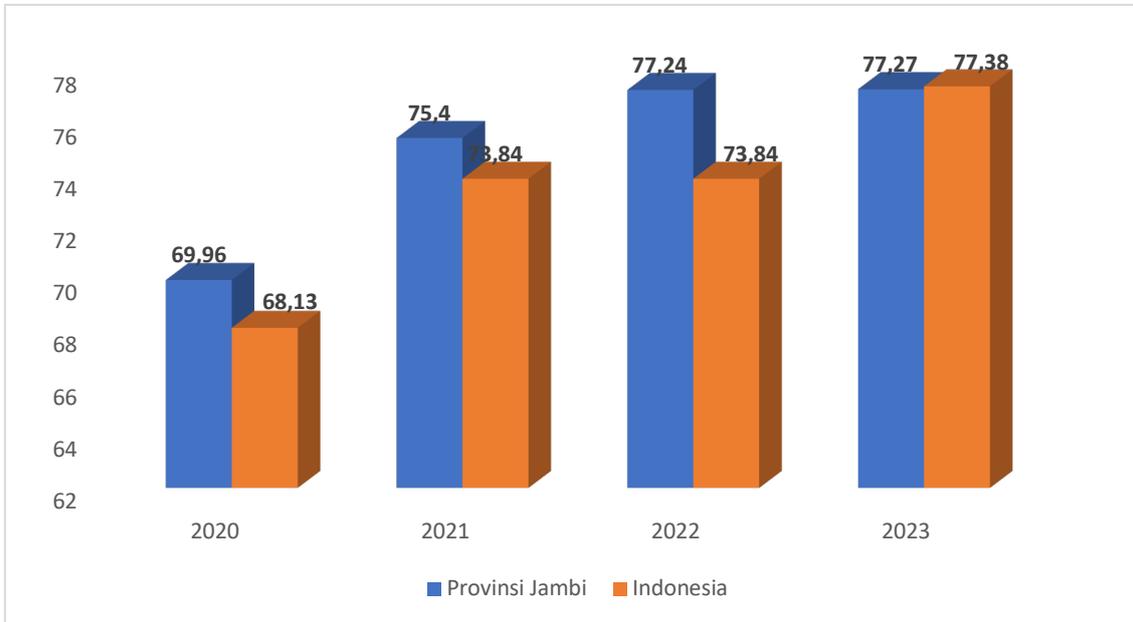
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Capaian indeks perlindungan anak (IPA) Kabupaten Tebo mengalami penurunan hingga 0,49 poin selama periode 2022 hingga data termutakhir tahun 2023. Pada tahun 2022, capaian IPA Kabupaten Tebo telah berada di 63,09 poin, kemudian mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Hal itu mengindikasikan belum optimalnya kinerja perlindungan anak di Kabupaten Tebo. Terutama ketika membandingkan dengan capaian Provinsi Jambi yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tebo tahun 2022 hingga 2023. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak baik di Kabupaten Tebo maupun Provinsi Jambi masih perlu ditingkatkan.

2.2.6.2. Indeks Kualitas Keluarga

Keluarga merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Kualitas keluarga yang baik berkontribusi pada terbentuknya individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter, yang pada akhirnya menjadi motor penggerak pembangunan. Indeks Kualitas Keluarga mengukur dan memahami kondisi serta dinamika keluarga di suatu wilayah. Indeks Kualitas

Keluarga mencakup dimensi keharmonisan, pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan ekonomi, serta pola asuh yang berkualitas. Berikut merupakan Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Tebo Tahun 2020 dan data termutakhir tahun 2023.



Gambar 2. 39 Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Tebo Tahun 2020-2023

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

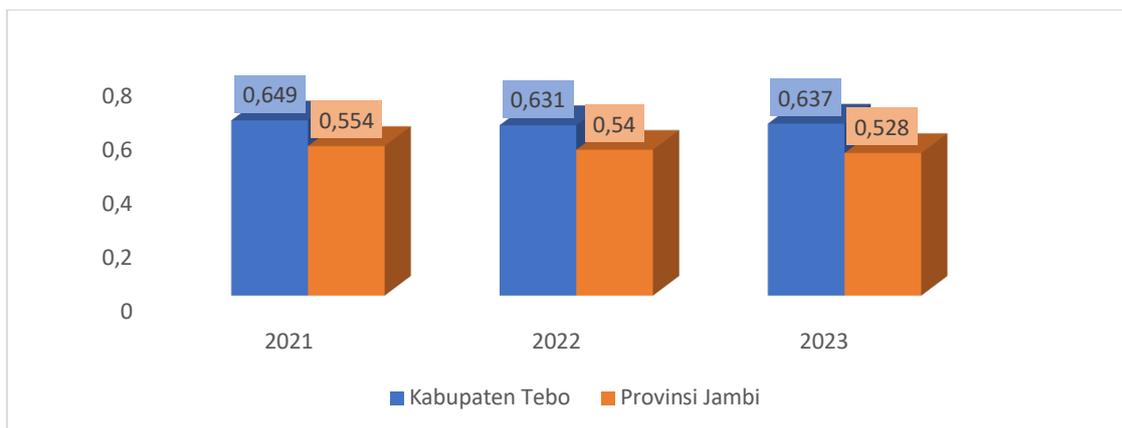
Perhitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dilakukan oleh BPS bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2020 hingga 2023 meliputi berbagai macam dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Namun, perhitungan IKK baru sampai pada level provinsi. Oleh karena itu, capaian rata-rata kualitas keluarga Provinsi Jambi menjadi salah satu proksi yang digunakan untuk melihat gambaran kualitas keluarga di Kabupaten Tebo.

Capaian indeks kualitas keluarga Provinsi Jambi pada tahun 2020 hingga 2022 sudah berada di atas rata-rata nasional. Capaian nasional lebih tinggi dibandingkan Jambi terjadi pada tahun 2023, meskipun keduanya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata kualitas keluarga di Provinsi Jambi, termasuk dalam hal ini Kabupaten Tebo, sudah berada pada kondisi yang relatif baik. Namun demikian, arus pembangunan dan perubahan sosial berlangsung cukup cepat, oleh karena

itu, perlu dilakukan langkah antisipatif dalam rangka merespons perubahan tersebut. Salah satunya melalui unit terkecil dalam masyarakat yakni keluarga. Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu diintegrasikan dalam pembangunan. Pemerintah bisa fokus pada pemenuhan dimensi-dimensi yang ada dalam indeks kualitas keluarga secara terpadu, terintegrasi dan holistik.

2.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender masih menjadi tantangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Tebo. Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk mengukur sejauh mana kesenjangan gender terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perbedaan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Indeks ini mencakup berbagai dimensi utama, seperti partisipasi dalam dunia kerja, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta tingkat kesejahteraan ekonomi. Semakin rendah angka ketimpangan gender, semakin setara kesempatan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dalam berkontribusi terhadap pembangunan. Berikut merupakan capaian Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tebo tahun 2021 hingga data termutakhir tahun 2023.



Gambar 2. 40 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tebo Tahun 2021-2023

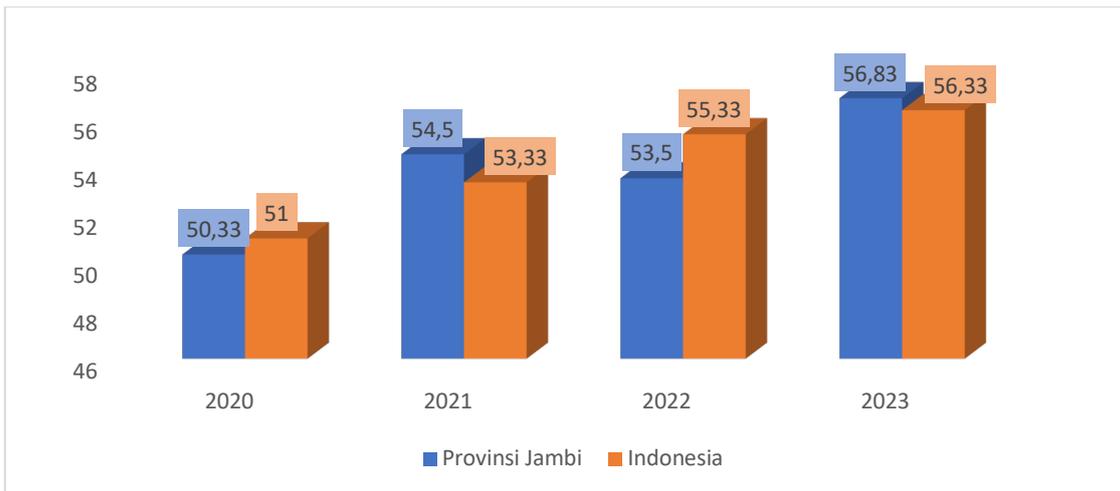
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Tebo dan Provinsi Jambi menunjukkan bahwa keduanya mengalami tren positif pada rentang tahun

2021 hingga 2023. IKG Kabupaten Tebo mengalami fluktuasi pada periode tersebut, peningkatan sempat terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,007 poin. Hal itu mengindikasikan adanya peningkatan kesenjangan gender. IKG Kabupaten Tebo yang masih cukup tinggi dibandingkan Provinsi Jambi. Hal itu dapat dipengaruhi oleh akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, akses kesehatan, keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, dan kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang pro-gender. Kabupaten Tebo masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi ketimpangan gender dibandingkan rata-rata provinsi. Intervensi kebijakan yang lebih kuat dan terfokus diperlukan untuk menunjang capaian tersebut, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

2.2.6.4. Indeks Pembangunan Pemuda

Pemuda merupakan agen perubahan dan aset penting dalam pembangunan suatu daerah. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) digunakan untuk mengukur sejauh mana pemuda memiliki akses dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti tingkat kesejahteraan, partisipasi, dan kualitas hidup pemuda dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Pemuda mencakup berbagai dimensi utama, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Semakin tinggi skor IPP, semakin baik kondisi yang mendukung perkembangan dan pemberdayaan pemuda sebagai individu yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Berikut merupakan capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Tebo Tahun 2020 hingga data termutakhir tahun 2023.



Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi Tahun 2020-2023

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024

Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Tebo menggunakan *proxy* capaian Provinsi Jambi. Grafik IPP di atas menunjukkan bahwa terdapat tren positif pada capaian provinsi maupun nasional pada tahun 2020 hingga 2023. Secara umum, capaian IPP Provinsi Jambi berfluktuasi pada rentang tahun 2020 hingga 2023. Faktor lain yang dapat mempengaruhi capaian IPP Provinsi Jambi meliputi peningkatan akses pendidikan bagi pemuda, termasuk program beasiswa, pelatihan vokasi, dan digitalisasi pendidikan, adanya peluang ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih baik, partisipasi pemuda dalam politik dan organisasi sosial maupun kewirausahaan, serta adanya dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan pemuda.

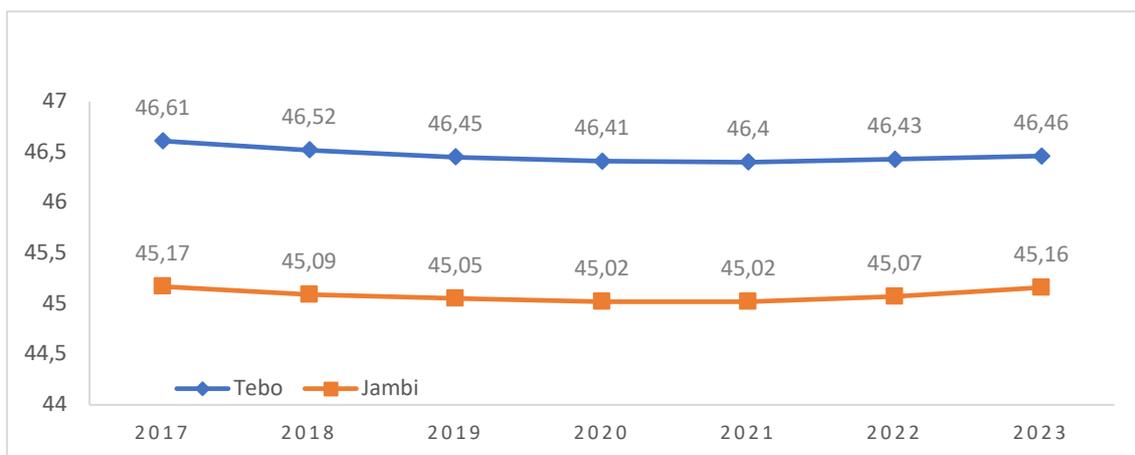
2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing ekonomi di Kabupaten Tebo. Kualitas SDM yang unggul bisa membantu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan efisiensi dalam berbagai sektor khususnya ekonomi yang mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Daya saing SDM ini juga ditentukan oleh beberapa aspek seperti tingkat pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kemampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan industri dan teknologi. Adanya SDM yang berkualitas tinggi cenderung memiliki

tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena mampu menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengembangkan sektor jasa dan industri secara efektif. Berikut merupakan salah satu indikator yaitu angka ketergantungan yang dapat menggambarkan kondisi daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Tebo.

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64 tahun). Semakin tinggi angka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut merupakan angka ketergantungan di Kabupaten Tebo selama periode 2017 hingga data termutakhir tahun 2023.



Gambar 2. 42 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Selama periode 2017 hingga 2023, Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tebo menunjukkan pola yang relatif stagnan. Sepanjang tujuh tahun tersebut, peningkatan yang terjadi hanya sebesar 0,32 persen, yang menandakan bahwa beban penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia produktif tidak mengalami perubahan signifikan. Artinya, jumlah individu yang bergantung pada kelompok usia kerja tetap berada pada kisaran yang hampir sama dari tahun ke

tahun, mencerminkan stabilitas demografis namun juga memperlihatkan minimnya kemajuan dalam mengurangi beban ketergantungan.

Meskipun demikian, angka ketergantungan di Kabupaten Tebo secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jambi. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia produktif di Tebo menanggung beban yang lebih besar dibandingkan rekan-rekannya di provinsi secara umum. Pada tahun 2023, tercatat bahwa setiap 100 orang yang berada dalam usia produktif di Kabupaten Tebo harus menopang sekitar 46 orang yang berada di luar kelompok usia kerja, baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia. Kondisi ini dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, agar beban ini tidak menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan aspek penting dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing suatu daerah. Salah satu indikator yang mencerminkan produktivitas dan kemajuan sektor ekonomi adalah kontribusi PDRB sektor industri pengolahan, yang menunjukkan sejauh mana kegiatan manufaktur memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah. Selain itu, PDRB sektor akomodasi dan makan minum juga menjadi indikator penting karena mencerminkan perkembangan sektor pariwisata dan jasa, yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja mengukur seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Kombinasi dari ketiga indikator ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika Inovasi, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta produktivitas dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2.3.2.1. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi PDRB industri pengolahan adalah persentase sumbangan sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Industri pengolahan mencakup aktivitas yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi

melalui proses produksi. Besarnya kontribusi sektor ini mencerminkan peran pentingnya dalam perekonomian daerah, baik dalam hal penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan ekspor. Semakin besar kontribusinya, semakin menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Berikut adalah data kontribusi PDRB industri pengolahan di Kabupaten Tebo.

Tabel 2. 17 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Industri pengolahan	2020	2021	2022	2023	2024
Miliar rupiah	638,1	662,1	675,7	715,4	777,4
Persentase	6,22	6,01	5,72	5,85	6,11

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Nilai kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Tebo menunjukkan peningkatan sebesar 139,3 miliar rupiah dari tahun 2020 hingga 2024. Walaupun secara nominal meningkat, persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Tebo mengalami penurunan sebesar 0,11 persen karena peningkatan kontribusi sektor lainnya. Kontribusi sektor industri pengolahan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan nilai produksi industri, khususnya industri kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Kabupaten Tebo. Dukungan intervensi kebijakan dari berbagai rumpun sektor seperti infrastruktur, sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan.

2.3.2.2. Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kontribusi PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum adalah persentase sumbangan sektor ini terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor ini mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pelayanan penginapan, restoran, kafe, dan usaha sejenis yang memberikan layanan konsumsi kepada masyarakat maupun wisatawan. Kontribusi yang signifikan dari sektor ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat, perkembangan industri pariwisata, serta peran jasa dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, sektor ini juga memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja muda dan perempuan, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, peningkatan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi indikator penting dalam menilai daya saing dan kinerja ekonomi suatu wilayah, khususnya dalam sektor jasa dan pariwisata.

Tabel 2. 18 Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Penyediaan Akomodasi dan makan minum	2020	2021	2022	2023	2024
Miliar rupiah	37,4	39,4	42,4	46,0	49,1
Persentase	0,35	0,33	0,31	0,31	0,29

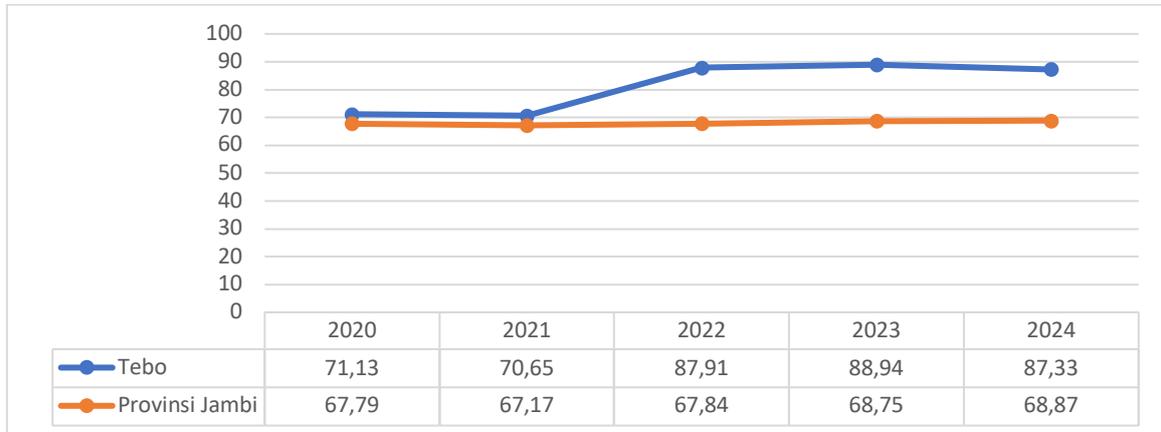
Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Nilai PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan sebesar 11,7 miliar rupiah dari tahun 2020 hingga 2024. Walaupun secara nominal meningkat, persentase kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB Kabupaten Tebo mengalami penurunan sebesar 0,06 persen karena peningkatan kontribusi sektor lainnya. Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dapat ditingkatkan dengan memperhatikan kunjungan wisatawan, pengeluaran wisatawan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Tebo.

2.3.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15 tahun ke atas, yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana penduduk usia produktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin besar potensi sumber daya manusia yang dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam akses terhadap lapangan pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan kerja. Oleh karena itu, tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi salah satu

indikator penting dalam menilai ketersediaan dan pemanfaatan tenaga kerja di suatu wilayah.



Gambar 2. 43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tebo mengalami peningkatan sebesar 16,2 persen dari tahun 2020 hingga 2020. TPAK Kabupaten Tebo berada di atas TPAK Provinsi Jambi dari tahun 2020 hingga 2024. TPAK Kabupaten Tebo berhubungan dengan beberapa faktor seperti faktor demografi (usia dan gender), faktor pendidikan (tingkat pendidikan, pelatihan dan keterampilan), faktor ekonomi (pendapatan, pertumbuhan ekonomi), faktor sosial (status pernikahan, norma sosial), faktor kesehatan dan berbagai faktor determinan lainnya. TPAK Kabupaten Tebo harus dijaga agar berdampak baik pada penurunan tingkat pengangguran terbuka dan perbaikan indikator makro ekonomi lainnya.

2.3.2.4. Indeks Inovasi Daerah

Perkembangan Indeks Inovasi Daerah merupakan cerminan dari kemajuan dan efektivitas suatu daerah dalam mengembangkan serta menerapkan inovasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, ekonomi, sosial, dan teknologi. Indeks ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan kebijakan, program, serta inisiatif yang mendorong perubahan dan peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, serta daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global. Berikut adalah data tentang perkembangan indeks inovasi daerah di Kabupaten Tebo.

Tabel 2. 19 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Indeks Inovasi Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Skor indeks	420	34.63	49.31	47,76	34,86
Predikat	Kurang inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Kurang inovatif

*) Mulai Tahun 2021 Indeks Inovasi Daerah berubah pengukuran yang sebelumnya Tahun 2019 dan 2020 masih dalam ribuan.

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2020-2024

Skor indeks inovasi daerah di Kabupaten Tebo menunjukkan tren yang fluktuatif. Kabupaten Tebo sudah mendapat predikat sebagai Kabupaten yang inovatif pada tahun 2021 hingga 2023, namun predikat ini kembali menurun pada tahun 2024. Dukungan dari berbagai *stakeholders* sangat dibutuhkan untuk meningkatkan indeks inovasi daerah Kabupaten Tebo. Riset dan inovasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan daerah di Kabupaten Tebo.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara bijak guna memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Keduanya hadir sebagai respons terhadap krisis ekologis global, seperti perubahan iklim, penurunan biodiversitas, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

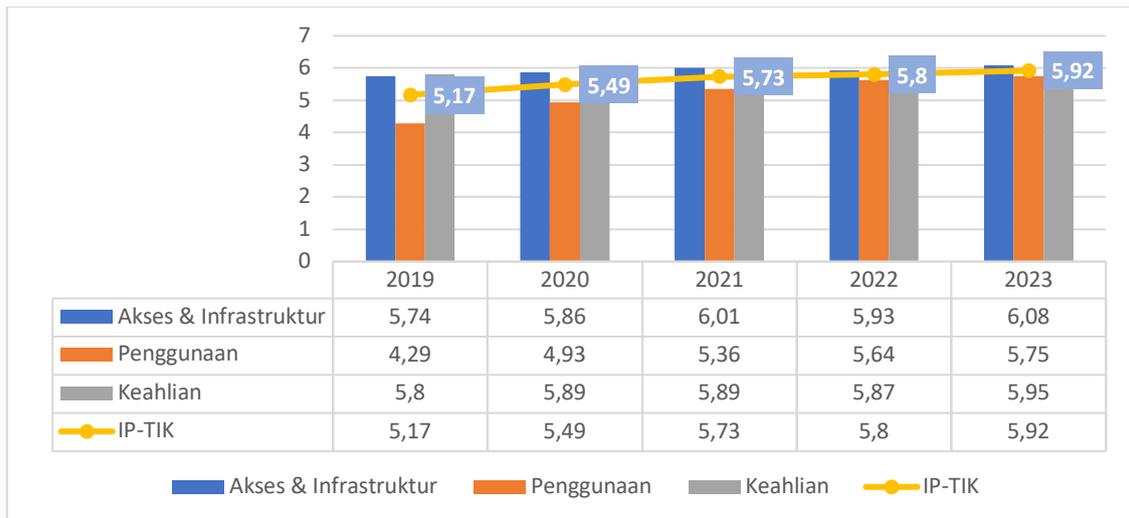
Ekonomi hijau merujuk pada model ekonomi yang menekankan pertumbuhan dengan rendah emisi karbon, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan inklusivitas sosial. Dalam praktiknya, ekonomi hijau diterapkan melalui berbagai sektor seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efisien, serta pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Pengembangan energi dari sumber terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air menjadi tulang punggung dari ekonomi hijau karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Sektor pertanian pun didorong untuk mengadopsi praktik

yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menjaga kesuburan tanah, kualitas air, serta keseimbangan ekosistem.

Penerapan ekonomi hijau, mengedepankan prinsip-prinsip keadilan antar generasi, inklusivitas sosial, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penerapan kedua konsep ini juga menuntut adanya kerangka kebijakan yang kuat, investasi berkelanjutan, serta kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung transisi ke arah ekonomi hijau dan biru, menyediakan insentif bagi inovasi ramah lingkungan, serta membangun kapasitas masyarakat agar mampu beradaptasi dan berpartisipasi aktif dalam perubahan tersebut. Dengan demikian, penerapan ekonomi hijau bukan hanya sekadar pendekatan teknis dalam pengelolaan sumber daya, melainkan merupakan paradigma pembangunan baru yang mengintegrasikan nilai-nilai ekologis, sosial, dan ekonomi secara holistik. Penerapannya diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap lingkungan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.3.4. Transformasi Digital

Bagian ini menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Transformasi digital menjadi salah satu prasyarat dalam peningkatan produktivitas ekonomi dan peningkatan pelayanan publik secara umum. Penerapan teknologi digital dapat mendorong efisiensi dalam proses produksi ekonomi daerah dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan publik secara umum. Digitalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, transformasi digital menjadi kondisi yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui tingkat digitalisasi di daerah. Saat ini, indikator Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi masih dihitung hingga level provinsi saja, sehingga gambaran pembangunan TIK di Kabupaten Tebo mengacu pada pembangunan TIK Provinsi Jambi.



Gambar 2. 44 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jambi
 Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024

Pembangunan TIK di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan positif pada kurun waktu 2019 sampai dengan data termutakhir tahun 2023, capaian tahun 2023 sebesar 5,92 meningkat 0,75 poin jika dibandingkan capaian pada tahun 2018. Capaian tertinggi terdapat pada sub indeks akses dan infrastruktur, mencapai 6,08 pada tahun 2023. Provinsi Jambi menempati kategori Indeks Pembangunan TIK sedang dengan rata-rata capaian pada kurun waktu 2019-2023 sebesar 5,622. Indeks Pembangunan TIK disusun berdasarkan sebelas indikator yang terhimpun dalam tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta keahlian TIK sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union (ITU). Data yang digunakan merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS serta kompilasi produk data administrasi dari berbagai instansi terkait.

Transformasi digital di Kabupaten Tebo diarahkan untuk pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah, sehingga tidak ada lagi kawasan *blankspot* yang belum memiliki akses internet. Upaya yang perlu dipertimbangkan pemerintah daerah salah satunya dengan perluasan layanan akses internet terhadap fasilitas layanan dasar dengan kualitas layanan dan keamanan jaringan internet yang sama merata di perkotaan dan perdesaan, sehingga selama kurun waktu 5 tahun kedepan seluruh kawasan *blankspot* sudah tidak ada. Selain pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik pemerintahan juga melakukan transformasi dengan memperbaiki portal layanan pemerintah daerah dan jumlah

layanan yang sudah terintegrasi pada portal layanan dalam mendukung percepatan transformasi digital sesuai yang telah diamanatkan dalam Perpres 95/2018; Perpres 82/2023, surat edaran Menteri dalam negeri nomor 000.9.3.2/92/SJ tentang peran pemda untuk memastikan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital di daerah Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Sub-bab ini menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencerminkan tingkat investasi suatu negara dalam aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dalam jangka panjang. Investasi ini mencakup berbagai jenis barang modal tetap, seperti pembangunan gedung perkantoran, pabrik, dan perumahan, serta pengadaan mesin, peralatan, dan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya. PMTB berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi suatu negara, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperkuat daya saing industri dan sektor usaha. Berikut adalah data tentang PMTB di Kabupaten Tebo.

Tabel 2. 20 Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB) (Juta Rupiah) Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024**
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.544.010,13	3.792.453,98	4.029.443,56	4.438.848,62	4.713,24

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Pembentukan modal tetap bruto Kabupaten Tebo mengalami peningkatan 894.838,49 juta rupiah dari tahun 2020 hingga 2023. PMTB pada tahun 2024 belum bisa dijadikan acuan karena masih menggunakan angka sementara. PMTB Kabupaten Tebo dapat ditingkatkan dengan meningkatkan realisasi nilai investasi modal asing dan dalam negeri di Kabupaten Tebo. PMTB dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo jika ditingkatkan secara berkesinambungan.

2.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor barang dan jasa adalah selisih antara total ekspor dan total impor suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Net ekspor digunakan untuk menghitung kontribusi perdagangan internasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Net ekspor positif (surplus perdagangan) terjadi jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti negara tersebut memiliki surplus perdagangan, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat nilai mata uang.

Tabel 2. 21 Net Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) (Juta Rupiah) Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024**
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.812.063,74	3.212.017,08	4.982.201,56	5.270.776,03	6.782,52

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Net ekspor negatif (defisit perdagangan) terjadi jika impor lebih besar daripada ekspor, berarti negara mengalami defisit perdagangan, yang dapat menyebabkan ketergantungan pada produk luar negeri dan melemahkan mata uang. Berikut adalah data net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Tebo. Net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Tebo mengalami peningkatan sebesar 3.458.712,29 juta rupiah dari tahun 2020 hingga 2023. Net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Tebo pada tahun 2024 belum bisa dijadikan acuan karena masih menggunakan angka sementara. Net ekspor barang dan jasa dapat ditingkatkan dengan peningkatan kualitas produk komoditas ekspor dan perluasan jaringan kerjasama ekspor barang dan jasa. Net ekspor barang dan jasa dapat berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo.

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

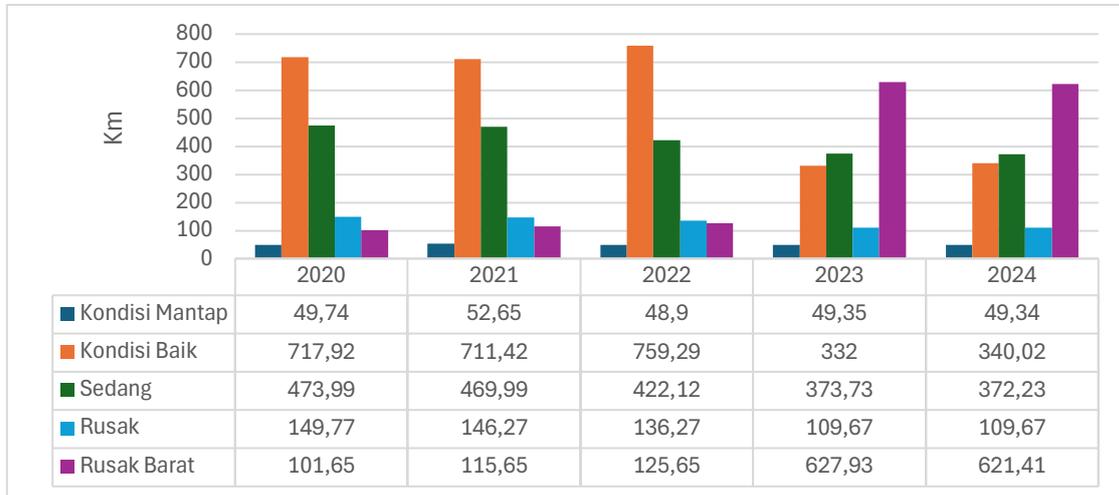
Kondisi fasilitas/infrastruktur daerah digunakan untuk menjelaskan kondisi daya saing daerah dengan menampilkan kondisi infrastruktur, baik yang sudah tersedia, maupun yang akan dibangun sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan. Penjelasan gambaran daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah eksisting sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Komponen indeks infrastruktur daerah digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan dukungan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lain.

2.3.6.1. Indeks Infrastruktur Daerah

Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Tebo sesuai dengan perencanaan dalam dokumen tata ruang terdiri dari jaringan jalan, jaringan kereta api, serta jaringan sungai, danau, dan penyeberangan. Jaringan jalan di Kabupaten Tebo berdasarkan kelas jalannya terbagi menjadi Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Sedangkan jika dilihat dari fungsi jalannya antara lain jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Kabupaten Tebo dilalui Jalur Lintas Sumatera yang menghubungkan langsung Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau dengan Kabupaten Tebo. Jalur Lintas Sumatera juga menghubungkan pusat Pemerintahan Kabupaten Tebo dengan bandar udara di Kabupaten Bungo yang merupakan gerbang penghubung beberapa daerah di Sumatera bagian tengah.

Aksesibilitas wilayah Kabupaten Tebo didukung dengan adanya Terminal penumpang tipe C yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang serta terminal barang yang berada di Kecamatan Tebo Tengah. Jaringan transportasi darat di Kabupaten Tebo juga akan diperkuat dengan adanya jaringan kereta api yang menghubungkan antar kota dengan dilengkapi stasiun penumpang di Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan Tebo Ilir. Alur pelayaran sungai dan danau merupakan Alur Pelayaran Kelas II yang dilengkapi dengan pelabuhan sungai dan danau pengumpan yang terdapat di Kecamatan Tebo Tengah.

Infrastruktur jalan di Kabupaten Tebo berdasarkan kewenangannya terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Total panjang jalan pada tahun 2020-2024 mencapai 1.492,67 Km. Jalan yang terdapat di Kabupaten Tebo didominasi oleh jalan kewenangan kabupaten dari keseluruhan jalan terbangun.



Gambar 2.45 Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Tebo Berdasarkan Kondisi Tahun 2020-2024 (Km)

Sumber: Kabupaten Tebo dalam Angka, 2020-2025

Pemerintah Kabupaten Tebo terus berupaya meningkatkan mutu jalan, tercatat hingga tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat ruas jalan dengan kondisi rusak hingga rusak berat. Belum optimalnya penganggaran sekaligus luasnya wilayah Tebo menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan. Hal inilah yang harus menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan masyarakat.

Tabel 2. 22 Kondisi Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

No	Perumahan dan Permukiman	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah tangga yang sudah terakses air bersih	58,72	61,63	65,34	68,6	69,33
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	86,16	86,71	87,18	87,96	88,26
3	Persentase Rumah Layak Huni	91,94	96,71	94,59	93,8	93,76

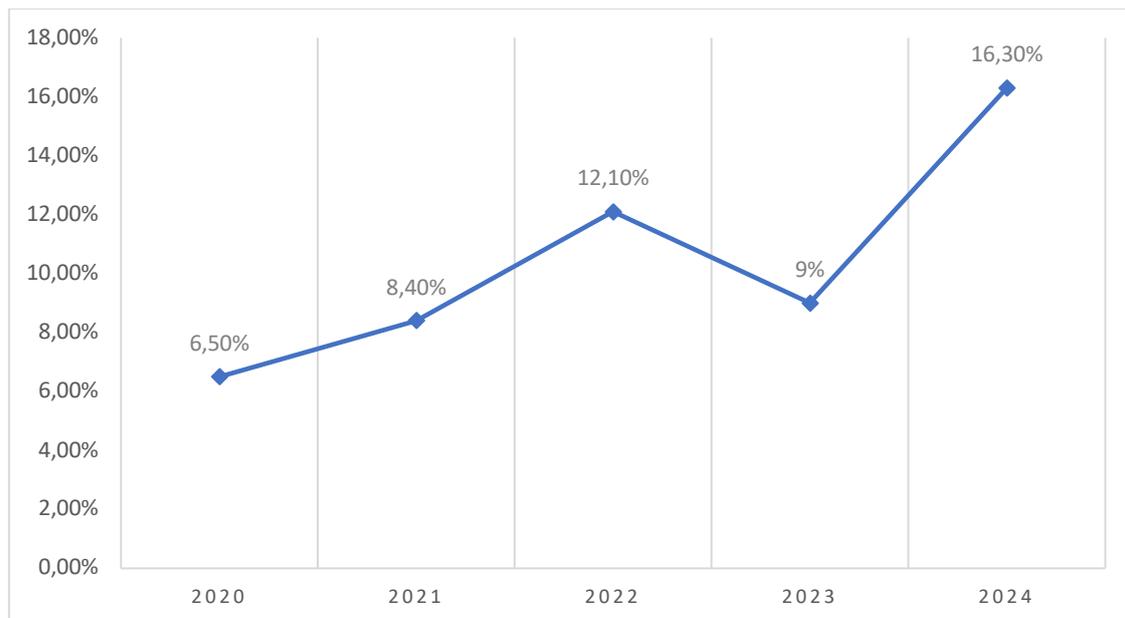
No	Perumahan dan Permukiman	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase kawasan kumuh	N/A	0,4	N/A	1,32	0,6

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Cakupan pelayanan Infrastruktur dasar mencakup akses terhadap air bersih, sanitasi layak, rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tebo terus mengalami perbaikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi pada tahun 2020 berturut-turut adalah 69,33% dan 88,26%. Cakupan layanan air bersih dinilai masih rendah, karena baru kurang lebih setengah dari total rumah tangga di Kabupaten Tebo yang telah memiliki akses. Sedangkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan rumah terbangun.

2.3.6.2. Persentase Desa Mandiri

Pembangunan desa merupakan agenda strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu konsep yang menjadi fokus utama adalah Desa Mandiri. Konsep ini diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Desa Mandiri diharapkan mampu mengelola potensi lokal secara optimal, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Lebih lanjut lagi, desa mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Berikut disajikan capaian dari persentase desa mandiri di Kabupaten Tebo.



Gambar 2. 46 Persentase desa mandiri di Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

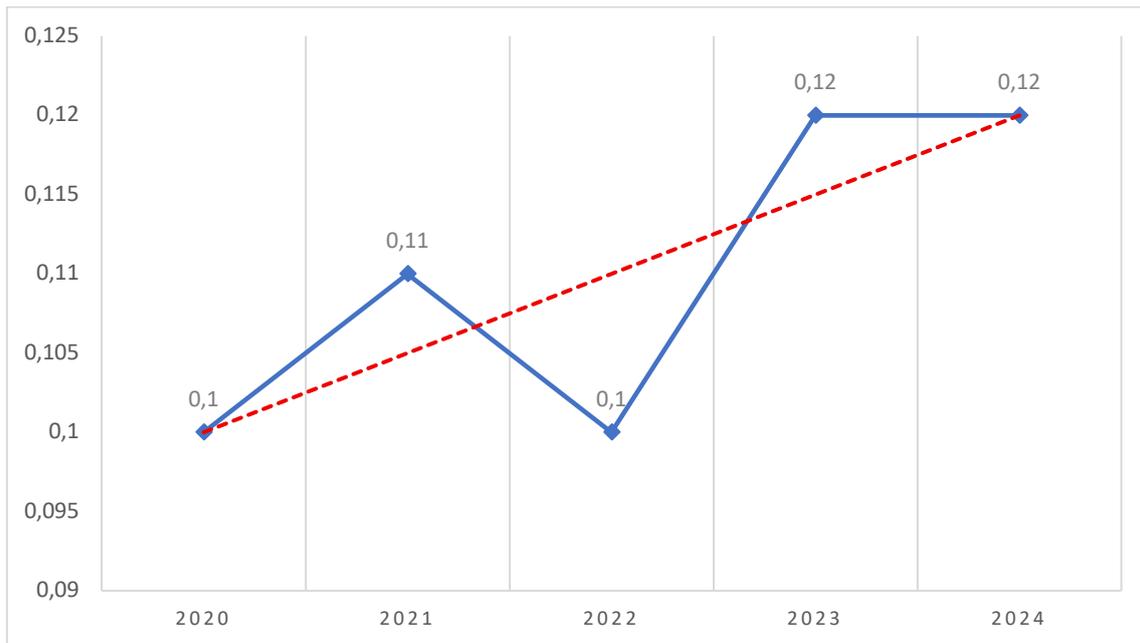
Capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Tebo memiliki tren peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi tersebut memberikan dampak positif bagi pembangunan desa di Kabupaten Tebo, yang mana status desa mandiri berpengaruh signifikan terhadap besaran dana desa yang diterima. Desa yang mencapai status mandiri berpotensi menerima alokasi dana yang lebih besar untuk memperkuat pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Sub-bab ini menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Tingkat Inflasi, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah

2.3.7.1. Rasio Pajak terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Tingginya rasio pajak dapat mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah yang tinggi, sehingga pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD dalam membiayai pembangunan daerah.



Gambar 2.47 Rasio pajak terhadap PDRB di Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

Rasio pajak terhadap PDRB mengalami tren yang relatif meningkat pada kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, peningkatan tidak terjadi signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak berkolerasinya antara pertumbuhan pajak terhadap pertumbuhan PDRB suatu daerah yang dibatasi oleh kewenangan pengelolaan pajak di tingkat kabupaten. Apabila pertumbuhan PDRB lebih besar maka Rasio Pajak akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya apabila pertumbuhan nilai pajak daerah tinggi maka Rasio Pajak akan mengalami peningkatan. Sehingga perlu upaya dalam hal mengoptimasi penerimaan daerah khususnya pada pajak daerah kewenangan kabupaten yang dilakukan, diantaranya dengan meningkatkan

penagihan piutang pajak dan digitalisasi layanan yang juga berperan dalam mendorong kepatuhan serta ketaatan pajak.

2.3.7.2. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu, biasanya dihitung dalam satu tahun. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang, yang berarti bahwa jumlah uang yang sama akan mampu membeli lebih sedikit barang atau jasa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Fenomena ini terjadi akibat berbagai faktor, seperti meningkatnya permintaan yang tidak diimbangi oleh pasokan, kenaikan biaya produksi, perubahan nilai tukar mata uang, serta kebijakan moneter dan fiskal suatu negara. Tingkat inflasi yang terkendali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dan konsumsi, tetapi jika inflasi meningkat secara tidak terkendali, hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan biaya hidup, dan mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah data inflasi di Kabupaten Tebo. Data ini mengacu pada data inflasi di Provinsi Jambi.

Tabel 2. 23 Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Inflasi	3,09	1,67	6,35	3,22	1,43

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Inflasi di Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 1,66 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengendalian harga serta stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Faktor-faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, penguatan sektor produksi, serta kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok turut berkontribusi terhadap capaian ini. Selain itu, kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga kestabilan harga juga menjadi salah satu pendorong utama menurunnya laju inflasi di Provinsi Jambi.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Kualitas

tata kelola pemerintahan berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan daerah. Komponen dalam analisis aspek pelayanan umum ini mencakup: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial, serta Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan, semakin tinggi potensi meraih keberhasilan pembangunan daerah. Adapun indikator dalam menganalisis aspek pelayanan umum, yaitu Indeks Reformasi Hukum, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Nilai SKM, Nilai SAKIP Daerah, Opini BPK, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Profesionalitas ASN.

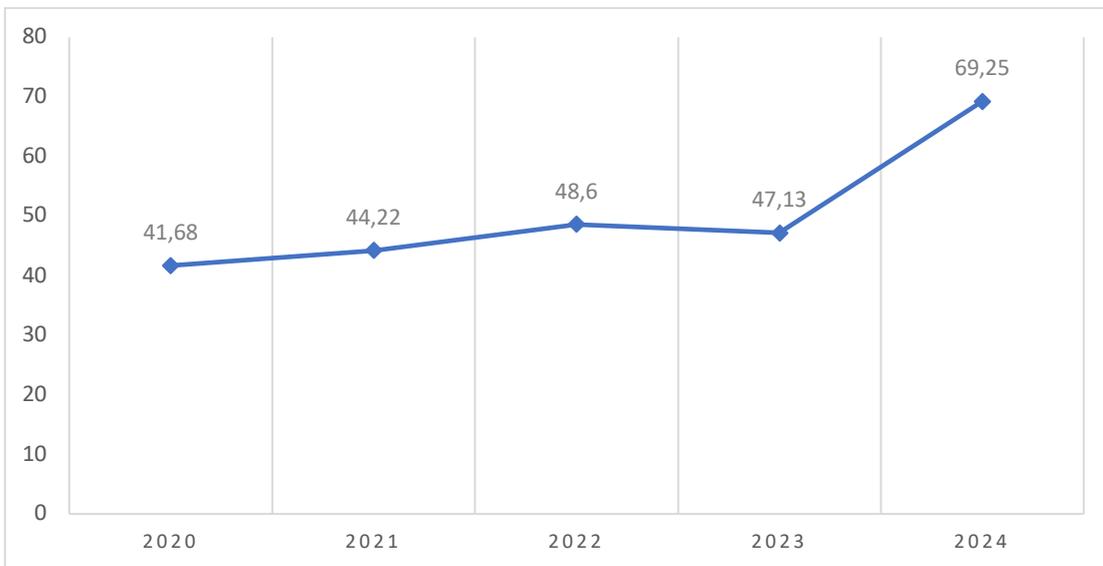
2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum (IRH) bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel dan sesuai dengan target reformasi birokrasi. IRH juga berfokus pada penguatan sistem regulasi nasional dan daerah. Dengan demikian, IRH menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola hukum yang lebih merata.

Capaian IRH di Kabupaten Tebo tahun 2024 adalah sebesar 87,36. Pengukuran tersebut pertama kalinya dilaksanakan untuk Kabupaten Tebo, dan memiliki kategori capaian sangat baik. Kondisi ini tentu menjadi capaian kinerja yang baik bagi Kabupaten Tebo. Untuk dapat meningkatkan capaian IRH, beberapa upaya yang perlu diperkuat diantaranya, memperkuat koordinasi antara lembaga terkait untuk harmonisasi regulasi, mendorong regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan, menyederhanakan regulasi pada setiap jenjang peraturan perundang-undangan, meningkatkan aspek pelayanan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perancang peraturan perundang-undangan.

2.4.1.2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator komposit yang dapat memberikan gambaran tentang tata kelola pemerintahan. Pelaksanaan RB dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun capaian IRB Kabupaten Tebo dapat dilihat pada grafik berikut ini.



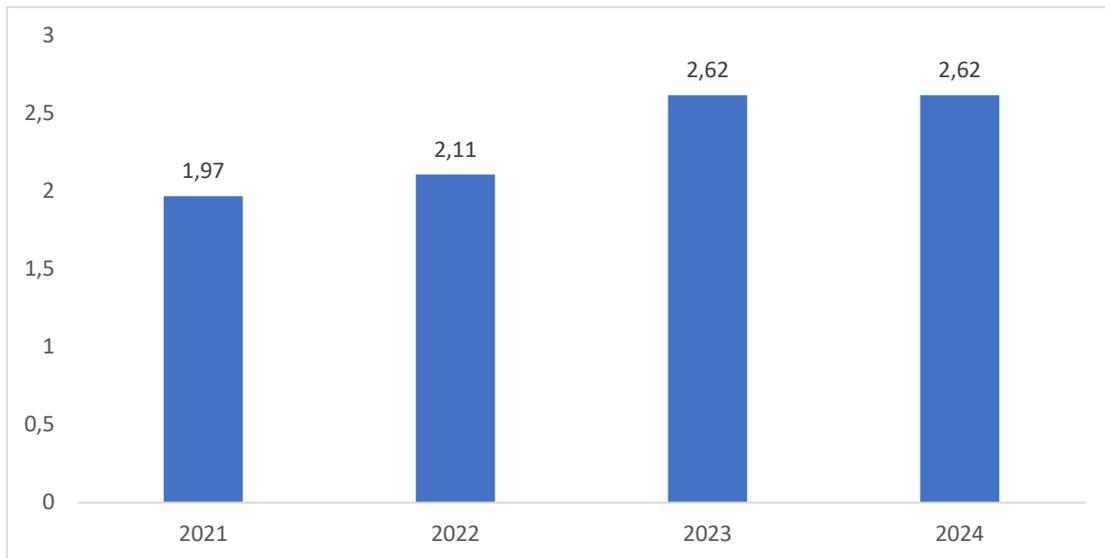
Gambar 2. 48 Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tebo

Sumber: Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, 2025

Selama lima tahun terakhir, kinerja RB di Kabupaten Tebo memiliki tren meningkat. Peningkatan kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas tata Kelola pemerintahan Pemerintah Kabupaten Tebo semakin baik. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa komponen IRB sudah optimal, seperti akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan, digitalisasi pemerintahan, dan pelayanan publik. Capaian kinerja reformasi birokrasi di atas dipengaruhi oleh beberapa kinerja dalam komponen reformasi birokrasi. Komponen reformasi birokrasi yang sangat mempengaruhi kinerjanya, yaitu komponen akuntabilitas, baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan.

2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik merupakan instrumen untuk menilai kualitas pelayanan publik. Adapun Kualitas pelayanan publik dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek, seperti, bukti fisik (*tangible*), kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Standar pelayanan publik yang baik disusun dengan memperhatikan prinsip, sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan berkeadilan.



Gambar 2. 49 Indeks SPBE Kabupaten Tebo tahun 2021-2024

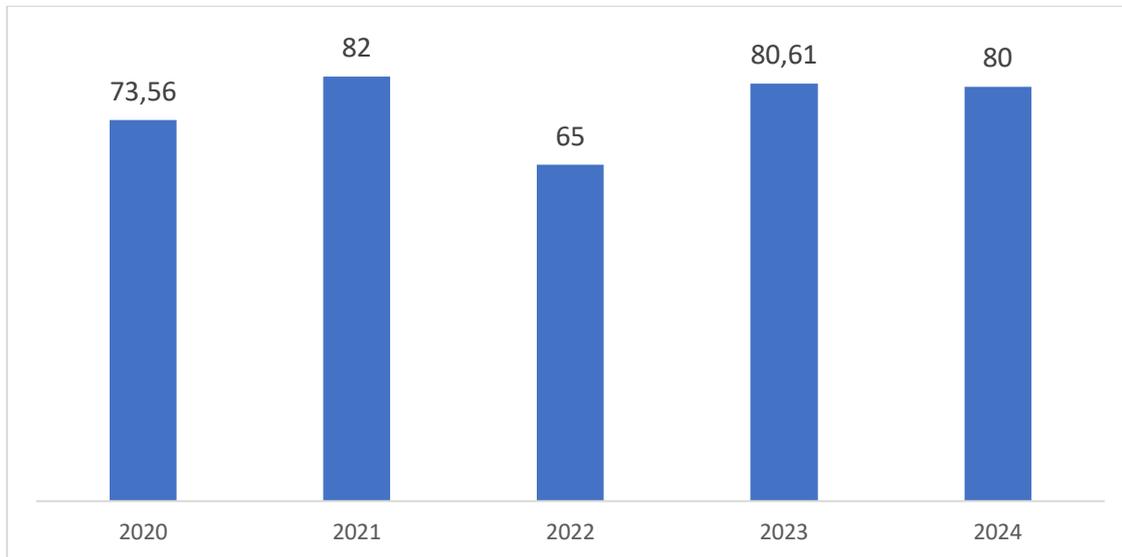
Sumber: Diskominfo Kabupaten Tebo, 2025

Dari sisi pelayanan publik, menunjukkan kualitas pelayanan publik semakin optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan diantaranya dengan kinerja digitalisasi pemerintahan yang juga meningkat, direpresentasikan dengan indeks SPBE yang memiliki tren semakin meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menandakan bahwa digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Tebo sudah berjalan semakin optimal dan terintegrasi.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Aspek ini mencerminkan dinamika pembangunan hukum yang secara strategis diarahkan untuk menegakkan supremasi hukum yang menjunjung keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta berakar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, agenda pembangunan demokrasi ditujukan

untuk mengonsolidasikan demokrasi substansial yang merepresentasikan aspirasi dan mandat rakyat secara autentik. Dalam konteks ini, Indikator proksi yang digunakan untuk mengukur capaian dan tantangan dalam aspek ini adalah Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut:



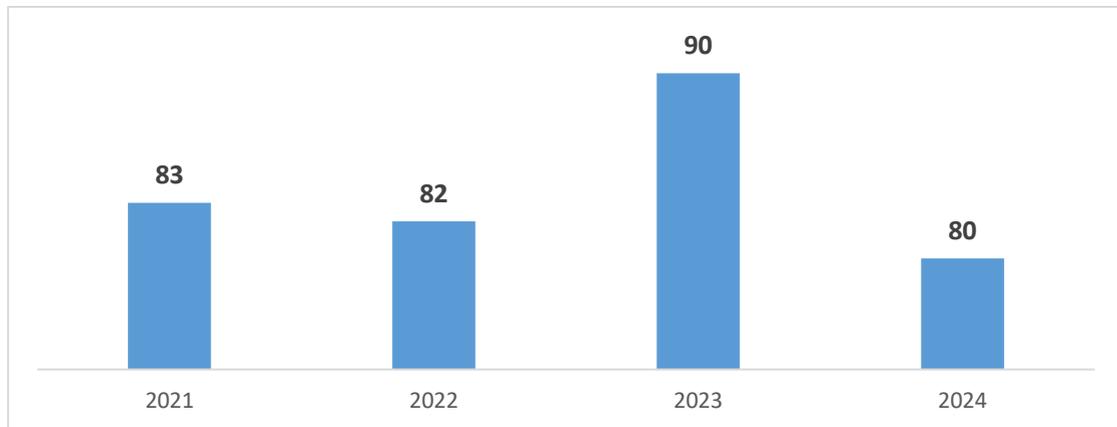
Gambar 2. 50 Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo, 2025

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Tebo dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan. Setelah mencatat angka 73,56 pada tahun 2020, IDI meningkat tajam menjadi 82 pada 2021. Namun, penurunan drastis terjadi di tahun 2022 dengan capaian hanya sebesar 65, menandakan adanya tekanan terhadap dimensi demokrasi, termasuk kemungkinan kendala dalam penegakan hukum yang adil dan jaminan terhadap kebebasan sipil. Pemulihan terlihat pada tahun 2023 dan 2024 dengan angka yang kembali stabil di atas 80 (masing-masing 80,61 dan 80), mengindikasikan perbaikan tata kelola hukum, keamanan, dan kualitas demokrasi substantif.

Capaian ini mencerminkan bahwa konsolidasi demokrasi di Kabupaten Tebo masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Oleh karena itu, penguatan pada aspek hukum yang berkeadilan, sistem keamanan yang responsif terhadap hak warga, serta pengembangan demokrasi yang partisipatif dan substansial perlu menjadi prioritas lintas sektor dalam perencanaan pembangunan. Penjaminan ruang kebebasan sipil, perlindungan terhadap

kelompok rentan, serta penyelesaian kasus hukum secara transparan harus dijadikan indikator keberhasilan kinerja pelayanan publik ke depan. Indikator yang digunakan sebagai proksi selanjutnya adalah Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, berikut analisisnya:



Gambar 2. 51 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Tebo

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo, 2025

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Tebo menunjukkan kecenderungan fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021 dan 2022, indeks tercatat relatif stabil di angka 83 dan 82. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2023 dengan nilai tertinggi mencapai 90, yang dapat mencerminkan peningkatan efektivitas aparat keamanan, penegakan hukum, serta respons kebijakan terhadap potensi gangguan ketertiban umum. Capaian tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan sebesar 10 poin menjadi 80 pada tahun 2024.

Penurunan ini perlu dicermati secara kritis, mengingat ketenteraman dan ketertiban merupakan prasyarat utama dalam menjamin ruang demokrasi yang aman dan inklusif, serta dalam menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan. Fluktuasi nilai indeks ini mengindikasikan perlunya konsistensi dalam tata kelola keamanan, pencegahan konflik horizontal, pembangunan sistem kewaspadaan dini, serta kolaborasi sinergis antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

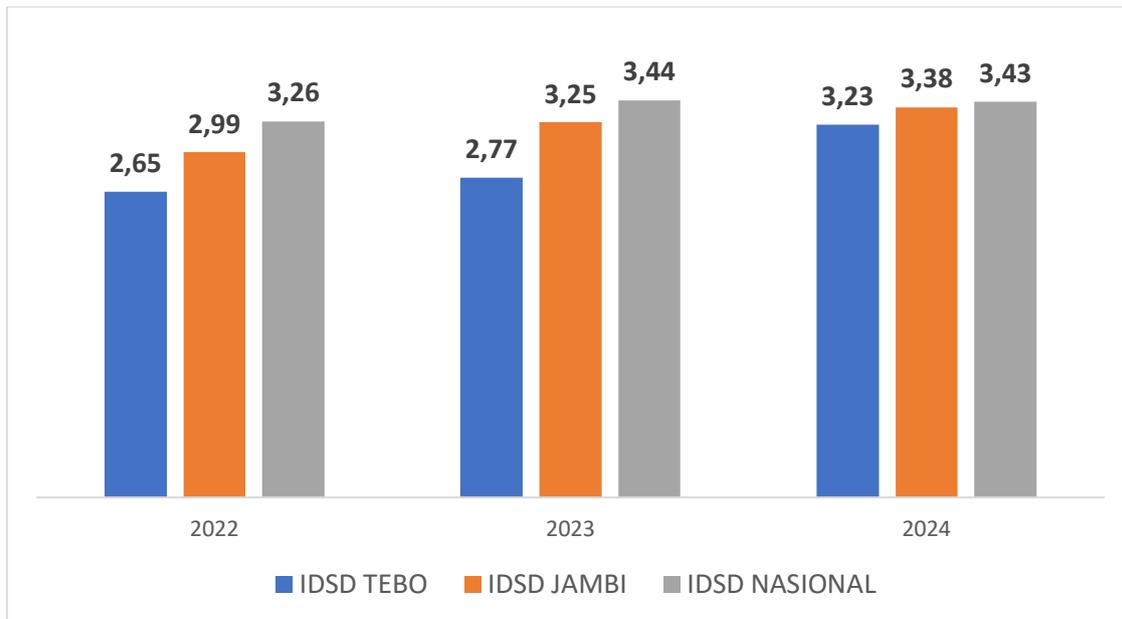
Dalam konteks kerangka perencanaan pembangunan daerah, penguatan sistem keamanan yang tangguh dan responsif perlu diintegrasikan dengan reformasi hukum dan pendalaman demokrasi. Dengan demikian, tercipta

ekosistem tata kelola pemerintahan yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menjamin keadilan hukum dan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen strategis untuk mengukur kapasitas suatu daerah dalam mendorong produktivitas, akselerasi pembangunan, serta kemampuan bersaing secara mandiri dalam kerangka sistem nasional. IDSD digunakan sebagai alat ukur keberhasilan daerah dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan komparatif, sekaligus menjadi penopang daya saing nasional. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pengukuran IDSD memiliki fungsi penting sebagai dasar kebijakan yang bersifat lintas sektor, guna memperkuat sinergi program pembangunan dan arah kebijakan peningkatan daya saing wilayah.

Pada tahun 2023, metodologi pengukuran IDSD diselaraskan dengan Global Competitiveness Index (GCI) yang dikembangkan oleh World Economic Forum. Penyesuaian metodologis ini menghasilkan empat komponen utama dalam konstruksi daya saing, yaitu: (1) lingkungan pendukung, (2) sumber daya manusia, (3) pasar, dan (4) ekosistem inovasi. Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam 12 pilar daya saing dan diukur melalui 63 indikator untuk tingkat provinsi dan 48 indikator untuk tingkat kabupaten/kota. Skor IDSD dinyatakan dalam rentang 0 hingga 5, di mana semakin tinggi skor menunjukkan kinerja daya saing daerah yang semakin optimal. Selanjutnya, capaian IDSD Kabupaten Tebo akan dikomparasikan dengan capaian provinsi dan nasional sebagai bahan evaluatif dan proyeksi penguatan daya saing daerah ke depan. Berikut capaian IDSD Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Nasional.



Gambar 2. 52 Perbandingan Skor Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi Jambi, dan Kabupaten Tebo

Sumber: BRIN, 2025

Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Tebo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir, meskipun masih menyisakan kesenjangan jika dibandingkan dengan rerata Provinsi Jambi maupun Nasional. Pada tahun 2022, nilai IDSD Kabupaten Tebo tercatat sebesar 2,65, jauh tertinggal dari skor Provinsi Jambi yang mencapai 2,99 dan nasional sebesar 3,26. Kesenjangan ini menunjukkan adanya tantangan struktural yang signifikan, terutama dalam aspek fundamental seperti kualitas infrastruktur, daya dukung regulasi, efisiensi pelayanan publik, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi ekonomi berbasis inovasi dan digitalisasi.

Memasuki tahun 2023, capaian IDSD Kabupaten Tebo mengalami peningkatan menjadi 2,77. Namun demikian, selisih dengan Provinsi Jambi (3,25) dan nasional (3,44) belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan dalam tata kelola pembangunan, intervensi lintas sektor belum sepenuhnya menghasilkan efek pengungkit yang signifikan terhadap daya saing daerah, utamanya apabila dibandingkan secara vertikal terhadap provinsi dan nasional. Kenaikan yang moderat ini juga memperlihatkan bahwa Tebo masih

berhadapan dengan hambatan institusional dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan ekonomi lokal dengan tuntutan globalisasi dan kompetisi antarwilayah.

Perubahan yang lebih substantif mulai terlihat pada tahun 2024, di mana capaian IDSD Kabupaten Tebo melonjak secara signifikan menjadi 3,23. Nilai ini mendekati capaian Provinsi Jambi (3,38) dan rerata nasional (3,43), dengan selisih yang kian menyempit masing-masing hanya sebesar 0,15 dan 0,20 poin. Lonjakan ini menandakan adanya perbaikan sistemik dalam pilar-pilar utama daya saing, khususnya pada aspek ekosistem inovasi, pembenahan layanan publik, dan dinamika pasar lokal yang semakin responsif. Reformasi kebijakan yang lebih terarah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan digital, serta peningkatan kualitas tata kelola birokrasi publik di tingkat daerah menjadi katalis penting bagi akselerasi daya saing ini. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama dan kolaborasi antar berbagai stakeholder. Kerjasama tersebut tidak hanya antar institusi pemerintah yang ada di daerah tetapi juga institusi pemerintah pusat, swasta, organisasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat.

2.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja pemerintah secara umum diartikan sebagai hasil dari pelaksanaan program pemerintah yang telah dicapai, terkait dengan pemanfaatan anggaran yang terukur baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dalam konteks dokumen ini, kinerja pemerintah merujuk pada capaian penyelenggaraan tujuan, sasaran, dan program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo pada dokumen RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Evaluasi capaian kinerja daerah ini tidak hanya memberikan gambaran tentang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan tingkat keberhasilan kepemimpinan kepala daerah secara menyeluruh. Capaian ini menjadi acuan penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan serta efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan RPD sudah berjalan optimal yang ditandai dengan rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan, yaitu

sebesar 99,91 persen pada tahun 2023 dan 102,98 persen pada tahun 2024 dengan kategori sangat tinggi. Namun demikian, apabila ditinjau dari setiap capaian kinerja, masih ditemukan hasil kinerja yang perlu untuk dioptimalkan dan ditingkatkan capaiannya. Capaian indikator kinerja berguna untuk mengetahui tingkat kinerja pembangunan daerah. Penyajian hasil analisis capaian indikator kinerja yang saling berkesinambungan mulai dari tujuan yang didukung oleh sasaran, dan sasaran yang didukung oleh program dapat dijadikan bahan dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan. Berikut capaian kinerja indikator kinerja dari Kabupaten Tebo, pada tahun 2023-2024 dari RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

Hasil identifikasi dari setiap capaian kinerja, diperoleh kesimpulan yang selanjutnya menjadi bahan untuk rekomendasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode berikutnya di Kabupaten Tebo. Rekomendasi perencanaan pembangunan disusun menjadi dua rekomendasi, yaitu rekomendasi substansi dan rekomendasi teknis. Adapun masing-masing rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

Rekomendasi Substansi

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):
 - Optimalisasi sektor kesehatan, pendidikan, dan pengarusutamaan gender.
 - Di bidang kesehatan, optimalisasi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan.
 - Di bidang pendidikan, penguatan angka partisipasi murni dan kasar dengan peningkatan sarana pendidikan serta kualitas pengajaran.
 - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui program inklusif yang terintegrasi sebagai bagian dari pengarusutamaan gender.
- Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan:
 - Penguatan dan pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, dan industri pengolahan, dengan menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah melalui inovasi dan penguatan akses pasar.

- Peningkatan daya saing PDRB per kapita melalui diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal
- Penurunan Ketimpangan Sosial:
 - Optimalisasi program pengentasan kemiskinan dengan perluasan jangkauan perlindungan sosial berbasis data.
 - Peningkatan pemberdayaan UMKM dan serapan tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran terbuka.
- Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan:
 - Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan penguatan program mitigasi bencana, pengurangan kawasan kumuh, dan perlindungan ekosistem lokal.
- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan:
 - Fokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui reformasi birokrasi dan reformasi tata kelola keuangan daerah.
 - Penguatan inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat.
 - Optimalisasi sinergitas antara perangkat daerah, swasta, dan kelompok masyarakat.
- Penguatan Nilai-nilai Sosial dan Keagamaan:
 - Implementasi nilai-nilai agama untuk meningkatkan kondusivitas sosial, seperti penguatan ketertiban umum dan partisipasi komunitas keagamaan.

Rekomendasi Teknis

- Keselarasan Target Kinerja:
 - Peningkatan kualitas perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang saling mendukung dan berorientasi hasil.
- Monitoring dan Evaluasi Berkala:
 - Pelaksanaan pengendalian dan monitoring secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja dan validitas data.
- Sinkronisasi Perencanaan:

- Optimalisasi perencanaan daerah yang selaras dengan perencanaan perangkat daerah agar mendukung hasil pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi:
 - Implementasi teknologi informasi dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi.

Evaluasi capaian kinerja daerah ini tidak hanya memberikan gambaran tentang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan tingkat keberhasilan kepemimpinan kepala daerah secara menyeluruh. Capaian ini menjadi acuan penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan serta efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Lebih lanjut lagi, Kinerja urusan pemerintahan daerah juga dapat dilihat dari capaian indikator kinerja kunci (IKK) selama lima tahun terakhir. Berikut capaian kinerja indikator kinerja kunci (IKK) Kabupaten Tebo tahun 2020–2024.

Tabel 2. 24 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
ASPEK PELAYANAN UMUM							
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	75,53	64	77,26	77,07	59,89
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	97,99	99,57	99,91	98,94	98,47
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	76,58	78,66	78,51	82,23	80,82
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	3,77	3,77	5,68	4,52	25,86
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,04	0,13	0,22	0,32	0,5
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	50	60	70	80	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	88,8	91,06	91,06	85,27	74,41
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	84,51	88,73	87,77	82,7	75,57
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	91,51	90,08	100,19	92,25	79,66
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	72,57	64,55	86,45	91,85	79,13
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	68,64	93,9	68,36	100	99,66
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	40,44	89,07	87,22	90,25	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	50,71	81,38	90,88	99,76	84,3
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	20,41	30,81	79,19	82,5	89,97
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,45	113,12	124,5	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	105,56	116,85	97,07	99,23	92,59
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	76,23	40,43	87,22	100	57,84
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	54,33	65,91	57,08	81,68	80,33
C	URUSAN PEMERINTAHAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,03	0,17	0,31	0,44	0,72
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	3,33	3,55	3,76	3,98	4,2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	58,82	61,63	65,34	68,6	69,33
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	94,48	86,16	87,81	87,96	88,26
5	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	83,51	86,81	90,11	93,40	100,00
6	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	49,74	52,34	67,9	48,9	49,34
7	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	N/A	3,836	3,749	3,678	5,04
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,41	3,29	5,41	6,11	6,14
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	76	80	87,03	95,15	96,24
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	82,35	84,88	87,41	89,94	95
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	93,13
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Angka	N/A	552	181.598	199.567	203.605
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Angka	N/A	N/A	80	2.150	2.400

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	N/A	65	3	1.979	76.65 1
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	83,33	80,22	78,79	73,42	88,89
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	40,4	13,7	2,9	4,3	19,5
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	87,5	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0	0	0	0	0,28
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	32	37	35,23	38	34
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	36,22	38,82	40,22	38,46	32,6
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	0	0,056	9,87	3,42	1,34
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	1,77	2,76	3,74	4,73	6,7
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,013 5	0,020 3	0,01	0,013	0,024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	%	0	0,0056	0	0	0,007
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	0,7	0,7	8,75	49,26	27,91
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	0	0	0	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	100	100	100	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	0	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0	0	0	0	0
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	68,37	73,23	74,63	67,62	67,82
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	4,6	6,3	22,71	70,84	25,02
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	65	68,75	30	28	30,95
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,68	99,99	98,83	99,49	99,71
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	23,42	31,28	31	47,03	55,9
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	92,58	95,3	96,71	97,66	98,02

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	0	0	0	0	0
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	13,21	14,83	16,45	18,07	21,31
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	2,3	N/A	N/A	2,26	2,35
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	74,07	N/A	N/A	75,14	70,1
3	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	N/A	N/A	N/A	10,11	6,9
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,52	0,54	0,56	0,7	0,61
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	N/A	0	0	0	0
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	18,92	40,54	45,95	48,84	70,73
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	88,84	194	94,74	95,12	68,13
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	12,77	39,56	28,12	7,87	36,66
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	100	100	100	100	100
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	%	11,66	903	118,19	100,4	75,11
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,43	0,69	0,96	1,22	0,71

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	3,71				6,38
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	0	2	2	2	3
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	18,92	40,54	45,95	48,84	70,73
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
O	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	7,69	50	26	70,83	0
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Nilai	N/A				0
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	62,93	57,87
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	N/A	N/A	71,55	71,81
R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	0,83	1,22	2	2	37
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	1,25	1,98	2,5	2,5	60
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	177,45	98,32	99,2	102,02	105,49
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
1	Persentase Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	100	-100	100	-55	625

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	- 17,26	67,35	59,17	11,06	15,11
3	Tingkat hunian akomodasi	%	36,53	52,58	58,62	56,3	63,7
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,36	0,37	0,37	0,39	0,4
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	N/A	N/A	2,25	2,28	2,83
C URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	0,33				1,65
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular persentase kasus zoonosis kab/kota	%	311,6 6	- 23,70	- 33,55	- 44,68	- 61,25
D URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	100	100	100	100	100
E URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP) Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	0,5	0,59	0,86	1,12	84,74
2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	%	98,39	100,0 0	92,38	84,34	86,77
3	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	%	51,78	51,41	51,04	50,66	69,09
4	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	9,27	43,3	62	92	110,6 4
F URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	1,05	1,2	16,39	20,22	6,24
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	N/A	20	20	20	20
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	N/A	N/A	50	49,2	44

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100
G	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TRANSMIGRASI						
1	Jumlah Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Jumlah	27 desa	27 desa	27 desa	27 desa	27 desa
2	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah	27 desa	27 desa	27 desa	27 desa	27 desa
3	Jumlah satuan permukiman yang dibina	Jumlah	27 desa	27 desa	27 desa	27 desa	27 desa
IV	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
A	PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	12,44	12,07	11,70	11,32	10,58
2	Rasio PAD	%	0,019	1,57	3,12	4,66	7,76
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Level 2	Level 2	3,000	3,203	3.211
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum expenditures	%	53,17	55,14	57,12	62,91 9	63,04
6	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
B	PENGADAAN						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	N/A	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	82,67	83,93	85,19	86,44	88,96
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	29,5	28,99	28,49	27,98	26,97

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah daerah	%	N/A	N/A	N/A	149,27	-15,08
C KEPEGAWAIAN							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	70,11	71,00	71,89	72,80	74,55
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9,79	12,53	15,27	18,02	23,5
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	05.16	25,36	27,50	28,66	33,93
D MANAJEMEN KEUANGAN							
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	5,43	5,50	5,57	7,89	5,77
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	1,1	1,51	1,92	1,8	3,16
3	Manajemen Aset	Nilai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5,2	5,37	5,54	5,5	6,05
E TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	100	100	100	100	100
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100

Sumber: Olah LPPD, 2025

2.5. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

2.5.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir (2020-2024)

Gambaran ringkas keuangan daerah melakukan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024. Kinerja pelaksanaan APBD berupa analisis terhadap realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut ini adalah gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD masa lalu Pemerintah Kabupaten Tebo sehingga gambaran pengelolaan keuangan tersebut dapat dijadikan landasan dalam penyusunan proyeksi dan target pendapatan dan belanja daerah yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tebo untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan ketiga komponen tersebut, perlu dilakukan analisis perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan tentang jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2020-2024. Analisis inilah yang diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

Dalam kurun waktu 2020-2024, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 1,74 persen sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 3,14 persen dan rata-rata pertumbuhan pembiayaan mencapai 39,98 persen. Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Tebo dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 25 Realisasi APBD Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI APBD LIMA TAHUN TERAKHIR				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.085.601.955.507,19	1.173.873.076.528,30	1.175.441.007.742,28	1.213.245.434.539,33	1.254.676.201.969,41
4,1	Pendapatan Asli Daerah	78.459.424.382,75	92.915.275.640,96	86.173.512.980,28	91.771.064.563,33	97.477.335.761,15
4,2	Pendapatan Transfer	951.225.215.724,35	1.024.054.976.682,00	1.075.614.494.762,00	1.107.752.193.166,00	1.132.665.413.208,26
4,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.917.315.400,09	56.902.824.205,34	13.653.000.000,00	13.722.176.810,00	24.533.453.000,00
5	BELANJA	842.932.846.239,48	964.953.562.563,25	1.162.988.550.368,07	1.034.622.837.881,55	1.051.221.358.898,38
5,1	Belanja Operasi	671.389.054.966,06	740.017.958.805,14	774.488.457.062,07	791.966.564.746,55	826.988.265.740,33
5,2	Belanja Modal	139.855.988.043,42	222.212.719.378,11	387.530.343.306,00	242.656.273.135,00	223.723.473.474,05
5,3	Belanja Tidak Terduga	31.687.803.230,00	2.722.884.380,00	969.750.000,00	-	509.619.684,00
5,4	Belanja Transfer	178.850.484.732,00	180.806.720.902,00	175.838.080.838,00	189.347.746.142,00	195.515.035.106,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.021.783.330.971,48	1.145.760.283.465,25	1.338.826.631.206,07	1.223.970.584.023,55	1.246.736.394.004,38
	Surplus/Defisit	63.818.624.535,71	28.112.793.063,05	-163.385.623.463,79	-10.725.149.484,22	7.939.807.965,03
6	PEMBIAYAAN	61.097.716.002,85	120.416.340.538,56	276.247.599.395,98	91.535.866.734,22	60.818.489.034,00
6,1	Penerimaan Pembiayaan	72.598.316.002,85	124.916.340.538,56	286.885.299.396,98	112.862.075.932,22	80.810.717.250,00
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	11.500.600.000,00	4.500.000.000,00	10.637.700.001,00	21.326.209.198,00	19.992.228.216,00
	Pembiayaan Netto	61.097.716.002,85	120.416.340.538,56	276.247.599.395,98	91.535.866.734,22	60.818.489.034,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	124.916.340.538,56	148.529.133.601,61	112.861.975.932,19	80.810.717.250,00	68.758.296.999,03

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024

Tabel 2. 26 Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

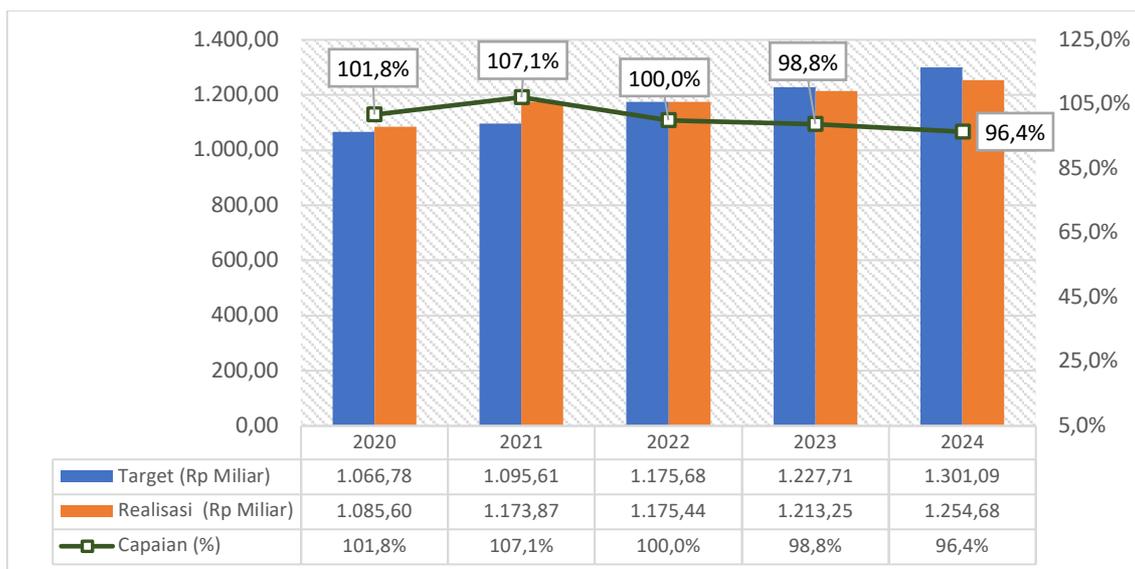
No	Uraian	PERTUMBUHAN REALISASI APBD LIMA TAHUN TERAKHIR					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	-6,19%	8,13%	0,13%	3,22%	3,41%	1,74%
4,1	Pendapatan Asli Daerah	-5,74%	18,42%	-7,26%	6,50%	6,22%	3,63%
4,2	Pendapatan Transfer	-6,78%	7,66%	5,03%	2,99%	2,25%	2,23%
4,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4,34%	1,76%	-76,01%	0,51%	78,79%	1,88%
5	BELANJA	-9,87%	14,48%	20,52%	-11,04%	1,60%	3,14%
5,1	Belanja Operasi	0,94%	10,22%	4,66%	2,26%	4,42%	4,50%
5,2	Belanja Modal	-48,03%	58,89%	74,40%	-37,38%	-7,80%	8,01%
5,3	Belanja Tidak Terduga	3018,84%	-91,41%	-64,39%			552,61%
5,4	Belanja Transfer	-3,11%	1,09%	-2,75%	7,68%	3,26%	1,24%
	Surplus/Defisit	70,44%	-55,95%	-681,18%	-93,44%	-174,03%	-186,83%
6	PEMBIAYAAN	73,80%	97,09%	129,41%	-66,86%	-33,56%	39,98%
6,1	Penerimaan Pembiayaan	1,08%	72,07%	129,66%	-60,66%	-28,40%	22,75%
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	-68,64%	-60,87%	136,39%	100,48%	-6,26%	20,22%
	Pembiayaan Netto	0,70	1,33	-0,07	-1,61	-33,56%	39,98%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	72,07%	18,90%	-24,01%	-28,40%	-14,91%	4,73%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan belanja. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 1,74 persen sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 3,14 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan anggaran. Ketika belanja daerah meningkat lebih cepat daripada pendapatan, maka daerah berpotensi menghadapi defisit anggaran. Ini berarti jumlah uang yang dikeluarkan lebih besar daripada jumlah uang yang masuk, yang bisa memaksa daerah untuk mengurangi cadangan kas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Tebo perlu mempertimbangkan langkah-langkah seperti meningkatkan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendapatan baru, dan merancang kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan agar pertumbuhan pendapatan dapat mengejar atau bahkan melampaui pertumbuhan belanja. Uraian mengenai kinerja pelaksanaan APBD berdasarkan kelompok pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, secara rinci dijelaskan pada sub bab bagian di bawah ini.

2.5.1.1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan target, realisasi dan capaian pendapatan daerah Kabupaten Tebo tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2. 53 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tebo pada periode tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dengan tren positif. Realisasi capaian pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 107,1 persen, terutama didukung oleh pendapatan transfer dimana pendapatan transfer pada tahun 2021 sebesar Rp 1,02 triliun. Realisasi capaian pendapatan terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 96,4 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan pendapatan transfer yang tidak mencapai target anggaran sebesar Rp44,54 miliar.

Pemerintah Daerah perlu hati-hati terhadap capaian realisasi pendapatan daerah yang bergantung pada sumber pendapatan transfer, mengingat perubahan kebijakan pemerintah pusat dapat mempengaruhi pendapatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penting untuk memiliki proses perencanaan yang fleksibel, akurat, dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari PAD sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi daerah

tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada PAD untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah. Berikut ini gambaran capaian kinerja PAD Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020–2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 27 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tebo, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	78,61	78,46	1,98	(5,74)	99,81
2021	73,68	92,92	(6,27)	18,42	126,10
2022	95,74	86,17	29,94	(7,26)	90,01
2023	96,87	91,77	1,18	6,50	94,73
2024	99,35	97,48	2,56	6,22	98,11
Rata-rata	88,85	89,36	5,88	3,63	101,75

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2020–2024, realisasi PAD Kabupaten Tebo mengalami rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 3,63 persen dengan rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 101,75 persen. Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 18,42 persen, terutama didukung oleh meningkatnya pendapatan Pajak Daerah sebesar 17,56 persen dari Rp78,45 miliar pada tahun 2020 naik menjadi Rp92,91 miliar pada tahun 2021. Pertumbuhan realisasi terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar minus 7,26 persen, yang terutama dipengaruhi menurunnya realisasi Lain-lain PAD yang sah dari Rp58,76 miliar menjadi Rp49,06 miliar.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi PAD menunjukkan realisasi PAD memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah, yakni 2,25 persen dari target PAD yang rata-rata tumbuh sebesar 5,88 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan PAD cenderung menggunakan target yang pesimis.

Terkait dengan realisasi capaian PAD, berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 yang

bersumber dari (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Besarnya kontribusi masing-masing komponen PAD selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 54 Kontribusi Masing-masing Komponen PAD Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan grafik di atas diperoleh gambaran PAD di Kabupaten Tebo dalam kurun waktu tahun 2020-2024 didominasi oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah dengan rata-rata 49,14 persen pertahun, kontribusi terbesar kedua berikutnya adalah Pajak Daerah dengan rata-rata 25,78 persen per tahun, sedangkan kontribusi rata-rata dari Retribusi Daerah dan HPKD yang dipisahkan masing-masing sebesar 13,80 persen dan 11,27 persen. Tingginya kontribusi lain-lain PAD yang sah, khususnya pendapatan yang berasal dari pendapatan BLUD. Kondisi tersebut mencerminkan terdapat potensi pendapatan yang cukup besar di Kabupaten Tebo.

Pendapatan pajak merupakan kontributor tertinggi kedua setelah lain-lain PAD yang sah, meskipun kontribusinya cenderung berfluktuasi. Secara rinci perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 28 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pajak Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	17,67	19,17	(11,71)	(26,87)	108,51
2021	17,87	22,54	1,16	17,56	126,10
2022	20,42	23,34	14,26	3,57	114,30
2023	22,09	24,32	8,18	4,20	110,09
2024	25,25	25,95	14,26	6,67	102,78
Rata-rata			5,23	1,02	112,36

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2020–2024, realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tebo mengalami rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 1,02 persen dengan realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 112,36 persen. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 17,56 persen. Ditinjau dari besaran persentase pertumbuhan tertinggi tercatat pada peningkatan pendapatan Pajak Air Tanah sebesar 109,26 persen dari Rp1,4 juta pada tahun 2020 naik menjadi Rp3,1 juta pada tahun 2021. Realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 26,87 persen, yang terutama dipengaruhi menurunnya realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Rp7,72 miliar menjadi Rp1,39 miliar.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi Pajak Daerah menunjukkan target Pajak Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni 4,21 persen dari realisasi Pajak Daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 1,02 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan Pajak Daerah cenderung menggunakan target yang optimis.

Selain pajak daerah, sumber PAD Kabupaten Tebo yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tebo adalah retribusi daerah. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 29 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Retribusi Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	4,47	3,02	0,69	(7,61)	67,45
2021	4,47	2,83	(0,12)	(6,19)	63,36
2022	3,91	3,07	(12,53)	8,52	78,60
2023	2,56	4,38	(34,62)	42,70	171,56
2024	44,97	52,43	1660,09	1096,15	116,59
Rata-rata			322,70	226,71	99,51

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2020–2024, realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tebo mengalami rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 226,71 persen dengan realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 99,51 persen. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 1096,15 persen, terutama didukung oleh meningkatnya pendapatan Retribusi Jasa Umum dari Rp3,85 miliar pada tahun 2023 naik menjadi Rp51,10 miliar pada tahun 2024. Perpindahan pos pendapatan BLUD menjadi retribusi pelayanan kesehatan mendorong pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 7,61 persen, yang terutama dipengaruhi menurunnya realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sebesar minus 52,60 persen dari Rp132,55 juta menjadi Rp80 juta.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi Retribusi Daerah menunjukkan target Retribusi Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah, yakni 95,99 persen dibandingkan realisasi Retribusi Daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 226,71 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan Pajak Daerah cenderung menggunakan target yang relatif pesimis.

Retribusi Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,20 persen pertahun terhadap PAD. Retribusi ini mencakup penerimaan dari pelayanan publik atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dikelompokkan ke dalam jenis retribusi yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yang mencakup: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
2. Retribusi Jasa Usaha, yang mencakup: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Selanjutnya, untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tebo yang cukup penting dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Tebo adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pendapatan ini memberikan kontribusi rata-rata sebesar 11,27 persen pertahun terhadap PAD. Kontribusi tersebut diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tebo. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama kurun waktu 2020-2024 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 30 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tebo, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	8,22	8,22	23,06	23,06	100,00
2021	8,62	8,78	4,79	6,76	101,88
2022	10,69	10,69	24,12	21,83	100,00
2023	11,14	11,14	4,17	4,17	100,00
2024	10,97	11,58	(1,57)	3,91	105,56
Rata-rata			10,92	11,95	101,49

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Tebo mengalami perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu 2020-2024 dengan rata-rata realisasi pertumbuhan 11,95 persen pertahun. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 23,06 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 3,91 persen. Sementara itu, dilihat dari rata-rata capaian kinerja untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 101,49 persen selama kurun waktu 2020-2024. Secara keseluruhan capaian kinerja selama 2020-2024 cukup optimal yang ditandai dengan capaian paling rendah 100 persen.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi menunjukkan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki rata-rata pertumbuhan sedikit lebih tinggi, yakni 1,03 persen dari realisasi yang rata-rata tumbuh sebesar 10,92 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah cukup baik namun masih diperlukan usaha lain untuk dapat meningkatkan pertumbuhannya.

Untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) terakhir yang peranannya cukup penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Tebo adalah penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan ini memberikan kontribusi terbesar yaitu rata-rata sebesar 49,14 persen pertahun. Kontribusi tersebut diperoleh dari Hasil Penjualan dan pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; Pendapatan Denda (Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pajak dan Retribusi Daerah); Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan BLUD; Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan Lain-lain PAD yang Sah Lain-lainnya. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020–2024.

Tabel 2. 31 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Tebo, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	48,25	48,05	5,00	2,07	99,59
2021	42,72	58,77	(11,45)	22,31	137,55
2022	60,72	49,06	42,11	(16,51)	80,81
2023	61,08	51,92	0,61	5,83	85,00
2024	18,17	7,52	(70,26)	(85,51)	41,41
Rata-rata			(6,80)	(14,36)	88,87

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas untuk realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Tebo memperlihatkan perkembangan yang cukup selama kurun waktu 2020-2024 dengan rata-rata realisasi pertumbuhan sebesar minus 14,36 persen. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 22,31 persen, serta realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024 dengan pertumbuhan minus 85,51 persen. Kondisi ini disebabkan oleh perpindahan pos pendapatan BLUD dari yang sebelumnya masuk ke dalam lain-lain PAD yang sah menjadi masuk ke dalam pos retribusi daerah. Sementara itu, rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 88,87 persen dengan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 137,55 persen, sedangkan untuk capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2024 dengan tingkat capaian sebesar 41,41 persen dari target proyeksi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi menunjukkan target penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar minus 6,80 persen dan realisasi pertumbuhan rata-rata sebesar minus 14,36 persen.

B. Pendapatan Transfer

Sumber Pendapatan Daerah selain PAD adalah Pendapatan Transfer. Dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pendapatan Transfer adalah

Transfer ke Daerah (TKD). TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 106 Ketentuan UU 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa. Berikut ini adalah target penerimaan yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 32 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	938,58	951,23	(9,71)	(6,78)	101,35
2021	976,25	1.024,05	4,01	7,66	104,90
2022	1.079,94	1.075,61	10,62	5,03	99,60
2023	1.114,34	1.107,75	3,19	2,99	99,41
2024	1.177,21	1.132,67	5,64	2,25	96,22
Rata-rata			2,75	2,23	100,29

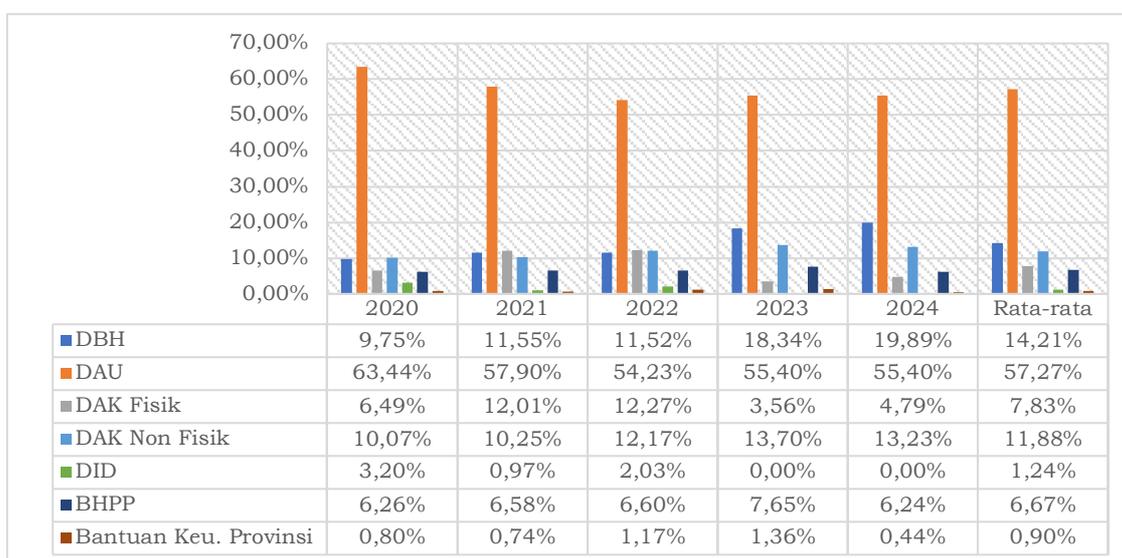
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tebo cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 2,23 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 7,66 persen, terutama didukung oleh Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan pertumbuhan sebesar 13,44. Realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar minus 6,78 persen. Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan turunnya pendapatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang menurun sebesar 23,86 persen.

Sementara itu, rata-rata realisasi capaian kinerja pendapatan transfer Kabupaten Tebo mencapai 100,29 persen dengan tingkat capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 104,90 persen, sedangkan realisasi capaian

kinerja terendah untuk pendapatan transfer Kabupaten Tebo terjadi pada tahun 2024 dengan tingkat capaian sebesar 96,22 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan.

Adapun rincian pendapatan transfer yang terdiri dari (a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana alokasi Khusus), Dana Insentif Daerah (DID) dan (b) Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Besarnya kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 55 Kontribusi Masing-masing Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Pendapatan Transfer di Kabupaten Tebo dalam kurun waktu tahun 2020-2024 didominasi oleh komponen DUA dengan rata-rata 57,27 persen pertahun. Dengan dominasi DUA, perencanaan keuangan Kabupaten Tebo harus mempertimbangkan prediksi dan ketepatan penerimaan DUA. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara efisien dan efektif untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dari komponen pendapatan transfer berupa Dana Bagi Hasil yang mencakup dana bagi hasil

pajak/dana bagi hasil bukan pajak yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 33 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	65,53	82,10	(34,85)	(7,61)	125,29
2021	59,32	105,45	(9,47)	28,44	177,77
2022	92,35	112,31	55,68	6,51	121,62
2023	188,00	182,51	103,58	62,50	97,08
2024	200,13	200,14	6,45	9,66	100,00
Rata-rata			24,28	19,90	124,35

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Tebo cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 19,90 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 62,50 persen dengan capaian kinerja mencapai 97,08 persen, tingginya pertumbuhan ini terutama didukung oleh pendapatan yang bersumber dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dengan pertumbuhan sebesar 443,30 persen. Realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang turun sebesar 7,61 persen dengan capaian kinerja 171,94 persen. Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan turunnya pendapatan bersumber dari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan pertumbuhan sebesar minus 73,70 persen.

Selain dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak, komponen dana perimbangan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan Kabupaten Tebo adalah dana alokasi umum (DAU). Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 34 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Umum Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	536,52	534,45	(10,32)	(10,67)	99,61
2021	528,39	528,39	(1,52)	(1,13)	100,00
2022	528,68	528,75	0,06	0,07	100,01
2023	547,19	551,26	3,50	4,26	100,74
2024	574,55	557,52	5,00	1,14	97,04
Rata-rata			(0,66)	(1,27)	99,48

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer DAU Kabupaten Tebo cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar minus 1,27 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 4,26 persen dengan capaian kinerja mencapai 100,74 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang turun sebesar 10,67 persen dengan capaian kinerja 99,61 persen. Meskipun demikian, untuk realisasi capaian kinerja DAU Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang cukup baik selama kurun waktu 2020-2024. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi capaian kinerja yang mencapai 99,48 persen yang berarti capaian kinerja untuk dana alokasi umum (DAU) relatif sudah mendekati sesuai dengan proyeksi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan terkait DAU diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kebijakan ini memastikan alokasi dan penyaluran DAU tepat waktu sehingga membantu menjaga konsistensi antara proyeksi dan realisasi.

Komponen penting lainnya dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo adalah dana alokasi khusus (DAK). DAK terdiri atas DAK Fisik dan Dak Non Fisik. DAK fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah, sedangkan DAK nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah. Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi dari dana alokasi khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 35 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tebo, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Alokasi Khusus (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	145,86	139,51	(14,51)	(10,09)	95,65
2021	204,03	203,15	39,88	45,61	99,57
2022	262,29	238,30	28,56	17,30	90,85
2023	176,91	171,74	(32,55)	(27,93)	97,08
2024	187,72	181,32	6,11	5,58	96,59
Rata-rata			5,49	6,10	95,95

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2020–2024, realisasi DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,10 persen per tahun. Namun jika dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang optimal dengan realisasi capaian kinerja mencapai 95,95 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 99,57 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2023 menjadi capaian kinerja terendah untuk realisasi dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo dengan tingkat capaian sebesar 97,08 persen dari proyeksi target yang ditetapkan sebelumnya yang terutama dipengaruhi oleh turunnya pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Komponen Pendapatan Transfer lainnya dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo adalah Dana Insentif Daerah (DID). DID adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi dari DID yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 36 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Insentif Daerah Kabupaten Tebo, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Insentif Daerah (DID) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	26,93	26,93	0,00	0,00	100,00
2021	8,81	8,81	(67,30)	(67,30)	100,00
2022	19,78	19,78	124,62	124,62	100,00
2023	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00			0,00
	Rata-rata		19,11	19,11	60,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2020–2024, realisasi Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,11 persen per tahun selama periode 2020-2022. Namun jika dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk dana insentif daerah (DID) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang cukup optimal dengan realisasi capaian kinerja mencapai 60 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi capaian kinerja ini rendah dikarenakan pada tahun 2023-2024 capaian kinerja sebesar nol persen.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut ini adalah perkembangan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Kabupaten Tebo untuk target dan realisasi selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 37 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tebo, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

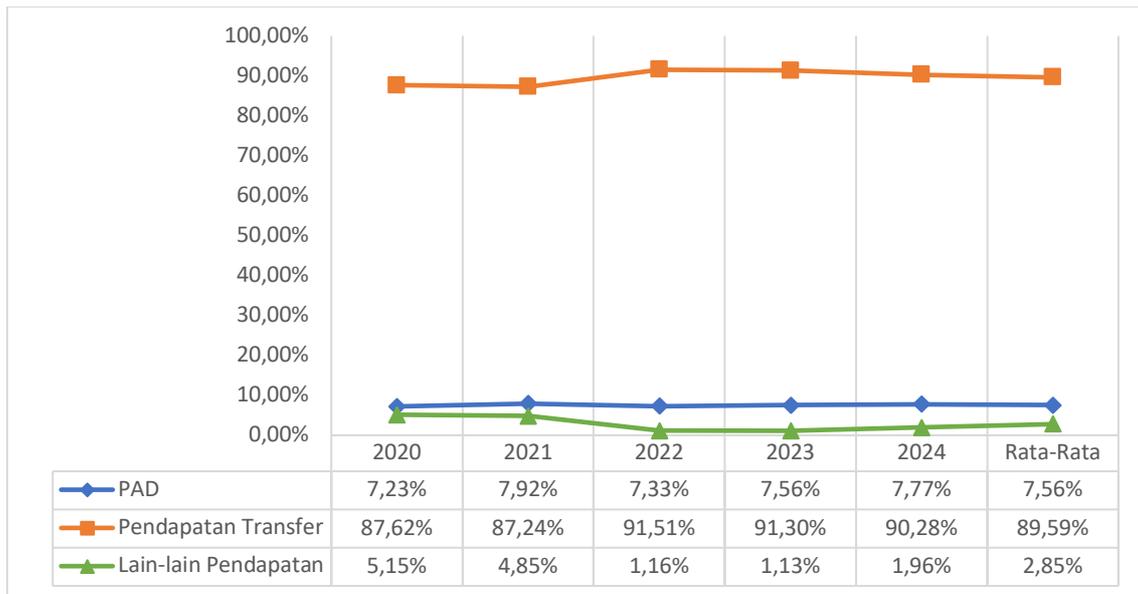
Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	49,58	55,92	0,21	4,34	112,78

Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2021	45,67	56,90	(7,88)	1,76	124,59
2022	0,00	13,65	(100,00)	(76,01)	0,00
2023	16,49	13,72	0,00	0,51	83,19
2024	24,53	24,53	48,74	78,79	100,00
Rata-rata			(11,79)	1,88	84,11

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Tebo cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2020-2024 dengan rata-rata realisasi pertumbuhan sebesar 1,88 persen pertahun. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 78,79 persen sedangkan realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan negatif 76,01 persen. Rata-rata capaian kinerja lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 85,77 persen. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 124,59 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar nol persen.

Berdasarkan kontribusi dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah, selama kurun waktu 2020-2024 terlihat kontribusi sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi 89,59 persen pertahun, sedangkan kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan masing-masing hanya 7,56 persen dan 2,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam membangun Tebo masih sebagian besar masih ditopang dari dana transfer. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah.



Gambar 2. 56 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024 (Persen)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Disamping itu, untuk melihat kemandirian Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan pemerintahan maka perlu dilakukan analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan. Analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Untuk derajat kemandirian daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Sedangkan untuk rasio ketergantungan daerah ditunjukkan dari proporsi dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan. Kemandirian fiskal daerah dikelompokkan menjadi “Belum Mandiri” yaitu $0,00 \leq IKF < 0,25$; “Menuju Kemandirian” yaitu $0,25 \leq IKF < 0,50$; “Mandiri” $0,50 \leq IKF < 0,75$; dan “Sangat Mandiri” yaitu $0,75 \leq IKF \leq 1,00$.

Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang

memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah. Berikut adalah grafik derajat kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Tebo 2020-2024.



Gambar 2. 57 Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2020 – 2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Dalam kurun waktu 2020-2024 derajat kemandirian Kabupaten Tebo secara rata-rata sebesar 0,076 (atau 0,76 persen). Ini menunjukkan derajat kemandirian Kabupaten Tebo dalam berotonomi masuk kategori “Belum Mandiri” yaitu $0,00 \leq IKF < 0,25$. Dilihat dari rasio ketergantungan Kabupaten Tebo terhadap bantuan pihak eksternal cenderung relatif masih tinggi selama kurun waktu 2020-2024 dengan rata-rata mencapai 0,926 (atau 92,6 persen) setiap tahunnya.

2.5.1.2. Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 38 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	949,00	842,93	(6,62)	(9,87)	88,82
2021	1.034,08	964,95	8,96	14,48	93,32
2022	1.273,04	1.162,99	23,11	20,52	91,36
2023	1.127,59	1.034,62	(11,43)	(11,04)	91,76
2024	1.157,46	1.051,22	2,65	1,60	90,82
Rata-rata			3,34	3,14	91,21

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2020–2024, realisasi Belanja Daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,14 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar minus 11,04 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 55,65 persen. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 20,52 persen. Tingginya capaian realisasi dikarenakan terjadi kenaikan pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 128,38 persen.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk belanja daerah Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 91,21 persen selama kurun waktu 2020-2024. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat capaian sebesar 93,32 persen dari target belanja daerah Kabupaten Tebo yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Pasal 55 ayat (1) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Keempat kategori tersebut kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 39 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Operasi (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	719,94	671,39	0,05	0,94	93,26
2021	782,61	740,02	8,71	10,22	94,56
2022	839,76	774,49	7,30	4,66	92,23
2023	876,57	791,97	4,38	2,26	90,35
2024	882,53	826,99	0,68	4,42	93,71
Rata-rata			4,22	4,50	92,82

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2020–2024, realisasi Belanja Operasi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,50 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,94 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pos Belanja Bantuan Hibah sebesar 53,69 persen. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 10,22 persen. Tingginya capaian realisasi dikarenakan terjadi kenaikan pos Belanja Hibah sebesar 507,50 persen dan belanja barang dan jasa sebesar 9,08 persen. Kenaikan kedua pos tersebut mendorong kenaikan belanja total sebesar Rp60,13 miliar pada tahun 2021.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Operasi Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 92,82 persen selama kurun waktu 2020-2024. Untuk realisasi capaian kinerja yang tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat capaian sebesar 94,56 persen dari target belanja operasi Kabupaten Tebo yang telah direncanakan sebelumnya, yang terutama dipengaruhi oleh menurunnya realisasi Belanja Pegawai dari target yang direncanakan Rp406,41 miliar menjadi realisasi sebesar Rp395,52 miliar.

B. Belanja Modal

Kategori belanja daerah berikutnya adalah Belanja Modal. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Modal Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 40 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Modal (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	149,81	139,86	(49,25)	(48,03)	93,36
2021	246,47	222,21	64,52	58,89	90,16
2022	431,86	387,53	75,22	74,40	89,74
2023	250,52	242,66	(41,99)	(37,38)	96,86
2024	272,62	223,72	8,82	(7,80)	82,06
Rata-rata			11,46	8,01	90,44

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2020–2024, realisasi Belanja Modal mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,01 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar minus 48,03 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pos Belanja Modal Tanah sebesar minus 100 persen atau turun dari Rp409,63 juta pada tahun 2019 menjadi Rp0 juta pada tahun 2020. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 74,40 persen. Tingginya capaian realisasi dikarenakan terjadi kenaikan pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 128,38 persen atau naik dari Rp31,18 miliar menjadi Rp71,22 miliar.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Modal Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90,44 persen selama kurun waktu 2020-2024. Untuk realisasi capaian kinerja yang mendekati target terjadi pada tahun 2023 dengan tingkat capaian sebesar 96,86 persen dari target belanja modal Kabupaten Tebo yang telah direncanakan sebelumnya, yang terutama dipengaruhi menurunnya

realisasi Belanja Modal Tanah dan belanja infrastruktur Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari target yang direncanakan Rp250,51 miliar menjadi Rp242,65 miliar.

C. Belanja Tidak Terduga

Kategori belanja daerah terakhir adalah Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 41 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Tidak Terduga (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	79,26	31,69	5183,70	3018,84	39,98
2021	5,00	2,72	(93,69)	(91,41)	54,46
2022	1,41	0,97	(71,71)	(64,39)	68,57
2023	0,50	0,00	(64,65)	(100,00)	0,00
2024	2,31	0,51	362,53	0,00	22,04
Rata-rata			1063,23	552,61	37,01

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2020–2024, rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tebo sebesar 37,01 persen. Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 552,61 persen per tahun. pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni mencapai 3.018,84 persen yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan realisasi belanja tidak terduga tergolong sangat rendah yang mengindikasikan lebih sedikit kejadian atau situasi darurat yang memerlukan pengeluaran tambahan.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas dua jenis yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Berikut adalah target dan realisasi belanja transfer Kabupaten Tebo pada periode 2020-2024.

Tabel 2. 42 Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp Miliar)

Tahun	Belanja Tidak Terduga (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	178,87	178,85	(3,14)	(3,11)	99,99
2021	181,94	180,81	1,72	1,09	99,37
2022	175,92	175,84	(3,31)	(2,75)	99,95
2023	189,42	189,35	7,67	7,68	99,96
2024	204,45	195,52	7,93	3,26	95,63
Rata-rata			3,50	2,32	98,73

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Belanja transfer Kabupaten Tebo menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 2,32 persen per tahun pada periode 2020-2024. Pertumbuhan realisasi belanja transfer tertinggi terjadi pada tahun 2023 mencapai 7,68 persen yang didorong oleh kenaikan peningkatan belanja bantuan keuangan sebesar 7,66 persen. Pertumbuhan realisasi belanja transfer terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 3,11 persen yang disebabkan oleh penurunan belanja bantuan keuangan sebesar 3,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian kinerja realisasi belanja transfer daerah secara umum cukup baik yaitu mencapai 98,73 persen terhadap yang telah ditargetkan.

2.5.1.3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah ini bertujuan

untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Adapun cakupan pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA).

Pembiayaan daerah selama kurun waktu 2020-2024 umumnya masih didominasi oleh penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Meski mendominasi, penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Selanjutnya, untuk melihat perkembangan besarnya target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 43 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	61,10	61,10	75,61	73,80	100,00
2021	120,42	120,42	97,09	97,09	100,00
2022	273,28	276,25	126,95	129,41	101,08
2023	89,30	91,54	(67,32)	(66,86)	102,51
2024	60,82	60,82	(31,89)	(33,56)	100,00
	Rata-rata		40,09	39,98	100,72

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Untuk pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tebo menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan realisasi rata-

rata sebesar 39,98 persen selama kurun waktu 2020–2024. Adapun penurunan terbesar untuk realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tebo terjadi pada tahun 2023 yang mencapai minus 66,86 persen. Dilihat dari target pembiayaan daerah Kabupaten Tebo juga cenderung fluktuatif secara rata-rata sebesar 40,09 persen selama kurun waktu 2020–2024 dengan pertumbuhan target tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 126,95 persen.

Sementara itu, realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kabupaten Tebo menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama kurun waktu 2020–2024. Realisasi pembiayaan daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100,72 persen. Terkait dengan pembiayaan daerah, berikut ini adalah rincian dari komponen pembiayaan daerah Kabupaten Tebo untuk target dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu 2020–2024.

A. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Selama kurun waktu 2020-2024, satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 44 Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	72,60	72,60	1,08	1,08	100,00
2021	124,92	124,92	72,07	72,07	100,00
2022	291,85	286,89	133,64	129,66	98,30
2023	112,86	112,86	(61,33)	(60,66)	100,00
2024	80,81	80,81	(28,40)	(28,40)	100,00
		Rata-rata	23,41	22,75	99,66

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan realisasi capaian kinerja untuk penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tebo memperlihatkan kinerja yang optimal selama kurun waktu 2020-2024. Secara rata-rata tingkat capaian kinerja untuk penerimaan daerah mencapai 99,66 persen. Pada tahun 2022 menjadi realisasi capaian kinerja terendah untuk penerimaan daerah Kabupaten Tebo dengan tingkat capaian sebesar 98,30 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut disebabkan oleh realisasi penerimaan pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2022 terealisasi sebesar 96,7 persen dari target.

B. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020–2024 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 45 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo, 2020–2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	11,50	11,50	(68,94)	(68,64)	99,99
2021	4,50	4,50	(60,87)	(60,87)	100,00
2022	18,57	10,64	312,64	136,39	57,29
2023	23,56	21,33	26,91	100,48	90,50
2024	19,99	19,99	(15,16)	(6,26)	100,00
	Rata-rata		38,91	20,22	89,56

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 rata-rata sebesar 20,22 persen dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata

sebesar 89,56 persen. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2024 yang mencapai 100 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2022 menjadi capaian kinerja terendah dengan capaian kinerja 57,29 persen.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tebo digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Tebo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemberian pinjaman daerah. Adapun besarnya target dan realisasi untuk penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Tebo pada BUMD selama kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 46 Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Tebo, 2020–2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Penyertaan Modal Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	11,50	11,50	(17,85)	(17,85)	99,99
2021	4,50	4,50	(60,87)	(60,87)	100,00
2022	5,50	5,50	22,22	22,22	100,00
2023	3,00	3,00	(45,45)	(45,45)	100,00
2024	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)	0,00
		Rata-rata	(40,39)	(40,39)	80,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi penyertaan modal daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2020-2024 rata-rata sebesar minus 40,39 persen dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata sebesar 80 persen. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada hampir semua tahun kecuali tahun 2024 yang mencapai 100 persen. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tebo tidak menganggarkan adanya penyertaan modal daerah.

2.5.1.4. Neraca Daerah

Neraca keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tebo merupakan salah satu laporan keuangan utama yang menggambarkan posisi keuangan suatu daerah meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada dalam satu periode tertentu.

Analisis terhadap neraca keuangan penting dilakukan untuk menilai kesehatan fiskal daerah, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta keberlanjutan keuangan daerah dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah pada setiap tahunnya terdapat dampak pada perubahan kondisi keuangan baik pada posisi aset, kewajiban maupun pada ekuitas. Perkembangan realisasi neraca daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 47 Neraca Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET	2.320.597.925.175	2.516.443.272.795	2.847.411.321.415	2.886.174.613.158	3.029.596.217.355
1.1	ASET LANCAR	170.281.864.862	170.995.268.234	157.056.381.660	121.934.092.911	186.452.915.817
	Kas	129.087.942.029	141.926.777.769	112.863.482.172	80.913.424.230	68.760.373.402
	Piutang	24.900.443.384	19.472.659.533	30.616.025.797	25.705.966.288	95.911.795.460
	Persediaan	15.816.068.016	9.219.680.712	13.154.238.215	14.908.280.023	21.349.934.115
	Beban Dibayar Dimuka	477.411.434	376.150.220	422.635.476	406.422.371	430.812.840
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	125.920.453.718	130.444.528.808	136.298.626.959	160.694.825.516	160.810.058.730
	Non Permanen	-	-	-	-	-
	Permanen	125.920.453.718	130.444.528.808	136.298.626.959	160.694.825.516	160.810.058.730
1.3	ASET TETAP	1.995.777.997.077	2.131.088.661.642	2.427.981.829.802	2.459.065.592.333	2.604.091.641.286
	Tanah	113.981.778.945	232.702.168.874	232.629.752.086	248.636.572.611	334.667.446.611
	Peralatan dan Mesin	417.188.598.107	449.708.852.280	515.681.301.059	545.605.211.593	585.764.017.984
	Gedung dan Bangunan	953.047.751.188	975.754.317.221	1.091.267.510.238	1.156.248.169.079	1.206.377.193.375
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.541.249.210.730	2.659.241.320.727	2.977.103.231.919	3.155.310.230.844	3.314.325.803.962
	Aset tetap Lainnya	32.744.953.867	33.990.029.042	35.439.238.897	37.282.904.297	40.013.820.297
	Konstruksi dalam pengerjaan	31.033.608.503	61.625.441.760	33.140.092.495	12.832.253.083	11.745.110.701
	Akumulasi Penyusutan	(2.093.467.904.263)	(2.281.933.468.261)	(2.457.279.296.893)	(2.696.849.749.174)	(2.888.801.751.644)
1.4	ASET LAINNYA	28.617.609.519	83.914.814.110	126.074.482.994	144.480.102.398	69.387.296.577
	Kemitraan dengan pihak ketiga	1.466.004.800	1.466.004.800	1,466,004,800	1,466,004,800	1,466,004,800
	Aset tak berwujud	119.456.000	217.888.000	2.077.770.589	1.786.378.909	2.042.789.084
	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	46.229.213.193	195.972.817	-
	Aset Lain-lain	27.032.148.719	82.230.921.310	76.301.494.412	80.953.807.872	62.430.006.693
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility	-	-	-	60.077.938.000	3.448.496.000

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.5	PROPERTI INVESTASI	0	0	0	0	8.854.304.946
	Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	3.554.626.000
	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	8.141.314.537
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	(2.841.635.591)
1.6	DANA CADANGAN	0	0	0	0	0
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	KEWAJIBAN	2.080.106.276	15.878.952.362	151.542.883.377	131.859.602.029	145.299.264.696
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	2.080.106.276	15.878.952.362	24.925.401.807	23.568.329.657	58.666.239.558
	Utang perhitungan pihak ketiga	42.934.510	59.537.162	1.506.240	102.706.980	2.076.403
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	18.326.209.198	18.326.209.198	19.992.228.216
	Pendapatan diterima dimuka	141.018.707	281.849.698	308.273.562	293.357.022	258.047.594
	Utang belanja	-	15.143.978.394	4.700.908.958	4.650.083.639	29.873.887.346
	Utang jangka pendek lainnya	1.896.153.059	393.587.107	-	-	8.540.000.000
	Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	1.588.503.849	195.972.817	-
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0	0	126.617.481.570	108.291.272.372	86.633.025.138
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	126.617.481.570	108.291.272.372	86.633.025.138
3	EKUITAS	2.318.517.818.900	2.500.564.320.433	2.695.868.438.038	2.754.315.011.130	2.884.296.952.659
	Ekuitas	2.318.517.818.900	2.500.564.320.433	2.695.868.438.038	2.754.315.011.130	2.884.296.952.659
4	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.320.597.925.175	2.516.443.272.795	2.847.411.321.415	2.886.174.613.158	3.029.596.217.355

Sumber: Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo 2020-2024

Berdasarkan data neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo selama periode tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren pertumbuhan aset yang konsisten. Total aset meningkat dari Rp2,32 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,03 triliun pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar $\pm 6,9$ persen. Peningkatan ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah dalam membangun struktur ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik.

Komponen utama yang mendominasi total aset adalah aset tetap, yang meningkat dari Rp1,99 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,60 triliun pada tahun 2024. Lonjakan signifikan terutama terjadi pada nilai tanah dan peralatan/mesin, serta gedung dan bangunan, yang menunjukkan adanya investasi berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur fisik dan sarana pemerintahan. Meski demikian, akumulasi penyusutan juga meningkat dari Rp2,09 triliun menjadi Rp2,89 triliun, yang menandakan bahwa sebagian besar aset tetap tersebut telah memasuki masa penyusutan lanjut.

Di sisi lain, aset lancar mengalami fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2023 sebesar $\pm 22,4$ persen dibandingkan tahun sebelumnya, sebelum kembali meningkat signifikan menjadi Rp186,45 miliar pada tahun 2024. Komponen piutang mencatat lonjakan drastis di tahun 2024, mencapai Rp95,91 miliar, yang patut dicermati dalam konteks efektivitas penagihan dan kualitas tata kelola pendapatan daerah. Ketersediaan kas justru menurun dari Rp129,08 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp68,76 miliar pada tahun 2024, menandakan potensi tekanan likuiditas jangka pendek.

Investasi jangka panjang secara perlahan meningkat dari Rp125,92 miliar menjadi Rp160,81 miliar, seluruhnya dalam bentuk investasi permanen. Sementara itu, aset lainnya menunjukkan lonjakan tajam pada tahun 2021 dan 2022, mencapai puncak tertinggi Rp144,48 miliar pada tahun 2023, sebelum turun ke Rp69,38 miliar di tahun 2024. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh berkurangnya kas yang dibatasi penggunaannya dan dana *treasury deposit facility*.

Salah satu perkembangan baru dalam struktur aset adalah munculnya properti investasi pada tahun 2024 sebesar Rp8,85 miliar, yang terdiri dari tanah serta gedung dan bangunan, menandakan mulai adanya diversifikasi sumber aset produktif daerah.

Pada sisi kewajiban, terjadi peningkatan signifikan dari hanya Rp2,08 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp145,30 miliar pada tahun 2024. Kewajiban jangka pendek mengalami lonjakan pada tahun 2024, terutama akibat utang belanja dan bagian lancar utang jangka panjang. Sedangkan kewajiban jangka panjang yang sebelumnya nihil hingga tahun 2021, mulai muncul sejak tahun 2022, terutama dalam bentuk utang kepada lembaga keuangan bukan bank, meskipun nilainya menurun dari Rp126,61 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp86,63 miliar di tahun 2024. Hal ini perlu dicermati dalam konteks keberlanjutan fiskal dan risiko pembiayaan jangka panjang.

Ekuitas daerah menunjukkan peningkatan yang stabil dari Rp2,32 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,88 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menjaga integritas nilai kekayaan bersih daerah, meskipun terdapat peningkatan kewajiban.

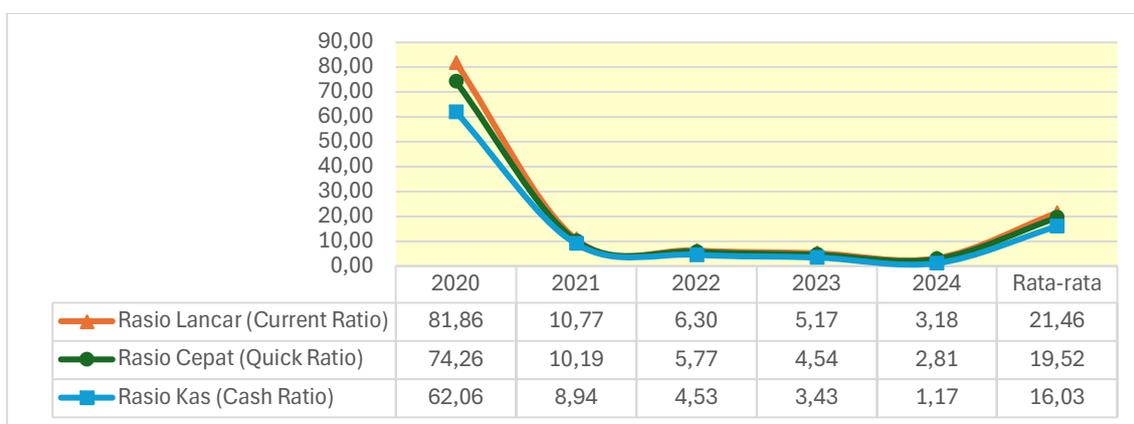
Secara keseluruhan, neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo mencerminkan arah kebijakan pengelolaan keuangan yang bertumpu pada pembangunan infrastruktur dan penguatan investasi, namun perlu terus diimbangi dengan pengelolaan aset lancar dan kewajiban jangka pendek secara lebih prudent. Optimalisasi manajemen piutang dan pemantauan kewajiban jangka panjang menjadi hal penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang.

Analisis neraca juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas dalam mengelola utang, serta efektivitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban lainnya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan

daerah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2.5.1.5. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah aset pemerintah daerah dapat dikonversi menjadi kas guna membayar kewajiban jangka pendek. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).



Gambar 2. 58 Rasio Likuiditas Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*), dapat disimpulkan bahwa tren rasio likuiditas selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola penurunan yang cukup tajam, yang mengindikasikan terjadinya pelemahan likuiditas keuangan daerah.

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas.

Pada tahun 2020, rasio lancar (*current ratio*) berada pada tingkat sangat tinggi, yaitu sebesar 81,86, yang mencerminkan kemampuan luar biasa dalam menutupi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Namun demikian, rasio ini menurun drastis menjadi hanya 3,18 pada tahun 2024. Penurunan tersebut menggambarkan semakin kecilnya ruang fiskal jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah, dan kemungkinan adanya peningkatan kewajiban jangka pendek atau penurunan aset lancar secara signifikan.

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mempertimbangkan persediaan. Persediaan sering kali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas, sehingga rasio ini lebih mencerminkan kondisi likuiditas yang sebenarnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan.

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) menunjukkan tren menurun dari 74,26 pada tahun 2020 menjadi 2,81 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun persediaan dikeluarkan dari perhitungan, kemampuan likuiditas tetap mengalami tekanan yang cukup besar.

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas mengukur sejauh mana kas dan setara kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini memberikan gambaran paling konservatif mengenai likuiditas pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara langsung.

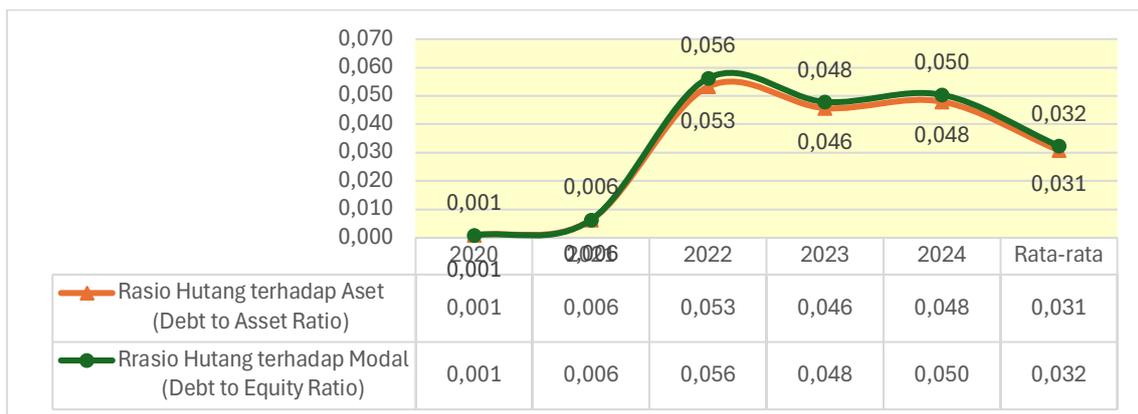
Rasio Kas (*Cash Ratio*) sebagai indikator paling konservatif dalam menilai likuiditas, juga menunjukkan penurunan paling mencolok yakni dari 62,06 pada tahun 2020 menjadi hanya 1,17 pada tahun 2024. Rasio kas yang sangat rendah, pemerintah daerah berisiko mengalami kesulitan likuiditas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara langsung, khususnya bila bergantung sepenuhnya pada kas yang tersedia.

Secara rata-rata selama lima tahun terakhir, rasio lancar tercatat sebesar 21,46, rasio cepat sebesar 19,52, dan rasio kas sebesar 16,03. Nilai-nilai rata-rata ini sesungguhnya masih mencerminkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang memadai jika dibandingkan dengan standar minimum di sektor publik, tetapi tren menurunnya perlu mendapat perhatian serius.

Penurunan konsisten pada seluruh rasio likuiditas tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pengelolaan aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Tebo perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan kas, piutang, dan strategi pembiayaan jangka pendeknya. Selain itu, penguatan perencanaan arus kas dan peningkatan efisiensi belanja jangka pendek menjadi penting agar tidak mengganggu kelangsungan pelayanan publik akibat tekanan likuiditas yang memburuk.

2.5.1.6. Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset daerah dibiayai oleh utang dan seberapa mampu daerah melunasi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*).



Gambar 2. 59 Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Tebo selama periode tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa secara umum tingkat solvabilitas

tetap berada pada kategori sangat sehat, meskipun mengalami peningkatan kewajiban yang cukup berarti sejak tahun 2022.

a. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini mengukur proporsi aset daerah yang didanai oleh utang. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko solvabilitas daerah karena ketergantungan yang tinggi terhadap utang.

Pada tahun 2020, rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*) tercatat sebesar 0,001, yang menunjukkan bahwa hanya 0,1 persen dari total aset yang dibiayai melalui utang. Angka ini naik secara bertahap menjadi 0,048 pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, nilai rasio ini masih tergolong rendah, yang berarti struktur pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tebo masih sangat bergantung pada ekuitas dan bukan pada pembiayaan berbasis utang. Rata-rata selama lima tahun menunjukkan rasio sebesar 0,031, yang mencerminkan bahwa utang jangka panjang maupun pendek tetap dalam batas yang terkendali terhadap total aset daerah.

b. Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara sumber pendanaan dari utang dan sumber internal. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai aktivitasnya.

Rasio hutang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) juga menunjukkan tren yang serupa, yakni meningkat dari 0,001 pada tahun 2020 menjadi 0,050 pada tahun 2024. Dengan kata lain, setiap Rp1 modal pemerintah daerah hanya dibebani utang sebesar Rp0,05, yang memperlihatkan tingkat leverage yang sangat rendah dan kemampuan keuangan daerah yang relatif mandiri. Rata-rata rasio selama lima tahun terakhir sebesar 0,032, mengindikasikan bahwa beban utang terhadap ekuitas masih dapat dikendalikan dengan baik.

Peningkatan rasio solvabilitas sejak tahun 2022 menunjukkan adanya penggunaan utang yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berpotensi mencerminkan kebutuhan pendanaan tambahan untuk mendukung belanja pembangunan atau operasional yang bersifat strategis. Namun, karena rasio tersebut masih jauh di bawah ambang batas kritis (umumnya 0,5 atau 50 persen), maka secara umum kondisi solvabilitas Pemerintah Kabupaten Tebo dapat dikatakan sangat baik dan sehat.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Tebo tetap perlu memperhatikan keberlanjutan fiskal jangka panjang, khususnya dalam mengelola komitmen kewajiban jangka panjang agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keuangan daerah di masa depan. Prinsip kehati-hatian dalam berutang, disertai dengan perencanaan pembiayaan yang matang dan transparan, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kemandirian fiskal daerah.

2.5.1.7. Analisis Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, khususnya dalam mengelola piutang dan persediaan. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu umur piutang dan umur persediaan.



Gambar 2. 60 Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Tebo selama periode 2020 hingga 2024, kinerja pengelolaan piutang dan persediaan menunjukkan pola yang berbeda.

a. Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang dari pihak ketiga. Semakin lama umur piutang, semakin besar risiko ketidakmampuan daerah dalam mengonversi piutang menjadi kas. Umur piutang yang tinggi dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, umur piutang Pemerintah Kabupaten Tebo menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, rata-rata waktu penagihan piutang adalah 17 hari, yang menunjukkan proses penagihan yang relatif cepat. Angka ini bahkan membaik menjadi hanya 7 hari pada tahun 2021, mengindikasikan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan piutang. Namun, tren tersebut tidak bertahan, karena pada tahun 2024 umur piutang kembali meningkat menjadi 18 hari, mendekati kondisi tahun 2020. Rata-rata umur piutang selama lima tahun terakhir adalah 12 hari, yang secara umum masih tergolong efisien. Meski demikian, fluktuasi ini menunjukkan perlunya konsistensi kebijakan dan tata kelola piutang yang lebih stabil.

b. Umur Persediaan

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menghabiskan persediaan yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Semakin tinggi angka umur persediaan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau penggunaan yang produktif.

Umur persediaan menunjukkan angka yang relatif tinggi. Umur persediaan tertinggi tercatat pada tahun 2021, yaitu selama 496 hari, yang menandakan adanya potensi penumpukan barang atau kurang optimalnya distribusi logistik. Pada tahun-tahun lainnya, angka ini berkisar antara 303 hingga 344 hari, yang tetap tergolong lama. Rata-rata umur persediaan sebesar 353 hari, Pemerintah Kabupaten Tebo perlu

meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan rotasi barang persediaan. Persediaan yang terlalu lama tersimpan berisiko mengalami penurunan kualitas, kehilangan nilai pakai, atau bahkan pemborosan anggaran.

Secara umum, analisis rasio aktivitas ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan piutang daerah berada dalam kategori cukup efisien, pengelolaan persediaan masih memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan. Optimalisasi sistem informasi barang, penjadwalan distribusi yang tepat waktu, serta sinergi antar unit kerja merupakan langkah strategis yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset lancar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

2.6. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis gambaran ringkas pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2020-2024, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah untuk periode 2026-2030. Analisis ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai belanja atau pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Berikut adalah proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Tebo untuk tahun 2026-2030.

Tabel 2. 48 Proyeksi Kerangka Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	97.477.335.761	127.262.655.000	132.413.675.000	137.788.229.000	143.396.522.000	149.249.239.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.132.665.413.208	1.081.132.768.000	1.092.265.591.000	1.103.558.354.000	1.115.015.253.000	1.126.640.650.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.533.453.000	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.254.676.201.969	1.208.395.423.000	1.224.679.266.000	1.241.346.583.000	1.258.411.775.000	1.275.889.889.000
2.	BELANJA						
2.1	Belanja Operasi	826.988.265.740	856.044.131.000	870.967.045.000	886.159.818.000	941.627.472.000	916.245.340.000
2.2	Belanja Modal	223.723.473.474	348.799.174.000	350.072.205.000	351.456.251.000	352.960.595.000	355.724.854.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	509.619.684	561.856.000	589.949.000	619.446.000	650.418.000	682.939.000
2.4	Belanja Transfer	195.515.035.106	2.990.262.000	3.050.067.000	3.111.068.000	3.173.290.000	3.236.756.000
	JUMLAH BELANJA	1.246.736.394.004	1.208.395.423.000	1.224.679.266.000	1.241.346.583.000	1.298.411.775.000	1.275.889.889.000
	SURPLUS/DEFISIT	7.939.807.965,03	0	0	0	(40.000.000.000)	0
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	80.810.717.250	34.992.230.000	49.992.230.000	49.992.230.000	74.992.230.000	34.992.230.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	19.992.228.216	34.992.230.000	49.992.230.000	49.992.230.000	34.992.230.000	34.992.230.000
	PEMBIAYAAN NETTO	60.818.489.034	0	0	0	40.000.000.000	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	68.758.296.999,03	0	0	0	0	0

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Berdasarkan data Proyeksi Kerangka Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo untuk periode tahun 2026 hingga 2030, terlihat bahwa struktur pendanaan dan belanja daerah mengalami dinamika yang mencerminkan upaya konsolidasi fiskal serta efisiensi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pada sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Tebo menunjukkan kecenderungan positif dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tumbuh dari Rp97,48 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp149,25 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah, baik melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, penguatan badan usaha milik daerah, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan. Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi struktur pendapatan, meskipun angkanya relatif stagnan dan mengalami sedikit fluktuasi dari Rp1,13 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,13 triliun pada tahun 2030. Sementara itu, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak lagi dianggarkan setelah tahun 2024, yang menandakan adanya penyederhanaan pos pendapatan atau perubahan regulasi akuntansi pendapatan.

Dari sisi belanja daerah, total belanja mengalami peningkatan secara gradual, dengan fokus utama pada belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi naik dari Rp826,99 miliar pada tahun 2024 menjadi puncaknya Rp941,63 miliar pada tahun 2029, sebelum turun tipis pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas layanan publik melalui pembiayaan gaji pegawai, barang dan jasa, serta belanja subsidi. Sementara itu, belanja modal menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencapai Rp355,72 miliar pada tahun 2030. Peningkatan belanja modal ini mencerminkan fokus pembangunan infrastruktur fisik dan sarana prasarana pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Pada aspek surplus atau defisit anggaran, data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat surplus anggaran sebesar Rp7,94 miliar. Namun, pada tahun 2029 direncanakan terjadi defisit anggaran sebesar Rp40 miliar. Defisit ini diimbangi oleh pembiayaan netto pada tahun tersebut yang nilainya sama, menunjukkan

perencanaan fiskal yang terkendali dengan mengandalkan penerimaan pembiayaan untuk menutup gap pendanaan. Pada tahun-tahun lainnya, proyeksi menunjukkan posisi anggaran yang seimbang antara pendapatan dan belanja, yang menandakan pendekatan zero-deficit budgeting.

Dari sisi pembiayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Tebo masih mengandalkan penerimaan pembiayaan dalam bentuk penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) atau sumber lainnya. Pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan mencapai Rp80,81 miliar, jauh lebih tinggi dibanding pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19,99 miliar, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp60,82 miliar. Namun, pada tahun-tahun berikutnya pembiayaan bersifat seimbang, kecuali tahun 2029 yang menunjukkan peran penting pembiayaan dalam menutup defisit.

Secara umum, kerangka pendanaan Kabupaten Tebo untuk tahun 2024–2030 dirancang dengan kehati-hatian fiskal dan orientasi pembangunan jangka menengah. Peningkatan PAD dan belanja modal menjadi indikator positif dari arah kebijakan keuangan daerah yang mendukung kemandirian fiskal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat tetap menjadi tantangan, sehingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD perlu terus diperkuat dalam konteks keberlanjutan fiskal daerah.

2.6.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan memiliki peran penting dalam perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah. Adanya estimasi pendapatan yang akurat, pemerintah dapat menyusun rencana pengeluaran secara lebih efektif, memastikan anggaran yang disusun realistis, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya sesuai dengan prioritas pembangunan dan program yang direncanakan. Selain itu, proyeksi pendapatan juga berfungsi sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas fiskal serta menghindari potensi defisit anggaran. Keakuratan proyeksi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi risiko keuangan di masa depan dan mengambil langkah-langkah preventif guna memitigasi dampak negatifnya.

Dalam menyusun proyeksi pendapatan, pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tren historis penerimaan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pencapaian dan pertumbuhan pendapatan, kondisi ekonomi makro, serta kebijakan dan strategi pendapatan daerah yang akan diterapkan. Berdasarkan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, proyeksi yang dihasilkan diharapkan lebih realistis dan dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan fiskal. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 49 Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	97.477.335.761	127.262.655.000	132.413.675.000	137.788.229.000	143.396.522.000	149.249.239.000
1.1.1	Pajak Daerah	25.946.092.811	48.866.585.000	50.332.583.000	51.842.560.000	53.397.837.000	54.999.772.000
1.1.2	Retribusi Daerah	52.434.009.352	57.808.496.000	60.698.921.000	63.733.867.000	66.920.560.000	70.266.588.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.575.080.402	12.761.526.000	13.399.602.000	14.069.582.000	14.773.061.000	15.511.714.000
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	7.522.153.195	7.826.048.000	7.982.569.000	8.142.220.000	8.305.064.000	8.471.165.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.132.665.413.208	1.081.132.768.000	1.092.265.591.000	1.103.558.354.000	1.115.015.253.000	1.126.640.650.000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.065.371.107.309	1.031.245.199.000	1.040.930.538.000	1.050.709.594.000	1.060.583.290.000	1.070.552.555.000
1.2.2	Transfer antar – daerah	67.294.305.899	49.887.569.000	51.335.053.000	52.848.760.000	54.431.963.000	56.088.095.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.533.453.000	0	0	0	0	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	24.533.453.000	0	0	0	0	0
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.254.676.201.969	1.208.395.423.000	1.224.679.266.000	1.241.346.583.000	1.258.411.775.000	1.275.889.889.000

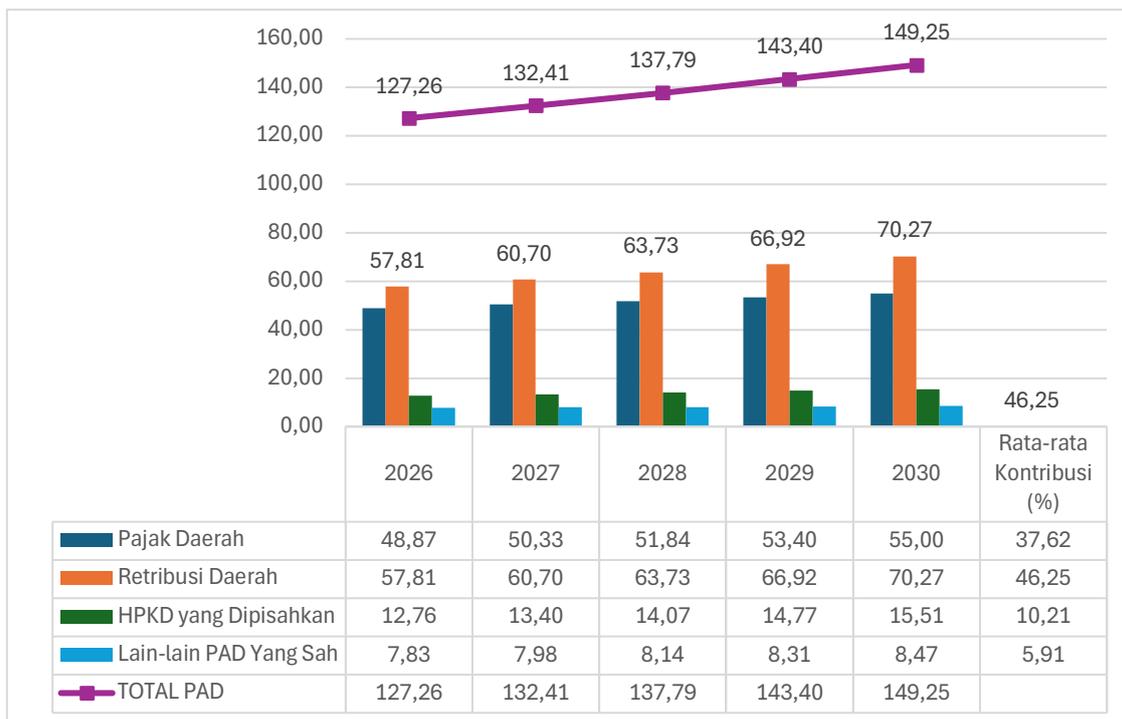
Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Secara keseluruhan, jumlah pendapatan daerah Kabupaten Tebo dalam periode 2024–2030 mengalami pertumbuhan moderat, dari Rp1,25 triliun menjadi Rp1,28 triliun. Meskipun terlihat stabil, tren ini menandakan adanya tantangan struktural dalam diversifikasi sumber pendapatan dan perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD secara berkelanjutan. Upaya penguatan kapasitas fiskal melalui peningkatan PAD menjadi krusial untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dan mendorong kemandirian fiskal daerah yang lebih kuat di masa mendatang.

2.6.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo tahun 2026 hingga 2030, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dari Rp97,48 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp149,25 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan PAD ini merupakan indikasi positif terhadap kinerja fiskal daerah, mencerminkan peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah.

Berdasarkan data Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tebo untuk periode tahun 2026 hingga 2030, dapat disimpulkan bahwa struktur PAD didominasi oleh dua sumber utama, yaitu retribusi daerah dan pajak daerah, dengan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 46,25 persen dan 37,62 persen terhadap total PAD. Komposisi ini mencerminkan peran penting sektor pelayanan publik dan aktivitas ekonomi lokal dalam mendukung pendanaan mandiri daerah. Berikut adalah grafik yang menampilkan proyeksi kontribusi masing-masing komponen PAD selama periode 2026-2030.



Gambar 2. 61 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kabupaten Tebo 2026-2030 (Rp. Miliar)

Sumber: Olah Data 2025

Secara rinci, Pajak Daerah meningkat lebih dari dua kali lipat dari Rp25,95 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp55 miliar pada tahun 2030. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan basis pajak, perbaikan sistem administrasi perpajakan, serta perluasan sektor ekonomi lokal. Demikian pula, Retribusi Daerah mengalami kenaikan dari Rp52,43 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp70,27 miliar pada tahun 2030, yang menunjukkan bahwa layanan publik yang dikenai retribusi semakin luas dan kualitas pelayanannya semakin baik, sehingga mampu menarik kontribusi masyarakat.

Kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKD), yang mencapai rata-rata 10,21 persen, juga mengalami pertumbuhan dari Rp12,76 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp15,51 miliar pada tahun 2030. Ini menunjukkan bahwa unit-unit usaha milik daerah dan pengelolaan aset daerah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap PAD. Meskipun kontribusinya masih terbatas dibanding pajak dan retribusi, namun kinerjanya yang positif menunjukkan peluang strategis bagi diversifikasi sumber pendapatan daerah, khususnya melalui penguatan tata kelola BUMD.

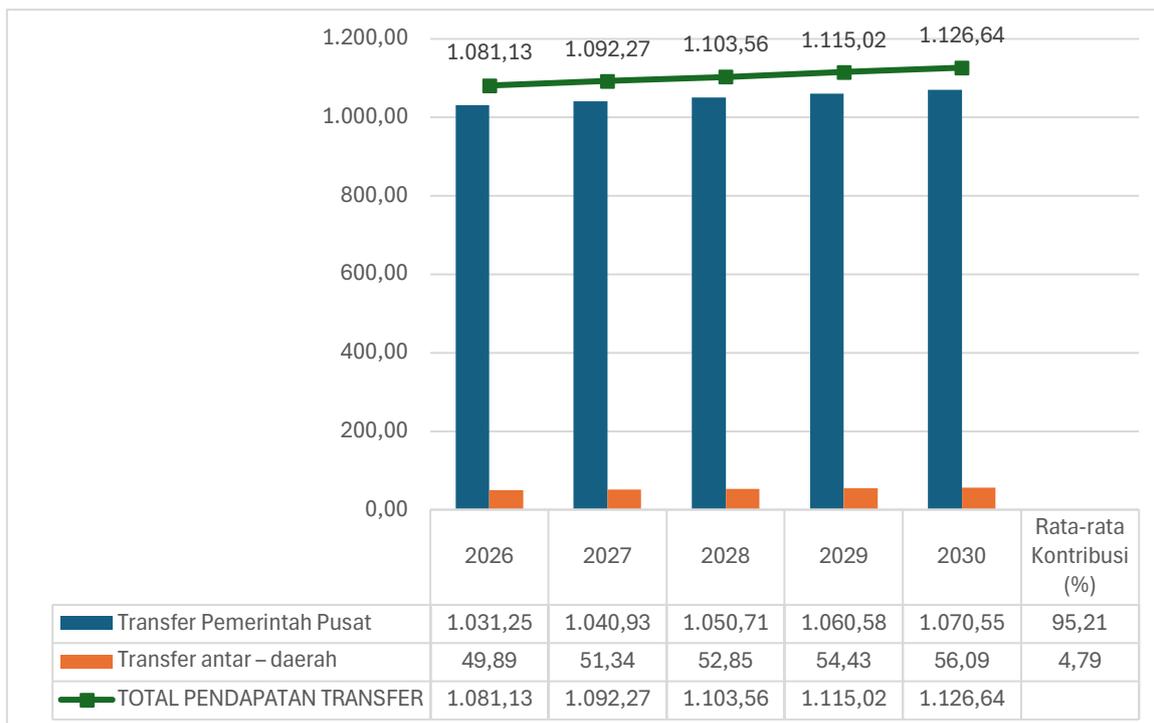
Adapun lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi paling kecil, yaitu rata-rata 5,91 persen dari total PAD. Meskipun pertumbuhannya relatif stabil dari Rp7,83 miliar menjadi Rp8,47 miliar, sumber ini tetap penting karena mencerminkan penerimaan yang lebih fleksibel, meskipun harus tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, struktur PAD Kabupaten Tebo untuk periode 2026–2030 menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten dan proporsi kontribusi yang cukup stabil. Namun demikian, dominasi retribusi dan pajak daerah dalam struktur PAD juga mengisyaratkan pentingnya strategi penguatan kelembagaan fiskal daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perluasan basis penerimaan lokal secara berkelanjutan. Optimalisasi seluruh komponen PAD perlu terus dilakukan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan menciptakan ruang fiskal yang sehat dalam mendukung pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

2.6.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tetap menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah, meskipun angkanya mengalami fluktuasi ringan. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang semula sebesar Rp1,07 triliun pada tahun 2024 sedikit menurun pada tahun 2026, namun kembali mengalami peningkatan hingga mencapai Rp1,07 triliun pada tahun 2030. Di sisi lain, Transfer antar-daerah seperti dari provinsi, juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun kontribusinya masih relatif kecil. Hal ini mengindikasikan ketergantungan fiskal Kabupaten Tebo terhadap dana pusat masih tinggi, namun terdapat ruang peningkatan dari transfer horizontal yang bisa dioptimalkan melalui kerja sama antardaerah atau pemanfaatan dana bagi hasil provinsi.

Grafik berikut ini menampilkan proyeksi kontribusi dan pertumbuhan dari masing-masing komponen Transfer selama periode 2026-2030.



Gambar 2. 62 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Tebo 2026-2030 (Rp. Miliar)

Sumber: Olah Data 2025

Berdasarkan data Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tebo untuk periode tahun 2026 hingga 2030, terlihat bahwa struktur pendapatan transfer masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, dengan kontribusi rata-rata mencapai 95,21 persen dari total pendapatan transfer. Sementara itu, transfer antardaerah, yang berasal dari dana perimbangan provinsi atau kerja sama fiskal antarwilayah, hanya menyumbang sekitar 4,79 persen dari keseluruhan pendapatan transfer selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan transfer Kabupaten Tebo menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap alokasi dari pemerintah pusat. Kondisi ini memberikan kepastian pembiayaan jangka pendek, namun di sisi lain juga mencerminkan tantangan struktural dalam hal kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas fiskal lokal, termasuk melalui intensifikasi PAD dan optimalisasi transfer antardaerah. Dengan demikian, Kabupaten Tebo dapat membangun sistem

keuangan daerah yang lebih resilien, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan merata di masa mendatang.

2.6.1.3. Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang pada tahun 2024 berkontribusi sebesar Rp24,53 miliar (seluruhnya berasal dari pendapatan hibah), tidak lagi dianggarkan pada tahun-tahun berikutnya. Ini bisa disebabkan oleh ketidakpastian sumber hibah atau kebijakan perencanaan yang lebih konservatif. Absennya proyeksi dari komponen ini ke depan menjadi catatan penting untuk memperkuat mekanisme perolehan dan perencanaan hibah sebagai bagian dari pendapatan alternatif yang potensial.

Dalam rangka mewujudkan proyeksi pertumbuhan pendapatan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tebo perlu mengambil langkah-langkah konkret dan terukur. Oleh karena itu, untuk mencapai target proyeksi pendapatan tersebut diperlukan kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Tebo di masa mendatang diarahkan pada:

- a. Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi hukum terkait pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengumpulan dan pengelolaan PAD. Ini dapat mencakup peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan untuk mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan pemungutan ini meliputi rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang, hingga kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan

retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi;

- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan sarana serta prasarana pada perangkat daerah penghasil;
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah daerah untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran yang lebih efektif;
- g. Memperbaiki pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, pemantauan, dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Kebijakan terkait pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus mempertimbangkan nilai kekayaan yang dipisahkan serta manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- j. Meningkatkan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berkontribusi bagi hasil laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- k. Meningkatkan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar dapat menghasilkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan BLUD;
- l. Mengantisipasi potensi penurunan dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan melakukan diversifikasi sumber pendapatan di sektor lain agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan dari sumber yang fluktuatif;
- m. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dengan Kabupaten Tebo dalam peningkatan pendapatan, khususnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak; DAN
- n. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tebo meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proyeksi pertumbuhan pendapatan tercapai. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang muncul, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil.

Melalui berbagai strategi tersebut, diharapkan Kabupaten Tebo dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan guna mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.6.2. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk berbagai tujuan yang esensial dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi belanja membantu pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran tahunan dengan mengestimasi kebutuhan pengeluaran. Ini memastikan bahwa dana yang tersedia dialokasikan secara efektif dan efisien. Melalui proyeksi belanja yang akurat, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Proyeksi belanja memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran, mencegah pemborosan, dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Sementara itu, Efisiensi belanja daerah sangat penting untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara optimal demi meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 50 Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.	BELANJA						
2.1	Belanja Operasi	826.988.265.740	856.044.131.000	870.967.045.000	886.159.818.000	941.627.472.000	916.245.340.000
2.1.1	Belanja Pegawai	436.611.033.885	449.807.602.000	456.554.716.000	463.403.037.000	470.354.083.000	477.409.394.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	341.972.686.340	355.788.383.000	362.904.151.000	370.162.234.000	377.565.479.000	385.116.789.000
2.1.3	Belanja Bunga	7.391.886.161	7.391.886.000	7.391.886.000	7.391.886.000	7.391.886.000	7.391.886.000
2.1.4	Belanja Subsidi	1.070.115.987	1.091.625.000	1.102.541.000	1.113.566.000	1.124.702.000	1.135.949.000
2.1.5	Belanja Hibah	39.942.543.368	41.964.635.000	43.013.751.000	44.089.095.000	85.191.322.000	45.191.322.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0
2.2	Belanja Modal	223.723.473.474	348.799.174.000	350.072.205.000	351.456.251.000	352.960.595.000	355.724.854.000
2.2.1	Tanah	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Peralatan dan Mesin	41.686.656.343	42.524.558.000	42.949.804.000	43.379.302.000	43.813.095.000	44.251.226.000
2.2.3	Gedung dan Bangunan	54.574.611.880	60.168.509.000	63.176.934.000	66.335.781.000	69.652.570.000	73.135.199.000
2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.761.942.242	241.793.047.000	239.556.146.000	237.274.061.000	234.948.481.000	233.711.051.000
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	6.108.324.610	3.813.060.000	3.889.321.000	3.967.107.000	4.046.449.000	4.127.378.000
2.2.6	Aset Lainnya	591.938.400	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	509.619.684	561.856.000	589.949.000	619.446.000	650.418.000	682.939.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	509.619.684	561.856.000	589.949.000	619.446.000	650.418.000	682.939.000
2.4	Belanja Transfer	195.515.035.106	2.990.262.000	3.050.067.000	3.111.068.000	3.173.290.000	3.236.756.000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.874.145.906	2.990.262.000	3.050.067.000	3.111.068.000	3.173.290.000	3.236.756.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	192.640.889.200	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	1.246.736.394.004	1.208.395.423.000	1.224.679.266.000	1.241.346.583.000	1.298.411.775.000	1.275.889.889.000

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Berdasarkan data Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tebo untuk periode tahun 2026 hingga 2030, terlihat bahwa struktur belanja daerah mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan respons terhadap kebutuhan tak terduga. Proyeksi ini menunjukkan pendekatan fiskal yang cermat dan bertahap dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Komponen terbesar dalam struktur belanja adalah belanja operasi, yang secara konsisten menyerap lebih dari 70 persen dari total belanja daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2024, belanja operasi mencapai Rp826,99 miliar dan meningkat hingga Rp916,25 miliar pada tahun 2030. Komposisi belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang mencerminkan peran besar belanja rutin dalam mendukung kelangsungan layanan publik dan kegiatan pemerintahan. Belanja pegawai meningkat dari Rp436,61 miliar menjadi Rp477,41 miliar, sementara belanja barang dan jasa naik dari Rp341,97 miliar menjadi Rp385,12 miliar. Meskipun penting, dominasi belanja pegawai mengindikasikan perlunya upaya efisiensi agar tidak membebani kapasitas fiskal untuk belanja pembangunan.

Selain belanja rutin, belanja modal menunjukkan komitmen terhadap pembangunan fisik dan infrastruktur strategis. Nilai belanja modal melonjak signifikan dari Rp223,72 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp355,72 miliar pada tahun 2030. Komponen utama dari belanja modal adalah pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan, yang menyerap sekitar dua pertiga dari total belanja modal. Hal ini mengindikasikan prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah, ketahanan pangan, dan pelayanan publik jangka panjang. Selain itu, pengalokasian anggaran untuk gedung dan bangunan juga meningkat dari Rp54,57 miliar menjadi Rp73,14 miliar, yang menunjukkan perhatian terhadap perbaikan dan pembangunan fasilitas layanan pemerintahan dan publik.

Komponen belanja tidak terduga tetap dijaga dalam jumlah yang relatif kecil namun penting, berkisar antara Rp509 juta hingga Rp683 juta per tahun. Ini menunjukkan kewaspadaan pemerintah daerah terhadap risiko dan kebutuhan

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

Sementara itu, belanja transfer, yang mencakup belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa atau pihak ketiga, mengalami penurunan drastis pasca tahun 2024. Dari Rp195,52 miliar pada tahun 2024, belanja transfer turun menjadi hanya sekitar Rp3 miliar per tahun mulai tahun 2026. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak dianggarkannya kembali belanja bantuan keuangan, yang pada tahun 2024 mencapai Rp192,64 miliar. Hal ini dapat menjadi catatan penting mengenai kebijakan fiskal desentralisasi dan hubungan keuangan antarpemerintah dalam jangka menengah.

Untuk mewujudkan proyeksi belanja daerah yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tebo perlu menetapkan kebijakan pengelolaan belanja yang konkret, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan. Kebijakan belanja daerah untuk periode 2026–2030 diarahkan pada sejumlah prinsip utama sebagai berikut:

- a. Mendesain perencanaan anggaran belanja yang didasari oleh prinsip *value for money*, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif;
- b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
- d. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik;

- e. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Belanja pembangunan tidak hanya bergantung pada kapasitas fiskal internal daerah, tetapi juga harus memperhatikan anggaran dari sumber luar seperti APBN, kerjasama antara pemerintah dan swasta, peran *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta sumber pendanaan lainnya, dengan menerapkan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat membelanjakan secara efektif dan efisien secara signifikan, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

2.6.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Proyeksi ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran tahunan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, baik untuk menutup defisit anggaran maupun untuk mendanai proyek-proyek strategis. Melalui proyeksi pembiayaan, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengelola utang secara lebih efisien, termasuk dalam menentukan jumlah pinjaman yang diperlukan serta jadwal pelunasan utangnya. Selain itu, proyeksi pembiayaan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko keuangan yang mungkin timbul, seperti risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Dengan proyeksi yang akurat, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa sumber

pembiayaan yang digunakan tidak menimbulkan beban yang berlebihan terhadap anggaran di masa mendatang.

Pertimbangan utama dalam penyusunan proyeksi pembiayaan daerah didasarkan pada analisis tren data historis dari tahun 2020 hingga 2024 untuk setiap objek pembiayaan. Di samping itu, proyeksi juga disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro, kebijakan penyelesaian kewajiban daerah, kebijakan efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan daerah, serta kewajiban kepada pihak ketiga yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, termasuk kebijakan defisit anggaran. Melalui pendekatan tersebut, proyeksi pembiayaan diharapkan lebih realistis dan akuntabel. Adapun proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 51 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2026-2030

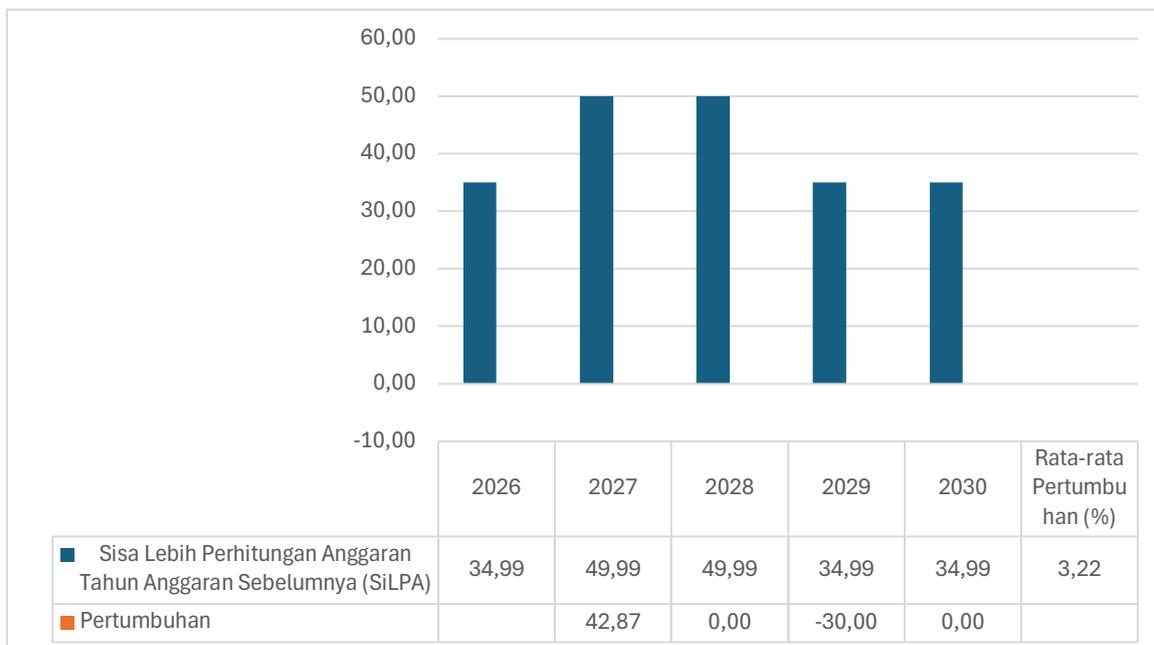
No	Uraian	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	80.810.717.250	34.992.230.000	49.992.230.000	49.992.230.000	74.992.230.000	34.992.230.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	80.810.717.250	34.992.230.000	49.992.230.000	49.992.230.000	34.992.230.000	34.992.230.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0				40.000.000.000	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	19.992.228.216	34.992.230.000	49.992.230.000	49.992.230.000	34.992.230.000	34.992.230.000
3.1.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	19.992.228.216	19.992.230.000	19.992.230.000	19.992.230.000	19.992.230.000	19.992.230.000
3.1.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3.1.3	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	60.818.489.034	0	0	0	40.000.000.000	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	68.758.296.999,03	0	0	0	0	0

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Berdasarkan data Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo untuk periode tahun 2026 hingga 2030, dapat disimpulkan bahwa strategi pembiayaan daerah dirancang dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan pengelolaan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan. Pembiayaan daerah mencakup dua komponen utama, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang keduanya memainkan peran penting dalam menyeimbangkan APBD dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

Pada sisi penerimaan pembiayaan, sumber utama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA diproyeksikan menyumbang seluruh komponen penerimaan pembiayaan dari tahun 2024 hingga 2028, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp80,81 miliar, dan kemudian menurun menjadi Rp34,99 miliar pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo masih mengandalkan efisiensi belanja dan pengendalian kas sebagai salah satu cara menjaga kelangsungan fiskal. Menariknya, pada tahun 2029 terdapat penambahan jenis penerimaan dari pencairan dana cadangan sebesar Rp40 miliar, yang menandakan penggunaan mekanisme pembiayaan jangka menengah untuk kebutuhan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung.

Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan SiLPA selama lima tahun hanya sebesar 3,22 persen, yang mencerminkan kecenderungan stabil meskipun dengan pola naik-turun. Angka ini bisa menjadi indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo cenderung menjaga SiLPA pada level tertentu sebagai bagian dari strategi fiskal konservatif untuk mengantisipasi ketidakpastian atau keperluan mendesak pada tahun anggaran berikutnya. Grafik berikut menunjukkan proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dari pos SiLPA untuk tahun 2026-2030 di Kabupaten Tebo.



Gambar 2. 63 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tebo 2026-2030 (Rp. Miliar)

Sumber: Olah Data 2025

Meskipun SiLPA dapat menjadi sumber pembiayaan pada tahun berikutnya, akumulasi SiLPA yang terlalu tinggi juga bisa menjadi indikasi lemahnya penyerapan anggaran, kurang efektifnya perencanaan program, atau kendala dalam pelaksanaan teknis. Oleh karena itu, pengelolaan SiLPA perlu dioptimalkan, bukan sekadar sebagai cadangan kas, tetapi juga diarahkan untuk mempercepat pemenuhan target pembangunan dan meningkatkan kualitas belanja daerah.

Proyeksi SiLPA Kabupaten Tebo menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, agar dana publik yang telah dialokasikan benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemanfaatan SiLPA secara terencana dan tepat sasaran juga dapat memperkuat ketahanan fiskal daerah dan mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebagian besar diarahkan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dengan nilai yang konstan di

kisaran Rp19,99 miliar per tahun. Ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo dalam memenuhi kewajiban fiskal secara tertib dan terukur. Selain itu, terdapat alokasi untuk penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau entitas lainnya yang dimulai pada tahun 2026, dengan kisaran antara Rp10 miliar hingga Rp15 miliar per tahun. Hal ini mencerminkan orientasi pemerintah untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah melalui investasi produktif yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang.

Pengeluaran lainnya juga dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, yang muncul pada tahun 2027 dan 2028, masing-masing sebesar Rp20 miliar. Dana cadangan ini mencerminkan perencanaan fiskal jangka menengah dan upaya antisipatif terhadap kebutuhan pembiayaan masa depan yang bersifat strategis yaitu untuk kebutuhan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung. Praktik ini sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan memperkuat daya tahan fiskal daerah.

Secara keseluruhan, pembiayaan netto hanya tercatat positif pada tahun 2024 dan 2029, masing-masing sebesar Rp60,82 miliar dan Rp40 miliar. Pada tahun-tahun lainnya, pembiayaan bersifat seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo telah merencanakan pembiayaan daerah secara konservatif dan realistis, tanpa menimbulkan ketergantungan yang berlebihan terhadap pembiayaan defisit.

Dengan demikian, proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tebo mencerminkan tata kelola fiskal yang prudent, berorientasi jangka menengah, dan mendukung kemandirian fiskal secara bertahap. Namun, keberhasilan strategi ini tetap memerlukan pengawasan ketat terhadap realisasi pendapatan dan belanja serta evaluasi berkala terhadap efektivitas investasi daerah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah ke depan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

- a. Pembiayaan: Diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit, atau memanfaatkan apabila terjadi surplus anggaran;
- b. Pendanaan APBD Defisit: Jika APBD diperkirakan mengalami defisit, pembiayaan dapat diperoleh dari sumber-sumber penerimaan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD, yang tidak akan membebani daerah;
- c. Pendanaan APBD Surplus: Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- d. Penganggaran SiLPA: Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan; dan
- e. Penyertaan Modal Daerah: Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.

2.6.4. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan, belanja, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2026-2030 untuk mendanai pembangunan

Kabupaten Tebo. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 52 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	1.254.676.201.969	1.208.395.423.000	1.224.679.266.000	1.241.346.583.000	1.258.411.775.000	1.275.889.889.000
2	Penerimaan Pembiayaan	80.810.717.250	34.992.230.000	49.992.230.000	49.992.230.000	74.992.230.000	34.992.230.000
	Total Penerimaan	1.335.486.919.219	1.243.387.653.000	1.274.671.496.000	1.291.338.813.000	1.333.404.005.000	1.310.882.119.000
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	1.335.486.919.219	1.243.387.653.000	1.274.671.496.000	1.291.338.813.000	1.333.404.005.000	1.310.882.119.000
3	PRIORITAS I (70 %)		870.371.357.100	892.270.047.200	903.937.169.100	933.382.803.500	917.617.483.300
	a. Belanja pegawai		449.807.602.000	456.554.716.000	463.403.037.000	470.354.083.000	477.409.394.000
	b. Pengeluaran Pembiayaan		34.992.230.000	49.992.230.000	49.992.230.000	34.992.230.000	34.992.230.000
	c. Belanja wajib dan mengikat lainnya		385.571.525.100	385.723.101.200	390.541.902.100	428.036.490.500	405.215.859.300
4	PRIORITAS II (20 %)		248.677.530.600	254.934.299.200	258.267.762.600	266.680.801.000	262.176.423.800
5	PRIORITAS III (10 %)		124.338.765.300	127.467.149.600	129.133.881.300	133.340.400.500	131.088.211.900

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2024

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (KKKD) Pemerintah Kabupaten Tebo untuk periode tahun 2026 hingga 2030 terlihat bahwa pemerintah daerah memiliki proyeksi kemampuan fiskal yang relatif stabil dan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kapasitas riil ini dihitung dari total pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, yang menggambarkan besaran sumber daya fiskal yang secara riil tersedia untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun 2026, kapasitas riil Kabupaten Tebo diproyeksikan sebesar Rp1,243 triliun, dan terus meningkat hingga mencapai Rp1,333 triliun pada tahun 2029, sebelum sedikit menurun menjadi Rp1,310 triliun pada tahun 2030. Kenaikan kapasitas riil ini sebagian besar didorong oleh kecenderungan naiknya pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer pusat, serta dukungan penerimaan pembiayaan yang meskipun berfluktuasi, tetap tersedia untuk menopang belanja pembangunan.

Dari keseluruhan kapasitas tersebut, pembagian proporsi berdasarkan tiga prioritas kebijakan menunjukkan pendekatan yang rasional dan sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Prioritas I, yang mencakup belanja pegawai, pengeluaran pembiayaan, serta belanja wajib dan mengikat lainnya, menyerap 70 persen dari kapasitas fiskal tahunan. Alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memenuhi kewajiban belanja rutin dan mendasar dengan fokus untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan. Pada tahun 2026, belanja pegawai mencapai Rp449,81 miliar dan terus meningkat hingga Rp477,41 miliar pada tahun 2030. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan stabil di angka Rp34,99 miliar, dan belanja wajib lainnya juga menunjukkan tren kenaikan, menandakan adanya peningkatan tuntutan layanan dasar dan tanggung jawab konstitusional.

Selanjutnya, Prioritas II, yang dialokasikan sebesar 20 persen dari kapasitas riil, diarahkan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Nilai alokasi prioritas ini berkisar antara

Rp248,68 miliar hingga Rp266,68 miliar selama lima tahun proyeksi. Adapun Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mencakup:

- a. Beasiswa untuk siswa kurang mampu dan berprestasi, serta tenaga pendidik
- b. Bantuan operasional ke pondok pesantren dan madrasah
- c. Insentif guru ngaji/TPQ dan tenaga kesehatan daerah terpencil
- d. Infrastruktur jalan, irigasi, pertanian, sarana olahraga dan sekretariat lembaga kecamatan
- e. Kesehatan gratis (UHC 100 persen) dan layanan kesehatan untuk semua (*Health for All*)
- f. Dokter masuk dusun
- g. Membuka Kawasan siap bangun, RTH dan penataan ibukota kecamatan
- h. Menyediakan Balai Latihan Kerja / BLK terpadu
- i. Ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ramah lingkungan
- j. Peningkatan kesejahteraan ASN dan perangkat desa
- k. Layanan perijinan dan kependudukan berbasis *web* dan *mobile* dengan moto Sijempol (sistim perijinan jemput bola)

Program-program prioritas tersebut pada dasarnya beririsan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar dan belanja wajib (mandatory spending) yang dialokasikan dalam kelompok Prioritas I (70 persen dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah)

Sementara itu, Prioritas III, yang mendapat alokasi sebesar 10 persen, diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk program-program yang bersifat pendukung namun tetap diperlukan dalam menjamin keberlangsungan pelayanan. Besarannya meningkat dari Rp124,34 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp133,34 miliar pada tahun 2029.

Struktur alokasi berdasarkan skema tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian fiskal yang tetap berpihak pada kesinambungan pelayanan dasar dan pembangunan. Namun, proporsi belanja pada Prioritas I yang mendominasi (terutama belanja pegawai dan kewajiban wajib lainnya) mengisyaratkan masih terbatasnya ruang fiskal yang fleksibel bagi Pemerintah Kabupaten Tebo. Oleh karena itu, strategi peningkatan efisiensi belanja, penguatan PAD, serta optimalisasi belanja prioritas II

dan III menjadi penting untuk mendorong transformasi ekonomi daerah dan pelayanan publik yang lebih adaptif dan berdampak.

2.7. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.7.1. Permasalahan Lintas sektor

Pembangunan daerah merupakan agenda penting dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, perhatian terhadap permasalahan yang menghambat pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan merupakan hal yang mendasar. Analisis mendalam terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh daerah menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif. Pembahasan mengenai permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan utama dalam konteks Kabupaten Tebo mencakup:

Tabel 2. 53 Pemetaan permasalahan pembangunan lintas sektor

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Transformasi Ekonomi	Kesejahteraan masyarakat belum memadai	Pertumbuhan sektor industri pengolahan belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM belum memadai	
			Sarana dan prasarana IKM belum memadai	
		Pertumbuhan sektor pariwisata belum optimal	Pengembangan daya tarik destinasi wisata belum optimal	
			Promosi destinasi wisata kurang memadai	
			Pengembangan SDM pelaku wisata belum optimal	
			Kapasitas produksi ekonomi kreatif belum memadai	
		Pengembangan BUMD belum optimal	Pembentukan modal tetap bruto belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia pengelola belum optimal
				Identifikasi potensi investasi belum optimal
		Ekspor barang dan jasa belum memadai	Ekspor barang dan jasa belum memadai	Promosi investasi belum memadai
				<i>Quality control</i> produk belum memadai
		Kerjasama pemasaran ekspor belum optimal		

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pertumbuhan sub sektor perikanan belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia perikanan belum optimal
			Sarana dan prasarana perikanan belum memadai
			Metode budidaya perikanan masih konvensional
			<i>Quality control</i> produk belum memadai
	Ketimpangan pendapatan masyarakat	Usaha mikro yang naik kelas ke usaha kecil belum memadai	Produksi usaha mikro khususnya usaha non-pertanian belum memadai
			Kualitas produk usaha mikro belum memadai
		Kapasitas pemasaran produk usaha mikro belum optimal	
	Pengangguran terbuka masih perlu diturunkan	Kesempatan kerja belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi belum optimal
			Kesesuaian kompetensi dengan permintaan pasar belum memadai
			Jaringan pemasaran tenaga kerja belum memadai
	Pengembangan ekonomi hijau belum optimal	Pertumbuhan sektor pertanian belum optimal	Kompetensi tenaga kerja belum memadai
			Kapasitas sumber daya manusia petani belum optimal
			Sarana dan prasarana pertanian belum memadai
			Metode budidaya pertanian masih konvensional
			Bencana pertanian
			<i>Quality control</i> produk belum memadai
			Kapasitas sumber daya manusia peternak belum optimal
			Sarana dan prasarana peternakan belum memadai
			Metode budidaya peternakan masih konvensional
Serangan penyakit ternak masih terjadi			
<i>Quality control</i> produk belum memadai			
Stabilitas inflasi masih perlu dijaga secara berkesinambungan	Stabilitas harga barang dan jasa	Stabilitas harga barang pokok dan barang penting belum optimal	
		Fluktuasi stok harga barang perdagangan	

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Sosial	Kualitas sumber daya manusia masih belum optimal	belum optimalnya penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas	kebutuhan tenaga pendidik masih belum terpenuhi
			kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan
			sarana dan prasarana berkualitas penunjang layanan pendidikan masih belum merata
			manajemen dan tata kelola pendidikan masih belum optimal
			pengembangan dan penerapan kurikulum muatan lokal masih belum optimal
			kesadaran masyarakat di beberapa wilayah terhadap pendidikan masih perlu ditingkatkan
		belum optimalnya penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas	kebutuhan tenaga kesehatan di daerah masih belum terpenuhi
			kompetensi tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan
			sarana dan prasarana berkualitas penunjang layanan kesehatan masih belum merata
			manajemen dan tata kelola kesehatan masih belum optimal
	pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan masih belum optimal		
	kebijakan penerapan sistem kesehatan terintegrasi masih belum optimal		
	penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular masih perlu ditingkatkan		
	pembudayaan hidup sehat dan upaya promotif-preventif masih belum optimal		
	belum optimalnya pengentasan kemiskinan	belum optimalnya layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial	cakupan layanan perlindungan sosial masih terbatas pada kelompok tertentu
integrasi data penerima bantuan masih belum optimal			
koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penanganan masalah sosial masih belum optimal			

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah		
Transformasi Tata Kelola	Belum optimalnya reformasi birokrasi	Belum optimalnya reformasi birokrasi berdampak	Belum optimalnya integrasi data antar PD		
			Belum optimalnya kolaborasi PD dalam peningkatan kinerja		
		Belum optimalnya implementasi sistem merit	Belum optimalnya manajemen talenta		
			Pengembangan sumber daya manusia belum optimal		
			Belum optimalnya implementasi SKJ		
		Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Kualitas pelayanan publik di luar MPP belum optimal		
			Belum optimalnya tindaklanjut dari pengaduan		
		Belum optimalnya pengawasan daerah	Belum optimalnya pengendalian internal		
			Implementasi Zona Integritas (ZI) belum optimal		
			Belum optimalnya pengawasan di level Desa		
		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran sungai belum optimal	Pemantauan titik sampel air belum optimal
					Belum optimalnya pencegahan dan pengawasan aktivitas tambang emas ilegal (PETI)
Meningkatnya akumulasi sedimen pada jaringan sungai					
Belum optimalnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terintegrasi					
Menurunnya kualitas tutupan lahan	Meluasnya alih fungsi lahan				
	Belum optimalnya rehabilitasi lahan pasca tambang				
	Pemulihan lahan kritis masih perlu ditingkatkan				
Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal	infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah belum lengkap				
	Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanganan sampah masih rendah				
Belum maksimalnya kualitas perencanaan pengelolaan dan perlindungan	Kualitas kajian lingkungan hidup masih perlu diperkuat				
	Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup				

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		lingkungan hidup	
	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Belum optimalnya pelestarian lingkungan hutan
			Banyaknya alih fungsi lahan menjadi terbangun
			Pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Aksesibilitas wilayah untuk kesejahteraan masyarakat	Pembangunan jalan yang belum merata dan berkualitas
			Masih banyaknya rumah tidak layak huni
			Akses air minum dan sanitasi yang masih terbatas
	Belum optimalnya perlindungan Sosial yang adaptif	Belum optimalnya upaya penanggulangan risiko kelompok rentan	Belum optimalnya pengarusutamaan gender
			Pemenuhan ruang dan hak anak masih belum optimal
			Belum memiliki layanan rumah singgah dan penampungan yang representatif
			Pemberdayaan dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran

Sumber: Analisis, 2025

2.7.2. Permasalahan urusan pemerintahan

Pembangunan di Kabupaten Tebo merupakan hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tebo. Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Pada bagian ini disajikan permasalahan tiap urusan berdasarkan telaah capaian kinerja dan identifikasi permasalahan pada hasil *focus group discussion*. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 54 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan		jumlah guru masih belum terpenuhi

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
		Penyelenggaraan layanan pendidikan masih belum optimal	Sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata
			Sebaran tenaga pendidik dan kependidikan masih belum merata
			Tata kelola pendidikan masih belum optimal
			integrasi antara pendidikan formal dan pesantren masih belum optimal
			Kesejahteraan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan
			pengembangan dan Penerapan kurikulum lokal serta pendidikan karakter masih belum optimal
			pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pendidikan masih belum optimal
2	Kesehatan	Penyelenggaraan layanan kesehatan masih belum optimal	Kebutuhan tenaga kesehatan masih belum terpenuhi
			sarana dan prasarana layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata
			Kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan masih belum optimal
			Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan masih belum optimal
			pembudayaan pola hidup bersih dan sehat masih belum optimal
			Penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular masih belum optimal
			Tata kelola rumah sakit masih belum optimal
			Belum terpenuhinya sarana dan prasarana RS yang sesuai standar
			Belum terpenuhinya sarana dan prasarana RS yang sesuai standar
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kualitas jaringan jalan dalam kondisi mantap yang terus menurun	kurangnya pemeliharaan dan pengawasan jalan terbangun
			belum adanya masterplan desain jalan
			masih banyaknya ruas jalan dengan material tanah dan batu
		Sarana Prasarana SDA yang masih terbatas	kurangnya pemeliharaan dan pengawasan jalan terbangun
			belum adanya masterplan desain jalan
			masih banyaknya ruas jalan dengan material tanah dan batu
			Kualitas air layak, belum aman
		sarana dan prasarana untuk normalisasi sungai masih terbatas	
		pembebasan lahan sekitar sungai masih banyak kendala	
		belum semua kawasan pertanian terfasilitasi jaringan irigasi teknis	
		masih terbatasnya pembangunan turap untuk tebing sungai besar	

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
		belum meratanya akses air minum dan sanitasi masyarakat	belum terpenuhinya akses air (PAMSIMAS) di kawasan seberang sungai
			Kondisi eksisting karakteristik daerah yang sulit untuk pelayanan air
			menurunnya akses sanitasi layak masyarakat
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan PSU permukiman belum optimal	kurangnya pemeliharaan dan pengawasan fasilitas LPJU
			pembangunan rapat beton belum merata
			drainase permukiman yang belum optimal
			tempat pembuangan sampah yang tidak terpenuhi
		Penanganan kawasan kumuh belum optimal	belum adanya baseline numerik kawasan kumuh
			belum adanya dokumen penanganan kawasan permukiman (RP3KP)
			penanganan RTLH belum optimal
			kerapatan antar rumah yang tinggi
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Masih tingginya tingkat kriminalitas daerah	Fasilitasi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik belum optimal
			Penguatan pencegahan tindak kejahatan belum optimal
		Belum optimalnya tingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum Optimalnya mitigasi dan sinergitas semua elemen dalam penanganan bencana
			Pengurangan Risiko Bencana belum dilaksanakan secara menyeluruh
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana pemadam dan penyelamatan
6	Sosial	Layanan peningkatan kebutuhan dasar PPKS masih terbatas	Belum adanya pusat rehabilitasi sosial yang menyebabkan minimnya layanan ODGJ dan lansia terlanjar
			Belum kuatnya basis data penerima bantuan sosial yang menyebabkan bantuan sosial belum tepat sasaran
			Minimnya jaminan sosial terkait kebencanaan akibat belum adanya dapur umum dan belum berfungsinya kampung siaga bencana
Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
7	Tenaga Kerja	Rendahnya kesesuaian ketersediaan tenaga kerja dengan tingkat kebutuhannya	Masih rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja
			Pelatihan tenaga kerja masih belum optimal
			Akses masyarakat terhadap informasi tenaga kerja masih belum merata
			Kesempatan lapangan usaha mandiri masih rendah
8			Belum optimalnya pengarusutamaan gender

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya keberdayaan perempuan	Belum optimalnya akses perempuan dalam bidang ekonomi dan politik
		Belum optimalnya perlindungan anak	Belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
			Layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan pada anak belum optimal
			Kasus pernikahan dini masih cukup banyak
9	Pangan	Ketahanan pangan belum optimal	Belum optimalnya penegakan regulasi penetapan kawasan pertanian yang berkelanjutan
			Keterjangkauan pangan belum optimal
			Pemanfaatan pangan belum memadai
			Belum optimalnya pengembangan cadangan pangan di tingkat masyarakat
10	Pertanahan	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan	Tertib pengelolaan pertanahan belum optimal
			Tingginya konflik penguasaan atas tanah
			Belum optimalnya fasilitasi penerbitan sertifikat tanah masyarakat
11	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mengelola lingkungan	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah
			Belum optimalnya pembinaan hidup pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
			Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
			Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan masih belum lengkap dan belum menjangkau seluruh masyarakat
			Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih rendah
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam setiap program LPM	Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih belum optimal
			Belum optimalnya peran lembaga ekonomi desa/BUMDes
			Kualitas aparatur desa masih perlu ditingkatkan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rendahnya kepesertaan KB aktif	Akses dan kualitas pelayanan KB yang belum merata
			Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi masih rendah
15	Perhubungan	Sarana dan prasarana dalam	Belum optimalnya kualitas sistem angkutan jalan darat dan sungai

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
		penyelenggaraan urusan perhubungan kurang memadai	Kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas perhubungan masih rendah
16	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya layanan informasi publik	Masih kurangnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		Belum optimalnya proses administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik berbasis elektronik	Belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintah
			Belum optimalnya pengembangan sistem TIK
			Kapasitas SDM TIK masih terbatas
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kapasitas manajerial koperasi belum optimal	Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
			Kapasitas SDM pengelola koperasi belum optimal
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi K-UKM belum optimal	Kurangnya daya saing KUMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen
			Masih minimnya pelaku UMKM memanfaatkan IT dalam pemasaran
18	Penanaman Modal	Realisasi investasi masih perlu ditingkatkan	Belum efektifnya promosi investasi
			Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menarik investor
			Prosedur pelayanan perizinan belum efektif
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan, dan kegiatan kepemudaan	Minimnya sarana dan prasarana pengembangan kepemudaan dan olahraga
20	Statistik	Belum optimalnya penanganan data statistik sektoral	Penguatan sumber perencanaan dan sumber data belum optimal dilaksanakan
			Pengumpulan data statistik sektoral yang belum optimal
21	Persandian	Belum adanya jaminan keamanan data dan informasi	Kurangnya keterampilan SDM pengelolaan persandian
			Urusan persandian belum dimasukkan dalam perencanaan

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
22	Kebudayaan	Pengembangan pelestarian budaya dan kearifan lokal daerah belum optimal	Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur
			Sarana promosi kebudayaan masih belum optimal
23	Perpustakaan	Budaya literasi masyarakat masih perlu ditingkatkan	Belum terpenuhinya kebutuhan pustakawan
			Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan
			Masih kurangnya kesadaran institusi dalam mengelola perpustakaan
			Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan
			Masih terbatasnya koleksi bacaan baik cetak maupun digital
			belum tersedianya perpustakaan daerah
			Kompetensi pengelola perpustakaan masih belum optimal
24	Kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah	masih terbatasnya jumlah tenaga arsip aris
			belum optimalnya tata kelola arsip di daerah
			belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip di daerah
			masih minimnya kesadaran institusi dalam mengelola arsip
Urusan Pemerintahan Pilihan			
25	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan	Belum optimalnya produksi benih perikanan dalam menunjang produksi perikanan daerah
			Tingginya biaya input produksi dan kenaikan harga ikan yang tidak seimbang
			Lemahnya kelembagaan/administrasi kelompok pengolahan dan pemasaran ikan
			Rendahnya mutu hasil produk olahan ikan
26	Pariwisata	Belum optimalnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Belum optimalnya promosi wisata
			Pengembangan daya tarik destinasi belum optimal
			Pengembangan ekonomi kreatif belum memadai
27	Pertanian	Produksi pertanian belum optimal	Belum optimalnya pembinaan terhadap petani dalam peningkatan produktivitas pertanian
			Belum optimalnya keberagaman pengadaan bibit untuk wilayah yang memiliki potensi baru
			Belum optimalnya pengolahan hasil pertanian
			Belum efektifnya alur tata niaga pangan
		Kapasitas sumber daya manusia peternak belum memadai	

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
		Produksi hasil peternakan belum optimal	Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai Metode peternakan masih konvensional
28	Perdagangan	Pengembangan sektor perdagangan belum optimal	Masih kurangnya kecukupan produk lokal sehingga masih menggantungkan pada pasokan luar daerah Rendahnya nilai ekspor daerah dalam bidang perdagangan
29	Perindustrian	Pengembangan IKM belum optimal	Belum optimalnya daya saing bidang industri Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung perindustrian
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
30	Sekretariat Daerah	Capaian reformasi birokrasi belum optimal	Lambatnya koordinasi terkait pembaruan data dari perangkat daerah SKM belum dapat dilaksanakan Reformasi birokrasi berdampak belum optimal Belum optimalnya pelayanan publik di luar MPP
		Penataan batas wilayah belum optimal	Pelacakan batas baru terlaksana sebanyak 6 dari 20 segmen
31	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya kualitas layanan bagi pimpinan DPRD	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor Presentase Prolegda yang terfasilitasi masih belum optimal
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
32	Perencanaan Pembangunan	Konsistensi perencanaan belum optimal	Indikator kinerja belum mengimplementasikan SMART-C Tantangan penyesuaian peraturan teknis dari pemerintah pusat terkait nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinamis Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal
33	Keuangan	Kapasitas fiskal dan penganggaran daerah belum optimal	Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat Perusahaan Umum Daerah belum optimal berkontribusi terhadap pendapatan daerah Belum optimalnya pengelolaan aset daerah Ketertiban pengelolaan keuangan daerah belum optimal
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya implementasi sistem merit	Pengembangan sumber daya manusia belum optimal Implementasi manajemen talenta belum optimal Belum optimalnya implementasi Standar Kompetensi Jabatan

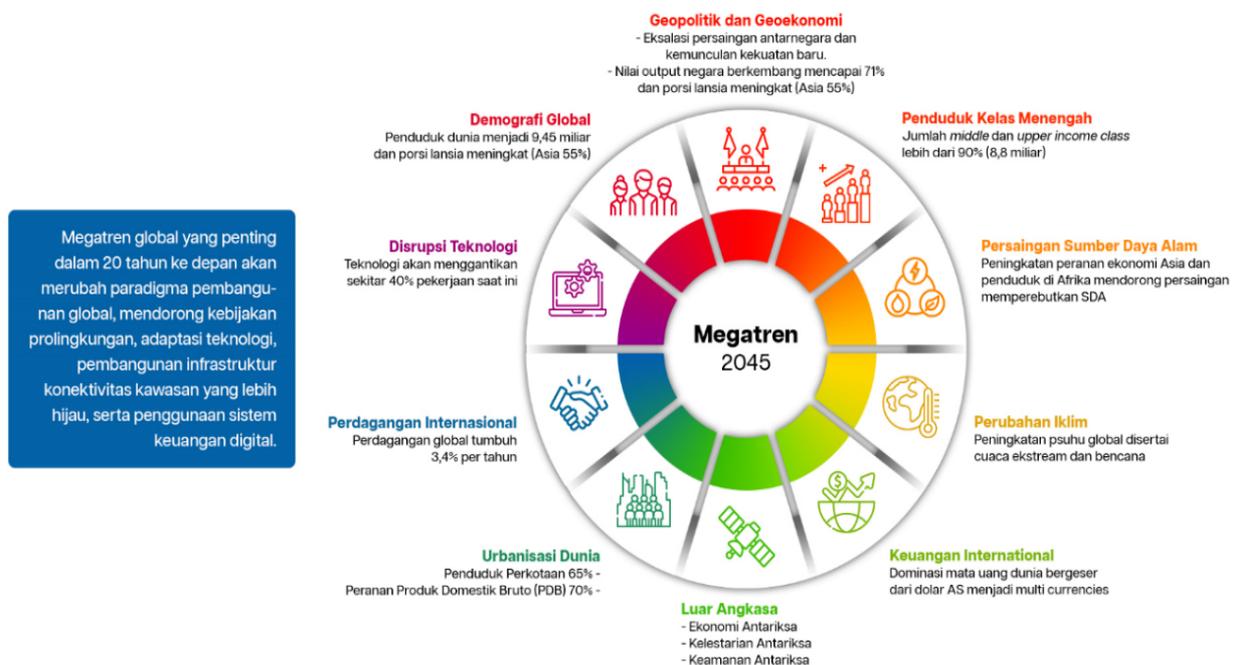
No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
35	Penelitian dan Pengembangan	Riset dan inovasi belum optimal	Ekosistem riset dan inovasi daerah belum optimal
			Masih terbatasnya fungsional peneliti
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
36	Inspektorat Daerah	Belum optimalnya pengawasan daerah dan perangkat daerah	Implementasi Zona Integritas (ZI) belum optimal
			Belum adanya integrasi pengukuran kinerja instansi pemerintah
			Miskomunikasi dan miskonsepsi terhadap inspektorat oleh perangkat daerah
			Belum optimalnya pengawasan di level desa
Unsur Kewilayahan			
37	Kecamatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat	Standar sarana prasarana pelayanan belum terpenuhi secara optimal
		Belum optimalnya koordinasi kewilayahan	Peran koordinasi pendataan belum optimal
			Tantangan penyelesaian konflik di wilayah kecamatan
Belum optimalnya fasilitasi pembangunan desa	Belum optimalnya pendampingan pengembangan potensi kewilayahan di desa-desa		
Unsur Pemerintahan Umum			
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	Belum optimalnya pembinaan dan koordinasi antar masyarakat	Potensi konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat
			Ketergantungan masyarakat dengan pemodal
			Rendahnya partisipasi dan pendidikan politik

Sumber: analisis, 2025

2.7.3. Isu Strategis

2.7.3.1. Isu Internasional

Isu internasional adalah isu yang perlu ditindaklanjuti secara serius karena dampaknya terasa baik di level global, nasional, hingga daerah. Terdapat banyak isu global yang diperkirakan dapat menjadi tantangan hingga tahun 2045, dan sudah mulai dirasakan hingga pada level perencanaan jangka menengah saat ini. Isu-isu internasional ini disebut sebagai megatrend global, yang dapat dimaknai sebagai pergeseran isu dan tantangan global di masa mendatang yang memiliki dampak pada sistem global hingga sistem pemerintahan di level daerah dalam berbagai aspek. Berikut gambaran megatrend global 2045 dalam dokumen RPJPN yang perlu dicermati:



Gambar 2. 64 Megatren Global 2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Seluruh pemangku kepentingan di level pusat, hingga kab/kota, dan seluruh elemen masyarakat perlu berhati-hati dan cermat dalam merespons dan merumuskan kebijakan yang sifatnya jangka menengah di masa depan. Proses perencanaan jangka menengah ini perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar perubahan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat global, khususnya masyarakat Kabupaten Tebo. Merujuk RPJPN, ada 10 isu strategis internasional yang sudah dirumuskan dan berpotensi dapat terdisrupsi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan global hingga daerah yang perlu dicermati dengan serius, berikut kesepuluh isu strategis tersebut:

Tabel 2. 55 Isu Strategis Internasional

No.	Isu Internasional
1	Perkembangan demografi global
2	Dinamika geopolitik dan geoekonomi global
3	Perkembangan teknologi
4	Peningkatan urbanisasi dunia
5	Perubahan konstelasi perdagangan global
6	Tata kelola keuangan global
7	Pertumbuhan kelas menengah (<i>middle class</i>)
8	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam
9	Pemanfaatan luar angkasa
10	Perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung

Sumber: RPJPN 2025-2045

Kesepuluh isu ini wajib secara serius dicermati, khususnya mana-mana saja yang berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan Kabupaten Tebo dengan melakukan kolaborasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kolaborasi ini menjadi sangat penting supaya penanganan dan antisipasi dari dampak yang timbul dari isu tersebut dapat dijalankan dengan lebih optimal.

2.7.3.2. Isu Nasional

Masih banyak tantangan dan hambatan yang perlu segera diselesaikan bagi Indonesia, dan Kabupaten Tebo khususnya untuk menjadi daerah yang maju sesuai dengan cita-cita nasional. Situasi yang semakin dinamis di tingkat global dan domestik juga mengharuskan daerah untuk lebih adaptif dan responsif dalam merespon segala jenis isu dan permasalahan yang ada di tingkat nasional. Daerah perlu dengan cermat memilah berbagai isu strategis nasional tersebut, dan mengidentifikasi mana-mana saja yang sekiranya relevan dengan kondisi dan konteks Kabupaten Tebo. Identifikasi yang baik dan tepat akan membawa pada intervensi dan perumusan kebijakan yang kontekstual, tepat sasaran, dan efektif.

Isu-isu strategis nasional telah diidentifikasi dan menjadi salah satu landasan dalam menyusun kinerja dan agenda pembangunan di dalam RPJPN dan RPJMN. Isu-isu nasional ini perlu menjadi perhatian daerah dan membutuhkan dukungan daerah

untuk meresponsnya, terutama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Isu strategis jangka panjang nasional yang terdapat di dalam dokumen RPJPN, yaitu:

1. **Produktivitas rendah:** SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan; produktivitas sektor ekonomi yang rendah; kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal; sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah.
2. **IPTEKIN dan riset lemah:** Anggaran IPTEKIN hanya mencapai 0,28 persen dari PDB; kualitas dan kuantitas SDM peneliti belum memadai; ekosistem riset dan inovasi masih lemah; belum berkembangnya kesadaran ilmiah.
3. **Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah:** Pelemahan sektor manufaktur; rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi; terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi; keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa; terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga; lambatnya regenerasi petani dan nelayan; kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan; terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan; lemahnya kelembagaan petani dan nelayan yang berbadan hukum; semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.
4. **Pariwisata di bawah potensinya:** terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas, serta kapasitas pengelola; pengelolaan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah; perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan; kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai untuk ekonomi kreatif; transformasi digital belum merata; inovasi dan pengembangan produk ekonomi kreatif masih rendah; ekosistem untuk mendukung komersialisasi belum terbentuk; akses ke pasar internasional untuk ekonomi kreatif masih terbatas.
5. **Ekonomi laut belum optimal:** Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut; belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI); belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan; belum berkembangnya diversifikasi industri dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi; terbatasnya riset dan pengembangan teknologi kelautan; rendahnya penanganan sampah plastik; masih tingginya kegiatan

Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUUF); belum optimalnya tata kelola dan regulasi ruang laut.

6. **Kontribusi UMKM dan koperasi kecil:** Sebagian besar UMKM memiliki pekerja yang berkeahlian rendah dan banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha; rendahnya kapasitas pengelolaan; rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
7. **Produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal:** Rendahnya kualitas SDM dengan sebagian besar tenaga kerja didominasi lulusan SMP ke bawah; ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*); informasi pasar tenaga kerja belum optimal; pasar tenaga kerja belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk dan pola budaya kerja.
8. **Infrastruktur dan literasi digital rendah:** Kesiapan infrastruktur TIK masih rendah; pembangunan infrastruktur TIK menghadapi kendala kesulitan geografis di beberapa daerah; rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, dan daya beli rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet; kondisi ekosistem pendukung digitalisasi belum memadai; produk digital Indonesia menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri.
9. **Pembangunan belum berkelanjutan:** Penggunaan energi fosil yang masih tinggi; akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah; rendahnya penggunaan energi terbarukan; rendahnya efisiensi energi; pencemaran dan kerusakan lingkungan; pemanfaatan SDA yang cenderung merusak ekosistem; sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau masih lemah.
10. **Integrasi domestik terbatas:** Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa; biaya logistik tinggi karena infrastruktur konektivitas belum memadai dan terintegrasi; banyak regulasi yang menghambat; kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa; terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya; ketimpangan pembangunan masih tinggi di kawasan maupun

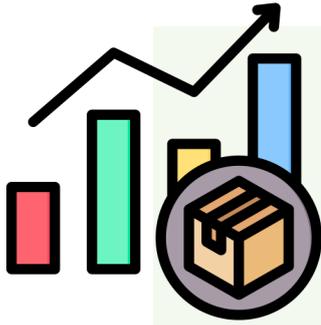
antar kawasan perkotaan dan perdesaan; kapasitas pengelolaan perkotaan masih terbatas; kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

11. **Tantangan tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045:** tantangan ini dibentuk dari persoalan kesehatan antara lain meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular; persoalan pendidikan terkait kompetensi dan distribusi guru, sarpras dan fasilitas belum memadai, pendidikan yang belum optimal membentuk kompetensi tenaga kerja; persoalan jaminan sosial belum merata; serta bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi.
12. **Tata kelola pemerintahan belum optimal:** Regulasi yang berlebih dan kualitas regulasi yang rendah; kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif; proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif; belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D; ASN berada dalam posisi rentan terhadap intervensi politik; belum meratanya kualitas pelayanan publik; transformasi digital pemerintahan dihadapkan oleh tantangan mendasar.
13. **Kepastian dan penegakan hukum masih lemah:** Pemulihan aset tindak pidana masih lemah; potensi pelanggaran HAM masih tinggi; pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah; budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah.
14. **Demokrasi belum optimal:** Permasalahan terkait integritas partai politik; partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal; prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan; demokrasi terbatas pada hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan.
15. **Tantangan stabilitas:** Perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan; meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan; keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan.
16. **Tantangan ketahanan sosial budaya:** Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan; karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global; kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat; kebebasan beragama belum disertai kemampuan

literasi keagamaan yang inklusif, moderat dan berorientasi kemaslahatan; penghormatan terhadap keragaman agama dan kebudayaan masih lemah; pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia belum optimal.

17. **Tantangan ketahanan ekologi:** Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; kurang efektifnya mitigasi bencana, sistem peringatan dini dan penanganan pasca bencana; pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal; ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi dan air di berbagai wilayah.
18. **Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa:** Masih kurangnya ketersediaan SDM berkualitas dan penyebarannya belum merata; belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia; masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran.

Berbeda dengan isu jangka panjang yang mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan mendesak dan mempengaruhi masa depan Indonesia, identifikasi isu jangka menengah memberikan rumusan tantangan sekaligus peluang. Isu jangka menengah yang dirumuskan di dalam dokumen RPJMN tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Peluang Pembangunan

- Resiliensi dan prospek perekonomian yang positif
- Keanekaragaman hayati dan potensi lingkungan
- Potensi sumber daya manusia dan modal sosial
- Pengembangan teknologi
- Sumber-sumber pertumbuhan inovatif



Tantangan Pembangunan

- Rendahnya produktivitas
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia
- Pergeseran struktur kelas masyarakat
- Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif
- Krisis lingkungan
- Geopolitik dan geoekonomi
- Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan

Gambar 2. 65 Peluang dan tantangan pembangunan nasional

Sumber: Lampiran 1 RPJMN Tahun 2025-2029

Peluang dan tantangan pembangunan tersebut menjadi salah satu pijakan untuk merumuskan visi, misi dan program prioritas pembangunan nasional jangka menengah. Visi Presiden Republik Indonesia yang terdapat di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas**”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 misi atau Asta Cita, yaitu:

**Visi:
Bersama
Indonesia
Maju
Menuju
Indonesia
Emas
2045**

- Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sumber: Lampiran 1 RPJMN Tahun 2025-2029

Asta cita selain sebagai misi, juga menjadi prioritas pembangunan untuk lima tahun mendatang. Asta cita kemudian dijabarkan ke dalam 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat sebagai berikut:

Tabel 2. 56 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara 3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi 5. Pemberantasan kemiskinan 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak dan serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23 persen.

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	

Sumber: Lampiran 1 RPJMN Tahun 2025-2029

2.7.3.3. Isu Strategis Regional Pulau Sumatera

Tema pembangunan untuk Pulau Sumatera di dalam RPJPN, yaitu “Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Terdapat arah kebijakan yang secara khusus terkait dengan konteks Kabupaten Tebo, yaitu diarahkan sebagai daerah pengembangan komoditas unggulan sawit dan karet, Kawasan swasembada air dan energi, dan sebagai daerah yang diarahkan sebagai Kawasan konservasi dan penanggulangan rawan bencana . Upaya mewujudkan tema pembangunan dalam periode tahun 2025-2029 perlu merespons berbagai isu dan peluang pembangunan regional Pulau Sumatera yang telah diidentifikasi di dalam dokumen RPJMN sebagai berikut:

Isu Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dominasi ekonomi pada komoditas primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan) mencapai hampir 50 persen dari PDRB (2023), dengan nilai tambah yang masih relatif rendah dan memiliki karakteristik yang rentan terhadap fluktuasi pasar global. • Diversifikasi dan hilirisasi industri belum optimal, baru mencapai 20 persen dari PDRB (2023), investasi masih lebih banyak terjadi pada sektor ekstraktif dan industri hulu. • Stok infrastruktur masih terbatas, masih cukup banyak wilayah di Sumatera yang masih mengalami kesenjangan infrastruktur dan memiliki infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. • Masih relatif tingginya kerentanan dan potensi bencana di Wilayah Sumatera terutama di pesisir barat yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan. • Degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan, serta pertambangan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Disparitas kualitas sumber daya manusia dan <i>brain/talent drain</i>, angka partisipasi sekolah jenjang menengah atas/kejuruan (70 persen) dan pendidikan tinggi (25 persen) di Sumatera masih relatif senjang, ditambah terjadinya <i>brain/talent drain</i> pada tenaga kerja ahli dan terampil (30 persen) (2023). • Prevalensi <i>stunting</i> masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Sumatera dapat mencapai hampir 20 persen (2023).
	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemiskinan rata-rata Sumatera masih 9 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi Aceh mencapai sekitar 14 persen. • Pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi unggulan belum bernilai tambah tinggi, serta infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan digital masih terbatas.

Potensi Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelapa sawit: Sumatera memiliki perkebunan sawit seluas 10,2 juta hektare dan menghasilkan 67 persen produksi sawit nasional. • Komoditas perkebunan potensial lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - karet (70 persen produksi nasional) - kopi (62 persen produksi nasional) - tebu (36 persen produksi nasional) - kelapa (32 persen produksi nasional) • Ketahanan pangan: Sumatera berkontribusi 27 persen dalam produksi beras nasional, serta berkontribusi sekitar 16 persen dalam produksi perikanan nasional.
	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi ketahanan energi: <ul style="list-style-type: none"> - Cadangan terbukti batu bara mencapai 12,6 miliar ton - Gas bumi 10.729,9 TSCF, dan minyak bumi 2.313,93 MMSTB - Potensi <i>clean energy</i> berupa EBT air (6,8 GW), EBT panas bumi (9,48 GW) EBT surya terapung (4,5 GWp), EBT bioenergi (29,5 GW), EBT arus laut (10 GW) • Bahan Tambang: terdapat <i>resource</i> logam bauksit sebanyak 109 juta ton dan <i>resource</i> bijih timah sebanyak 2,2 miliar ton, serta logam tanah jarang (REE).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Geographical gift</i>: dekat dengan <i>main line</i> dalam <i>global maritime trade route</i>, yaitu Selat Malaka, yang memberikan <i>comparative advantage</i>, terutama dalam sektor perdagangan dan logistik. • Potensi dari perairan laut yang luas, yaitu perairan Selat Malaka, Laut Natuna, dan Samudera Hindia, memberikan potensi besar untuk sektor perikanan tangkap.

Gambar 2. 66 Isu dan Potensi Regional Sumatera

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

2.7.3.4. Isu Strategis Provinsi Jambi

Tema pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJPN yakni Penyangga bioindustri dan ketahanan energi Sumatera. Lebih lanjut lagi, Provinsi Jambi di dalam RPJPD telah mengidentifikasi isu-isu pembangunan jangka panjang berupa kesejahteraan masyarakat, *aging population* dan bonus demografi, degradasi lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Isu-isu tersebut melandasi visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi, yaitu “Jambi yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan delapan misi dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah di Provinsi Jambi, yang mencakup:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi tata kelola Pemerintah
2. Memantapkan Ketenteraman dan ketertiban Umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
3. Memantapkan ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
4. Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
5. Mewujudkan Transformasi Penyediaan Sarana Prasarana Daerah
6. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Lebih lanjut lagi, dalam perencanaan jangka menengah Provinsi Jambi memiliki empat isu strategis yang dirasa perlu untuk direspon dengan tepat dalam agenda pembangunan lima tahun mendatang. Berikut disajikan isu strategis Provinsi Jambi yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.



Gambar 2. 67 Isu strategis Provinsi Jambi dalam RPJMD Tahun 2025-2029

Sumber: RPJMD Provinsi Jambi, 2025

2.7.3.5. Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Tebo

Penelaahan terhadap isu strategis jangka panjang yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045 menjadi salah satu bagian penting dalam perumusan isu strategis jangka menengah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029. Upaya ini dilakukan guna menjaga keselarasan antara kebijakan jangka panjang dengan kebijakan jangka menengah di Kabupaten Tebo. Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo disusun berdasarkan hasil telaahan terhadap isu global, isu nasional, isu kewilayahan, hasil evaluasi RPJPD, FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta observasi lapangan, dan penelaahan KLHS RPJPD. Berikut adalah isu strategis jangka panjang Kabupaten Tebo periode 2025-2045.

Sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter

Sebagai salah satu subjek sekaligus objek pembangunan, sumber daya manusia menjadi salah satu isu penting yang perlu diintervensi oleh Pemerintah. Kemajuan dan keberhasilan pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kondisi dan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Beberapa aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia di suatu daerah antara lain adalah sektor pendidikan, kesehatan, keduanya yang kemudian akan berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat hingga kualitas Angkatan kerja di suatu daerah.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tebo, isu terkait pemenuhan dan pemerataan akses pelayanan dasar yang meliputi pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar menjadi hal yang perlu diprioritaskan. Pemenuhan dan pemerataan bangunan sekolah, puskesmas, puskesmas pembantu, sarana prasarana penunjang layanan, pemenuhan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan kependidikan menjadi beberapa hal utama yang perlu diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tebo. Keterlibatan peran keluarga dan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan juga menjadi hal yang penting guna membentuk karakter masyarakat Kabupaten Tebo di masa yang akan datang.

Selain aspek pendidikan dan kesehatan, aspek perlindungan sosial juga perlu diperhatikan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter. Aspek perlindungan sosial menjamin kebutuhan dasar, layanan sosial, serta pemberdayaan bagi individu/kelompok rentan. Perlindungan sosial didukung dengan pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, perempuan, dan pemuda. Perbaikan sumber daya manusia dari sisi hulu yang kemudian akan menjadi kunci pembangunan terutama dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Kualifikasi tenaga kerja perlu diimbangi dengan kompetensi. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai pelatihan perlu untuk dilakukan sebagai upaya mempersiapkan angkatan kerja dalam menyambut perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Sumber daya manusia yang adaptif perlu diciptakan agar mampu bersaing baik di level daerah, wilayah, nasional maupun global.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan sosial yang berbasis pada sumber penghidupan Masyarakat yang berkelanjutan

Pembangunan jangka panjang di Kabupaten Tebo dihadapkan oleh beberapa isu strategis, salah satunya adalah pemberdayaan dan kesejahteraan sosial yang berbasis pada sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan. Adanya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi perlu memperhatikan sumber penghidupan yang dijalankan oleh masyarakat. Selama ini sumber penghidupan yang dijalankan di Kabupaten Tebo cenderung berjangka pendek dan tidak berkelanjutan, sehingga ketika sumber penghidupan sebelumnya tidak lagi menghasilkan, maka masyarakat cenderung berbondong-bondong untuk beralih ke sumber penghidupan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan dan bisa diberdayakan untuk menunjang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tebo.

Sumber penghidupan yang berkelanjutan menggambarkan kegiatan masyarakat yang meliputi kemampuan, aset, dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber penghidupan baru dapat dikatakan berkelanjutan apabila memenuhi beberapa aspek, yakni dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, aspek lingkungan, dan dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Aspek ekonomi yang dijalankan juga perlu mempertimbangkan tokoh penerima manfaat dari sumber penghidupan yang dijalankan. Kata keberlanjutan mengindikasikan bahwa manfaat

dari segi ekonomi harus mampu diberdayakan dan membawa kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Inklusifitas dan transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal

Inklusifitas dan transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal adalah isu strategis pembangunan jangka panjang yang dihadapi oleh rumpun urusan ekonomi di Kabupaten Tebo. Inklusifitas dan transformasi ekonomi di Kabupaten Tebo harus mempertimbangkan berbagai indikator seperti pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan sektor yang menjadi city branding dan economic power house Kabupaten Tebo. Pertanian dan pariwisata menjadi sektor potensi lokal yang harus dipersiapkan untuk menjembatani Inklusifitas dan transformasi perekonomian di Kabupaten Tebo.

Kelestarian lingkungan hidup

Kelestarian lingkungan hidup telah menjadi isu nasional bahkan global. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan serta hilangnya keanekaragaman hayati merupakan tiga isu global (triple planetary crisis) yang menjadikan isu terkait kelestarian lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi. Sehingga, isu terkait kelestarian lingkungan hidup cukup penting untuk menjadi perhatian dalam agenda pembangunan di setiap daerah.

Konteks Kabupaten Tebo, isu terkait kelestarian lingkungan hidup direpresentasikan melalui capaian IKLH yang belum sepenuhnya optimal, khususnya pada komponen IKA dan IKTL. Capaian kedua komponen tersebut yang masih rendah, menjadikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tebo perlu untuk lebih diperhatikan dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terlebih lagi, apabila industri sawit dan hilirisasinya akan semakin berkembang di Kabupaten Tebo. Perlindungan terhadap tutupan lahan, kualitas badan – badan air maupun praktik pembuangan asap dari industri tersebut perlu untuk semakin diperketat dalam pengawasannya. Sehingga dampak berupa kerusakan lingkungan akibat berkembangnya industri sawit maupun aktivitas lain yang berpotensi memberikan dampak bagi lingkungan di Kabupaten Tebo dapat terminimalisir.

Industri sawit berkelanjutan

Industri sawit telah menjadi salah satu pilar utama ekonomi di banyak negara tropis, termasuk Indonesia. Pengembangan industri sawit berkelanjutan memberikan

manfaat langsung bagi para petani sawit lokal yang terlibat dalam produksi sawit. Kondisi tersebut tentu diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Terlebih lagi pengembangan industri diimplementasikan dengan berpegang pada pilar berkelanjutan, yang artinya juga memiliki fokus pada upaya untuk menciptakan keberlanjutan perekonomian masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan petani, memperluas peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan terbangunnya infrastruktur lokal merupakan hasil yang diharapkan dari pengembangan industri sawit yang berkelanjutan tersebut.

Infrastruktur pelayanan dasar yang berketahanan

Infrastruktur fisik suatu daerah memegang peranan penting sebagai penggerak pembangunan baik dalam memacu pertumbuhan ekonomi maupun dari sisi pengembangan budaya sosial kemasyarakatan. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan syarat penting dalam menghubungkan masyarakat dengan pusat kegiatan. Kabupaten Tebo telah memiliki akses jalan yang menghubungkan antar kecamatan. Mobilitas masyarakat masih terkendala karena infrastruktur jalan yang belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Jaringan jalan yang mantap dan merata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mudah mengakses pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.

Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar salah satunya yakni pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Tebo belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat bahkan beberapa wilayah di Kabupaten Tebo merupakan wilayah rawan kekeringan. Selain pemenuhan air bersih untuk masyarakat, pemenuhan layanan sanitasi, jaringan drainase, persampahan, dan kebencanaan di Kabupaten Tebo saat ini pun belum mampu menjangkau seluruh wilayah karena infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur kebencanaan di Kabupaten Tebo difokuskan pada pengurangan risiko bencana banjir. Karakteristik fisik wilayah Kabupaten Tebo mengharuskan penerapan mitigasi struktural berupa pembangunan kolam retensi dan drainase untuk mengurangi risiko bencana banjir yang sering terjadi.

Tata kelola Pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi

Tata kelola yang akuntabel menjadi pondasi yang kuat dalam berfungsinya roda Pemerintahan di Kabupaten Tebo. Tata kelola Pemerintahan perlu dijalankan

berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas dan berbasis pemanfaatan teknologi. Akuntabilitas kinerja menjadi sangat krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, karena secara prinsip seluruh anggaran yang ada dan dimanfaatkan oleh Pemerintah merupakan uang yang berasal dari masyarakat. Pemanfaatan teknologi menjadi krusial dalam memberikan pelayanan publik dan mengelola internal Pemerintah karena digitalisasi dapat membawa perubahan cepat menuju ke arah yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi atau digitalisasi ini dapat dilihat dengan seberapa jauh implementasi arsitektur SPBE yang sudah diterapkan oleh Kabupaten Tebo.

2.7.3.6. Telaah RTRW Kabupaten Tebo

Wilayah Kabupaten Tebo sebagian besar mempunyai kemiringan di bawah 15% meliputi wilayah seluas 523.200 Ha atau mencakup 83% dari luas wilayah kabupaten dan tersebar di seluruh kecamatan. Kondisi bentang alam demikian menunjukkan bahwa wilayah kabupaten Tebo relatif datar sampai landai dan akan cocok untuk usaha pertanian, peternakan dan perkebunan. Namun, kondisi tanah di Kabupaten Tebo sebenarnya kurang baik untuk usaha pertanian, karena hampir seluruh tanah di kabupaten Tebo mempunyai tekstur tanah halus (98,5%), hanya Kecamatan Tebo Tengah dan Sumay yang mempunyai tekstur tanah sedang, itupun jumlahnya sangat sedikit. Perlu adanya upaya penambahan bahan organik dan teknik pengolahan tanah yang tepat agar tanah bertekstur halus cocok dikembangkan untuk pertanian.

Sumber air bersih yang dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, maupun jalur transportasi yakni memanfaatkan sungai. Sungai terbesar yang melalui kabupaten Tebo adalah sungai Batanghari dengan luas wilayah aliran sungai sekitar 71.400 Ha, sedangkan sungai lainnya merupakan anak sungai dari Batanghari. Komoditas pertanian di Kabupaten Tebo dengan luasan paling luas adalah padi sawah dengan luas 8.478 hektar atau sekitar 40,68% dari keseluruhan wilayah pertanian di Kabupaten Tebo. Komoditas perkebunan paling luas di Kabupaten Tebo adalah karet yang berada di Kebun Rakyat seluas 113.416 hektar, sedangkan kelapa sawit seluas 60.629 hektar tertanam di kebun rakyat dan 4.790,13 hektar tertanam di kebun swasta. Selain potensi pertanian dan perkebunan, potensi pariwisata di Kabupaten

Tebo terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya telah ditetapkan 10 kawasan wisata alam, 6 kawasan wisata budaya, dan 3 kawasan wisata buatan.

Berdasarkan beberapa gambaran umum kewilayahan di Kabupaten Tebo tersebut, maka dirumuskan tujuan penataan ruang serta kebijakan dan strategi penataan ruang untuk tahun 2013-2033. Tujuan penataan ruang Kabupaten Tebo yaitu "mewujudkan Kabupaten Tebo berbasis pertanian dan agroindustri dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan". Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, kemudian dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut:

1. Pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah
 - a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat agroindustri
 - b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah
 - c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlannya.
2. Peningkatan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah
 - a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, industri dan pelayanan pariwisata
 - b. meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi Sumatera Barat – Muara Bungo – Jambi – Muara Sabak dan pelayanan sampai pelosok
 - c. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian
3. Pengembangan pusat-pusat agroindustri
 - a. mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agroindustri
 - b. mengembangkan kawasan agroindustri untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pusat agroindustry di Kecamatan Tengah Ilir
 - c. memantapkan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agroindustri di Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Muara Tabir,

Kecamatan Serai Serumpun, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto dan Kecamatan VII Koto Ilir

- d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi hasil perkebunan ke pusat-pusat pemasaran sampai terbuka akses ke pasar nasional
 - e. mengendalikan kawasan perkebunan secara ketat
 - f. meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk perkebunan unggulan sebagai satu kesatuan sistem;
 - g. mengembangkan infrastruktur dan kelembagaan untuk menunjang pengembangan agroindustri
 - h. mengembangkan industri berbasis agro pada sentra-sentra produksi
 - i. mengembangkan keterkaitan antara industri berbasis agro dengan pasar regional dan nasional.
4. pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan
- a. mengembangkan kawasan industri berjauhan dengan kawasan permukiman
 - b. mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan industri kecil dan home industry pengolahan hasil pertanian dan perkebunan
 - c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan tangan
 - d. meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta investasi.
5. pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan
- a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup
 - b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan
 - c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual;
 - d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang

- berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung;
- f. memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam
 - g. melindungi DAS Batanghari sebagai penunjang kehidupan dan lingkungan.
6. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan
- a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi di Kabupaten Tebo
 - b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya
 - c. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal
 - d. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI
 - c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

2.7.3.7. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tebo

Berdasarkan Perpres No.59 Tahun 2017, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 goals. Dari 319 indikator TPB Indonesia 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum, sehingga setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya. Beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah:

1. Wewenang;
2. Kekhususan indikator;
3. Kondisi geografis; dan

4. Ketentuan indikator RPJMD.

Jumlah indikator TPB berdasarkan kewenangan untuk Pemerintah Kabupaten adalah 220 indikator. Setelah dilakukan evaluasi terdapat 12 indikator yang bukan merupakan kewenangan (BK) Kabupaten Tebo. Sehingga total indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Tebo adalah 208 indikator TPB. Dari 17 TPB yang ditetapkan, hanya 15 TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Tebo. TPB 14 yaitu konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim tidak menjadi kewenangan Kabupaten Tebo karena terkait wilayah administrasi Kabupaten Tebo yang tidak mempunyai wilayah laut. Kemudian TPB 7 yaitu terkait akses energi juga bukan merupakan kewenangan Kabupaten Tebo. TPB dengan indikator terbanyak adalah TPB No.3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera yaitu total 34 indikator (16%) dan diikuti dengan TPB No.1 Tanpa Kemiskinan dengan jumlah indikator 23 (11%) dan TPB No.16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh dengan 21 indikator (10%). Kategori evaluasi capaian indikator TPB Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target atau disingkat dengan SS;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target atau disingkat dengan SB;
3. Indikator TPB belum dilaksanakan atau tidak ada data tersedia, disingkat NA (*not available*); dan
4. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target atau disingkat BB.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Tebo yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) mencapai 35% (72 indikator). Bila dilihat dari 4 kategori di atas, proporsi SS mempunyai persentase capaian tertinggi. Komposisi pelaksanaan TPB Kabupaten Tebo seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 57 Proporsi Capaian Indikator TPB Kabupaten Tebo

No. TPB	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BB
1	Tanpa Kemiskinan	23	15	4	1	3
2	Tanpa Kelaparan	11	4	2	5	-
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	9	8	15	2
4	Pendidikan berkualitas	13	2	3	8	-
5	Kesetaraan gender	14	4	3	6	1
6	Air bersih dan sanitasi layak	17	5	5	2	5
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	6	6	7	-
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	10	8	1	1	-
10	Mengurangi kesenjangan	10	4	1	5	-
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	8	1	3	3	1
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	1	3	1	-
13	Penanganan perubahan iklim	2	-	1	-	1
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	1	-	-	3
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	6	8	7	-
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	6	3	4	2
Total		206	72	51	65	18
Persentase			35%	25%	32%	9%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

Meskipun indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target indikator memiliki proporsi yang paling besar, namun persentase TPB belum dilaksanakan atau tidak ada data tersedia menempati urutan kedua terhadap capaian TPB di Kabupaten Tebo. Kesehatan, kesejahteraan dan juga pendidikan masih menjadi persoalan dan tantangan yang perlu untuk dioptimalkan penanganannya dengan baik di Kabupaten Tebo. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan capaian TPB pada poin ke tiga dan empat yang masih memiliki kategori belum tercapai atau belum dilaksanakan. Evaluasi capaian TPB tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis sekaligus sebagai objek pengintegrasian antara dokumen

KLHS dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tebo dalam lima tahun kedepan.

2.7.3.8. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Tebo

Berdasarkan hasil pemetaan masalah pembangunan, potensi daerah, analisis lingkungan dinamis, dan analisis KLHS, maka dirumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tebo sebagai berikut ini.

Tabel 2. 58 Perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Daerah			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Potensi hasil perkebunan kelapa sawit dan karet serta komitmen untuk pengelolaan yang berkelanjutan	Kesejahteraan masyarakat belum memadai	Kota dan permukiman yang berkelanjutan	Perkembangan demografi global	Rendahnya produktivitas	Dominasi ekonomi pada komoditas primer mencapai hampir 50% dari PDRB, namun nilai tambah masih relatif rendah dan rentan terhadap fluktuasi pasar global	Akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang inklusif
Tingginya usia produktif	Ketimpangan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	Dinamika geopolitik dan geoekonomi global	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Stok infrastruktur masih terbatas dan belum merata serta memadai	Perlindungan sosial dan kesejahteraan kelompok rentan
	Pengangguran terbuka masih perlu diturunkan	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	Perkembangan teknologi	Pergeseran struktur kelas masyarakat	Masih relatif tingginya kerentanan dan potensi bencana di Wilayah Sumatera	Tantangan sektor ekonomi unggulan dan optimalisasi sektor potensial

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Daerah			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Stabilitas daerah yang terjaga	Pengembangan ekonomi hijau belum optimal	Penanganan perubahan iklim	Peningkatan urbanisasi dunia	Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	Disparitas kualitas sumber daya manusia dan brain/talent drain, angka partisipasi sekolah jenjang menengah atas / kejuruan dan pendidikan tinggi masih relatif senjang	Sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan
Dukungan infrastruktur wilayah	Stabilitas inflasi masih perlu dijaga secara berkesinambungan	Air bersih dan sanitasi layak	Perubahan konstelasi perdagangan global	Krisis lingkungan	Prevalensi stunting masih relatif tinggi	Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian
Potensi nilai budaya dan kearifan lokal daerah	Kualitas sumber daya manusia masih belum optimal	Kehidupan sehat dan sejahtera	Tata kelola keuangan global	Geopolitik dan geoekonomi	Tingkat kemiskinan rata-rata Sumatera masih 9%	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan
	belum optimalnya pengentasan kemiskinan	Tanpa kemiskinan	Pertumbuhan kelas menengah (middle class)	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	Pada daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi unggulan belum bernilai tambah tinggi, serta infrastruktur layanan dasar, konektivitas dan digital masih terbatas.	Akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik
	Belum optimalnya reformasi birokrasi	Tanpa Kelaparan	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam			Pengembangan kawasan perdesaan dan keberdayaan desa
	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Pendidikan berkualitas	Pemanfaatan luar angkasa			

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Daerah			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan	Kesetaraan gender	Perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung			
	Belum optimalnya perlindungan Sosial yang adaptif					

Sumber: Analisis, 2025

a. Akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang inklusif

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pemenuhan layanan dasar meliputi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, beberapa bidang tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tebo.

Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan menjadi kunci dalam mempersiapkan kondisi sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing, baik di tingkat lokal maupun global. Secara operasional, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan dengan terpenuhinya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, serta didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana penunjang layanan yang inklusif dan memadai.

Inisiatif serta terobosan kebijakan pada bidang pendidikan menjadi penting dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan. Beberapa hal yang menjadi fokus sebagai langkah merespon perkembangan zaman adalah isu yang berkaitan dengan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Selain itu, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan akademisi dan industri menjadi salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk menyiapkan dan menyelaraskan kebutuhan industri dengan kurikulum pendidikan.

Peningkatan kesadaran dalam bidang kesehatan turut menjadi hal yang penting guna membangun manusia yang berkualitas. Berkaitan dengan budaya hidup sehat, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular menjadi bagian paling mendasar dalam mewujudkan manusia yang sehat. Oleh karena itu, inovasi dalam peningkatan KIE pada bidang kesehatan menjadi poin penting yang harus diperhatikan pemerintah Kabupaten Tebo untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pada urusan kesehatan.

b. Perlindungan sosial dan kesejahteraan kelompok rentan

Capaian pada perlindungan sosial dan kesejahteraan dapat dilihat dari sejauh mana keberadaan dan implementasi kebijakan pemerintah untuk mengatasi situasi kerentanan yang dihadapi masyarakat. Kerentanan sendiri bukan kondisi yang terberi, melainkan berkaitan dengan proses yang menyebabkan kelompok tertentu tidak memiliki akses untuk mengatasi risiko yang dihadapinya. Faktor penyebabnya cukup beragam seperti situasi kemiskinan, pemberlakuan norma sosial tertentu, dan bencana. Secara umum, kelompok rentan di Kabupaten Tebo dapat meliputi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dimensi kerentanan masing-masing kelompok tersebut beragam. Sehingga dibutuhkan identifikasi yang mendalam untuk memilah spesifikasi isu yang dihadapi. Pada kelompok perempuan, isu seputar pelecehan dan kekerasan seksual masih dominan. Oleh karena struktur pemukiman berbasis perkebunan sawit, korban semakin berisiko untuk mencari perlindungan dan bantuan saat pelecehan atau kekerasan terjadi. Sehingga dibutuhkan mekanisme khusus untuk mengatasi problem tersebut. Pada level kuratif, lembaga-lembaga terkait dapat mengoptimalkan peran layanan pengaduan dan pemulihan korban. Sementara pada level preventif diperlukan sosialisasi atau peningkatan kapasitas komunitas baik yang berpotensi menjadi pelaku dan korban tentang risiko kasus pelecehan dan kekerasan seksual termasuk cara untuk meresponsnya. Demikian halnya pada kasus anak, dimana pelaku pelecehan dan kekerasan seksual seringkali adalah kerabat terdekat. Edukasi dan penguatan hukum merupakan strategi yang perlu ditingkatkan untuk memastikan optimalisasi pemenuhan hak dan perlindungan terhadap kelompok anak.

Sementara pada kelompok lansia, yang perlu diperhatikan adalah akses terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial. Stigma bahwa lansia cenderung tidak produktif dan mengalami penurunan kesehatan seringkali membuat para lansia tidak diperhatikan. Di Kabupaten Tebo, akses dan fasilitas untuk lansia tampak masih terbatas. Dari segi infrastruktur, belum ada transportasi yang ramah lansia. Sementara mereka juga memiliki kebutuhan untuk mengakses layanan kesehatan dan sosial lainnya. Di sisi penyedia layanan sendiri juga masih perlu dioptimalkan ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan khusus para lansia. Sementara itu, di level komunitas, strategi pemberdayaan lansia melalui posyandu lansia dapat memberikan dampak yang positif. Namun penyelenggaraan posyandu lansia yang berbasis kesukarelaan juga menjadi tantangan. Komitmen para kader sulit dikelola karena sebagai penduduk yang juga tinggal di area pertanian, para kader juga memiliki kegiatan atau rutinitas pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Pengelolaan sumber daya penggerak di level komunitas inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait.

Demikian halnya pada kelompok disabilitas yang masih memiliki keterbatasan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang setara. Pendekatan atau kebijakan yang memungkinkan terbangunnya sekolah inklusif perlu difasilitasi oleh pemerintah. Komitmen terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif memiliki sejumlah tantangan, seperti ketersediaan infrastruktur dan tenaga pendidik atau guru. Di Kabupaten Tebo, inisiasi untuk membangun sekolah alternatif telah mulai muncul tapi berasal dari komunitas atau swasta. Inisiasi ini tampak mendapatkan respons positif dari masyarakat yang mengindikasikan adanya kebutuhan yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

c. Tantangan sektor ekonomi unggulan dan optimalisasi sektor potensial

Perekonomian Kabupaten Tebo didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 51,84 persen per tahun pada periode 2019-2023. Komoditas kelapa sawit dan karet menjadi produk unggulan daerah yang dihasilkan oleh masyarakat dan pihak swasta. Pada tahun 2023, produksi perkebunan rakyat untuk komoditas kelapa sawit mencapai 119.264 ton. Namun demikian, produksi kelapa sawit di Kabupaten Tebo belum diikuti dengan sistem penanaman berkelanjutan yang optimal. Persoalan keberlanjutan menjadi salah satu isu penting

mengingat potensi perkebunan daerah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkebunan berkelanjutan, khususnya sawit berkelanjutan, memegang peranan penting dalam memastikan keberlanjutan produksi dengan meminimalkan dampak terhadap lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Hal ini didorong oleh kebutuhan pasar akan kelapa sawit yang diprediksi akan semakin tinggi di mana produk turunan dari kelapa sawit dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan pangan hingga energi. Namun demikian, persoalan harga kelapa sawit menjadi isu tersendiri, khususnya bagi masyarakat. Fluktuasi harga sangat mungkin terjadi terlebih jika tidak diatur oleh pemerintah dan dapat merugikan para petani, khususnya bagi petani di perkebunan rakyat.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah pengolahan hasil perkebunan yang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan adanya *opportunity loss* yang seharusnya berdampak pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produk kelapa sawit sendiri dapat diturunkan menjadi berbagai produk dan digunakan dalam industri fraksinasi/rafinasi (utamanya minyak goreng), lemak khusus (*cocoa butter substitute*), margarin/*shortening*, *oleochemical*, dan sabun mandi.

Hilirisasi hasil SDA menjadi salah satu kunci peningkatan nilai tambah produk tetapi membutuhkan investasi yang cukup besar. Peningkatan iklim investasi yang bersaing menjadi tantangan yang besar bagi Kabupaten Tebo mengingat kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung perekonomian. Selain itu, kemudahan investasi melalui proses perizinan yang mudah dan cepat serta pemberian insentif bagi investor perlu untuk diwujudkan agar dapat menarik investasi masuk ke Kabupaten Tebo.

d. Sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan

Penghidupan yang layak dari perspektif ekonomi dapat dilihat melalui indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan karena dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menggambarkan pola dan perkembangan distribusi pendapatan/ sumber penghidupan masyarakat. PDRB per kapita Kabupaten Tebo masih berada cukup jauh di bawah PDRB per kapita Provinsi Jambi maupun PDB per kapita Indonesia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dari segi ekonomi penghidupan yang layak masyarakat Kabupaten Tebo masih

berada di bawah provinsi maupun nasional. Kondisi ini berhubungan dengan berbagai faktor, salah satu yang menjadi perhatian utama adalah rendahnya nilai tambah dari produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tebo. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya pendapatan/ sumber penghidupan yang layak masyarakat Kabupaten Tebo jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan rata-rata nasional.

PDRB per kapita Kabupaten Tebo terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,26 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 7,72 persen dibandingkan tahun 2013. Tingginya pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2014 didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,82 persen dengan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung stagnan di kisaran 2 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita mengikuti pergerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo dimana PDRB per kapita setelah tahun 2014 menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin turun. PDRB per kapita Kabupaten Tebo sempat mengalami pertumbuhan yang negatif atau mengalami penurunan pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian Kabupaten Tebo menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi berkontraksi sedangkan jumlah penduduk tetap tumbuh positif. Namun, seiring dengan pulihnya perekonomian Kabupaten Tebo, PDRB per kapita kembali tumbuh positif sebesar 3,15 persen pada tahun 2021 dan semakin tinggi mencapai 5,17 persen pada tahun 2022. PDRB per kapita tahun 2022 mencapai 31,22 juta rupiah berdasar harga konstan atau 54,62 juta rupiah berdasar harga berlaku.

PDRB per kapita Kabupaten Tebo dibentuk oleh struktur ekonomi Kabupaten Tebo. Perekonomian Kabupaten Tebo sejak tahun 2010 hingga tahun 2022 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata kontribusi sebesar 49,45 persen per tahun. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar 47,91 persen pada tahun 2011 menjadi 51,44 persen pada tahun 2022. Tingginya kontribusi sektor pertanian didorong oleh tingginya nilai tambah komoditas karet dan kelapa sawit yang selama ini menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Tebo.

Perekonomian Kabupaten Tebo tidak hanya digerakkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan saja tetapi juga didorong oleh sektor usaha lainnya meskipun kontribusinya cenderung jauh lebih kecil. Sektor perdagangan besar dan

eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor turut berkontribusi pada perekonomian Kabupaten Tebo dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,72 persen per tahun pada periode 2010-2022. Secara rata-rata, sektor perdagangan menjadi sektor terbesar kedua yang menggerakkan perekonomian Kabupaten Tebo setelah sektor pertanian selama periode 2010-2022. Namun, kontribusi sektor perdagangan mulai mengalami penurunan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, kontribusi sektor perdagangan tercatat sebesar 10,62 persen lalu turun sebesar 0,31 persen poin menjadi 10,31 persen pada tahun 2021, lalu semakin turun sebesar 0,42 persen poin menjadi 9,89 persen pada tahun 2022. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perubahan struktur perekonomian yang mulai berjalan perlahan.

Perekonomian Kabupaten Tebo masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kecenderungan kontribusi yang semakin meningkat. Selain itu, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian juga mulai kembali menunjukkan dominasinya meskipun nilainya masih jauh di bawah sektor pertanian. Kondisi ini perlu dijadikan perhatian mengingat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian memiliki nilai tambah yang rendah. Terlebih lagi kegiatan di sektor pertambangan dan penggalian bersifat ekstraktif dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dapat memberikan eksternalitas negatif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier demi menjaga kestabilan perekonomian Kabupaten Tebo.

e. Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian

Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar wilayah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan rumah layak huni masyarakat masih perlu terus diupayakan karena saat ini di Kabupaten Tebo masih terdapat Kawasan Kumuh yang tersebar di 13 lokasi dengan luasan 500 hektar. Namun kendala yang dihadapi dalam penanganannya masih belum adanya baseline numerik dan dokumen Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah. Kondisi permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Tebo diperkuat dengan belum meratanya layanan air bersih dan sanitasi layak untuk masyarakat. Tercatat pada tahun 2022 cakupan akses air minum layak baru 65-75% mencakup 122 desa, namun masih ada beberapa desa yang belum terlayani.

Sedangkan cakupan layanan sanitasi layak sebesar 87,6%, belum melayani keseluruhan wilayah Kabupaten Tebo.

Pelayanan air bersih dan air minum masyarakat yang terlayani jaringan distribusi PDAM hanya mencakup kawasan perkotaan dan belum mampu mengakses seluruh masyarakat terutama yang jaraknya jauh. Layanan air bersih dan air minum layak belum menjangkau seluruh desa, masyarakat yang belum terjangkau menggunakan air sumur atau air sungai. Selain jaringan distribusi PDAM, layanan air bersih masyarakat dibantu dengan adanya PAMSIMAS, walaupun belum mampu mencakup seluruh desa. Sumber air baku yang dimanfaatkan di Kabupaten Tebo juga belum optimal, belum tersedianya embung atau bendungan yang dapat difungsikan sebagai penyedia air bersih terutama pada daerah rawa yang rawan terjadi kekeringan. Selain itu belum tersedianya bangunan kolam retensi maupun saluran pembuangan air yang dapat menampung air berlebih sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi banjir.

Infrastruktur pendukung perekonomian juga menjadi isu yang harus diperhatikan dalam peningkatan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi pendukung arus distribusi barang dan jasa di Kabupaten Tebo. Kondisi jaringan jalan dalam kondisi mantap baru mencapai kurang dari 65% dan belum terpelihara dengan baik, sehingga banyak ditemukan jalan rusak maupun rusak berat. Selain sebagai pendukung distribusi barang dan jasa, jaringan jalan juga difungsikan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan. Selain jaringan jalan, isu lain yang perlu diperhatikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tebo adalah jaringan listrik dan telekomunikasi. Masih perlu adanya peningkatan ketersediaan jaringan listrik, karena masing-masing belum meratanya cakupan pelayanan listrik terutama di level dusun, jika ditinjau level desa telah mencapai 100%. Cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi juga masih ditemukan lokasi *Blankspot* di daerah seberang sungai yang mencakup 32 desa.

f. Kesesuaian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan

Kesesuaian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan menjadi aspek yang saling berhubungan diantara keduanya. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukannya memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, pemanfaatan ruang yang diperuntukan sebagai kawasan

lindung, dan implementasinya juga disesuaikan dengan peruntukannya yakni sebagai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dapat memberi dukungan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Kabupaten Tebo telah memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tahun 2023-2043, yang mana telah dilakukan revisi dari RTRW sebelumnya, untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Tebo. Dengan demikian penyesuaian rencana tata ruang Kabupaten Tebo dilakukan revisi untuk mengendalikan peruntukan pemanfaatan ruang agar keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor di Kabupaten Tebo dapat terwujud, sesuai dengan tujuan dalam dokumen RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043, yakni mewujudkan Kabupaten berbasis pertanian dan agroindustri dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Namun demikian, jika dilihat dari capaian rasio kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) di Kabupaten Tebo, tercatat dalam capaian termutakhir tahun 2023 sebesar 33,33%. Kondisi tersebut menunjukkan masih diperlukannya optimalisasi penataan ruang dalam pemanfaatan tata ruang wilayah di Kabupaten Tebo. Dengan demikian, dalam penataan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tebo perlu untuk lebih lanjut memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, seperti optimalisasi penataan kawasan perkotaan dan perdesaan, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), serta peningkatan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan bangunan. Upaya tersebut perlu untuk nantinya dimuat didalam arah pembangunan dan kebijakan dalam rencana pembangunan 5 tahun kedepan. Dengan demikian, diharapkan berbagai upaya tersebut dapat mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan tata ruang, dan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta wilayah di Kabupaten Tebo.

Lebih lanjut lagi, secara eksplisit kesesuaian pemanfaatan ruang dapat mendukung kelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam mempertahankan fungsi daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang

dapat menimbulkan potensi dampak terhadap daya dukung daya tampung lingkungan hidup yang terlampaui. Kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya direpresentasikan dengan capaian terhadap indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indikator ini juga sekaligus menggambarkan kondisi daya dukung daya tampung lingkungan suatu daerah dengan adanya intervensi dari sebuah kebijakan, rencana maupun program. Kabupaten Tebo tercatat mengalami penurunan capaian IKLH berdasarkan tahun termutakhir 2023 dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Ketiga komponen pembentuk indikator tersebut, yakni IKU, IKA, dan IKTLH, mengalami penurunan. Selaian intervensi secara langsung yang menyebabkan ketiga komponen mengalami penurunan, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang juga dapat dimungkinkan memberikan kontribusi terhadap menurunnya capaian terhadap ketiga komponen IKLH. Lebih lanjut lagi terkait pengelolaan persampahan, penambangan emas tanpa izin (PETI), dan alih fungsi lahan juga masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dalam penanganannya, sehingga dapat memberikan dukungan dalam mempertahankan fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu untuk dimasukkan dalam arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Tebo, dengan tujuan dapat mengawal pembangunan Kabupaten Tebo yang lestari dan berkelanjutan.

g. Akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik merupakan isu strategis yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan di Kabupaten Tebo. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks ini, akselerasi reformasi birokrasi berarti mempercepat pelaksanaan perubahan sistem dan prosedur kerja yang lebih modern dan adaptif. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta penyederhanaan regulasi dan prosedur administratif. Dengan demikian, reformasi birokrasi yang dipercepat akan mampu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah hasil dari reformasi birokrasi yang efektif. Di Kabupaten Tebo, akselerasi reformasi ini diharapkan dapat memberikan

dampak positif bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Peningkatan kualitas pelayanan publik melibatkan perbaikan sistem pengaduan masyarakat, penyediaan layanan yang berbasis teknologi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima tanpa harus terjebak dalam proses birokrasi yang panjang dan rumit. Peningkatan kualitas layanan publik ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah.

Selain itu, akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Tebo juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang berkualitas, investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Proses perizinan yang cepat dan transparan, serta dukungan administratif yang profesional, akan memperkuat daya saing Kabupaten Tebo dalam menarik investasi. Hal ini pada gilirannya akan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik tidak hanya menjadi kunci keberhasilan pemerintahan yang efektif, tetapi juga menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tebo.

h. Pengembangan kawasan perdesaan dan keberdayaan desa

Desa merupakan institusi penting dalam pembangunan daerah. Desa juga merupakan representasi sebagian besar wajah Kabupaten Tebo dengan jumlah desa sebanyak 122. Meskipun demikian, perkembangan pembangunan desa di Tebo masih memiliki tantangan. Desa perlu akselerasi pembangunan baik melalui pembangunan desa maupun pendekatan berbasis kawasan perdesaan.

Sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun pendekatan pembangunan kawasan

perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten/kota. Inti dari Pembangunan Kawasan Perdesaan ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tinjauan RTRW Kab. Tebo (Perda Nomor 01 Tahun 2023 tentang RTRW Tahun 2023-2043) Kecamatan VII Koto Ilir termasuk dalam Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai kawasan agroindustri dengan tujuan mewujudkan kawasan agroindustri berbasis pembangunan ekonomi lokal yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Secara administratif, di Kecamatan VII Koto Ilir terdapat 6 (enam) desa yaitu Desa Cermin Alam, Desa Paseban, Desa Balai Rajo, Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Desa Sungai Karang dan Desa Pasir Mayang. Sedangkan kawasan yang ditetapkan dan dikembangkan sebagai kawasan Mina-Agropolitan terdiri dari 3 (tiga) desa yang terdiri dari Desa Paseban, Desa Cermin Alam dan Desa Balai Rajo. Ketiga desa Kawasan perdesaan berada dalam satu kawasan yang saling berdekatan, serta memiliki potensi unggulan yang saling mendukung untuk dikembangkan satu sama lain dengan komoditas unggulan berupa padi sawah, padi ladang, kedelai, ikan nila serta potensi wisata danau. Ketiganya juga telah memiliki Badan Kerjasama Antar desa (BKAD) Kawasan dan BUMDESMA Kawasan. Namun demikian, dalam pengembangannya bukan berarti tanpa tantangan nantinya, seperti komitmen desa-desa selaku anggota kawasan perdesaan, konsistensi dan konvergensi stakeholder dalam pendampingan, kemampuan dalam percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan serta pemberdayaan partisipatif, dan persaingan dunia usaha. Berbagai tantangan tersebut perlu untuk direspon dengan tepat, diantaranya melalui perencanaan yang sinergi-terintegrasi, payung hukum yang jelas serta sistem pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Tebo.



Pemerintah
Kabupaten Tebo



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi dan Misi

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.3. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas



3.1. Visi dan Misi

Rumusan Visi dan Misi merupakan bagian utama dalam dokumen RPJMD. Visi menggambarkan harapan akan kondisi yang lebih baik yang hendak diwujudkan pada masa depan, dalam hal ini lima tahun mendatang. Kondisi yang lebih baik tersebut didasarkan pada isu-isu strategis yang dihadapi daerah maupun tantangan dan peluang baik yang berada pada level lokal, regional, nasional, dan global. Sedangkan misi menggambarkan serangkaian upaya strategis yang hendak dilakukan untuk mewujudkan harapan akan kondisi ideal tersebut. Dengan demikian secara substantif, rumusan visi dan misi dalam RPJMD merupakan manifesto kolektif seluruh stakeholder untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang dicita-citakan bersama.

3.1.1.Visi

Visi merupakan rumusan umum tentang keadaan atau kondisi daerah yang akan terwujud pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebagai hasil pembangunan selama lima tahun. Visi RPJMD dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati. Visi RPJMD dengan demikian merupakan transformasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati menjadi visi pembangunan jangka menengah daerah. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tebo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TEBO YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA”

Penjelasan tentang kondisi umum yang akan diwujudkan sebagai berikut:

Tebo Cerdas

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Tebo untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas, dengan penguatan akses dan mutu pendidikan formal dan non-formal. Implementasi visi ini mencakup penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, peningkatan kompetensi guru, beasiswa bagi siswa berprestasi atau kurang mampu. Lebih lanjut lagi, "Cerdas" di sini tidak hanya berarti cakap secara akademis, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu berpikir kritis dalam kehidupan sosial.

Tebo Sehat

Visi ini berfokus pada pembangunan sektor kesehatan untuk memastikan masyarakat Tebo hidup dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan layanan kesehatan dasar, memperluas jangkauan fasilitas kesehatan, memperbaiki gizi masyarakat, serta menanggulangi penyakit menular dan tidak menular. Peningkatan kualitas tenaga medis, serta sistem layanan yang efisien juga menjadi bagian penting dari pencapaian visi ini. Visi Tebo Sehat juga mencakup pola hidup sehat dan upaya preventif melalui edukasi masyarakat.

Tebo Sejahtera

Visi ini merupakan gambaran besar dari kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan. Dalam aspek ekonomi, Tebo Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Fokus utamanya adalah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas pertanian dan UMKM, serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi seperti infrastruktur jalan, dan jaringan irigasi juga menjadi strategi utama.

Pada aspek sosial, Tebo Sejahtera mengedepankan keadilan dan inklusivitas. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang

disabilitas dan masyarakat adat. Peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi landasan utama, disertai upaya memperkuat ketahanan keluarga dan sosial masyarakat. Di samping itu, program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan komunitas menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Dimensi lingkungan dalam visi ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari kesejahteraan jangka panjang. Tebo Sejahtera berupaya menyeimbangkan pembangunan fisik dengan pelestarian hutan, perlindungan sumber daya air, pengelolaan sampah, serta pengendalian bencana alam. Upaya konservasi dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang utama kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Dalam aspek tata kelola, visi ini menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka Tebo Sejahtera, tata kelola pemerintahan diarahkan untuk memperkuat transparansi, efisiensi birokrasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Keterkaitan antara Visi RPJMD dan Visi RPJPD sebagai berikut:



Keterkaitan kondisi antara visi pembangunan jangka panjang dengan visi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:



Selain membangun keterkaitan antara visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, Visi RPJMD juga harus membangun sinergi dengan visi pembangunan jangka menengah nasional dan Provinsi Jambi. Sinergi antara visi pembangunan jangka menengah nasional dan daerah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Penyandingan Visi RPJMD Kabupaten Tebo terhadap Visi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi

3.1.2. Misi

Visi memerlukan misi untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan Visi RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan misi berdasarkan klusterisasi bidang besar pembangunan, serta merespon isu strategis dan

permasalahan pembangunan daerah. Misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan

Misi ini memiliki pengertian bahwa sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial harus disiapkan dan ditingkatkan. Penyediaan sarana pendidikan yang terjangkau dan berkualitas didukung tenaga pendidik baik formal dan non formal disetiap wilayah kabupaten Tebo yang merata dan berkualitas, penyediaan fasilitas kesehatan dari tingkat kabupaten hingga desa

2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal

Misi ini memiliki pengertian bahwa seluruh warga masyarakat kabupaten Tebo dapat mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi lokal dan regional dengan mensinergikan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, *home industri* dan ekonomi kreatif serta hasil alam lainnya melalui program yang terarah, terencana dan terukur, serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing dan membuka lapangan kerja

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik

Misi ini memiliki pengertian dengan tersedianya jalan dan jembatan dengan kualitas mantap merata diseluruh kecamatan hingga desa, sarana permukiman, sanitasi dan air bersih yang merata di seluruh wilayah dan sarana olahraga disetiap kecamatan, serta penerangan merata diseluruh desa dan dusun akan menciptakan kawasan dan lingkungan yang harmonis

4. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Misi ini memiliki arti bahwa masyarakat kabupaten Tebo dapat mengoptimalkan sumberdaya daerah yang ada melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan dengan tetap menjaga keutuhan lingkungan

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi

Misi ini memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan akan diselenggarakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Visi sebagai kondisi umum yang akan diwujudkan memerlukan rumusan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mencapainya. Rumusan kondisi tersebut disebut sebagai tujuan dan sasaran. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Adapun sasaran merupakan rangkaian kinerja/hasil dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang diturunkan dari tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD bersifat *ultimate outcome*, makro, lintas sektor dan memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian kondisi tujuan dan sasaran. Indikator kinerja tujuan dan sasaran akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
TERWUJUDNYA KABUPATEN TEBO YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA	SDM Tebo yang Cerdas dan Sehat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	73,5	74,32	75,15	75,97	76,8	77,63		
	1. MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN KEARIFAN LOKAL	Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,26	14,6	14,93	15,27	15,6	15,93	
				Rerata nilai assesmen nasional: literasi membaca & numerasi (Nilai)	60,62	62,62	64,62	66,62	68,62	70,62	
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,37	8,69	9,02	9,34	9,67	10	
			Derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat		Usia Harapan Hidup (Angka)	73,91	74,21	74,5	74,8	75,09	75,38
	2. MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR FISIK	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan		Tingkat Kemiskinan ((%))	6,04	5,96	5,87	5,79	5,71	5,63	
		3. OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,04	4,3	5,47	5,88	7,15	7,15	
			Rasio Gini (Indeks)	0,256	0,254	0,253	0,251	0,25	0,249		
	Dukungan infrastruktur		Indeks Infrastruktur (Angka)	45,17	45,85	46,53	47,23	47,94	48,66		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN		yang merata dan berkualitas								
	4. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE) SERTA LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	4,65	4,69	4,72	4,76	4,79	4,83	
5. MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			Indeks Desa (Indeks)	0,7447	0,7549	0,7649	0,7754	0,8501	0,8651	
		Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,79	1,64	1,5	1,45	1,41	1,35	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	73,13	73,34	73,55	73,76	74,19	74,4	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	129,89	128,59	127,28	125,98	124,67	123,36	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	70,27	71,29	72,31	73,33	74,35	75,37	
		Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel,	Nilai Sakip (Nilai)	67,51	68,19	68,86	69,54	70,21	70,88	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		melayani dan berintegritas berbasis transformasi digital								
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,74	2,94	3,14	3,34	3,54	3,74	
			Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Nilai)	82,9	82,95	83	83,05	83,1	83,15	
			Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	1,31	1,31	1,32	1,32	1,33	1,33	
		Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Nilai)	78,6	79,1	79,6	80,1	80,6	81,1	
			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	3.3-4.9	3.4-5	3.5-5.1	3.6-5.2	3.6-5.2	3.7-5.3	

Sumber: Olah data, 2025

3.3. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

Rumusan kondisi dalam bentuk visi, tujuan, dan sasaran memerlukan berbagai rumusan cara atau upaya untuk mencapainya. Cara atau upaya untuk mencapai kondisi di dalam RPJMD dirumuskan dalam bentuk strategi, arah kebijakan dan program prioritas. Rumusan cara atau upaya ini berbasis pada berbagai aspek, mulai dari respons atas permasalahan pembangunan, sinergi dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi, serta penjabaran dari arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

3.3.1. Strategi Sebagai Tahapan Pembangunan Daerah

Rumusan strategi adalah langkah-langkah atau upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan strategi didahului oleh tema pembangunan tahunan yang menjadi acuan umum bagi prioritas tahunan. Tema pembangunan secara berurutan selama lima tahun mendatang yaitu:



Gambar 3.2 Tema Pembangunan Setiap Tahun di Dalam RPJMD

Sumber: Olah, 2025

Tabel 3.2 Strategi Setiap Misi RPJMD Kabupaten Tebo

Isu Strategis	Strategi RPJMD
Tantangan sektor ekonomi unggulan dan optimalisasi sektor potensial	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor agro. • Peningkatan daya tarik pariwisata berbasis potensi daerah. • Penguatan iklim investasi dan stabilitas perekonomian daerah.
Sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan keberdayaan usaha mikro dan kecil, serta koperasi. • Pengembangan perekonomian berbasis kawasan.
Kesesuaian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kelestarian lingkungan hidup • Pembangunan yang berketahanan iklim dan tangguh bencana.
Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas. • Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung akselerasi perekonomian. • Peningkatan harmoni sosial.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu layanan pendidikan. • Peningkatan mutu layanan kesehatan. • Peningkatan pemajuan kebudayaan. • Peningkatan kesetaraan gender, inklusi sosial dan kualitas keluarga.
Peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif. • Peningkatan pendapatan berbasis kompetensi angkatan kerja dan keberdayaan masyarakat.
Akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan adaptif transformasi digital. • Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan. • Peningkatan profesionalitas dan integritas birokrasi.
Pengembangan kawasan perdesaan dan keberdayaan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas tata kelola desa dan pemberdayaan ekonomi desa.

Sumber: Olah data, 2025

3.3.2. Arah Kebijakan Sebagai Penjabaran Misi

Misi sebagai agenda besar pembangunan memiliki arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan rincian misi yang dirumuskan berdasarkan pemetaan masalah dan sinergi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, serta arah kebijakan nasional dan provinsi. Arah kebijakan pada setiap Misi RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kabupaten Tebo

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu layanan pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah • Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi • Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas • Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan • Peningkatan akses penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah • Penguatan sekolah terbuka dan pesantren • Dukungan realisasi dan fasilitasi pendirian Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu layanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan • Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas • Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		terabaikan (AIDS, Tuberkulosis, Malaria (ATM)). <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem ketahanan kesehatan (penguatan farmasi, alkes, serta ketahanan gawat darurat dan bencana).
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesetaraan gender, inklusi sosial dan kualitas keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses layanan perlindungan perempuan. • pengarusutamaan gender dalam pembangunan, termasuk peningkatan anggaran responsif gender. • Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan perempuan rentan (lansia, kepala rumah tangga, dan menanggung keluarga)
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan suku anak dalam • Pemerataan perlindungan sosial yang adaptif, diantaranya melalui peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan harmoni sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kebijakan keamanan berbasis komunitas • Peningkatan bina mental dan spiritual masyarakat untuk menjaga harmoni sosial. • Peningkatan deteksi dini potensi konflik sosial.
<p>Misi 2 Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor agro 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, khususnya pada komoditas karet dan sawit • Penguatan integrasi perkebunan sawit terhadap peternakan • meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk perkebunan unggulan sebagai satu kesatuan sistem • mengembangkan sarana dan prasarana produksi hasil perkebunan ke pusat-pusat pemasaran sampai terbuka

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>akses ke pasar regional dan nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi (bersertifikat) petani karet dan sawit berbasis pertanian berkelanjutan
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya tarik pariwisata berbasis potensi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis keunggulan wilayah • Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif • Memperkuat daya tarik wisata budaya dengan perwujudan nilai-nilai adat • Meningkatkan pelestarian kuliner lokal dan kuliner tradisi sebagai tambahan daya tarik pengalaman wisata. • <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> • Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan iklim investasi dan stabilitas perekonomian daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan iklim investasi daerah berbasis ekonomi hijau • mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, industri, pelayanan pariwisata dan ekonomi kreatif • Peningkatan iklim investasi dengan dukungan kebijakan dan wilayah yang kondusif • Peningkatan realisasi investasi padat karya • Penguatan manajemen risiko investasi.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pemanfaatan riset dan inovasi sektor unggulan daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan keberdayaan usaha mikro dan kecil, serta koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan lembaga kemitraan (seperti koperasi) yang inklusif • Penguatan skema kemitraan yang adil dan transparan, termasuk penataan pengelolaan hulu-hilir antara petani swadaya dan PKS • Pengembangan Usaha Kecil, Mikro, Menengah (UMKM) dan Industri Kreatif • mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan tangan • meningkatkan pemberdayaan koperasi, termasuk pendampingan dan pembentukan koperasi merah putih
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan berbasis kompetensi angkatan kerja dan keberdayaan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kewirausahaan pemuda • pemberdayaan industri kecil dan <i>home industry</i> melalui pengolahan hasil pertanian dan perkebunan • Mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai potensi daerah • Pemenuhan sarpras pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja • Optimalisasi pengelolaan dampak tambang dan perkebunan sawit melalui pemanfaatan DBH, CSR, maupun kompensasi dalam bentuk lainnya untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas tata kelola desa dan pemberdayaan ekonomi desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan keberdayaan masyarakat desa

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan MHA suku anak dalam
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perekonomian berbasis kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan kawasan agroindustri untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pusat agroindustri • mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemajuan kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan keberdayaan lembaga keagamaan • Pelestarian dan penguatan corak kebudayaan daerah • Penguatan dan pengembangan potensi wisata budaya dan sejarah lokal. • Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemajuan kebudayaan. • Peningkatan implementasi rekomendasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
<p>Misi 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa • mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian • Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah • Percepatan pemerataan dan peningkatan akses sanitasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung akselerasi perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata dan industri
<p>Misi 4 Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kelestarian lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kelestarian lingkungan berbasis daerah tangkapan sungai dan danau • mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan berbasis hulu-hilir guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih • Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan • Intensifikasi pendidikan pengurangan sampah • Mengembangkan kelembagaan pengelolaan sampah non formal • Penguatan aturan baku mutu dan debit air buangan yang lebih ketat • peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari DAS Batanghari • pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam • Penguatan dukungan pengawasan pelaksanaan pertambangan • Mendorong penguatan implementasi rehabilitasi lahan bekas tambang • Revitalisasi kearifan lokal dalam pengendalian alih fungsi lahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan yang berketahanan iklim dan tangguh bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		valid secara terbuka kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kapasitas masyarakat tangguh bencana • Optimalisasi infrastruktur pengendalian bencana
Misi 5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan adaptif transformasi digital. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan arsitektur sistem pemerintahan berbasis digital • Penguatan Kapasitas aparatur penyelarasan pembangunan Desa dan Supra-Desa • Penguatan ekosistem inovasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah • Peningkatan PAD berbasis optimalisasi pajak, retribusi dan kinerja BUMD. • Peningkatan kualitas manajemen dan produktivitas BUMD • Pemanfaatan TIK dalam pelayanan pajak dan retribusi • Penguatan efektivitas reformasi birokrasi general dan tematik untuk menghasilkan birokrasi yang menghasilkan manfaat nyata kepada masyarakat. • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang didukung kualitas data dan pembangunan satu data Indonesia. • Peningkatan kualitas pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. • Peningkatan transparansi pemerintah daerah dan keterbukaan informasi publik. • Peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti dan sinergis dengan kebijakan provinsi dan nasional. • Peningkatan kapasitas dan kinerja DPRD dalam perumusan

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		kebijakan, penganggaran dan pengawasan. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas penganggaran berbasis kinerja.
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan profesionalitas dan integritas birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem merit pendukung birokrasi profesional dan berintegritas • Perluasan implementasi zona integritas. • Peningkatan kualitas sistem pencegahan korupsi. • Peningkatan pengendalian intern yang berkualitas yang didukung kapasitas dan ketercukupan kebutuhan APIP. • Penguatan sistem merit dan manajemen talenta. • Penataan kelembagaan dan sistem kerja untuk menghasilkan postur birokrasi yang efisien, agile dan berkinerja.

Sumber: Olah data, 2025

3.3.3. Arah Kebijakan Kewilayahan Daerah

Transformasi ekonomi di Wilayah Sumatera diarahkan sebagai koridor ekonomi "**Industri Berbasis SDA dan Hub Ekonomi Biru Barat Indonesia**". Arah transformasi tersebut untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir. Upaya tersebut sekaligus bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Posisi Kabupaten Tebo yang berada di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera dan berdekatan dengan Kawasan Industri Kemingking, diharapkan dapat membuka peluang dan sangat memungkinkan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tebo menjadi lebih signifikan.

Kabupaten Tebo dalam dokumen RPJPN 2025-2045, termasuk dalam kerangka arah kebijakan Wilayah Sumatera, yang diarahkan menjadi "**Mata Rantai Bioindustri dan kemaritiman berdaya saing dan berkelanjutan**". Arah kebijakan

tersebut memiliki enam prioritas yang mencakup, (1) peningkatan SDM lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi /3T; (2) pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun; (3) penguatan pembangunan hijau, sirkuler dan berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan geopark; (4) pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan *multiinfrastructure backbone* dan *feeder* serta *maritime backbone*; (5) meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT; (6) Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana.

Arah pengembangan kewilayahan Kabupaten Tebo yang dirumuskan merupakan alternatif pusat-pusat pertumbuhan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Kondisi kewilayahan Kabupaten Tebo merujuk pada konsep penataan ruang kewilayahan yang terbagi menjadi pusat-pusat perkotaan yakni Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Setiap kawasan perkotaan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan perkotaan masing-masing. Penentuan Pusat Kegiatan dibuat sesuai dengan tingkat pelayanan perkotaan masing-masing dan fungsi yang harus diemban bagi setiap kawasan perkotaan terhadap wilayah penyangganya. Rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Tebo ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Rencana Sistem Pusat Pelayanan di Kabupaten Tebo

Sistem Pusat Perkotaan	Nama Pusat Layanan	Wilayah Pelayanan
PKL	Perkotaan Muara Tebo	Kecamatan Tebo Tengah
	Perkotaan Sungai Bengkal	Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Tebo Ilir dan Tengah Ilir
	Perkotaan Wirotho Agung	Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo ulu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kecamatan Tebo ulu, Kecamatan VII Koto Ilir, dan Kecamatan VII Koto
PPK	Perkotaan Pulau Temiang	Kecamatan Tebo Ulu
	Perkotaan Sungai Abang	Kecamatan VII Koto
	Perkotaan Sekutur Jaya	Kecamatan Serai Serumpun
	Perkotaan Pintas Tuo	Kecamatan Muara Tabir

Sistem Pusat Perkotaan	Nama Pusat Layanan	Wilayah Pelayanan
	Perkotaan Mengupeh	Kecamatan Tengah Ilir
	Perkotaan Teluk Singkawang	Kecamatan Sumay
	Perkotaan Karang Dadi	Kecamatan Rimbo Ilir
	Perkotaan Suka Damai	Kecamatan Rimbo Ulu
	Perkotaan Balai Rajo	Kecamatan VII Koto Ilir
PPL	Perdesaan Sako Makmur	Pusat Desa di Kecamatan Serai Serumpun
	Perdesaan Suo-Suo	Desa Muara Sekalo, Desa Semambu, dan Desa Pelayungan di Kecamatan Sumay

Sumber: Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043

Perwilayahan Kabupaten Tebo direncanakan dalam Sistem Kerja Sama Strategis, merupakan upaya untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang berkembang cenderung terus membesar dan berpotensi mendorong perkembangan aglomerasi antar kota/kabupaten, menyeimbangkan perkembangan perkotaan lain di wilayah Jambi dan mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di perkotaan sesuai daya dukung dan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penataan Sistem Perwilayahan dengan kedalaman hingga penataan struktur pusat permukiman perkotaan adalah upaya untuk mendorong perkembangan perkotaan yang serasi dengan kawasan perdesaan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, arah kebijakan kewilayahan juga telah terpetakan dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, termasuk terhadap Kabupaten Tebo. Arah kebijakan kewilayah tersebut mencakup lokus dan highlight intervensi arah kebijakan bagi daerah termasuk untuk Kabupaten Tebo. Berikut disajikan arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Tebo berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029:

Tabel 3. 5 Arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Tebo dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Batanghari	Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area WS Batanghari, terutama pada Sub-DAS Batanghari hulu dan Sub-DAS Batang Tebo
	Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Batanghari hulu dan Sub-DAS Batang Tebo
	Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada formasi Muaraenim, Formasi Air Benakat dan Formasi Sinamar

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Karet Cekungan Batanghari	Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet)
	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan karet)
	Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan karet)
	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet
	Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Bukit Duabelas	Perlindungan, pemuklihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
	Pengurangan status keterancamannya spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan
	Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
	Perlindungan dan pengamanan hutan
	Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
	Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana
	Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
	Pengembangan Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata VII Koto Ilir
Intervensi Program MBG, Bantuan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)	Indikasi daerah prioritas Intervensi Program MBG, Bantuan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah dan dayah / pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	<p>antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan layanan pendidikan anak usia dini - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas - Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran - Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah - Revitalisasi pendidikan nonformal - Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat	<p>antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penurunan kematian ibu dan anak - Pencegahan dan penurunan stunting <p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro</p> <p>Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis</p>
Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat	<p>antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penuntasan TBC - Pengendalian penyakit menular lainnya - Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa - Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Perlindungan sosial adaptif dan inklusif	antara lain melalui: - Pelaksanaan bantuan sosial adaptif melalui kartu kesejahteraan - Reformasi sistem jaminan sosial nasional
Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan	antara lain melalui: - Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan - Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan - Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan - Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan
Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	antara lain melalui: - Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan - Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah	antara lain melalui: - Pengembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan - Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi - Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik - Penerapan Internet of Things (Iot) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-time - Perluasan penggunaan kendaraan listrik
Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital	antara lain melalui: - Penguatan tata kelola pemerintahan digital - Penguatan infrastruktur pemerintahan digital - Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN - Digitalisasi layanan publik prioritas - Pengembangan ekosistem layanan publik digital
Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Melayu Jambi	antara lain melalui: - Perlindungan dan pelestarian warisan budaya - Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan - Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat
Penguatan ekonomi syariah	antara lain melalui: - Pengembangan industri halal - Peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional - Penciptaan ekosistem UMKM halal - Penguatan keuangan syariah - Penguatan dana sosial syariah
Memperkuat reformasi hukum	antara lain melalui: - Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) - Penanggulangan judi dan penyelundupan - Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Sumber: Olah RPJMN 2025-2029

3.3.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas RPJMD merupakan agenda strategis yang dirumuskan untuk merespons permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Program prioritas memiliki sifat lintas sektor/*cross-cutting*, sehingga pelaksanaannya tidak hanya dijalankan oleh satu Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab program prioritas memiliki peran sebagai orkestrator dan koordinator yang mampu membangun kolaborasi lintas sektor dan pihak. Program prioritas dirumuskan menggunakan metode *cascading* mulai dari tujuan, sasaran dan *outcome*. Dalam rangka membangun sinergi antara pendekatan politik dan teknokratik, program prioritas juga berupaya mengkerangkai program janji politik Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dengan rumusan kinerja. Rumusan program prioritas RPJMD Kabupaten Tebo sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perumusan program prioritas RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
TERWUJUDNYA KABUPATEN TEBO YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA	SDM Tebo yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Angka)			
				Rerata nilai assesmen nasional: literasi membaca & numerasi (Nilai)			
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)			
				Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Izin Pendidikan yang diterbitkan (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase standar kompetensi yang terpenuhi pada kurikulum muatan lokal (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Orang)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
				Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklm Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklm Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklm Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
Iklm Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)		
5. AND CLEAN GOVERNANCE) SERTA LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				Iklm Kebinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				Iklm Kebinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno		Jumlah naskah kuno yang terinventarisasi (Angka)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
			Derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat			Usia Harapan Hidup (Angka)		
				Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Dinas Kesehatan	Persentase Indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai lebih dari 90% (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat RSUD	Nett Death Rate (NDR) (Per 1000)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
					Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan Dinas Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahann keluarga (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan			Tingkat Kemiskinan((%))		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
				Rasio Gini(Indeks)		
		Dukungan infrastruktur yang merata dan berkualitas		Indeks Infrastruktur (Angka)		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan dan prasarana pendukung kawasan milik pemerintah daerah dalam kondisi baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi air	Persentase Pengelolaan Pelayaran (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Ketersediaan dokumen mengenai Rencana Tata Ruang yang di sahkan (Angka)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Rasio Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Rasio)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya pelayanan terhadap pengembang perumahan	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa		Indeks Desa (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Disbunnak	Persentase Kelembagaan Petani yang difasilitasi memperoleh bantuan Prasarana Pertanian (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Ternak Tervaksin (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian Disbunak	Jumlah ternak yang terinseminasi (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Total ketersediaan bibit unggul (Batang)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Skor)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Promosi Investasi yang Berhasil Menarik Investor (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian Disbunnak	Persentase Kelembagaan petani yang dibina (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase UMKM yang dilakukan pengembangan usahanya (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman hayati	Jumlah kelompok petani/nelayan yang dibina (Kelompok)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dikelola (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahann keluarga (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Rekomendasi penanganan kerawanan pangan (Dokumen)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang dimanfaatkan (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian DISBUNAK	Persentase Pengendalian Lahan Perkebunan dari serangan OPT yang Dilaporkan (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian DTPH	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian DTPH	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian DTPH	Produksi tanaman hortikultura (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Produksi tanaman pangan (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Penyuluhan Pertanian DTPH	Persentase Kelompok Tani yang Mencapai Kelas Lanjut, Madya, dan Utama (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Persentase Perusahaan yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Peningkatan kapasitas Produksi (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dari Kalender Event Tahunan	Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dari Kalender Tahunan (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase tingkat Kepatuhan Penyampaian LKPM (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		Menurunnya pengangguran		Tingkat pengangguran terbuka (%)		
			Meningkatnya pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase dokumen RTK mikro (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat (%)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Rata-rata capaian layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang sesuai baku mutu (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, melayani dan berintegritas berbasis transformasi digital		Nilai Sakip (Nilai)		
				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
				Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Nilai)		
				Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kemudahan investasi	Persentase Peluang Investasi yang Teridentifikasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah DISBUNAK	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah DTPH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, tata kelola pengembangan karir ASN, dan kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital (Desa)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Layanan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			perencanaan pembangunan			
				Persentase keberlanjutan inovasi yang diterapkan pada perangkat daerah (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi administrasi kependudukan	Jumlah layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses secara daring (Angka)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) (Tepat Waktu)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		Meningkatnya kapasitas keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Nilai)		
				Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase alokasi belanja pendidikan (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

Sumber: Analisis, 2025

Tabel 3. 7 Rincian program unggulan Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

No.	Program Unggulan (Janji Politik)	Definisi dan Output
1	Beasiswa untuk siswa kurang mampu dan berprestasi, serta tenaga pendidik	<p>Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu maupun siswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, serta dukungan peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tebo.</p> <p>Program ini dijalankan melalui mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, pencapaian prestasi, serta kebutuhan pengembangan profesional guru. Hasil yang diharapkan dari program ini mencakup bertambahnya jumlah siswa kurang mampu dan berprestasi yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, meningkatnya tenaga pendidik dengan kompetensi profesional, serta lahirnya generasi muda Tebo yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan pembangunan baik di tingkat daerah maupun global.</p>
2	Bantuan operasional ke pondok pesantren dan madrasah	<p>Kebijakan strategis daerah yang memberikan dukungan biaya operasional guna memperkuat penyelenggaraan pendidikan berbasis agama. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban biaya pengelolaan lembaga, meningkatkan kualitas sarana prasarana pembelajaran, serta memastikan santri dan siswa madrasah memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik dan merata.</p> <p>Pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel, berbasis data jumlah lembaga serta kebutuhan operasional, dengan prioritas pada pondok pesantren dan madrasah yang memiliki keterbatasan sumber daya.</p>
3	Insentif guru ngaji/TPQ dan tenaga kesehatan daerah terpencil	<p>Kebijakan daerah yang memberikan dukungan finansial berupa insentif rutin kepada guru ngaji/tenaga pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) serta tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, memperkuat motivasi pengabdian, serta memastikan keberlangsungan layanan pendidikan keagamaan non-formal dan pelayanan kesehatan dasar di seluruh pelosok Kabupaten Tebo.</p> <p>Penyaluran insentif dilakukan secara periodik dengan mekanisme verifikasi penerima berbasis data lembaga/pos pelayanan dan sesuai kriteria yang ditetapkan.</p>
4	Kesehatan gratis (UHC 100%) dan layanan kesehatan untuk semua (<i>Health for All</i>)	<p>Kebijakan daerah yang memastikan seluruh penduduk Kabupaten Tebo terdaftar dan terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan nasional, sehingga dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan. Program ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjamin bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat miskin, pekerja informal, dan kelompok rentan.</p> <p>Pelaksanaan program dilakukan melalui perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, optimalisasi peran fasilitas kesehatan daerah, serta penyediaan anggaran pendamping dari APBD.</p>

No.	Program Unggulan (Janji Politik)	Definisi dan Output
5	Dokter masuk dusun	<p>Kebijakan pelayanan kesehatan berbasis jemput bola dengan menghadirkan dokter ke setiap dusun untuk melakukan pengecekan kesehatan gratis bagi masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan dasar hingga ke wilayah pelosok, memperkuat deteksi dini penyakit, serta memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Pelaksanaan dilakukan melalui kunjungan rutin bulanan ke seluruh dusun dengan dukungan tenaga dokter umum, dokter gigi, serta tenaga kesehatan pendamping.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Layanan <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sasaran: 574 dusun • Frekuensi: 1 kali kunjungan per dusun per bulan • Total kunjungan: $574 \times 12 = 6.888$ kunjungan per tahun 2. Insentif Tenaga Medis – disesuaikan dengan kemampuan keruangan daerah <ul style="list-style-type: none"> • Dokter umum: 10 orang (12 bulan) • Dokter gigi: 1 orang (12 bulan) 3. Biaya Transportasi Kunjungan <ul style="list-style-type: none"> • Formula: $4 \text{ orang} \times 574 \text{ dusun} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}70.000$ • Perhitungan: $4 \times 574 \times 12 \times 70.000 = \text{Rp}192.192.000$
6	Menyediakan Balai Latihan Kerja / BLK terpadu	<p>Kebijakan daerah untuk membangun serta mengoperasikan pusat pelatihan kerja terpadu yang berfungsi sebagai wadah peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. BLK ini dirancang untuk memberikan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), mendukung peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, serta mendorong lahirnya wirausaha baru yang mandiri. Pelaksanaan program dilakukan melalui pembangunan fasilitas BLK, penyediaan instruktur, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, serta kerja sama dengan industri dan lembaga sertifikasi profesi.</p> <p>Output yang diharapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya 1 unit BLK Terpadu di Kabupaten Tebo dengan sarana dan prasarana lengkap. 2. Terlaksananya program pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi minimal 200 peserta setiap tahun. 3. Meningkatnya jumlah tenaga kerja tersertifikasi sesuai standar industri. 4. Tumbuhnya wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing. 5. Berkurangnya angka pengangguran terbuka melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
7	Ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ramah lingkungan	<p>Kebijakan daerah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dengan bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Program ini diarahkan untuk memperkuat rantai nilai agribisnis dari hulu hingga hilir melalui pemberdayaan petani, kelompok tani, dan UMKM, sekaligus mendorong penerapan praktik ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, konservasi tanah dan air, serta pemanfaatan energi terbarukan. Pelaksanaan program dilakukan dengan dukungan pembiayaan, penyediaan sarana produksi, pelatihan kewirausahaan, serta fasilitasi akses pasar.</p> <p>Output yang diharapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

No.	Program Unggulan (Janji Politik)	Definisi dan Output
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan dengan Penambahan Luas Tanam melalui Peningkatan IP. 4. Bantuan Benih Padi Inbrida dan Saprodi mendukung Peningkatan Indeks Pertanaman seluas 300 Ha dan mendukung MT. II. <ul style="list-style-type: none"> • Benih Padi Inbrida sebanyak 7.500 Kg • Pupuk NPK sebanyak 15.000 Kg • Dolomit sebanyak 30.000 Kg • Pupuk Organik Cair (POC) sebanyak 300 Liter 5. Pengembangan Sarana Pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih • Mempersiapkan Ketersediaan Benih Unggul Padi Sawah bersertifikat. • Bantuan Benih Penangkaran sebanyak 1.000 Kg • Bantuan Pupuk Penangkaran/NPK sebanyak 2.000 Kg 6. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura 6. Bantuan Saprodi dan bahan kimia <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Fungisida sebanyak (6 Liter + 6 Bungkus) • Bantuan Insektisida sebanyak 99 botol • Bantuan Mulsa sebanyak 32 Roll • Bantuan NPK 16-16-16 sebanyak 400 Kg 7. Bantuan Bahan/Bibit Tanaman <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Benih sayuran untuk diserahkan kepada petani sebanyak 81,6 Kg • Bantuan Benih Cabai Rawit sebanyak 40 Bungkus • Bantuan Bibit Cabe sebanyak 75 Bungkus • Bantuan Bibit Bawang Merah sebanyak 700 kg 8. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura 9. Bantuan Bahan-Bahan Kimia <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Rodentisida sebanyak 350 Kg • Bantuan Mulokisida sebanyak 290 ml • Bantuan Insektisida sebanyak 200 Botol
8	Infrastruktur jalan, irigasi, pertanian, sarana olahraga dan sekretariat lembaga kecamatan	<p>Kebijakan pembangunan fisik yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan produktivitas pertanian, menyediakan fasilitas olahraga yang layak, serta mendukung tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Program ini mencakup pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan infrastruktur strategis dengan mengutamakan pemerataan pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.</p> <p>Output yang Diharapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya infrastruktur jalan yang lebih baik untuk mendukung aktivitas ekonomi dan akses pelayanan publik. 2. Meningkatnya produktivitas pertanian melalui jaringan irigasi dan sarana pendukung yang memadai. 3. Terwujudnya sarana olahraga yang merata, layak, dan mendukung prestasi olahraga daerah.

No.	Program Unggulan (Janji Politik)	Definisi dan Output
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Menguatnya kelembagaan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan melalui sekretariat yang representatif. 5. Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo
9	Membuka Kawasan siap bangun, RTH dan penataan ibukota kecamatan	Kebijakan daerah untuk menyiapkan lahan yang layak huni dan memiliki infrastruktur dasar yang memadai sebagai kawasan siap bangun (kasiba), menyediakan ruang terbuka hijau publik yang berfungsi sebagai paru-paru kota sekaligus sarana interaksi sosial, serta menata pusat pemerintahan dan pelayanan publik di ibukota kecamatan agar lebih representatif, tertib, dan terintegrasi. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tata ruang wilayah, mendukung pemerataan pembangunan, serta menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan.
10	Layanan perijinan dan kependudukan berbasis web dan mobile dengan moto SIJEMPOL (Sistim Perijinan Jemput Bola)	<p>Inovasi pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen perizinan dan administrasi kependudukan secara cepat, transparan, dan efisien. Program ini menghadirkan dua pendekatan sekaligus, yaitu: (1) pelayanan berbasis aplikasi web dan mobile, yang memungkinkan masyarakat mengajukan perizinan dan layanan kependudukan dari mana saja, dan (2) pelayanan jemput bola (offline), dengan petugas turun langsung ke desa/kelurahan, khususnya daerah terpencil, untuk melayani masyarakat yang belum memiliki akses teknologi.</p> <p>Output yang Diharapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses dan kecepatan layanan perizinan serta kependudukan di Kabupaten Tebo. 2. Masyarakat dapat mengurus izin usaha, KTP, KK, akta, dan dokumen lainnya tanpa harus datang ke kantor kecamatan/kabupaten. 3. Tercapainya digitalisasi administrasi perizinan dan kependudukan dengan integrasi sistem yang transparan dan akuntabel. 4. Terlayani secara merata masyarakat di desa/kelurahan terpencil melalui sistem jemput bola. 5. Meningkatnya kepuasan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah.
11	Peningkatan kesejahteraan ASN dan perangkat desa	<p>Kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat motivasi, kinerja, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) serta perangkat desa melalui peningkatan penghasilan, tunjangan, insentif, dan jaminan kesejahteraan lainnya. Program ini mencakup penyediaan tambahan penghasilan berbasis kinerja, insentif operasional, peningkatan akses jaminan sosial, serta pemberdayaan kapasitas sumber daya aparatur. Tujuan utamanya adalah mewujudkan aparatur pemerintahan yang lebih sejahtera, berintegritas, dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Output yang Diharapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan penghasilan ASN dan perangkat desa secara terukur. 2. ASN dan perangkat desa terlindungi oleh jaminan sosial dan ketenagakerjaan.

No.	Program Unggulan (Janji Politik)	Definisi dan Output
		3. Meningkatnya motivasi, kinerja, dan kedisiplinan aparatur dalam memberikan pelayanan publik. 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 5. Tercapainya keseimbangan antara kesejahteraan aparatur dengan peningkatan kualitas pelayanan public.

Sumber: Olah, 2025

3.3.5 Dukungan Program RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 Terhadap Kegiatan Prioritas Utama dan Proyek Strategis Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama dan Proyek Strategis Nasional RPJM Nasional 2025–2029, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah. Adapun penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama dan Proyek Strategis Nasional terhadap program unggulan daerah dituangkan sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	OPD PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Prioritas Nasional 2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	OPD PENGAMPU URUSAN PERIKANAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	OPD PENGAMPU URUSAN PERIKANAN
3	Pengembangan Pangan Hewani		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	OPD PENGAMPU URUSAN PERTANIAN SUB URUSAN PETERNAAKAN
4	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	OPD PENGAMPU URUSAN PERTANIAN

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu
			SARANA PERTANIAN	
5	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	OPD PENGAMPU URUSAN PERTANIAN OPD PENGAMPU URUSAN PERTANIAN SUB URUSAN PETERNAAKAN
6	Peningkatan Penyediaan Energi		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	OPD PENGAMPU URUSAN SEKRETARIAT DAERAH
7	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	OPD PENGAMPU URUSAN SEKRETARIAT DAERAH
8	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	OPD PENGAMPU URUSAN SEKRETARIAT DAERAH
9	Konservasi Sumber Daya Air		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)	OPD PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	OPD PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	OPD PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
15	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
16	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
17	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	OPD PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu
18	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	OPD PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	OPD PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Prioritas Nasional 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	OPD PENGAMPU URUSAN SEKRETARIAT DAERAH
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	OPD PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
20	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	OPD PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
21	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	OPD PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
22	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	OPD PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
23	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	OPD PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
24	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	OPD PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
25	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	OPD PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
26	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g.pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	OPD PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
27	Peningkatan Relevansi dan Perluasaan Akses Pendidikan Tinggi		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD PENGAMPU URUSAN SEKRETARIAT DAERAH
28	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	OPD PENGAMPU URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu
29	Penurunan Kematian Ibu dan Anak		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	OPD PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
30	Pencegahan dan Penurunan Stunting		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	OPD PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
31	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	OPD PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
32	Penuntasan TBC		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	OPD PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
33	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	OPD PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
34	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	OPD PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
35	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	OPD PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
36	Investasi pelayanan kesehatan primer		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	OPD PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
37	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	OPD PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
38	Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	OPD PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
39	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
40	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	OPD PENGAMPU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu
41	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
42	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Prioritas Nasional 5	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
43	Pengembangan Hilirisasi Kelapa		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
45	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
46	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Prioritas Nasional 6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
47	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
48	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
50	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
51	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa		PROGRAM PENATAAN DESA	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
52	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Prioritas Nasional 7	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	OPD PENGAMPU UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
53	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	OPD PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN
54	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
55	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	OPD PENGAMPU URUSAN KEUANGAN

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu
56	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	OPD PENGAMPU URUSAN KEUANGAN
57	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Prioritas Nasional 8	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	OPD PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
58	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	OPD PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Sumber: Olah RPJMN 2025-2029

Tabel 3. 9 Penyeragaman Proyek Strategis Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
Makan Bergizi Gratis				
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	Badan Gizi Nasional (koordinator)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat 3. Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 4. Program Peningkatan Kualitas 5. Keluarga Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 8. Program Penanganan Kerawanan Pangan 9. Program Rehabilitasi Sosial
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
	Kabupaten/Kota			
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
Swasembada Pangan				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	Nasional	Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
7	Layanan Irigasi Pendukung Pangan Nasional	Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Nasional	Kementerian Pertanian, Swasta	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Hilirisasi, Industrialisasi, dan Transformasi Digital				
9	Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar Proyek: Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong	Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua		
10	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bsl, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan	Swasta	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
		n Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat		
11	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
12	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia	Nasional	Badan Informasi Geospasial	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Konektivitas dan Kawasan				
13	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas	Sumatera	BUMN (Penugasan)	Program Penyelenggaraan Jalan
Perumahan dan Permukiman				
14	Pembangunan 3 juta rumah	Nasional	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)	Program Pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh

Sumber: Olah, 2025



Pemerintah
Kabupaten Tebo



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Bab ini memuat program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Program perangkat daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam bab VI Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat indikasi kerangka pendanaan yang berasal dari hasil analisis pada BAB II perihal gambaran keuangan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat terkait indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD). IKU merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang terseleksi. Sedangkan IKD merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025-2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					364.604.008.497		368.304.739.183		372.043.032.285		375.819.269.065		379.633.834.644	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					255.225.042.270		257.815.576.449		260.432.404.550		263.075.793.457		265.746.012.760	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77,83	78	78,83	255.225.042.270	79,83	257.815.576.449	80,83	260.432.404.550	81,83	263.075.793.457	82,83	265.746.012.760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					105.956.327.282		107.031.784.004		108.118.156.611		109.215.555.901		110.324.093.793	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	57,25	59,75	62,25	105.956.327.282	64,75	107.031.784.004	67,25	108.118.156.611	69,75	109.215.555.901	72,25	110.324.093.793	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	56,04	58,44	60,84		63,24		65,64		68,04		70,44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	73,46	74,36	75,26		76,16		77,06		77,96		78,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	68,85	70,35	71,85		73,35		74,85		76,35		77,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SD (Nilai)	69,9	70,9	71,9		72,9		73,9		74,9		75,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Iklm Kebinekaan SMP (Nilai)	69,39	70,39	71,39		72,39		73,39		74,39		75,39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	71,56	74,6	77,64		80,68		83,65		86,62		89,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	98,56	98,86	99,17		99,48		99,78		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	22,66	26,76	30,86		34,96		39,05		43,15		47,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	29,56	36,98	44,33		54,13		66,37		81,07		95,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	50,25	47,6	48,6		49,6		50,6		51,6		52,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					157.138.945		158.733.905		160.345.054		161.972.557		163.616.578	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase standar kompetensi yang terpenuhi pada kurikulum muatan lokal (%)	100	100	100	157.138.945	100	158.733.905	100	160.345.054	100	161.972.557	100	163.616.578	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					3.215.500.000		3.248.137.325		3.281.105.919		3.314.409.144		3.348.050.397	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	37	37	37	3.215.500.000	38	3.248.137.325	39	3.281.105.919	40	3.314.409.144	41	3.348.050.397	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					50.000.000		50.507.500		51.020.151		51.538.006		52.061.116	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Izin Pendidikan yang diterbitkan (%)	100	100	100	50.000.000	100	50.507.500	100	51.020.151	100	51.538.006	100	52.061.116	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					258.578.419,897		258.480.307,038		294.463.076,214		316.505.377,204		339.756.295,580	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					150.921.129,113		165.737.716,632		179.888.309,222		195.674.440,594		212.752.041,079	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Angka)	74,21	74,5	75	86.582.480,287	75,5	95.240.728,316	76	104.764.801,148	76,5	115.241.281,262	77	126.765.409,389	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah RSUD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80,56	80,56	80,66	64.338.648,826	80,76	70.496.988,316	80,86	75.123.508,074	80,96	80.433.159,332	80,96	85.986.631,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					106.807.950,455		91.845.816,044		113.625.815,193		119.824.589,631		125.934.772,824	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Dinas Kesehatan	Persentase Indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai lebih dari 90% (%)	33,33	50	75	75.569.229.985	80	61.301.252.984	85	72.431.378.193	90	81.674.516.111	95	91.834.647.224	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat RSUD	Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	56,86	58,86	60,55	31.238.720.470	60,65	30.544.563.060	60,75	41.194.437.000	60,85	38.150.073.520	60,85	34.100.125.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nett Death Rate (NDR) (Per 1000)	15	15	14		14		13		13		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					515.000.000		529.000.000		544.400.000		561.340.000		579.974.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan Dinas Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	63	64	65	140.000.000	70	154.000.000	75	169.400.000	78	186.340.000	80	204.974.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan RSUD	Indeks Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit (Indeks)	53,8	54	55	375.000.000	57	375.000.000	59	375.000.000	62	375.000.000	62	375.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					84.040.329		92.444.362		101.688.799		111.857.679		123.043.447	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	80	100	100	84.040.329	100	92.444.362	100	101.688.799	100	111.857.679	100	123.043.447	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					250.300.000		275.330.000		302.863.000		333.149.300		366.464.230	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	70	72	72	250.300.000	75	275.330.000	78	302.863.000	80	333.149.300	85	366.464.230	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					171.371.883,447		174.968.304,404,5		178.640.214,376,21		182.389.198,091,71		186.216.873,551,73	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.770.831,755		10.997.019,222		11.227.956,625		11.463.743,715		11.704.482,333	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80,18	80,19	80,2	10.770.831,755	80,22	10.997.019,222	80,24	11.227.956,625	80,28	11.463.743,715	80,3	11.704.482,333	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					4.667.767,549		4.765.790,668		4.865.872,272		4.968.055,589		5.072.384,757	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	20,17	20,3	20,42	4.667.767,549	20,68	4.765.790,668	20,94	4.865.872,272	21,2	4.968.055,589	21,46	5.072.384,757	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					33.171.471.475		33.868.072.375		34.579.301.895		35.305.467.235		36.046.882.047	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	69,33	72	75,01	33.171.471.475	77,25	33.868.072.375	79,9	34.579.301.895	82,47	35.305.467.235	84,97	36.046.882.047	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					11.159.145.939		11.393.488.003		11.632.751.251		11.877.039.028		12.126.456.847	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	88,26	88,5	89,96	11.159.145.939	90,81	11.393.488.003	91,66	11.632.751.251	92,51	11.877.039.028	93,36	12.126.456.847	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.179.566.503		2.225.337.399		2.272.069.484		2.319.782.944		2.368.498.385	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Rasio Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Rasio)	0,019	0,0209	0,0233	2.179.566.503	0,0257	2.225.337.399	0,028	2.272.069.484	0,0304	2.319.782.944	0,0328	2.368.498.385	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					39.645.319.845		40.477.871.562		41.327.906.865		42.195.792.909		43.081.904.560	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan dan prasarana pendukung kawasan milik pemerintah daerah dalam kondisi baik (%)	69	70	71	39.645.319.845	72	40.477.871.562	73	41.327.906.865	74	42.195.792.909	75	43.081.904.560	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					398.098.700		404.070.180,5		410.131.233,21		416.283.201,71		422.527.449,73	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Rasio bangunan dan prasarana pendukung kawasan milik pemerintah daerah dalam kondisi baik (Rasio)	0,4751	0,5226	0,5701	398.098.700	0,6176	404.070.180,5	0,6651	410.131.233,21	0,7126	416.283.201,71	0,7601	422.527.449,73	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					68.210.582.085		69.643.004.308		71.105.507.399		72.598.723.054		74.123.296.238	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	19,95	20	20,95	68.210.582.085	21,45	69.643.004.308	21,95	71.105.507.399	22,45	72.598.723.054	22,95	74.123.296.238	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					113.676.223		116.063.423		118.500.755		120.989.271		123.530.046	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	96	140	216	113.676.223	276	116.063.423	336	118.500.755	396	120.989.271	456	123.530.046	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.055.423.373		1.077.587.264		1.100.216.597		1.123.321.145		1.146.910.889	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Ketersediaan dokumen mengenai Rencana Tata Ruang yang di sahkan (Angka)	3	4	5	1.055.423.373	6	1.077.587.264	7	1.100.216.597	8	1.123.321.145	9	1.146.910.889	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					18.126.026.192		18.397.916.585		18.673.885.332		18.953.993.613		19.238.303.516	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.882.140.119		2.925.372.221		2.969.252.804		3.013.791.596		3.058.998.470	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	68,26	69,26	70,26	2.882.140.119	71,26	2.925.372.221	72,26	2.969.252.804	73,26	3.013.791.596	74,26	3.058.998.470	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					31.354.860		31.825.183		32.302.560		32.787.099		33.278.905	
Meningkatnya pelayanan terhadap pengembang perumahan	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	61,22	67,35	73,47	31.354.860	79,59	31.825.183	85,71	32.302.560	91,84	32.787.099	97,96	33.278.905	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.578.564.578		1.602.243.047		1.626.276.692		1.650.670.843		1.675.430.905	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	3,6651	3,6583	3,6516	1.578.564.578	3,6448	1.602.243.047	3,638	1.626.276.692	3,6312	1.650.670.843	3,6245	1.675.430.905	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					472.814.579		479.906.797		487.105.399		494.411.980		501.828.160	
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	6,24	6,18	6,15	472.814.579	6,1	479.906.797	6,05	487.105.399	6,01	494.411.980	5,96	501.828.160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					13.161.152.056		13.358.569.337		13.558.947.877		13.762.332.095		13.968.767.076	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	66,1	71,09	76,09	13.161.152.056	81,09	13.358.569.337	86,09	13.558.947.877	91,09	13.762.332.095	96,09	13.968.767.076	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10.052.442.250,51		10.194.627.121,02		10.375.247.774,26		10.558.816.506,77		10.700.000.590,51	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.482.124.178,65		8.624.679.183,59		8.769.059.665,72		8.915.300.056,84		9.018.012.064,46	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah BPBD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	54	54	54	2.924.284.563	56	2.967.500.591	58	3.010.716.619	60	3.053.932.647	62	3.097.148.675	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah Damkar	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	70	70,5	71	2.895.943.523	71,25	2.939.382.682	71,5	2.983.473.422	71,75	3.028.225.523	72	3.028.225.523	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah Salpol PP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	50,37	50,97	51,6	2.661.896.092,65	52,83	2.717.795.910,59	53,06	2.774.869.624,72	54,29	2.833.141.886,84	55,52	2.892.637.866,46	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti (%)	93,13	93,63	94		95		96		97		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.570.318.071,86		1.569.947.937,43		1.606.188.108,54		1.643.516.449,93		1.681.988.526,05	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100	1.570.318.071,86	100	1.569.947.937,43	100	1.606.188.108,54	100	1.643.516.449,93	100	1.681.988.526,05	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Rata-rata capaian layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					6.792.659.420		7.480.528.426		10.110.289.305		10.707.772.065		11.889.152.704	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.250.186.887		5.689.996.569		6.905.106.603		7.427.457.592		8.529.656.221	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	68,88	69	69,1	5.250.186.887	69,33	5.689.996.569	69,56	6.905.106.603	69,79	7.427.457.592	70,02	8.529.656.221	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					294.108.506		298.520.134		579.770.990		585.240.125		590.790.813	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	17	18	20	294.108.506	22	298.520.134	25	579.770.990	30	585.240.125	35	590.790.813	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					482.775.400		506.914.170		827.134.879		860.441.622		896.713.954	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	8	1	1	482.775.400	1	506.914.170	1	827.134.879	1	860.441.622	1	896.713.954	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	63,64	64	64		64		64		64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	3,22	2	2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	9	9	9		9		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	60,28	5	5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					215.184.657		359.688.070		800.570.891		812.579.454		824.768.146	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	60,47	61	62,02	215.184.657	63,57	359.688.070	65,12	800.570.891	66,67	812.579.454	68,22	824.768.146	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0,45	0,5	0,52		0,55		0,57		0,6		0,63	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0,89	0,9	1,03		1,34		1,64		1,95		2,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	16,55	16,3	16,4		16,42		16,49		16,56		16,63	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					487.913.519		561.606.733		902.563.334		925.092.672		948.409.494	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	487.913.519	100	561.606.733	100	902.563.334	100	925.092.672	100	948.409.494	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	0,21	0,25	0,28		0,35		0,42		0,49		0,56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					62.490.451		63.802.750		95.142.608		96.960.600		98.814.076	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	62.490.451	100	63.802.750	100	95.142.608	100	96.960.600	100	98.814.076	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.339.077.262		3.395.152.532		3.612.877.586		3.612.877.586		3.612.877.586	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.344.587.826		2.372.722.879		2.609.995.166		2.609.995.166		2.609.995.166	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peringkat Daerah (Nilai)	60,04	61,15	62,15	2.344.587.826	62,2	2.372.722.879	63,5	2.609.995.166	64,8	2.609.995.166	65,95	2.609.995.166	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					23.245.000		23.523.940		25.876.334		25.876.334		25.876.334	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase dokumen RTK mikro (%)	8,3	9	10	23.245.000	10	23.523.940	12	25.876.334	12	25.876.334	12	25.876.334	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					685.753.235		700.154.053		714.857.288		714.857.288		714.857.288	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	3,7	3,75	3,8	685.753.235	3,84	700.154.053	3,86	714.857.288	3,93	714.857.288	3,97	714.857.288	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					27.654.150		27.985.999		30.784.598		30.784.598		30.784.598	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	1,7	1,8	1,88	27.654.150	2,09	27.985.999	2,31	30.784.598	2,53	30.784.598	2,75	30.784.598	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					257.837.051		270.765.661		231.364.200		231.364.200		231.364.200	
Meningkatnya pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	49,2	52,2	54,17	257.837.051	66,67	270.765.661	70,83	231.364.200	75	231.364.200	79,17	231.364.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.038.019.876		1.079.584.715		1.236.492.758		1.293.676.321		1.362.267.464	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					485.260.796		495.451.273		505.855.750		516.478.720		527.324.774	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	9	9	10	485.260.796	15	495.451.273	20	505.855.750	25	516.478.720	30	527.324.774	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	55	55,5	56		57		58		59		60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					20.000.000		20.300.000		30.302.250		30.756.784		31.584.123	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	0,03	0,03	0,04	20.000.000	0,04	20.300.000	0,05	30.302.250	0,05	30.756.784	0,05	31.584.123	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					248.010.596		260.411.125		273.431.682		287.103.266		301.458.429	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	55	56	58	248.010.596	60	260.411.125	64	273.431.682	68	287.103.266	70	301.458.429	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					16.983.682		25.475.523		38.213.285		57.319.927		85.979.890	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	30	33	35	16.983.682	40	25.475.523	45	38.213.285	50	57.319.927	55	85.979.890	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					257.764.802		267.796.794		308.287.541		319.709.340		331.642.340	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	68	68	69	257.764.802	70	267.796.794	72	308.287.541	74	319.709.340	76	331.642.340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					10.000.000		10.150.000		80.402.250		82.308.284		84.277.908	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	73,11	74	75	10.000.000	76	10.150.000	77	80.402.250	78	82.308.284	79	84.277.908	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.907.308.129		5.391.615.626		5.404.423.626		5.417.231.626		5.430.039.626	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.561.607.355		4.680.831.797		4.680.831.797		4.680.831.797		4.680.831.797	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peringkat Daerah (Nilai)	60,5	61,4	62,8	3.561.607.355	63,4	4.680.831.797	64,8	4.680.831.797	65,4	4.680.831.797	66,8	4.680.831.797	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					60.211.854		187.925.809		187.925.809		187.925.809		187.925.809	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	60.211.854	100	187.925.809	100	187.925.809	100	187.925.809	100	187.925.809	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					225.939.001		412.905.120		425.713.120		438.521.120		451.329.120	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Skor)	94,48	94,78	94,95	225.939.001	95,43	412.905.120	95,9	425.713.120	96,38	438.521.120	96,87	451.329.120	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)	90	90,5	91		91,7		92		92,9		93,36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					29.568.050		60.002.900		60.002.900		60.002.900		60.002.900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Rekomendasi penanganan kerawanan pangan (Dokumen)	1	1	1	29.568.050	1	60.002.900	1	60.002.900	1	60.002.900	1	60.002.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					29.981.869		49.950.000		49.950.000		49.950.000		49.950.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	100	100	100	29.981.869	100	49.950.000	100	49.950.000	100	49.950.000	100	49.950.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					215.560.943		218.794.357		222.076.273		225.407.417		228.788.528	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					215.560.943		218.794.357		222.076.273		225.407.417		228.788.528	
Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase)	6,12	10,2	20,41	215.560.943	30,61	218.794.357	40,82	222.076.273	51,02	225.407.417	61,22	228.788.528	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					15.373.019.188		15.496.717.375		15.712.286.925		15.790.524.589		15.995.147.639	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.895.310.845		6.849.026.845		6.854.026.845		6.849.026.845		6.854.026.845	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80,31	80,56	80,81	6.895.310.845	81,06	6.849.026.845	81,31	6.854.026.845	81,56	6.849.026.845	81,81	6.854.026.845	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					83.188.800		183.188.800		230.531.737		203.769.401		206.825.942	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	83.188.800	100	183.188.800	100	230.531.737	100	203.769.401	100	206.825.942	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					900.000.000		705.000.000		990.000.000		1.100.000.000		1.010.000.000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang sesuai baku mutu (%)	40	40	40	900.000.000	40	705.000.000	40	990.000.000	40	1.100.000.000	40	1.010.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					694.810.600		866.583.987		744.810.600		744.810.600		744.810.600	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	0,0011	0,0011	0,0011	694.810.600	0,0011	866.583.987	0,0011	744.810.600	0,0011	744.810.600	0,0011	744.810.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					35.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	35.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					110.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	69,05	70	70	110.000.000	72	140.000.000	74	140.000.000	76	140.000.000	78	140.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan (%)	0	0	0	0	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat (%)	0	0	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					6.791.200		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	6.791.200	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					6.647.917.743		6.387.917.743		6.387.917.743		6.387.917.743		6.674.484.252	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	21,93	23,68	25,58	6.647.917.743	27,63	6.387.917.743	29,84	6.387.917.743	32,22	6.387.917.743	34,8	6.674.484.252	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.280.783.135		4.369.563.138		4.460.190.773		4.552.704.592		4.647.143.947	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.094.709.254		4.180.698.148		4.268.492.809		4.358.131.158		4.449.651.912	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80,52	80,9	81	4.094.709.254	81,5	4.180.698.148	82	4.268.492.809	82,5	4.358.131.158	83	4.449.651.912	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					106.903.881		108.507.440		110.135.051		111.787.077		113.463.883	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	8,12	9	10	106.903.881	11	108.507.440	12	110.135.051	13	111.787.077	15	113.463.883	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	55,98	57	59		61		63		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					25.375.000		25.755.625		26.141.959		26.534.089		26.932.100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	25.375.000	100	25.755.625	100	26.141.959	100	26.534.089	100	26.932.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	98	98,3	98,5		98,7		98,8		98,9		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	65	67	68		69		70		71		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					53.795.000		54.601.925		55.420.954		56.252.268		57.096.052	
Meningkatnya pemanfaatan informasi administrasi kependudukan	Jumlah layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses secara daring (Angka)	7	9	10	53.795.000	12	54.601.925	14	55.420.954	16	56.252.268	18	57.096.052	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					12.967.484.824		8.296.386.848		12.969.484.824		8.297.386.848		12.999.840.801	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.536.264.432		5.536.264.432		5.536.264.432		5.536.264.432		5.536.264.432	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	69,24	70	71,05	5.536.264.432	73,2	5.536.264.432	75,5	5.536.264.432	77,25	5.536.264.432	79,05	5.536.264.432	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					56.000.000		57.000.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	56.000.000	100	57.000.000	100	58.000.000	100	58.000.000	100	58.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	16,39	20	26,22	50.000.000	32,27	50.000.000	38,52	50.000.000	46,72	50.000.000	51,63	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					5.378.281.158		706.183.182		5.378.281.158		706.183.182		5.378.281.158	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital (Desa)	3	4	5	5.378.281.158	7	706.183.182	9	5.378.281.158	11	706.183.182	13	5.378.281.158	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.946.939.234		1.946.939.234		1.946.939.234		1.946.939.234		1.977.295.211	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	70	73	75	1.946.939.234	78	1.946.939.234	80	1.946.939.234	83	1.946.939.234	85	1.977.295.211	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					8.864.551.944		8.390.488.000,36		8.568.178.154,41		8.748.605.145,8		8.932.326.182,14	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.105.322.944		2.942.101.467,36		3.006.374.849,41		3.068.982.966,8		3.133.431.939,14	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peringkat Daerah (Nilai)	60,59	63	64	3.105.322.944	66	2.942.101.467,36	68	3.006.374.849,41	70	3.068.982.966,8	72	3.133.431.939,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					34.435.200		35.158.337		34.896.663		36.650.493		37.420.152	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	35,1	33.5-34.00	32.5-33.00	34.435.200	31.5-32.00	35.158.337	30.5-31.00	34.896.663	29.5-30.00	36.650.493	28.5-29.00	37.420.152	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,35	2,34	2,33		2,31		2,29		2,27		2,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.958.393.800		3.709.491.828		3.787.391.811		3.866.927.043		3.948.132.511	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	6,9	6,8	6,7	3.958.393.800	6,6	3.709.491.828	6,5	3.787.391.811	6,4	3.866.927.043	6,3	3.948.132.511	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	70,1	70,2	70,48		70,86		71,24		71,62		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.766.400.000		1.703.736.368		1.739.514.831		1.776.044.643		1.813.341.580	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahann keluarga (%)	63,34	63,44	63,5	1.766.400.000	63,66	1.703.736.368	63,82	1.739.514.831	63,98	1.776.044.643	64,14	1.813.341.580	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					545.234.500		650.789.757		667.912.452		775.857.417		984.596.878	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					545.234.500		650.789.757		667.912.452		675.857.417		684.596.878	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas (%)	12	11,8	11,61	545.234.500	11,11	650.789.757	10,61	667.912.452	10,11	675.857.417	9,61	684.596.878	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	18	19	20		40		60		80		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					0		0		0		100.000.000		300.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi air	Persentase Pengelolaan Pelayaran (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100.000.000	100	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.128.407.187,99		6.369.756.589,95		6.621.806.967,69		6.884.974.678,97		7.160.059.793,22	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.884.581.078		4.078.810.130		4.282.750.635		4.496.798.162		4.721.731.570	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	60,02	61,02	62,3	3.884.581.078	65,5	4.078.810.130	67,2	4.282.750.635	68,9	4.496.798.162	75	4.721.731.570	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					996.355.022		1.017.278.479		1.038.641.325		1.060.452.794		1.082.722.302	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	71	72	996.355.022	73	1.017.278.479	74	1.038.641.325	75	1.060.452.794	76	1.082.722.302	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.247.471.087,99		1.273.667.980,95		1.300.415.007,69		1.327.723.722,97		1.355.605.921,22	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	-	1,31	1,31	1.247.471.087,99	1,32	1.273.667.980,95	1,32	1.300.415.007,69	1,33	1.327.723.722,97	1,33	1.355.605.921,22	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					108.565.767		108.587.480		108.609.198		108.630.918		108.652.646	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					40.956.290		40.964.481		40.972.674		40.980.868		40.989.064	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	31,25	31,35	31,45	40.956.290	31,65	40.964.481	31,85	40.972.674	32	40.980.868	32,25	40.989.064	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					19.503.100		19.507.000		19.510.902		19.514.804		19.518.707	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi (%)	25	50	100	19.503.100	100	19.507.000	100	19.510.902	100	19.514.804	100	19.518.707	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					2.100.360		2.100.780		2.101.200		2.101.620		2.102.041	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	6,91	8,91	10,27	2.100.360	11,29	2.100.780	12,32	2.101.200	13,35	2.101.620	14,37	2.102.041	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					46.006.017		46.015.219		46.024.422		46.033.626		46.042.834	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase UMKM yang dilakukan pengembangan usahanya (%)	0,59	0,6	0,65	46.006.017	0,67	46.015.219	0,7	46.024.422	0,73	46.033.626	0,76	46.042.834	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.283.107.493		3.352.052.750		3.422.445.859		3.494.317.222		3.567.697.884	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.044.835.737		3.108.777.288		3.174.061.611		3.240.716.905		3.308.771.960	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Angka)	78,68	79	80	3.044.835.737	81	3.108.777.288	82	3.174.061.611	83	3.240.716.905	84	3.308.771.960	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					38.501.988		39.310.529		40.136.050		40.978.908		41.839.465	
Meningkatnya kemudahan investasi	Persentase Peluang Investasi yang Teridentifikasi (%)	0	25	25	38.501.988	30	39.310.529	35	40.136.050	40	40.978.908	50	41.839.465	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					15.801.200		16.133.025		16.471.819		16.817.727		17.170.899	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Promosi Investasi yang Berhasil Menarik Investor (%)	0	0	25	15.801.200	30	16.133.025	35	16.471.819	40	16.817.727	50	17.170.899	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					120.380.899		122.908.898		125.489.985		128.125.274		130.815.905	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan (%)	98	98	98	120.380.899	98	122.908.898	98	125.489.985	98	128.125.274	98	130.815.905	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					10.038.676		10.249.488		10.464.728		10.684.487		10.908.861	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase tingkat Kepatuhan Penyampaian LKPM (%)	70	90	90	10.038.676	92	10.249.488	94	10.464.728	96	10.684.487	98	10.908.861	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					53.548.993		54.673.522		55.821.666		56.993.921		58.190.794	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Layanan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi (%)	70	72	75	53.548.993	77	54.673.522	79	55.821.666	82	56.993.921	85	58.190.794	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					7.844.120.364		8.008.846.892		8.177.032.626		8.348.890.977		8.713.736.764	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.320.420.221		3.390.149.046		3.461.342.176		3.534.030.362		3.608.244.999	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Angka)	70,93	71,93	72,93	3.320.420.221	73,93	3.390.149.046	74,93	3.461.342.176	75,93	3.534.030.362	76,93	3.608.244.999	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					513.865.218		524.656.388		535.674.172		547.063.944		558.552.287	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	3	3	3	513.865.218	4	524.656.388	4	535.674.172	5	547.063.944	5	558.552.287	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N					3.652.484.925		3.729.187.108		3.807.500.037		3.887.457.538		4.158.613.223	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	2	2	2	3.652.484.925	3	3.729.187.108	3	3.807.500.037	3	3.887.457.538	4	4.158.613.223	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					357.350.000		364.854.350		372.516.241		380.339.133		388.326.255	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Jumlah prestasi pramuka (Prestasi)	4	4	4	357.350.000	4	364.854.350	4	372.516.241	4	380.339.133	4	388.326.255	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					110.012.458		112.322.719		114.681.497		117.089.808		119.548.694	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					110.012.458		112.322.719		114.681.497		117.089.808		119.548.694	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,4	2,4	2,5	110.012.458	2,5	112.322.719	2,6	114.681.497	2,6	117.089.808	2,7	119.548.694	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					79.424.661		81.092.579		82.795.523		84.534.229		86.309.448	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					79.424.661		81.092.579		82.795.523		84.534.229		86.309.448	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintahan daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2,4	2,4	2,5	79.424.661	2,5	81.092.579	2,6	82.795.523	2,6	84.534.229	2,7	86.309.448	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.290.000.000		2.312.533.000		2.335.294.711		2.358.287.451		2.381.513.568	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.450.000.000		1.464.717.500		1.479.584.383		1.494.602.164		1.509.772.376	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan (%)	100	100	100	1.450.000.000	100	1.464.717.500	100	1.479.584.383	100	1.494.602.164	100	1.509.772.376	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					470.000.000		474.770.500		479.589.421		484.457.253		489.374.494	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kelompok kesenian yang dibina (%)	12,5	13	15	470.000.000	17,5	474.770.500	20	479.589.421	22,5	484.457.253	25	489.374.494	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Cakupan pembinaan sejarah (%)	2	3	5	70.000.000	6	70.000.000	7	70.000.000	8	70.000.000	9	70.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					300.000.000		303.045.000		306.120.907		309.228.034		312.366.698	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	98,1	98,1	98,1	300.000.000	98,25	303.045.000	98,5	306.120.907	99,1	309.228.034	99,25	312.366.698	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.058.923.823		4.119.807.679		4.181.604.795		4.244.328.867		4.307.993.800	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.321.647.615		3.371.472.329		3.422.044.414		3.473.375.080		3.525.475.707	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Angka)	70,31	70,32	70,32	3.321.647.615	70,33	3.371.472.329	70,34	3.422.044.414	70,35	3.473.375.080	70,36	3.525.475.707	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					699.895.280		710.393.709		721.049.615		731.865.359		742.843.339	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Orang)	3.916	3.956	3.956	699.895.280	3.996	710.393.709	4.036	721.049.615	4.076	731.865.359	4.116	742.843.339	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					37.380.928		37.941.641		38.510.766		39.088.428		39.674.754	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah naskah kuno yang terinventarisasi (Angka)	0	1	2	37.380.928	3	37.941.641	4	38.510.766	5	39.088.428	6	39.674.754	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					72.654.588		73.744.407		74.850.573		75.973.332		77.112.932	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					72.654.588		73.744.407		74.850.573		75.973.332		77.112.932	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase OPD yang menggunakan sistem aplikasi Srikandi (%)	20	20	20	72.654.588	25	73.744.407	30	74.850.573	35	75.973.332	38	77.112.932	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					309.805.080		881.563.144		881.563.144		881.563.144		881.563.144	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					79.758.114		259.758.114		259.758.114		259.758.114		259.758.114	
Meningkatnya produksi produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	402,23	422,23	443,45	79.758.114	465,6	259.758.114	488,91	259.758.114	513,35	259.758.114	539,02	259.758.114	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					66.322.508		339.964.830		339.964.830		339.964.830		339.964.830	
Meningkatnya produksi produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	599,415	620,85	660,85	66.322.508	693,89	339.964.830	728,59	339.964.830	765,02	339.964.830	803,27	339.964.830	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					139.101.000		199.101.000		199.101.000		199.101.000		199.101.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman hayati	Jumlah kelompok petani/nelayan yang dibina (Kelompok)	105	110	125	139.101.000	125	199.101.000	125	199.101.000	125	199.101.000	125	199.101.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					24.623.458		82.739.200		82.739.200		82.739.200		82.739.200	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	33,46	34,46	35,5	24.623.458	35,5	82.739.200	35,5	82.739.200	35,5	82.739.200	35,5	82.739.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					829.052.128		846.462.273		864.237.980,6		882.386.978,4		900.917.105,1	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					106.766.226		109.008.366		111.297.542		113.634.790		116.021.121	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,29	0,31	0,32	106.766.226	0,34	109.008.366	0,35	111.297.542	0,37	113.634.790	0,38	116.021.121	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	15,11	15,15	15,18		15,2		15,22		15,25		15,28		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					621.007.008		634.048.156		647.363.166,6		660.957.793,4		674.837.907,1	
Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dari Kalender Event Tahunan	Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dari Kalender Tahunan (%)	100	100	100	621.007.008	100	634.048.156	100	647.363.166,6	100	660.957.793,4	100	674.837.907,1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					101.278.894		103.405.751		105.577.272		107.794.395		110.058.077	
Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	98,06	98,07	98,08	101.278.894	98,1	103.405.751	98,12	105.577.272	98,14	107.794.395	98,16	110.058.077	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					18.298.634.127,45		18.655.151.967,1		19.028.004.783,8		19.419.286.465,18		20.073.985.193	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.347.093.284		15.565.997.883		15.788.808.033		16.015.625.286		16.491.163.287	
Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah DTPH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	83,43	83,45	83,5	8.886.733.152	83,55	9.020.034.150	83,6	9.155.334.662	83,65	9.292.664.682	83,7	9.432.054.652	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah DISBUNAK	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	61,53	63	65	6.460.360.132	68	6.545.963.733	68	6.633.473.371	70	6.722.960.604	70	7.059.108.635	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.084.076.602,45		2.186.489.912,1		2.298.084.609,8		2.419.768.236,18		2.552.538.975	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian Disbunak	Jumlah ternak yang terinsinerasi (Ekor)	5.600	6.000	6.500	1.177.714.996	6.591	1.189.492.145	6.683	1.201.387.066	6.777	1.213.400.938	6.872	1.225.534.947	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Total ketersediaan bibit unggul (Batang)	11.768	15.000	18.750		18.750		18.750		18.750		18.750		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian DTPH	Produksi tanaman pangan (Ton)	811	1.404	1.560	906.361.606,45	1.716	996.997.767,1	1.887,6	1.096.697.543,8	2.076,36	1.206.367.298,18	2.284	1.327.004.028	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produksi tanaman hortikultura (Ton)	52,49	136,53	151,7		166,87		183,56		201,91		222,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					107.279.333		113.493.454		120.283.849		127.707.693		135.827.878	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Disbunnak	Persentase Kelembagaan Petani yang difasilitasi memperoleh bantuan Prasarana Pertanian (%)	50	50	50	50.153.470	50	50.655.005	55	51.161.555	55	51.673.170	55	52.189.902	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian DTPH	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	0	60	57.125.863	126	62.838.449	198,6	69.122.294	344,46	76.034.523	577,51	83.637.976	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					408.685.350		412.766.204		416.899.926		422.898.399		428.984.300	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Ternak Tervaksin (%)	39	39	40	408.685.350	42	412.766.204	45	416.899.926	47	422.898.399	50	428.984.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					136.550.649		147.145.714		158.769.686		171.525.148		185.524.942	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian DISBUNAK	Persentase Pengendalian Lahan Perkebunan dari serangan OPT yang Dilaporkan (%)	60	65	70	34.000.000	70	34.340.000	73	34.683.400	75	35.030.234	75	35.380.536	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian DTPH	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	14,47	25,67	30,85	102.550.649	48,88	112.805.714	68,7	124.086.286	90,49	136.494.914	100	150.144.406	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					55.000.000		55.000.000		56.105.500		56.666.555		57.233.231	
Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Persentase Perusahaan yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan (%)	40	45	50	55.000.000	50	55.000.000	53	56.105.500	53	56.666.555	55	57.233.231	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					159.948.909		174.258.800		189.053.180		205.095.148		222.712.580	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian Disbunnak	Persentase Kelembagaan petani yang dibina (%)	50	50	50	30.000.000	50	31.315.000	50	31.815.000	50	32.133.150	50	32.454.382	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Penyuluhan Pertanian DTPH	Persentase Kelompok Tani yang Mencapai Kelas Lanjut, Madya, dan Utama (%)	13,25	14	14,75	129.948.909	16,25	142.943.800	17,75	157.238.180	19,25	172.961.998	20,75	190.258.198	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.617.607.470		1.618.427.992		1.618.748.577		1.619.569.227		1.619.889.942	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					535.618.402		535.725.526		535.832.671		535.939.838		536.047.026	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dikelola (%)	3,17	4	4,76	535.618.402	6,35	535.725.526	7,94	535.832.671	9,52	535.939.838	11,11	536.047.026	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					321.946.564		322.010.954		322.075.356		322.139.771		322.204.199	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	100	100	100	321.946.564	100	322.010.954	100	322.075.356	100	322.139.771	100	322.204.199	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					98.976.852		99.493.647		99.510.446		100.027.248		100.044.054	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (%)	30	31,5	32,5	98.976.852	36	99.493.647	37,5	99.510.446	40	100.027.248	42	100.044.054	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					661.065.652		661.197.865		661.330.104		661.462.370		661.594.663	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	661.065.652	100	661.197.865	100	661.330.104	100	661.462.370	100	661.594.663	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					4.706.491.131		4.726.821.537		4.727.766.902		4.728.712.455		4.729.658.197	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.960.662.367		3.980.843.607		3.981.639.776		3.982.436.104		3.983.232.591	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79,16	79,56	80	3.960.662.367	81,15	3.980.843.607	82,65	3.981.639.776	84	3.982.436.104	85,15	3.983.232.591	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					674.002.702		674.137.502		674.272.330		674.407.184		674.542.066	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Peningkatan kapasitas Produksi (%)	5,38	3	3	674.002.702	3,25	674.137.502	3,5	674.272.330	3,75	674.407.184	4	674.542.066	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					71.826.062		71.840.428		71.854.796		71.869.167		71.883.540	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap (Persentase)	100	100	100	71.826.062	100	71.840.428	100	71.854.796	100	71.869.167	100	71.883.540	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					38.210.855.013		43.901.658.941		39.605.751.222		40.323.404.032		41.054.895.441	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.668.337.761		30.227.320.953		30.797.537.845		31.379.228.168		31.972.637.027	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Angka)	83,2	83,4	83,5	29.668.337.761	83,7	30.227.320.953	83,9	30.797.537.845	84,1	31.379.228.168	84,3	31.972.637.027	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					7.928.687.724		13.047.618.040		8.168.332.310		8.290.857.295		8.415.220.155	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)	100	100	100	7.928.687.724	100	13.047.618.040	100	8.168.332.310	100	8.290.857.295	100	8.415.220.155	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					613.829.528		626.719.948		639.881.067		653.318.569		667.038.259	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	613.829.528	100	626.719.948	100	639.881.067	100	653.318.569	100	667.038.259	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					53.725.159.716		54.847.928.066		54.856.402.288		54.859.428.759		54.862.486.502	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.234.765.882		32.906.235.961		32.912.126.568		32.912.515.168		32.912.879.645	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Angka)	79,2	79,3	79,3	32.234.765.882	79,5	32.906.235.961	79,6	32.912.126.568	79,7	32.912.515.168	80,1	32.912.879.645	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					21.490.393.834		21.941.692.105		21.944.275.720		21.946.913.591		21.949.606.857	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100	21.490.393.834	100	21.941.692.105	100	21.944.275.720	100	21.946.913.591	100	21.949.606.857	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					7.877.749.505		8.043.182.401		8.212.089.966		8.384.542.955		8.560.619.419	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.912.626.136		5.015.791.285		5.121.122.902		5.228.666.483		5.338.468.479	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	89,39	89,4	89,41	4.912.626.136	89,42	5.015.791.285	89,43	5.121.122.902	89,44	5.228.666.483	89,45	5.338.468.479	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.755.559.369		1.792.426.116		1.830.067.064		1.868.498.472		1.907.736.940	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD (%)	96,03	96,56	97	1.755.559.369	98	1.792.426.116	99	1.830.067.064	100	1.868.498.472	100	1.907.736.940	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.209.564.000		1.234.965.000		1.260.900.000		1.287.378.000		1.314.414.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	95,32	95,8	96	403.188.000	97	411.655.000	98	420.300.000	100	429.126.000	100	438.138.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) (%)	100	100	100	403.188.000	100	411.655.000	100	420.300.000	100	429.126.000	100	438.138.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	93,05	93,5	94	403.188.000	95	411.655.000	100	420.300.000	100	429.126.000	100	438.138.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					241.063.733.646		246.134.812.054		251.312.173.106		256.598.048.742		261.994.717.765	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.167.104.142		10.380.613.329		10.598.606.209		10.821.176.939		11.048.421.655	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	86,86	86,87	86,88	10.167.104.142	86,89	10.380.613.329	86,9	10.598.606.209	86,91	10.821.176.939	86,92	11.048.421.655	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					228.021.792.650		232.810.250.296		237.699.265.552		242.690.950.129		247.787.460.081	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik (%)	49	40	40	1.128.107.035	40	1.151.797.282	40	1.175.985.025	40	1.200.680.711	40	1.225.895.006	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase alokasi belanja pendidikan (%)	25,55	20	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	91,54	92	92	225.870.594.195	92	230.635.361.594	93	235.500.189.107	93	240.467.177.998	93	245.538.473.655	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	9,17	9,15	9,12		9,1		9,05		9		8,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	1.023.091.420	100	1.023.091.420	100	1.023.091.420	100	1.023.091.420	100	1.023.091.420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.488.839.137		1.520.104.759		1.552.026.959		1.584.619.525		1.617.896.535	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) (Tepat Waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	1.488.839.137	Tepat waktu	1.520.104.759	Tepat waktu	1.552.026.959	Tepat waktu	1.584.619.525	Tepat waktu	1.617.896.535	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.385.997.717		1.423.843.670		1.462.274.386		1.501.302.149		1.540.939.494	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	6	6	6	1.385.997.717	6	1.423.843.670	6	1.462.274.386	6	1.501.302.149	6	1.540.939.494	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	7,77	8	9,58		9,8		9,84		9,93		10,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	85,6	84	84,1		84,5		85,2		85,7		87,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					6.779.883.597		7.481.581.851		7.293.805.579		7.703.212.663		7.518.760.853	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.165.917.871		5.243.406.639		5.322.057.739		5.401.888.605		5.482.916.934	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Angka)	83,75	83,76	83,77	5.165.917.871	83,79	5.243.406.639	83,81	5.322.057.739	83,83	5.401.888.605	83,85	5.482.916.934	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.613.965.726		2.238.175.212		1.971.747.840		2.301.324.058		2.035.843.919	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, tata kelola pengembangan karir ASN, dan kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	90	90,05	90,1	1.613.965.726	90,15	2.238.175.212	90,2	1.971.747.840	90,25	2.301.324.058	90,3	2.035.843.919	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2,07	2,07	2,07		2,07		2,07		2,07		2,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	81,31	82	83		83,5		84		84,5		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					338.169.200		1.043.241.738		358.890.364		1.064.273.720		380.237.825	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					338.169.200		1.043.241.738		358.890.364		1.064.273.720		380.237.825	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar (%)	100	100	100	338.169.200	100	1.043.241.738	100	358.890.364	100	1.064.273.720	100	380.237.825	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial (%)	30,6	30,65	30,7		30,8		30,9		31		31,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					595.299.000		608.010.000		620.989.000		634.239.000		647.768.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					595.299.000		608.010.000		620.989.000		634.239.000		647.768.000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibngan dalam perencanaan pembangunan	Persentase implementasi rencana kelibngan (%)	100	100	100	595.299.000	100	608.010.000	100	620.989.000	100	634.239.000	100	647.768.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase keberlanjutan inovasi yang diterapkan pada perangkat daerah (%)	-	65	66		67		68		69		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					10.429.676.878		10.427.494.879		13.376.936.791		13.657.852.464		13.944.667.366	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.898.761.272		9.032.242.691		11.952.384.308		12.203.384.379		12.459.655.451	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Angka)	89,92	89,93	89,94	8.898.761.272	89,95	9.032.242.691	89,96	11.952.384.308	89,97	12.203.384.379	89,99	12.459.655.451	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.354.764.600		1.152.504.190		1.172.506.778		1.192.929.420		1.213.780.938	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	83	83,15	83,25	1.354.764.600	83,35	1.152.504.190	83,45	1.172.506.778	83,55	1.192.929.420	84	1.213.780.938	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					176.151.006		242.747.998		252.045.705		261.538.665		271.230.977	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	176.151.006	Terintegrasi (Integrated)	242.747.998	Terintegrasi (Integrated)	252.045.705	Terintegrasi (Integrated)	261.538.665	Terintegrasi (Integrated)	271.230.977	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					32.756.945.252,06		33.412.155.620,77		34.074.198.874,53		34.751.905.408,15		35.750.976.443,08	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.666.865.841,86		28.215.824.129,41		28.781.078.621		29.355.667.780,36		30.249.694.745,75	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah KECAMATAN TEBO TENGAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Angka)	69,91	70	70,91	5.087.887.692	71,91	5.162.687.446	72,91	5.244.580.757	73,91	5.324.232.921	74,91	5.714.068.165	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah KECAMATAN TEBO ILIR	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	59,67	60	60,67	3.156.522.248	61,67	3.222.809.215	62,67	3.290.488.209	63,67	3.359.588.461	64,67	3.430.139.819	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah KECAMATAN TEBO ULU	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	68,9	69,4	69,9	3.637.345.830	70,9	3.713.730.092	71,9	3.791.718.424	72,9	3.871.344.511	73,9	3.952.642.746	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah KECAMATAN RIMBO BUJANG	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	68,25	68,75	69,25	2.833.118.747	70,25	2.892.614.241	71,25	2.953.359.140	72,25	3.015.379.682	73,25	3.078.702.655	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah KECAMATAN SUMAY	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	62,79	63	63,79	1.699.845.155,02	64,79	1.735.541.903,28	65,79	1.771.988.283,24	66,79	1.809.200.037,19	67,79	1.847.193.237,97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah KECAMATAN VII KOTO	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	52,59	53	53,59	1.768.633.708,85	54,59	1.805.775.016,73	55,59	1.843.696.292,08	56,59	1.882.413.914,22	57,59	1.921.944.606,42	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah KECAMATAN RIMBO ULU	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	60,83	61,33	61,83	1.056.003.233,99	62,83	1.078.179.301,9	63,83	1.100.821.067,24	64,83	1.123.938.309,65	65,83	1.147.541.014,15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah KECAMATAN RIMBO ILIR	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	66,02	66,52	67,02	1.737.925.261	68,02	1.774.421.686,5	69,02	1.811.684.541,44	70,02	1.849.729.917,3	71,02	1.888.574.247,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah KECAMATAN TENGAH ILIR	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	65,81	66,31	66,81	1.657.612.602	67,81	1.692.422.466	68,81	1.727.208.648	69,81	1.764.250.569	70,81	1.801.299.828	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah KECAMATAN SERAI SERUMPUN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	51,56	52	52,56	2.103.911.290	53,56	2.148.093.427	54,56	2.193.203.389	55,56	2.239.260.660	56,56	2.286.285.134	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah KECAMATAN VII KOTO ILIR	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	52,73	53	53,73	1.700.040.412	54,73	1.735.741.261	55,73	1.772.191.827	56,73	1.809.307.856	57,73	1.847.405.421	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah KECAMATAN MUARA TABIR	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	50,95	51,5	51,95	1.228.019.662	52,95	1.253.808.073	53,95	1.280.138.043	54,95	1.307.020.942	55,95	1.333.897.872	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.547.306.466		1.574.404.701		1.603.477.497		1.638.234.827,07		1.665.386.857	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik KECAMATAN TEBO TENGAH	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	471.200.000	100	475.700.000	100	481.700.000	100	493.000.000	100	496.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik KECAMATAN TEBO ILIR	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	72.529.288	100	74.052.403	100	75.607.503	100	77.195.261	100	78.816.361	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik KECAMATAN TEBO ULU	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	252.900.781	100	258.211.698	100	263.634.143	100	269.170.460	100	274.823.040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik KECAMATAN RIMBO BUJANG	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	202.967.892	100	207.230.217	100	211.582.052	100	216.025.275	100	220.561.806	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik KECAMATAN SUMAY	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik KECAMATAN VII KOTO	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik KECAMATAN RIMBO ULU	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik KECAMATAN RIMBO ILIR	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	81.501.631	100	83.213.165	100	84.960.641	100	86.744.815	100	88.566.455	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik KECAMATAN TENGAH ILIR	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	74.155.944	100	75.713.219	100	77.303.196	100	78.926.564	100	80.584.021	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik KECAMATAN SERAI SERUMPUN	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	108.500.649	100	110.779.163	100	113.105.525	100	115.380.741,07	100	117.905.837	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik KECAMATAN VII KOTO ILIR	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	150.824.877	100	153.992.199	100	157.226.035	100	160.527.782	100	163.898.865	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik KECAMATAN MUARA TABIR	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	132.725.404	100	135.512.637	100	138.358.402	100	141.263.929	100	144.230.472	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.039.487.363,2		3.101.777.214,36		3.158.453.537,53		3.215.094.609,72		3.279.084.577,33	
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KECAMATAN TEBO TENGAH	Persentase kelompok PKK yang terbina (%)	100	100	100	629.323.585	100	641.000.000	100	646.000.000	100	649.879.548	100	660.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelompok PKK yang terbina (%)	100	100	100	496.456.513	100	506.882.099	100	517.526.623	100	528.394.683	100	539.490.971	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KECAMATAN TEBO ILIR														
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KECAMATAN TEBO ULU	Persentase kelompok PKK yang terbina (%)	100	100	100	270.006.309	100	275.676.441	100	281.465.647	100	287.376.425	100	293.411.330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KECAMATAN RIMBO BUJANG	Persentase kelompok PKK yang terbina (%)	100	100	100	1.208.195.041	100	1.233.567.137	100	1.259.472.047	100	1.285.920.960	100	1.312.925.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KECAMATAN SUMAY	Persentase kelompok PKK yang terbina (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KECAMATAN VII KOTO	Persentase kelompok PKK yang terbina (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KECAMATAN RIMBO ULU	Persentase kelompok PKK yang terbina (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KECAMATAN RIMBO ILIR	Persentase kelompok PKK yang terbina (%)	100	100	100	173.574.390	100	177.219.451	100	180.941.060	100	184.740.822	100	188.620.380	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KECAMATAN TENGAH ILIR	Persentase kelompok PKK yang terbina (%)	100	100	100	73.576.731	100	75.121.842	100	76.699.400	100	78.310.088	100	79.954.599	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KECAMATAN SERAI SERUMPUN	Persentase kelompok PKK yang terbina (%)	100	100	100	104.741.531,2	100	106.941.103,3 ₆	100	109.186.866,53	100	111.479.790,72	100	113.820.866,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KECAMATAN VII KOTO ILIR	Persentase kelompok PKK yang terbina (%)	100	100	100	22.956.470	100	23.438.556	100	23.930.766	100	24.433.312	100	24.946.411	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KECAMATAN MUARA TABIR	Persentase kelompok PKK yang terbina (%)	100	100	100	60.656.793	100	61.930.585	100	63.231.128	100	64.558.981	100	65.914.720	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					73.700.631		80.601.343		82.531.472		84.991.633		87.482.457	
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat KECAMATAN TEBO TENGAH	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas (%)	100	100	100	12.000.000	100	12.500.000	100	13.000.000	100	14.000.000	100	15.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat KECAMATAN TEBO ULU	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas (%)	100	100	100	7.948.281	100	8.115.195	100	8.285.614	100	8.459.612	100	8.637.264	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat KECAMATAN RIMBO BUJANG	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas (%)	100	100	100	18.263.982	100	18.647.525	100	19.039.124	100	19.438.945	100	19.847.163	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat KECAMATAN VII KOTO	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas (%)	100	100	100	33.303.428	100	39.107.800	100	39.929.063	100	40.767.574	100	41.623.693	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KECAMATAN VII KOTO ILIR														
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat KECAMATAN MUARA TABIR	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas (%)	100	100	100	2.184.940	100	2.230.823	100	2.277.671	100	2.325.502	100	2.374.337	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					391.929.190		399.794.703		407.804.392		415.961.284		424.268.471	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tebo Tengah	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100	100	100	65.000.000	100	66.000.000	100	67.000.000	100	68.000.000	100	69.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tebo Ilir	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100	100	100	45.374.261	100	46.327.120	100	47.299.990	100	48.293.290	100	49.307.449	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tebo Ulu	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100	100	100	69.799.644	100	71.265.437	100	72.762.011	100	74.290.013	100	75.850.103	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rimbo Bujang	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100	100	100	76.647.695	100	78.257.297	100	79.900.700	100	81.578.615	100	83.291.766	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sumay	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum VII Koto	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rimbo Ulu	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rimbo Ilir	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100	100	100	41.161.512	100	42.025.904	100	42.908.448	100	43.809.526	100	44.729.526	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tengah Ilir	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100	100	100	41.366.631	100	42.235.330	100	43.122.272	100	44.027.839	100	44.952.424	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Serai Serumpun	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Muara Tabir	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100	100	100	52.579.447	100	53.683.615	100	54.810.971	100	55.962.001	100	57.137.203	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					37.655.760		39.753.530		40.853.355		41.955.274		45.059.335	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tebo Tengah	Persentase APBDes tepat waktu (%)	100	100	100	33.000.000	100	35.000.000	100	36.000.000	100	37.000.000	100	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tebo Ulu	Persentase APBDes tepat waktu (%)	100	100	100	2.042.000	100	2.084.882	100	2.128.665	100	2.173.366	100	2.219.007	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sumay	Persentase APBDes tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tengah Ilir	Persentase APBDes tepat waktu (%)	100	100	100	1.021.000	100	1.042.441	100	1.064.332	100	1.086.683	100	1.109.503	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa Muara Tabir	Persentase APBDes tepat waktu (%)	100	100	100	1.592.760	100	1.626.207	100	1.660.358	100	1.695.225	100	1.730.825	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.448.591.537		5.528.320.411		5.613.275.215		5.697.474.343		5.782.936.459	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.554.543.429		2.592.861.581		2.631.754.504		2.671.230.822		2.711.299.284	
Meningkatnya Kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	55,54	55,67	56,68	2.554.543.429	57,82	2.592.861.581	58,96	2.631.754.504	60,1	2.671.230.822	61,24	2.711.299.284	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					911.485.530		925.157.812		939.035.180		953.120.707		967.417.518	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	75	76	78	911.485.530	79	925.157.812	80	939.035.180	80	953.120.707	80	967.417.518	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.323.845.741		1.343.703.427		1.363.858.978		1.384.316.863		1.405.081.616	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	70	72	73	1.323.845.741	74	1.343.703.427	75	1.363.858.978	76	1.384.316.863	77	1.405.081.616	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					79.880.500		81.078.708		82.294.888		83.529.311		84.782.251	
Meningkatnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	52	53	54	79.880.500	55	81.078.708	56	82.294.888	57	83.529.311	58	84.782.251	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					176.133.305		178.775.305		181.456.934		184.178.788		186.941.470	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	80	80	80	176.133.305	80	178.775.305	80	181.456.934	80	184.178.788	80	186.941.470	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					402.703.032		406.743.578		414.874.731		421.097.852		427.414.320	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	88	90	90	402.703.032	90	406.743.578	90	414.874.731	90	421.097.852	90	427.414.320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sumber: Olah data, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bagian ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tebo untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kabupaten Tebo.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tebo

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,29	72,31	73,33	74,35	75,37	
2.	Tingkat Kemiskinan	(%)	5,96	5,87	5,79	5,71	5,63	
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,32	75,15	75,97	76,8	77,63	
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,3	5,47	5,88	7,15	7,15	
5.	Rasio Gini	Indeks	0,254	0,253	0,251	0,25	0,249	
6.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	79,1	79,6	80,1	80,6	81,1	
7.	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,64	1,5	1,45	1,41	1,35	
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	73,34	73,55	73,76	74,19	74,4	
9.	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	4,69	4,72	4,76	4,79	4,83	
10.	Indeks Infrastruktur	Angka	45,85	46,53	47,23	47,94	48,66	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
11.	Usia Harapan Hidup	Angka	74,21	74,5	74,8	75,09	75,38	
12.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	128,59	127,28	125,98	124,67	123,36	
13.	Rerata nilai assesmen nasional: literasi membaca & numerasi	Nilai	62,62	64,62	66,62	68,62	70,62	
14.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	3.4-5	3.5-5.1	3.6-5.2	3.6-5.2	3.7-5.3	
15.	Nilai Sakip	Nilai	68,19	68,86	69,54	70,21	70,88	
16.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,94	3,14	3,34	3,54	3,74	
17.	Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	Nilai	82,95	83	83,05	83,1	83,15	
18.	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1,31	1,32	1,32	1,33	1,33	
19.	Indeks Desa	Indeks	0,7549	0,7649	0,7754	0,8501	0,8651	

Sumber: Analisis, 2025

4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tebo

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Infrastruktur	Angka	45,17	45,17	45,85	46,53	47,23	47,94	48,66	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	87,33	88,2	88,3	89,01	89,1	89,15	89,2	
3	Indeks Inovasi Daerah	Angka	34,86	35,61	36,36	37,11	37,86	38,61	39,36	
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,29	0,31	0,32	0,34	0,35	0,37	0,38	
5	Tingkat Inflasi	(%)	2,04	2,04	2,03	2,03	2,02	2,02	2,01	
6	Angka Ketergantungan	%	31,98	31,8	31,62	31,44	31,26	31,08	30,9	
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	
8	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	6,11	6,34	6,58	6,81	7,04	7,28	7,51	
9	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak		93,76	93,81	93,85	93,9	93,95	93,99	94,04	
10	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	97,83	98,02	98,2	98,39	98,57	98,76	98,94	
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	
12	Persentase Desa Mandiri	%	16,3	21	26	31	36	41	46	
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	19,71	20,8	21,88	22,97	24,05	25,14	26,22	
14	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	
15	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Industri	%	8,67	8,67	8,69	8,71	8,73	8,75	8,77	
16	Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1,358	1,413	1,468	1,523	1,578	1,633	1,688	
17	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perdagangan	%	9,59	9,59	9,61	9,63	9,65	9,67	9,69	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
18	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,09	3,18	3,22	3,26	3,31	3,35	3,37	
19	Persentase Koperasi Sehat	%	31,43	31,43	31,45	31,9	40,25	40,65	50	
20	Persentase pertumbuhan UMKM level Mikro	%	0,23	0,23	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	
21	Jumlah Penyandang Disabilitas yang dilayani di Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Orang	6	6	10	10	10	10	10	
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67,82	73,13	73,34	73,55	73,76	74,19	74,4	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	131,2	129,89	128,59	127,28	125,98	124,67	123,36	
3	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	16,36	16,64	16,92	17,21	17,5	17,8	18,1	
4	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	11,03	10,97	10,92	10,87	10,81	10,76	10,7	
5	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	88,26	89,11	89,96	90,81	91,66	92,51	92,36	
6	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	-	1.107.353,15	1.217.685,33	1.345.341,44	1.486.845,76	1.621.288,4	1.770.994,94	
7	Rasio Penduduk	%	105,09	105,3	105,52	105,73	105,94	106,15	106,37	
8	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	58,2	59,69	61,17	62,66	64,14	65,63	67,11	
9	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	0	0	10	12	14	16	18	
10	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	71,36	71,72	72,08	72,44	72,8	73,16	73,53	
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,28	1,3	1,32	1,33	1,35	1,37	1,39	
12	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	69,33	72	80	85	90	95	98	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
13	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	
14	Indeks Kualitas Air	Indeks	55	71,88	72,08	72,28	72,48	72,88	72,9	
15	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	
16	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,16	77,77	78,07	78,37	78,67	79,27	79,76	
17	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	42,98	66,69	66,76	66,83	66,9	67,04	67,08	
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,12	6,04	5,96	5,87	5,79	5,71	5,63	
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,67	73,5	74,32	75,15	75,97	76,8	77,63	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,97	4,04	4,3	5,47	5,88	7,15	7,15	
4	Rasio Gini	Indeks	0,257	0,256	0,254	0,253	0,251	0,25	0,249	
5	Usia Harapan Hidup	Angka	73,62	73,91	74,21	74,5	74,8	75,09	75,38	
6	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,93	1,79	1,64	1,5	1,45	1,41	1,35	
7	Rerata nilai assesmen nasional: literasi membaca & numerasi	Nilai	58,62	60,62	62,62	64,62	66,62	68,62	70,62	
8	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	67,37	68,47	69,57	70,67	71,77	72,87	73,97	
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	41,8	42,65	43,5	44,35	45,2	46,05	46,9	
10	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	49,85	52,75	55,65	58,55	61,45	64,35	67,25	
11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,59	0,58	0,56	0,55	0,53	0,5	0,45	
12	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	60,59	63	65	68	70	73,27	73,27	
13	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63.34:63.44	63.50:63.60	63.66:63.76	63.82:63.92	63.98:64.08	64.14:64.24	64.30:64.40	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	74	76,2	76,45	76,7	76,9	76,95	77	
15	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	22,7	20,74	18,79	16,83	14,88	12,92	10,96	
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	29,03	32,28	35,52	38,77	42,01	45,26	48,5	
17	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60,25	61,75	63,25	64,75	66,25	67,75	69,25	
18	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	71,81	71,84	71,87	71,9	71,93	71,96	71,99	
19	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	57,01	59,51	62,01	64,51	67,01	69,51	72,01	
20	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	67,3	68,42	69,53	70,65	71,76	72,88	74	
21	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,26	66,26	66,26	67	67,62	69,87	70	
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,63	92,8	93,35	94,5	95	96,5	97	
23	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Pangan	Nilai	108,89	104,6	109	109,1	109,2	109,3	109,4	
24	Indeks Pendidikan	Indeks	0,627	0	0,628	0,629	0,63	0,631	0,632	
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,5	2,45	2,35	2,3	2,25	2,2	2,2	
26	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73,62	73,91	74,21	74,5	74,8	75,09	75,38	
27	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,93	14,26	14,6	14,93	15,27	15,6	15,93	
28	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Hortikultura	Nilai	119,57	112,6	119,6	119,7	119,8	119,9	120	
29	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,04	8,37	8,69	9,02	9,34	9,67	10	
30	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	0	15	20	40	60	80	80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
31	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	41,8	0	43,5	44,35	45,2	46,5	46,9	
32	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	58,35	58,93	59	59,5	60	60,5	61	
33	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	11,72	2,3	1,94	1,88	1,82	1,77	1,71	
34	Cakupan Dokter Masuk Dusun	Kali	0	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	
35	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	128,27	95	87,3	84,6	82,1	79,67	77,2	
36	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Indeks	43,87	44,24	44,61	44,98	45,34	45,71	46,08	
37	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus	272,19	232,42	228,36	195,1	171,5	153,24	139,35	
38	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	(%)	80,49	82	85	90	95	100	100	
39	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	35,1	33.5-34.00	32.5-33.00	31.5-32.00	30.5-31.00	29.5-30.00	28.5-29.00	
40	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	90	90,5	91	91,7	92	92,9	93,36	
41	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,1	70,2	70,48	70,86	71,24	71,62	72	
42	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	94,48	94,78	94,95	95,43	95,9	96,38	96,87	
43	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahann keluarga	%	63,34	63,44	63,5	63,66	63,82	63,98	64,14	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
44	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,35	2,34	2,33	2,31	2,29	2,27	2,25	
45	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	
46	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	55	55,5	56	57	58	59	60	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,54	2,74	2,94	3,14	3,34	3,54	3,74	
2	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	1,31	1,31	1,32	1,32	1,33	1,33	
3	Persentase Capaian Aksi HAM	%	90	90,23	90,46	90,69	90,92	91,15	91,38	
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,36	87,4	87,44	87,48	87,52	87,56	87,6	
5	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,23	3,52	3,81	4,1	4,39	4,68	4,97	
6	Persentase Penegakan Perda	%	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	
7	Indeks Transformasi Digital	Indeks	-	29,3	29,5	29,6	29,8	29,8	30,1	
8	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	80,61	81,27	81,93	82,59	83,25	83,91	84,57	
9	Indeks Rasa Aman	Angka	-	71,32	72,07	72,82	73,57	74,32	75,07	
10	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	80	81	82	83	84	85	86	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		85,69	86	87	88	89	90	92	
12	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	100	Wajar Tanpa Pengecualian						
13	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		0	65	75	80	85	90	95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
14	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
15	Perekaman KTP elektronik	%	99,4	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	99,9	
16	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	42,3	39,3	39,5	39,6	39,8	39,9	40,1	
17	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	
18	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	daerah	75	80	80	80	80	85	85	
19	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,892	2,897	2,902	2,907	2,912	2,917	2,922	
20	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3,175	3,177	3,179	3,181	3,183	3,185	3,187	
21	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	55,92	57	60	62	64	66	68	
22	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	Persentase	8,12	9	10	11	12	13	15	
23	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)							
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	57,25	59,75	62,25	64,75	67,25	69,75	72,25	
2	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	50,25	47,6	48,6	49,6	50,6	51,6	52,6	
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi	Persentase	98,56	98,86	99,17	99,48	99,78	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	dalam pendidikan dasar (APS)									
4	Persentase Izin Pendidikan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	69,39	70,39	71,39	72,39	73,39	74,39	75,39	
6	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	37	37	37	38	39	40	41	
7	Iklim Keamanan SD	Nilai	73,46	74,36	75,26	76,16	77,06	77,96	78,86	
8	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	71,56	74,6	77,64	80,68	83,65	86,62	89,59	
9	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	56,04	58,44	60,84	63,24	65,64	68,04	70,44	
10	Iklim Kebinekaan SD	Nilai	69,9	70,9	71,9	72,9	73,9	74,9	75,9	
11	Iklim Keamanan SMP	Nilai	68,85	70,35	71,85	73,35	74,85	76,35	77,85	
12	Persentase standar kompetensi yang terpenuhi pada kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	22,66	26,76	30,86	34,96	39,05	43,15	47,25	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	85	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Mutunya	%	63	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Puskesmas memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	%	40	45	50	55	60	65	70	
4	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	91,5	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Puskesmas yang Memiliki Obat, Vaksin, dan BMHP Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Aktivitas Fisik	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Prevalensi Overweight pada Anak Usia Sekolah	%	18,8	18,78	18,7	18,66	18,4	18,21	16,25	
9	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	60	60	60	60	80	100	100	
10	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	70	72	72	75	78	80	85	
11	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	80	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	63	64	65	70	75	78	80	
13	Nett Death Rate (NDR)	Per 1000	15	15	14	14	13	13	13	
14	Persentase Indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai lebih dari 90%	%	33,33	50	75	80	85	90	95	
15	Indeks Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit	Indeks	53,8	54	55	57	59	62	62	
16	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	56,86	58,86	60,55	60,65	60,75	60,85	60,85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
17	Tingkat Akreditasi RS Paripurna	%	82	82	84	85	85	87	87	
18	Persentase Indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target	%	79,13	100	100	100	100	100	100	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Nilai	80,18	80,19	80,2	80,22	80,24	80,28	80,3	
2	Jumlah Ketersediaan dokumen mengenai Rencana Tata Ruang yang di sahkan	Angka	3	4	5	6	7	8	9	
3	Persentase bangunan dan prasarana pendukung kawasan milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	69	70	71	72	73	74	75	
4	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	20,17	20,3	20,42	20,68	20,94	21,2	21,46	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	69,33	72	75,01	77,25	79,9	82,47	84,97	
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	88,26	88,5	89,96	90,81	91,66	92,51	93,36	
7	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	96	140	216	276	336	396	456	
8	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	19,95	20	20,95	21,45	21,95	22,45	22,95	
9	Rasio Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Rasio	0,019	0,0209	0,0233	0,0257	0,028	0,0304	0,0328	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
10	Rasio bangunan dan prasarana pendukung kawasan milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	Rasio	0,4751	0,5226	0,5701	0,6176	0,6651	0,7126	0,7601	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	66,1	71,09	76,09	81,09	86,09	91,09	96,09	
2	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	61,22	67,35	73,47	79,59	85,71	91,84	97,96	
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	3,6651	3,6583	3,6516	3,6448	3,638	3,6312	3,6245	
4	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,24	6,18	6,15	6,1	6,05	6,01	5,96	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti	%	93,13	93,63	94	95	96	97	98	
2	Rata-rata capaian layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	9	9	9	9	9	9	9	
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	8	1	1	1	1	1	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase	0,89	0,9	1,03	1,34	1,64	1,95	2,26	
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persentase	9	9	9	9	9	9	9	
5	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	0,21	0,25	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	
6	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	17	18	20	22	25	30	35	
7	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	0,45	0,5	0,52	0,55	0,57	0,6	0,63	
8	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	16,55	16,3	16,4	16,42	16,49	16,56	16,63	
10	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	60,28	5	5	5	5	5	5	
11	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	63,64	64	64	64	64	64	64	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	60,47	61	62,02	63,57	65,12	66,67	68,22	
13	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	3,22	2	2	2	2	2	2	
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	1,7	1,8	1,88	2,09	2,31	2,53	2,75	
2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	3,7	3,75	3,8	3,84	3,86	3,93	3,97	
3	Persentase dokumen RTK mikro	%	8,3	9	10	10	12	12	12	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	49,2	52,2	54,17	66,67	70,83	75	79,17	
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	73,11	74	75	76	77	78	79	
2	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	65,56	66	68	70	72	74	76	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	9	9	10	15	20	25	30	
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	30	33	35	40	45	50	55	
6	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	55	56	58	60	64	68	70	
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase ARG	%	9	9	10	14	17	20	25	
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Rekomendasi penanganan kerawanan pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
2	Persentase sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persentase	6,12	10,2	20,41	30,61	40,82	51,02	61,22	
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	%	0	0	0	100	100	100	100	
3	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	0	0	0	100	100	100	100	
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	69,05	70	70	72	74	76	78	
5	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase RTH	Persentase	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	
7	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	%	0	0	0	100	100	100	100	
8	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota	%	21,93	23,68	25,58	27,63	29,84	32,22	34,8	
10	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang sesuai baku mutu	%	40	40	40	40	40	40	40	
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Kepemilikan akta kelahiran	%	98,24	98,37	98,55	98,77	98,9	99	99,2	
2	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	8,12	9	10	11	12	13	15	
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	98	98,3	98,5	98,7	98,8	98,9	99	
5	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	65	67	68	69	70	71	72	
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses secara daring	Angka	7	9	10	12	14	16	18	
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	3	4	5	7	9	11	13	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	16,39	20	26,22	32,27	38,52	46,72	51,63	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	70	73	75	78	80	83	85	
5	Indeks Desa	Indeks	0,734	0,7447	0,7549	0,7652	0,7754	0,8501	0,8651	
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Persentase	70,1	70,25	70,48	70,86	71,24	71,62	72	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Total Fertility Rate (TFR).	Orang	2,35	2,34	2,33	2,31	2,29	2,27	2,25	
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Persentase Pengelolaan Pelayaran	%	0	0	0	0	0	100	100	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	18	19	20	40	60	80	100	
3	Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas	%	12	11,8	11,61	11,11	10,61	10,11	9,61	
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	95,3	75	76	77	78	79	80	
2	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	-	71	72	73	74	75	76	
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	%	0,23	0,23	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	
2	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	31,43	31,43	31,45	31,9	40,25	40,65	50	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Nilai	79,16	79,56	80	81,15	82,65	84	85,15	
4	Persentase UMKM yang dilakukan pengembangan usahanya	%	0,59	0,6	0,65	0,67	0,7	0,73	0,76	
5	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	%	25	50	100	100	100	100	100	
6	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persentase	6,91	8,91	10,27	11,29	12,32	13,35	14,37	
7	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	31,25	31,35	31,45	31,65	31,85	32	32,25	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Layanan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	%	70	72	75	77	79	82	85	
2	Persentase Promosi Investasi yang Berhasil Menarik Investor	%	0	0	25	30	35	40	50	
3	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	%	98	98	98	98	98	98	98	
4	Persentase Peluang Investasi yang Teridentifikasi	%	0	25	25	30	35	40	50	
5	Persentase tingkat Kepatuhan Penyampaian LKPM	%	70	90	90	92	94	96	98	
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	3	3	3	4	4	5	5	
2	Jumlah prestasi pramuka	Prestasi	4	4	4	4	4	4	4	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	% Indeks	2	2	2	3	3	3	4	
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0	26	27	28	29	30	31	
2	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	98,1	98,1	98,1	98,25	98,5	99,1	99,25	
2	Persentase kelompok kesenian yang dibina	%	12,5	13	15	17,5	20	22,5	25	
3	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan pembinaan sejarah	%	2	3	5	6	7	8	9	
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	3.916	3.956	3.956	3.996	4.036	4.076	4.116	
2	Jumlah naskah kuno yang terinventarisasi	Angka	0	1	2	3	4	5	6	
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Persentase OPD yang menggunakan sistem aplikasi Srikandi	%	20	20	20	25	30	35	38	
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	599,415	620,85	660,85	693,89	728,59	765,02	803,27	
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	402,23	422,23	443,45	465,6	488,91	513,35	539,02	
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	33,46	34,46	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	
4	Jumlah kelompok petani/nelayan yang dibina	Kelompok	105	110	125	125	125	125	125	
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	98,06	98,07	98,08	98,1	98,12	98,14	98,16	
2	Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dari Kalender Tahunan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	15,11	15,15	15,18	15,2	15,22	15,25	15,28	
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	0	0	60	126	198,6	344,46	577,51	
2	Persentase Kelompok Tani yang Mencapai Kelas Lanjut, Madya, dan Utama	%	13,25	14	14,75	16,25	17,75	19,25	20,75	
3	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	14,47	25,67	30,85	48,88	68,7	90,49	100	
4	Produksi tanaman pangan	Ton	811	1.404	1.560	1.716	1.887,6	2.076,36	2.284	
5	Produksi tanaman hortikultura	Ton	52,49	136,53	151,7	166,87	183,56	201,91	222,1	
6	Persentase Kelembagaan Petani yang difasilitasi memperoleh bantuan Prasarana Pertanian	%	50	50	50	50	55	55	55	
7	Persentase Pengendalian Lahan Perkebunan dari serangan OPT yang Dilaporkan	%	60	65	70	70	73	75	75	
8	Persentase Perusahaan yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan	%	40	45	50	50	53	53	55	
9	Jumlah ternak yang terinseminasi	Ekor	5.600	6.000	6.500	6.591	6.683	6.777	6.872	
10	Total ketersediaan bibit unggul	Batang	11.768	15.000	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	
11	Persentase Kelembagaan petani yang dibina	%	50	50	50	50	50	50	50	
12	Persentase Ternak Tervaksin	%	39	39	40	42	45	47	50	
BB	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	9,59	9,59	9,61	9,63	9,65	9,67	9,69	
2	Persentase alat tera yang sah	%	30	30	32,5	35	37,5	40	42,5	
3	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	30	31,5	32,5	36	37,5	40	42	
5	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dikelola	%	3,17	4	4,76	6,35	7,94	9,52	11,11	
6	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	100	100	100	100	100	100	
BC	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Kontribusi sektor Pengolahan terhadap PDRB	%	8,67	8,67	8,69	8,71	8,73	8,75	8,77	
2	Persentase Peningkatan kapasitas Produksi	%	5,38	3	3	3,25	3,5	3,75	4	
BD	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Angka	83,2	83,4	83,5	83,7	83,9	84,1	84,3	
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	
BE	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BF	5.01 - PERENCANAAN									
1	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPDP ke Dalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	95,32	95,8	96	97	98	100	100	
2	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPDP ke Dalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	93,05	93,5	94	95	100	100	100	
3	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPDP ke Dalam APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPDP ke Dalam APBD	%	96,03	96,56	97	98	99	100	100	
BG	5.02 - KEUANGAN									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Nilai	86,86	86,87	86,88	86,89	86,9	86,91	86,92	
2	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	49	40	40	40	40	40	40	
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7,77	8	9,58	9,8	9,84	9,93	10,15	
5	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	85,6	84	84,1	84,5	85,2	85,7	87,2	
6	Persentase alokasi belanja pendidikan	%	25,55	20	20	20	20	20	20	
7	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD)	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
8	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	91,54	92	92	92	93	93	93	
9	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	9,17	9,15	9,12	9,1	9,05	9	8,95	
10	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	6	6	6	6	6	6	6	
BH	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	90	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25	90,3	
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	81,31	82	83	83,5	84	84,5	85	
BI	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial	%	30,6	30,65	30,7	30,8	30,9	31	31,1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
BJ	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase keberlanjutan inovasi yang diterapkan pada perangkat daerah	%	-	65	66	67	68	69	70	
BK	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Angka	89,92	89,93	89,94	89,95	89,96	89,97	89,99	
2	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	83	83,15	83,25	83,35	83,45	83,55	84	
BL	7.01 - KECAMATAN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	80	80	80	81	82	83	84	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	81	82	83	84	85	86	87	
3	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	78	79	80	81	82	83	84	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	78	79	80	81	82	83	84	
5	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	65	65	65	66	67	68	69	
6	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	0	83	83,5	84	84,5	85	83	
7	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase kelompok PKK yang terbina	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
10	Persentase APBDDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	100	100	100	100	
BM	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	75	76	78	79	80	80	80	
2	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	88	90	90	90	90	90	90	
3	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	70	72	73	74	75	76	77	
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	80	80	80	80	80	80	80	
5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	52	53	54	55	56	57	58	

Sumber: Olah, 2025



Pemerintah
Kabupaten Tebo



BAB V

PENUTUP



Dokumen RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memiliki peran strategis sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah yang sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tebo yakni, ***Terwujudnya Kabupaten Tebo yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera***, yang diturunkan ke dalam 5 misi mencakup, Mewujudkan Aksesibilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal, Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik, Optimalisasi Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*) Serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.

Lebih lanjut lagi, sebagai bagian dari proses perencanaan yang komprehensif, RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2025-2029 ini juga mengidentifikasi permasalahan utama dan isu-isu strategis yang menjadi tantangan serta peluang dalam pembangunan Kabupaten Tebo. Isu strategis yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang mendesak, berdampak luas, serta memerlukan respons kebijakan yang tepat dan cepat agar dapat ditangani secara efektif. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, isu-isu tersebut tidak hanya dianalisis secara internal, tetapi juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional, provinsi, serta prioritas pembangunan Kabupaten Tebo untuk periode tahun 2025-2029. Dengan demikian, dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi berbagai tantangan pembangunan daerah. Adapun isu strategis yang sekaligus menjadi permasalahan dan tantangan pembangunan serta fokus utama di Kabupaten Tebo dalam periode pembangunan lima tahun ke depan yakni, akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang inklusif, perlindungan sosial

dan kesejahteraan kelompok rentan, tantangan sektor ekonomi unggulan dan optimalisasi sektor potensial , sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan, infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian, kesesuaian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan, akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik, pengembangan kawasan perdesaan dan keberdayaan desa.

Dokumen RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 merupakan bagian sekaligus penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Tebo tahun 2025-2045. Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pemerintah Kabupaten Kabupaten Tebo yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Kabupaten Tebo ;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Kabupaten Tebo dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tebo ;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Tebo melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap PD berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029;
5. Renstra-PD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja-PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo ;

7. Penyusunan RKPD Kabupaten Tebo harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
8. RKPD Kabupaten Tebo harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja-PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
9. Berkaitan dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Tebo merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
10. Berkaitan dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Provinsi dan masyarakat sipil;
11. Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership), melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di Kabupaten Kabupaten Tebo, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini;
13. Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029, meliputi antara lain :
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan, sasaran, program, dan program unggulan melalui pemantauan, supervisi, dan penilaian hasil capaian kinerja pelaksanaan RPJMD secara periodik;

- b. Menyusun dan melaksanakan manajemen risiko yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan.
14. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Tebo yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Tebo untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Dengan adanya dokumen perencanaan ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Tebo dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Selain itu, RPJMD ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman yang solid bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Tebo yang maju. Aamiin.



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN**

Jalan. Lintas Tebo - Bungo KM.12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung,
Muara Tebo, - Tebo
Jambi